



RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
2018-2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
2018



RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
2018-2023



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Jawa Barat	1
1.2 Keselarasan SDGs Terhadap Misi RPJMD Jawa Barat	3
1.3 SDGs Menyempurnakan MDGs	7
1.4 Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs.....	8
1.5 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	10
1.6 PembiayaanTPB/SDGs	11
1.6.1 Optimalisasi Penerimaan Daerah	11
1.6.2 Sumber Pembiayaan Non-Pemerintah.....	11
1.6.3 Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	12
1.7 Metode Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs	12
1.8 Sistematika Rencana Aksi Daerah	14
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs	17
2.1 BAGIAN I PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL	17
2.1.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun	17
2.1.1.1 Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi.....	17
2.1.1.2 Sistem Dan Upaya Perlindungan Sosial	23
2.1.1.3 Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah.	26
2.1.1.4 Kebencanaan.....	33

2.1.1.5	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Tanpa Kemiskinan	34
2.1.2	Tanpa Kelaparan.....	35
2.1.2.1	Menghilangkan Kelaparan Dan Menjamin Akses Bagi Semua Orang, Terhadap Makanan Yang Aman, Bergizi, Dan Cukup Sepanjang Tahun.....	35
2.1.2.2	Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi ...	38
2.1.2.3	Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan.	42
2.1.2.4	Sistem Produksi Pangan yang Berkelanjutan Dan Menerapkan Praktek Pertanian Tangguh	43
2.1.2.5	Keragaman Genetik Benih Tanaman Budidaya Dan Hewan Ternak.....	46
2.1.2.6	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Tanpa Kelaparan	47
2.1.3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	48
2.1.3.1	Mengurangi Rasio Angka Kematian Ibu	48
2.1.3.2	Mengakhiri Kematian Bayi Baru Lahir Dan Balita	51
2.1.3.3	Mengakhiri Epidemii Penyakit Menular dan Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM)	53
2.1.3.4	Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM).	55
2.1.3.5	Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi	57
2.1.3.6	Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi	58
2.1.3.7	Pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO.....	60
2.1.3.8	Penelitian Dan Pengembangan Vaksin Dan Obat...60	
2.1.3.9	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera	62

2.1.4	Pendidikan Berkualitas	64
2.1.4.1	Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.....	64
2.1.4.2	Perkembangan Dan Pengasuhan Anak Usia Dini...65	
2.1.4.3	Kemampuan Literasi Dan Numerasi.....	65
2.1.4.4	Disparitas Pendidikan Antara Perempuan Dan Laki-Laki	66
2.1.4.5	Akreditasi Satuan Pendidikan	67
2.1.4.6	Kualitas Guru, dan Tenaga Kependidikan.....	67
2.1.4.7	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Pendidikan Berkualitas	68
2.1.5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	69
2.1.5.1	Mengakhiri Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan.....	69
2.1.5.2	Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.....	71
2.1.5.3	Menghapus Semua Praktik Berbahaya.....	73
2.1.5.4	Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin.....	74
2.1.5.5	Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi.	75
2.1.5.6	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Kesetaraan Gender	78
2.2	BAGIAN II PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI	79
2.2.1	Energi Bersih dan Terjangkau	79
2.2.1.1	Akses Universal Layanan Energi Yang Terjangkau, Andal Dan Modern	79
2.2.1.2	Energi Baru dan Terbarukan (EBT).....	79
2.2.1.3	Intensitas Dan Efisiensi Energi (Listrik)	80

2.2.1.4	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Energi Bersih & Terjangkau	82
2.2.2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.....	83
2.2.2.1	Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita	83
2.2.2.2	Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif.	84
2.2.2.3	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi.....	90
2.2.3	Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.....	91
2.2.3.1	Infrastruktur yang Berkualitas, Andal, Berkelanjutan dan Tangguh.....	91
2.2.3.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan.....	94
2.2.3.3	Meningkatkan Infrastruktur Dan <i>Retrofit</i> Industri..	96
2.2.3.4	Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi	97
2.2.3.5	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Industri, Inovasi & Infrastruktur	99
2.2.4	Mengurangi Kesenjangan.....	101
2.2.4.1	Meningkatkan dan Mempertahankan Pertumbuhan Pendapatan Penduduk	101
2.2.4.2	Menjamin Kesempatan yang Sama dan Mengurangi Kesenjangan Hasil	105
2.2.4.3	Kebijakan Fiskal, Upah dan Perlindungan Sosial.	106
2.2.4.4	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Berkurangnya Kesenjangan	107
2.2.5	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	109
2.2.5.1	Mobilisasi Sumberdaya Domestik	109

2.2.5.2	Kemitraan Multipihak.....	110
2.2.5.3	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	112
2.3	BAGIAN III PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN.....	113
2.3.1	Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	113
2.3.1.1	Menjamin penyediaan akses air minum layak dan terjangkau.....	113
2.3.1.2	Menjamin penyediaan sanitasi layak dan terjangkau.....	115
2.3.1.3	Meningkatkan Kualitas Air	116
2.3.1.4	Efisiensi Penggunaan Air Di Semua Sektor, Dan Menjamin Penggunaan Dan Pasokan Air Tawar Yang Berkelanjutan	116
2.3.1.5	Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu	116
2.3.1.6	Melindungi Dan Merestorasi Ekosistem Terkait Sumber Daya Air	117
2.3.1.7	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Air Bersih & Sanitasi Layak	118
2.3.2	Kota dan Permukiman Berkelanjutan.....	120
2.3.2.1	Menjamin Akses Bagi Semua Terhadap Perumahan Yang Layak, Aman, Terjangkau, Dan Pelayanan Dasar , Serta Menata Kawasan Kumuh	120
2.3.2.2	Mempromosikan Dan Menjaga Warisan Budaya Dunia Dan Warisan Alam Dunia	122
2.3.2.3	Dampak Lingkungan Perkotaan.....	122
2.3.2.4	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Kota & Permukiman yang Berkelanjutan.....	123
2.3.3	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.....	124
2.3.3.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan tertangani sesuai peraturan perundangan	124
2.3.3.2	Mengurangi Produksi Limbah	125

2.3.3.3	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.....	127
2.3.4	Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan.....	128
2.3.4.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di Jawa Barat.....	128
2.3.4.2	Antisipasi perubahan iklim	129
2.3.4.3	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Penanganan Perubahan Iklim.....	130
2.3.5	Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	132
2.3.5.1	Mengelola Dan Melindungi Ekosistem Laut Dan Pesisir Secara Berkelanjutan.....	132
2.3.5.2	Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan	132
2.3.5.3	Akses Untuk Nelayan Skala Kecil (Small-Scale Artisanal Fishers) Terhadap Sumber Daya Laut Dan Pasar	133
2.3.5.4	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Ekosistem Lautan.....	134
2.3.6	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	135
2.3.6.1	Menjamin Pelestarian, Restorasi Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Dari Ekosistem Daratan Dan Perairan Darat Serta Jasa Lingkungannya.....	135
2.3.6.2	Luas Kawasan Terdegradasi yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya	136
2.3.6.3	Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Ekosistem Daratan	138
2.4	BAGIAN IV PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA.....	139
2.4.1.1	Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan yang Tangguh	139

2.4.1.2	Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan.....	139
2.4.1.3	Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua.....	140
2.4.1.4	Membangun Kelembagaan yang Tangguh	140
2.4.1.5	Pengambilan Keputusan Yang Responsif, Inklusif, Partisipatif Dan Representatif.	141
2.4.1.6	Identitas yang Syah	143
BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs		145
3.1	BAGIAN I PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL	145
3.1.1	Tujuan 1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun.....	145
3.1.1.1	Kebijakan Tujuan 1 Di Provinsi Jawa Barat.....	145
3.1.2	Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.....	151
3.1.2.1	Kebijakan Tujuan 2 Di Provinsi Jawa Barat.....	151
3.1.3	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	157
3.1.3.1	Kebijakan Tujuan 3 Di Provinsi Jawa Barat.....	157
3.1.4	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	163
3.1.4.1	Kebijakan Tujuan 4 Di Provinsi Jawa Barat.....	163
3.1.5	Tujuan 5 Kesetaraan Gender	168
3.1.5.1	Kebijakan Tujuan 5 Di Provinsi Jawa Barat.....	168
3.1.6	Integrasi Indikator RPJMD terhadap Indikator SDGs Pilar Sosial	172
3.2	BAGIAN II PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI	179
3.2.1	Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	179
3.2.1.1	Kebijakan Tujuan 7 Di Provinsi Jawa Barat.....	179
3.2.2	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	183

3.2.2.1	Kebijakan Tujuan 8 Di Provinsi Jawa Barat.....	183
3.2.3	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	189
3.2.3.1	Kebijakan Tujuan 9 Di Provinsi Jawa Barat.....	189
3.2.4	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	194
3.2.4.1	Kebijakan Tujuan 10 Di Provinsi Jawa Barat.....	194
3.2.5	Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.....	199
3.2.5.1	Kebijakan Tujuan 17 Di Provinsi Jawa Barat.....	199
3.2.6	Integrasi Indikator RPJMD terhadap Indikator SDGs Pilar Ekonomi	206
3.3	BAGIAN III PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN.....	209
3.3.1	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	209
3.3.1.1	Kebijakan Tujuan 6 Di Provinsi Jawa Barat.....	209
3.3.2	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.....	215
3.3.2.1	Kebijakan Tujuan 11 Di Provinsi Jawa Barat.....	215
3.3.3	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.....	220
3.3.3.1	Kebijakan Tujuan 12 Di Provinsi Jawa Barat.....	220
3.3.4	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim.....	225
3.3.4.1	Kebijakan Tujuan 13 Di Provinsi Jawa Barat.....	225
3.3.5	Tujuan 14 Ekosistem Lautan.....	228
3.3.5.1	Kebijakan Tujuan 14 Di Provinsi Jawa Barat.....	228
3.3.6	Tujuan 15 Ekosistem Daratan	233
3.3.6.1	Kebijakan Tujuan 15 Di Provinsi Jawa Barat.....	233
3.3.7	Integrasi Indikator RPJMD terhadap Indikator SDGs Pilar Lingkungan.....	239
3.4	BAGIAN IV PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA.....	243

3.4.1	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.....	243
3.4.1.1	Kebijakan Tujuan 16 Di Provinsi Jawa Barat.....	243
3.4.2	Integrasi Indikator RPJMD terhadap Indikator SDGs Pilar Hukum & Tata Kelola	249
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		251
4.1	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	253
4.2	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pihak Non Pemerintah	260
4.3	Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB 2017-2023	263
4.4	Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi	264
BAB V PENUTUP.....		265
5.1	Prinsip Pelaksanaan TPB/ SDGs.....	265
5.1.1	<i>Universality</i>	265
5.1.2	<i>Integration</i>	265
5.1.3	<i>No One Left Behind</i>	266
5.2	Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB/SDGs.....	267
5.2.1	Perluasan penggunaan teknologi	267
5.2.2	Penguatan Kerja Sama Multipihak.....	267
5.2.3	Penguatan Koordinasi dan Kapasitas Sumberdaya Manusia SDGs	269
5.2.4	Penguatan Pelaksanaan Strategi Komunikasi.....	269
5.3	Pemutakhiran Dokumen.....	269
DAFTAR PUSTAKA		271

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Kemiskinan Jawa Barat Periode 2013-2017.....	18
Gambar 2.2	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Jawa Barat Periode 2013-2017.....	19
Gambar 2.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan di Jawa Barat	20
Gambar 2.4	Penurunan Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan di Jawa Barat.....	21
Gambar 2.5	Trend Kematiana Ibu Dan Bayi Di Jawa Barat	49
Gambar 4.1	Alur Informasi Pemantauan untuk RAD (Matriks RAD).....	253
Gambar 4.2	Alur informasi untuk pemantauan	255
Gambar 4.3	Alur Informasi Evaluasi untuk RAN (Matriks 1).....	258
Gambar 4.4	Alur Informasi Monitoring Organisasi Non Pemerintah.....	261
Gambar 4.5	Diagram Jadwal Pelaporan dan Pemantauan TPB Nasional dan Daerah.....	264

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Terhadap Misi RPJMD Jawa Barat.....	5
Tabel 2.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat.....	18
Tabel 2.2	Tantangan Tujuan Tanpa Kemiskinan	34
Tabel 2.3	Tantangan Tujuan Tanpa Kelaparan	47
Tabel 2.4	Tantangan Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	62
Tabel 2.5	Tantangan Tujuan Pendidikan Berkualitas.....	68
Tabel 2.6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Barat 2013-2017.....	71
Tabel 2.7	Tantangan Tujuan Kesetaraan Gender	78
Tabel 2.8	Tantangan Tujuan Energi Bersih dan Terjangkau.....	82
Tabel 2.9	Tantangan Tujuan Perkerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi.....	90
Tabel 2.10	Tantangan Tujuan Industri, Inovasi & Infrastuktur.....	99
Tabel 2.11	Indeks Gini Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017.....	102
Tabel 2.12	Tantangan Tujuan Berkurangnya Kesenjangan	107
Tabel 2.13	Tantangan Tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.....	112
Tabel 2.14	Tantangan Tujuan Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	118
Tabel 2.15	Tantangan Tujuan Kota & Permukiman yang Berkelanjutan.....	123
Tabel 2.16	Tantangan Tujuan Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.....	127
Tabel 2.17	Tantangan Tujuan Penanganan Perubahan Iklim	130
Tabel 2.18	Tantangan Tujuan Ekosistem Lautan	134

Tabel 2.19	Tantangan Tujuan Ekosistem Daratan	138
Tabel 3.1	Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan ...	148
Tabel 3.2	Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	155
Tabel 3.3	Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	161
Tabel 3.4	Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.....	166
Tabel 3.5	Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender ...	171
Tabel 3.6	Sandingan Indikator RPJMD Terhadap Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Pilar Sosial.....	172
Tabel 3.7	Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Terbarukan ...	182
Tabel 3.8	Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	187
Tabel 3.9	Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	193
Tabel 3.10	Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan.....	198
Tabel 3.11	Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.....	205
Tabel 3.12	Sandingan Indikator RPJMD Terhadap Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Pilar Ekonomi.....	206
Tabel 3.13	Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	213
Tabel 3.14	Target Pencapaian Indikator tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	219
Tabel 3.15	Target Pencapaian Indikator Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	224

Tabel 3.16	Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim.....	227
Tabel 3.17	Target Pencapaian Indikator Tujuan 14. Ekosistem Lautan..	232
Tabel 3.18	Target Pencapaian Indikator Tujuan 15. Ekosistem Daratan	237
Tabel 3.19	Sandingan Indikator RPJMD Terhadap Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Pilar Lingkungan	239
Tabel 3.20	Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.....	247
Tabel 3.21	Sandingan Indikator RPJMD Terhadap Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Pilar Hukum & Tata Kelola	249
Tabel 4.1	Target dan Indikator TPB/SDGs Jawa Barat Berdasarkan Pilar Pembangunan	252
Tabel 5.1	Daftar <i>Stake Holder</i> Dalam Pelaksanaan SDGs Jawa Barat .	268

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Jawa Barat

Amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta melibatkan organisasi non-pemerintah (Ormas, filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar). Berdasarkan Perpres 59 tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil langkah-sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Pelaksana TPB/SDGs tingkat Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur;
- b. Melaksanakan sosialisasi TPB/SDGs kepada ; Seluruh Perangkat daerah dilingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota melalui BAPPEDA di seluruh Jawa Barat, serta terhadap Filantropi dan CSR. Sosialisasi tersebut ditujukan untuk penyusunan RAD dan mengintegrasikan seluruh indikator SDGS/TPB ke dalam agenda pembangunan daerah; dan menyelaraskan RAD TPB/SDGs (sebagai “Wadah/Payung”) dengan berbagai RAD yang telah ada di daerah, seperti RAD-Pangan dan Gizi, RAD-GRK, RAD Pengentasan Kemiskinan, dll;
- c. Melaksanakan latihan teknis penyusunan matrik RAD bagi seluruh perangkat daerah di lingkup Provinsi Jawa Barat, dan seluruh Bappeda Kabupaten Kota.

Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) *Sustainable Development Goals* (SDGs), Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengacu kepada prinsip dasar SDGs yaitu *people, planet, prosperity, peace, dan partnership* sebagai berikut:

1. *People* (Manusia), memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia

dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat;

2. *Planet* (Planet), melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang;
3. *Prosperity* (Kesejahteraan), memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam;
4. *Peace* (Perdamaian), memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan; dan
5. *Partnership* (Kemitraan), mengarahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan semangat solidaritas global (Setnas SDGS, 2018).

Selain memperhatikan prinsip-prinsip tersebut di atas penyusunan RAD SDGs Jawa Barat, juga mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran, dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; (2) Hasil evaluasi pelaksanaan MDGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015; (3) Sembilan prioritas pembangunan (Nawacita) yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; (4) RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018; dan (5) Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam Rancangan RKPD Jawa Barat Tahun 2019 sebagai bahan acuan untuk RPJMD 2018-2023 setelah pelantikan Gubernur Baru.

1.2 Keselarasan SDGs Terhadap Misi RPJMD Jawa Barat

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Nasional, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkatan dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya dengan adanya Perpres No 59 Tahun 2017, maka diperlukan keselarasan antara indikator-indikator SDGs dengan perencanaan pembangunan yaitu RPJMD Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam visi dan misi, serta prioritas pembangunan 2019 yang disusun sebagai embrio RPJMD Provinsi Jawa barat 2018-2023 sebagai berikut :

a. Agenda Prioritas Pembangunan Nasional/ Nawa Cita Pada RPJMN 2014-2019 diantaranya adalah :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

b. Common Goals (CG) Pada RPJMD 2013-2018

1. CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
2. CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan
3. CG 3 : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku
4. CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian
5. CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian
6. CG 6 : Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan
7. CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga
8. CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan
9. CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan
10. CG 10 : Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan

c. Prioritas Pembangunan 2019 yang Disusun Sebagai Embrio RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian berkelanjutan
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata
4. Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar perumahan dan permukiman
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang
7. Peningkatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat
8. Penguatan Reformasi dan Birokrasi

Sinergi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat dengan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita), RPJMD Jawa

Barat, dengan Calon Prioritas Pembangunan 2018-2023 dan SDGs sebagaimana Tabel 1.1

Tabel 1.1 Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terhadap Misi RPJMD Jawa Barat

NAWA CITA	SDGs	RPJMD 2013-2018	CALON PRIORTAS PEMBANGUNAN 2018-2023
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan emberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	1. G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 2. G10 Berkurangnya Kesenjangan 3. G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh 4. G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	1. CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan;	Prioritas 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan	Prioritas 8. Penguatan Reformasi dan Birokrasi
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	1. G1 Tanpa Kemiskinan 2. G2 Tanpa Kelaparan 3. G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4. G4 Pendidikan Berkualitas 5. G5 Ksetaraan Gender 6. G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 7. G7 Energi Bersih dan Terjangkau 8. G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 9. G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur 10. G10 Berkurangnya Kesenjangan 11. G11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan	1. CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan 2. CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan; 3. CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku	1. Prioritas 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Prioritas 2. Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan bisnis pertanian berkelanjutan 3. Prioritas 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata 4. Prioritas 5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar perumahan dan permukiman 5. Prioritas 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,	G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan	Prioritas 8. Penguatan Reformasi dan Birokrasi

NAWA CITA	SDGs	RPJMD 2013-2018	CALON PRIORTAS PEMBANGUNAN 2018-2023
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 	<ol style="list-style-type: none"> CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan ; CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan; CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan CG 8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> Prioritas 5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar perumahan dan permukiman Prioritas 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional	<ol style="list-style-type: none"> G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G7 Energi Bersih dan Terjangkau 	CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Prioritas 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata Prioritas 4. Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	<ol style="list-style-type: none"> G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> CG 3 : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian CG 6 : Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> Prioritas 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata Prioritas 4. Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi
8) Melakukan revolusi karakter bangsa	<ol style="list-style-type: none"> G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G11 Kota dan 	Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga	Prioritas 7. Peningkatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan daya saing jawa barat
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Masing-masing agenda dijabarkan menurut prioritas-prioritas yang dilengkapi dengan uraian sasaran, arah kebijakan dan strategi.	<ol style="list-style-type: none"> G5 Kesetaraan Gender G10 Berkurangnya Kesenjangan G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 	Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga	Prioritas 7. Peningkatan modal sosial masyarakat untuk meningkatkan daya saing jawa barat

Sumber: Buku Konvergensi Agenda Pembangunan: Nawa Cita, RPJMN, dan SDGs, RPJMD, RKPd 2019.

1.3 SDGs Menyempurnakan MDGs

TPB/SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs. Sebagai contoh, Tujuan 1 MDGs tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB/SDGs diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 Tujuan (meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan). Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, SDGs jauh lebih ambisius bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan “Tanpa Kemiskinan” dan “Tanpa Kelaparan”, akan dituntaskan Tujuan tersebut hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai “*Zero Goal*”. Sebagai contoh, target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*). Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*) (Bappenas, 2018).

TPB/SDGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB/SDGs telah bertransformasi menjadi 241 Indikator. Meski menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, serta dengan budaya dan kondisi geografis beragam, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mencapai hampir semua indikator MDGs dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. 49 dari 67 indikator MDGs telah berhasil dicapai Indonesia pada akhir tahun 2015. Tujuh indikator utama yang telah dicapai dalam MDGs tersebut meliputi: 1)

kemiskinan dengan ukuran USD 1,00/kapita per hari, 2) akses pendidikan dasar, 3) kesetaraan gender dalam pendidikan, 4) angka kematian bayi dan balita, 5) pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dan malaria, 6) akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan, dan 7) permukiman kumuh perkotaan.

Sementara itu, terdapat enam indikator MDGs yang belum dapat dicapai pada akhir tahun 2015 yaitu: 1) kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, 2) angka kematian ibu, 3) prevelansi HIV dan AIDS, 4) tutupan lahan, 5) air minum layak perdesaan, dan 6) sanitasi layak perdesaan. Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan oleh Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan SDGs.

1.4 Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya.

TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No One Left Behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha dan Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Setiap *platform* ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi

anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Provinsi Jawa Barat mengikuti semangat nasional yang menjadikan SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh *platform* yang tercermin pada proses penyusunan dan dokumen Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

1.5 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Indonesia tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi pelopor (*pioneer*) dan teladan (*role model*) dunia pelaksanaan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di kancan dunia. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi masyarakat Jawa Barat yang terefleksi dari sinergitas antara Nawacita dengan SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi Jawa Barat bagi komunitas global.

Komitmen pelaksanaan SDGs di Indonesia diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai wujud implementasi di daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut telah disusun tim koordinasi pelaksanaan SDGs Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan kelompok kerja. Tim Pengarah diketuai oleh Gubernur, Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Tim Pokja dibagi berdasarkan pilar pembangunan SDGs yang diketuai oleh Kepala Bidang dan Sekretaris lingkup Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip inklusif SDGs, Tim Koordinasi SDGs Provinsi Jawa Barat disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah, pelaku usaha, filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan media. Sedangkan untuk membantu tugas dan fungsi Tim Koordinasi SDGs Provinsi Jawa Barat dibentuk Sekretariat SDGs melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat.

1.6 Pembiayaan TPB/SDGs

Sebagai daerah yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari :

1.6.1 Optimalisasi Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah yang berasal dari pajak, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi daerah, transfer pemerintah pusat (DBH pajak dan bukan pajak), dan lainnya akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu, bahkan menjadi salah satu indikator SDGs pada Goals 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan SDGs (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan Provinsi Jawa Barat.

1.6.2 Sumber Pembiayaan Non-Pemerintah

Kedermawanan masyarakat Indonesia sangatlah tinggi, bahkan survei Gallup menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah Myanmar. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, Perpuluhan, Kolekte dan Dana Punia, mempunyai potensi yang sangat besar. Dari Zakat saja diperkirakan potensinya sekitar Rp 213 triliun/tahun namun baru tergalang kurang dari 2 persen, belum bila ditambahkan yang lainnya.

Kedermawanan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini juga terus berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari Rp 12 triliun per tahun. CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*” yang menjadi standar

pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.

1.6.3 Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah

Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) & pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to SDGs*, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta dan Filantropi).

Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan EBT serta konservasi energi mendukung pencapaian Tujuan 7.

1.7 Metode Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat yang melibatkan seluruh aktor pembangunan di Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1.7.1 Sidang Pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs terbagi dalam dua kali sidang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana. Sidang pertama melibatkan seluruh perangkat daerah dan kabupaten/kota dengan isu TPB/SDGs. Sidang pleno kedua melibatkan pihak non-pemerintah yang terdiri dari filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi, serta media. Sidang pleno kedua ini menekankan keterlibatan aktif dari pihak non-pemerintah dalam penyusunan RAD serta turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program

dan kegiatan yang tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip inklusif.

- 1.7.2** Tahap berikutnya adalah penyelenggaraan beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja dan sub pokja setiap tujuan untuk membahas pengisian matriks RAD. Matriks terdiri dari matriks bagian 1 yang merupakan matriks utama yang berisi target tahunan setiap indikator, matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan daerah serta matriks bagian 3 merupakan program dan kegiatan non-pemerintah. Dalam proses penyusunan matriks non-pemerintah, beberapa diskusi intensif dan workshop antara BAPPEDA, selaku koordinator pelaksana TPB/SDGs dengan pihak-pihak non-pemerintah dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan non-pemerintah yang sesuai untuk pencapaian suatu indikator dapat secara tepat tertuang pada matriks bagian 3.
- 1.7.3** Selanjutnya, masing-masing sub kelompok kerja (Pokja) setiap Tujuan juga melakukan pembahasan terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh data dasar (*baseline*) secara runtun waktu (*series*) selama sepuluh tahun atau sesuai dengan ketersediaan data. Pokja dan sub pokja juga melakukan pembahasan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator output terkait yang telah dicapai dan ditargetkan hingga 2019.
- 1.7.4** Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah melalui sistem daring (*online*) lewat laman (*website*) dan surat elektronik (*email*). Melalui sistem ini, Tim Pelaksana TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD. Proses ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana telah ada kesesuaian antara indikator RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan indikator global SDGs. Hasil pemetaan menunjukkan terdapat 12,86% indikator SDGs global yang sudah diadopsi (*matched*) ke dalam dokumen RPJMD, 25,73% indikator global SDGs yang dikategorikan mendekati (*proxy*) indikator RPJMD, dan terdapat 61,41%

sisanya indikator SDGs global yang sama sekali tidak terdapat pada indikator RPJMD dan perlu untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi indikator RPJMD ke depan (*will be developed*).

1.7.5 Penyusunan indikator SDGs Provinsi Jawa Barat

Penyusunan indikator SDGs Jawa Barat merujuk pada indikator nasional dan menjadikan metadata indikator nasional sebagai referensi untuk menentukan indikator daerah. Adapun teknis penentuan indikator Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Identifikasi indikator nasional yang dis-agregasi datanya secara geografis/wilayah administrasi ada di tingkat provinsi.
- b. Meskipun tidak ditemukan disagregasi data pada tingkat provinsi, perlu ditelaah kembali pada konsep dan definisi operasionalnya. Jika konteksnya merupakan bagian dari agenda pembangunan daerah, maka indikator tersebut dipertimbangkan untuk diambil sebagai daftar usulan indikator daerah.
- c. Dari list dis-agregat data di tingkat provinsi dan kesesuaian konsep dan definisi operasionalnya dengan konteks daerah, lalu langkah selanjutnya yang diambil oleh Provinsi Jawa Barat dalam menentukan indikator SDGs daerah dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria:
 1. Lingkup administrasi data merupakan bagian dari wilayah provinsi;
 2. Kesesuaian dengan kondisi/karakteristik daerah provinsi; dan
 3. Kemungkinan penyediaan data indikator di tingkat provinsi.

1.8 Sistematisasi Dokumen Rencana Aksi Daerah

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan SDGs dengan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat, bagaimana SDGs menyempurnakan MDGs dan juga komitmen Indonesia dalam melaksanakan SDGs. Bab satu ini menjabarkan pula platform partisipatif dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan perannya masing-masing dan pembiayaan SDGs serta

potensi pembiayaan lainnya. Proses penyusunan RAD juga menjadi satu bagian penting yang dibahas di bab pertama.

Bab kedua menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) dan capaian hingga tahun 2016 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2019.

Bab ketiga merupakan bab yang menunjukkan arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdapat pada RPJMD 2014-2019 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) OPD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program non-pemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAD ini.

Bab keempat menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, umpan balik dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs 2017-2019 ini. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan non-pemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak non-pemerintah dilakukan berdasarkan *self-assessment*. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD

TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan non-pemerintah yang tertuang pada program dan kegiatan.

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

2.1 BAGIAN I PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

2.1.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

2.1.1.1 Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Target pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional, dengan indikator:

a. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

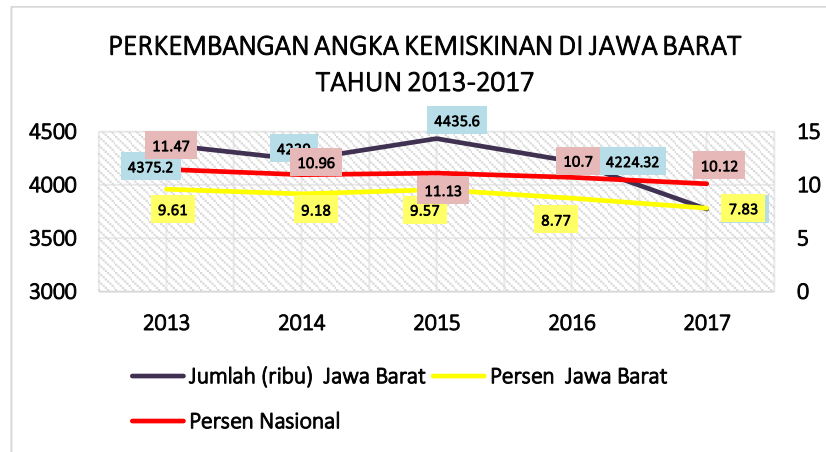
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan,

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Dengan mengkombinasikan status kemiskinan dengan status pekerja, maka konsep dari pekerja miskin tergambar. Hal ini bertujuan untuk mengukur berapa bekerja dan tidak bekerja yang hidup dalam kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat yang berada di bawah garis kemiskinan pada Tahun 2015 (akhir tahun pelaksanaan MDGs) sebesar 9,57 persen (BPS, 2016). Kondisi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang mencapai 11,13 persen. Berbagai usaha Pemerintah Provinsi Jawa

Barat melalui program penanggulangan kemiskinan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 9,57 persen pada tahun 2015 menjadi 8,77 persen pada Tahun 2016, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 7,83 persen sedangkan nasional menjadi 10,12 persen (BPS, 2017), seperti disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Perkembangan Kemiskinan Jawa Barat Periode 2013-2017



Sumber : BPS Jawa Barat; Tahun 2013 sd 2016 Posisi Bulan Maret; Tahun 2017 Posisi Bulan September

Secara absolut penduduk miskin Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 4.485.680 jiwa dan pada Tahun 2016 turun menjadi 4.168.110 jiwa serta pada Tahun 2017 menjadi 3.774,410 jiwa. Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 393.700 jiwa yang berkontribusi sebesar 4,25 persen terhadap penurunan penduduk miskin nasional yang menurunkan sebanyak 1.181.220 jiwa (BPS Jawa Barat 2014-2018).

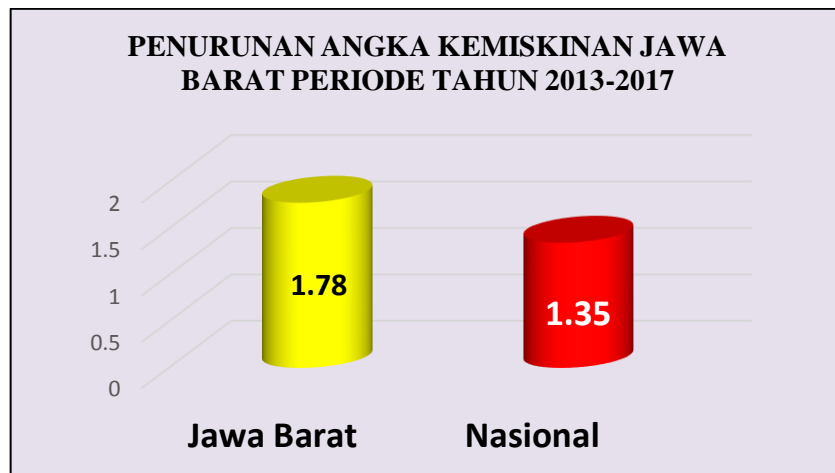
Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Barat

Penduduk Miskin					
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jawa Barat (Jiwa)	4.382.650	4.238.960	4.485.680	4.168.110	3.774,410
Pertumbuhan Jawa Barat (%)		-3,28	5,82	-7,08	-9,45
Nasional (Jiwa)	28.553.930	27.727.780	28.613.570	27.764.220	26.583.000
Pertumbuhan Nasional (%)		-2,89	3,19	-2,97	-4,25

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2014-2018

Dari sisi akselerasi penurunan angka kemiskinan pada periode Tahun 2013-2017, Jawa Barat dapat menurunkan penduduk miskin sebesar 1,78 persen, kondisi ini lebih cepat dibanding nasional sebesar yang mencapai 1,35 persen (Gambar 2.2). Keberhasilan tersebut merupakan upaya secara simultan dilaksanakan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Daerah khususnya aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

Gambar 2.2 Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Jawa Barat Periode 2013-2017.



Sumber BPS Jawa Barat 2013 - 2018

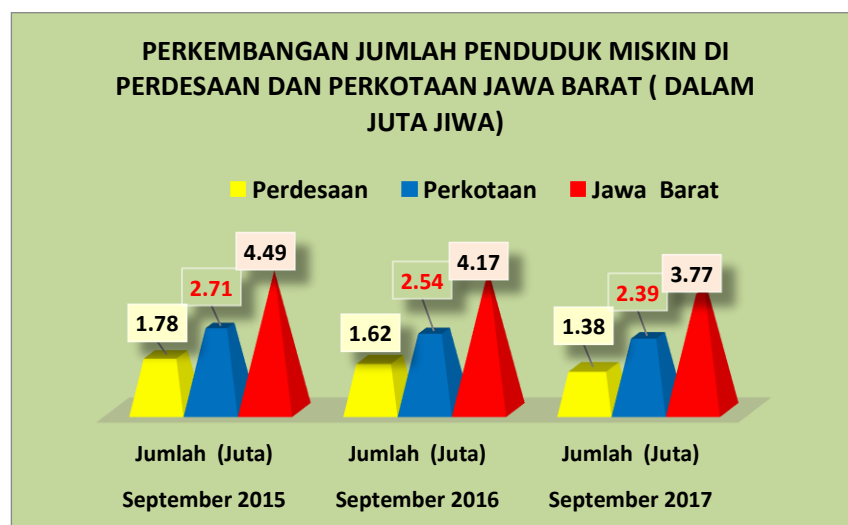
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah Jawa Barat dalam melaksanakan program perlindungan sosial diantaranya: Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat. Sebaran dari bantuan yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin di Jawa Barat sampai saat ini belum teridentifikasi dan dilaporkan dengan baik, sehingga diperlukan identifikasi dari program tersebut. Untuk itu diperlukan kajian yang dilakukan melalui identifikasi dan analisis terhadap Basis Data Terpadu (BDT) 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah diaplikasikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi KM 0 poor.

Bantuan yang ada di dalam aplikasi tersebut adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS Mandiri, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Sejahtera (Rastra). Implikasi dari kajian ini adalah tersedianya bahan kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan kemiskinan yang terfokus kepada perlindungan sosial.

1) Laju Penurunan Kemiskinan Di Kota dan Di Desa

Pada akhir periode pasca MDGs yaitu Tahun 2015 penduduk miskin di Jawa Barat menurut BPS Jawa Barat (2013-2018) sebanyak 4,49 juta jiwa yang terdiri atas 1,78 juta jiwa di perdesaan dan 2,71 juta jiwa di perkotaan. Kondisi tersebut pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 3,77 juta jiwa yang terdiri atas 1,38 juta jiwa di perdesaan dan 2,39 juta jiwa di perkotaan (Gambar 2.3).

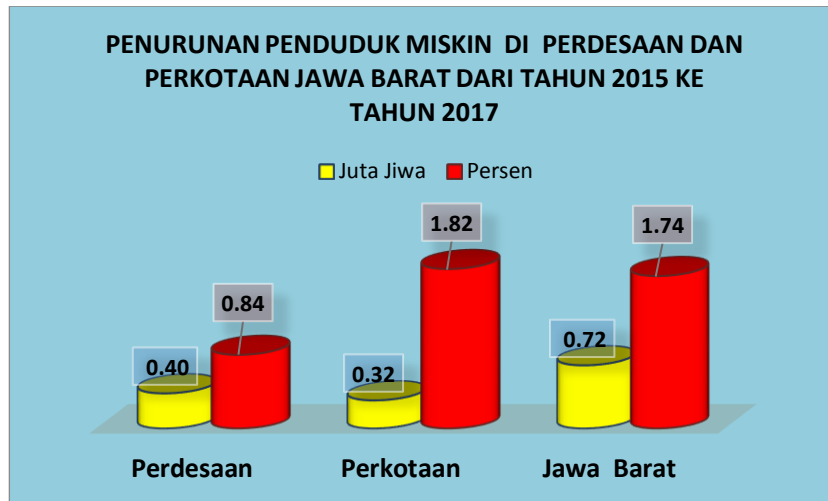
Gambar 2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan di Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2016-2018

Perkembangan penurunan penduduk miskin pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 di perkotaan secara jumlah lebih rendah yaitu sebanyak 320 ribu orang lebih sedangkan di perdesaan sebanyak 400 ribu orang lebih. Secara persentase di perkotaan lebih tinggi yaitu sebesar 1,82 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 0,84 persen (Gambar 2.4).

Gambar 2.4 Penurunan Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan di Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2016-2018

Secara nasional angka kemiskinan penduduk perdesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan perkotaan, data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin desa pada Maret 2017 mencapai 13,93 persen, sedangkan di perkotaan mencapai 7,72 persen. Namun tidak demikian halnya untuk Jawa Barat, yang menunjukkan angka tertinggi kemiskinannya berada di perkotaan (Kementrian Sosial, 2017). Hal ini sejalan dengan data BPS Jawa Barat (2016) yang menyatakan bahwa angka kemiskinan yang tinggi di Jawa Barat berada di kota-kota besar, hal ini dihubungkan dengan kenaikan inflasi. Inflasi di perkotaan rata-rata setiap tahunnya meningkat, sedangkan di perdesaan terjadi deflasi sehingga kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan.

2) Konsumsi Penduduk Miskin Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (BPS Jawa Barat, 2013-2018). Pada Tahun 2015 garis kemiskinan di Jawa Barat sebesar Rp 318 602, pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 332 119 per kapita per bulan. Pada Tahun 2015 atau akhir tahun pelaksanaan MDGs, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) sebesar 70,21 persen untuk daerah perkotaan. Sedangkan di daerah perdesaan sebesar 75,89 persen. Secara total peranan komoditi makanan terhadap GK adalah sebesar 72,04 persen (BPS Jawa Barat, 2018).

Kondisi bulan September 2017, secara total Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 254.799,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp. 99.879,-. Jika dibedakan antara perkotaan dan perdesaan, Garis Kemiskinan Makanan di perdesaan (Rp. 265.183,-) lebih tinggi dibandingkan Garis Kemiskinan Makanan di perkotaan (Rp. 250.654,-). Tetapi sebaliknya, untuk Garis Kemiskinan Non Makanan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu Rp. 104.212,- berbanding Rp. 87.921,- (BPS Jawa Barat, 2018).

3) Pengeluaran Konsumsi 20% Terbawah (Desil 1)

Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik (BPS), nilai dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini dapat digunakan untuk menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target

sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Kearifan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada Tahun 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jawa Barat sebesar 1,63 poin (BPS Jawa Barat 2018) dengan jumlah penduduk pada desil 1 sebanyak 1,160,605 keluarga (BPDT, 2015). Pada Tahun 2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Jawa Barat dibanding Tahun 2015 turun menjadi 1,49 poin (BPS Jawa Barat,2018). Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga cenderung menyempit.

2.1.1.2 Sistem dan Upaya Perlindungan Sosial

Sistem dan upaya perlindungan sosial merupakan pelaksanaan dari target menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara. Pelaksanaan perlindungan sosial di Jawa Barat adalah melalui : (a) Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan; (b) rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat, dan (c) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

a. Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial/BPJS) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/ pendapatan terendah). Manfaat dari indikator ini adalah untuk mengetahui sistem pembiayaan yang melindungi penduduk miskin.

Peserta jaminan kesehatan dilaksanakan melalui BPJS, yang terdiri atas peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok yaitu: (1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU dan (2) bukan PBI jaminan kesehatan. SJSN yang iurannya dibayar pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan di Jawa Barat pada akhir pelaksanaan MDGS telah mencapai Tahun 2015 sebesar 62,12 persen, meningkat menjadi 64 persen pada Tahun 2016 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017).

b. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. PKH juga sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Program serupa ini di negara lain dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau Bantuan Tunai Bersyarat.

Manfaat dari indikator ini adalah memantau upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat miskin. Secara jangka panjang, untuk memutus mata rantai kemiskinan rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (*price effect*) serta memberikan kepastian akan masa depan anak (*insurance effect*) dan mengubah perilaku (*behaviour effect*) keluarga miskin.

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan, pada Tahun 2015 sebesar 599.696 jiwa, meningkat menjadi 549.565 jiwa pada Tahun 2016 (Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 2018; Kementrian Sosial RI, 2017).

c. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Manfaat dari indikator ini adalah jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/ pensiun, atau meninggal dunia.

Pelaksanaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia secara umum meliputi penyelenggaraan program-program Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri. Penyelenggaraan program Jamsostek didasarkan pada UU No 3 Tahun 1992, program Taspen didasarkan pada PP No 25 Tahun 1981, program Askes didasarkan pada PP No 69 Tahun 1991, program Asabri didasarkan pada PP No 67 Tahun 1991, sedangkan program Pensiun didasarkan pada UU No 6 Tahun 1966. Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia berbasis kepesertaan, yang dapat dibedakan atas kepesertaan pekerja sektor swasta, pegawai negeri sipil (PNS), dan anggota TNI/Polri. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Jawa Barat pada Tahun 2016 mencapai 37,64 persen dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 38,44 persen (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

2.1.1.3 Akses terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah.

SDGs menargetkan pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Dengan indikator sebagai berikut:

a. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti; Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin, Klinik/Bidan/Praktek Dokter, Puskesmas/Pustu/Polindes. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit) menunjukkan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan menjadi rendah.

Akses pelayanan kesehatan di Jawa Barat ditunjukkan oleh peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat yang keberhasilannya ditunjukkan oleh: (1) meningkatnya indeks kesehatan dari 80,14 poin pada Tahun 2013, menjadi 80,63 poin pada Tahun 2015 dan selanjutnya meningkat menjadi 81,18 poin pada Tahun 2017; dan (2) Angka Harapan Hidup (AHH) dari sebesar 72,09 tahun pada Tahun 2013 menjadi 72,41 pada Tahun 2015 selanjutnya meningkat menjadi 72,77 tahun pada Tahun 2017 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

Pada aspek aksesibilitas kesehatan bagi persalinan dilakukan dengan melengkapi puskesmas dengan PONEID yang telah berhasil meningkatkan peserta keluarga berencana (KB) aktif pada Tahun 2016 sebanyak 7.129.900 peserta dari pasangan usia subur (PUS) sebanyak 9.521.667 keluarga atau *contraceptive prevalence rate (CPR)* Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar 74,88 persen (BPS Jawa Barat, 2018). Kondisi ini meningkat dari Tahun 2015 yang mencapai CPR sebesar 74,56 persen yaitu sebanyak 7.114.256 peserta KB aktif dari PUS sebanyak 9.541.148 keluarga Selain melalui Puskesmas yang dilengkapi Poneid keberhasilan tersebut dengan memberdayakan aktifitas posyandu, pada kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 dilaksanakan melalui: (1) Revitalisasi Posyandu sebanyak 50.374 unit yang didampingi oleh kader posyandu sebanyak 27 orang di tingkat kabupaten dan 626 orang di tingkat kecamatan; (2) Peningkatan strata posyandu di Jawa Barat dari strata pratama dan madya sebanyak 62,07 persen pada Tahun 2013 menjadi posyandu purnama dan mandiri disebut dengan Posyandu Multifungsi sebesar 60,49 persen pada Tahun 2017 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

Keberhasilan dari upaya tersebut telah ditunjukkan oleh tercapainya indikator : persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan pada akhir pelaksanaan MDGS Tahun 2015 sebesar 79.57 persen dan meningkat menjadi 78.09 persen pada Tahun 2016 (BPS Jawa Barat, 2017).

b. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.

Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap adalah perbandingan antara banyaknya anak umur 12-23 bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap berupa DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali) terhadap jumlah anak umur 12-23 bulan seluruhnya pada periode yang sama. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

Ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Karena imunisasi campak diberikan pada umur 9-11 bulan sehingga dapat menunjukkan kelengkapan imunisasi anak. Disamping itu imunisasi campak yang diberikan kepada anak dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita.

Capaian Jawa Barat dalam indikator ini adalah anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap pada Tahun 2015 sebesar 93,4 persen dan meningkat pada Tahun 2017 menjadi 93,8 persen (BPS Jawa Barat, 2018).

c. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan, penyediaan pelayanan KB serta sterilisasi, pemasangan IUD, persiapan alat dan obat, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.

Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin pada tahun 2015 sebesar 74.56 persen dan meningkat pada Tahun 2016 sebesar 74.88 persen (BKKBN Provinsi Jawa Barat, 2017)

d. Aksesibilitas Penduduk terhadap Kebutuhan Dasar Perumahan.

Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

Manfaat dari indikator ini adalah memantau rumah tangga terhadap sumber air minum layak berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak layak adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Untuk akses terhadap air minum yang aman membutuhkan pemeriksaan biologis, fisika, kimia. Indonesia akan mengarah ke akses air minum yang aman secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2030.

Aksesibilitas penduduk Jawa Barat terhadap kebutuhan dasar perumahan ditunjukkan oleh capaian pemenuhan kebutuhan sumber air minum yang layak meningkat dari 67,20 persen Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan MDGS) meningkat menjadi 67,62 persen pada Tahun 2016, kondisi ini lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 62,75% pada tahun 2017 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018, BPS Jawa Barat, 2017).

e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri.

Manfaat dari indikator ini adalah untuk mengukur rumah tangga baik yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik yang ada di daerah

perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan pada Tahun 2015 mencapai 59,43 persen dan meningkat menjadi 63,79 persen pada Tahun 2016 (BPS, 2017). Layanan sanitasi layak tersebut ditunjang oleh cakupan pelayanan air limbah domestik meningkat dari 65,03 persen pada akhir pelaksanaan MDGS Tahun 2015 menjadi 67,01 persen pada Tahun 2017. Capaian tersebut dilakukan melalui kegiatan Bantuan Keuangan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sabernas) ke Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

f. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan

Daerah kumuh adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Persentase rumah tangga kumuh adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Manfaat dari indikator ini adalah memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan permasalahan kemiskinan akibat ketimpangan pembangunan yang tidak merata.

Rumah tangga kumuh perkotaan di Jawa Barat terjadi penurunan dari akhir pelaksanaan MDGs (Tahun 2015) sebesar 13,73 persen menjadi 10,83 persen pada Tahun 2016 (BPS Jawa Barat, 2017). Kondisi ini ditunjang oleh cakupan pelayanan persampahan perkotaan pada akhir tahun MDGs yaitu Tahun 2015 mencapai 64,70 persen meningkat menjadi 67,11 persen pada Tahun 2016, capaian tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo, Legoknangka; Penataan Regional Leuwigajah; Perencanaan TPPAS Regional Ciayumajakuning; (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

g. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN

Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari listrik baik PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga yang miskin dan rentan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Indikator ini diperlukan untuk memantau kecenderungan rumah tangga miskin yang memiliki akses terhadap listrik penerangan. Diharapkan dengan adanya akses terhadap listrik maka keluarga tersebut mempunyai kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, pendidikan, kesehatan dan akses terhadap informasi.

Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 99,73 persen dan meningkat menjadi 99,75 persen pada Tahun 2016 (BPS Jawa Barat, 2017). Sedangkan Rasio Elektrifikasi rumah di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 93,71 persen meningkat menjadi 96,20 pada tahun 2016 dan 99,87 persen pada Tahun 2017. Keberhasilan tersebut dilaksanakan melalui pembangunan sebanyak 9,298 Kms SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah), 104,912 KMs SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah), 1 unit gardu cantol 25 KVA, 8 unit 50 KVA, dan 4 unit 100 KVA, serta 168.978 Sambungan Rumah/Instalasi Rumah (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

h. Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan

Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya, jika $APM = 100$, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu (BPS Jawa Barat, 2018).

- a) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat, pada akhir pelaksanaan MDGs tahun 2015 mencapai 95,04 persen, pada Tahun 2016 naik menjadi 95,11 persen dan pada Tahun 2017 mencapai 96,03 persen.
- b) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat pada Tahun 2015 mencapai 82.13 persen, pada Tahun 2016 naik menjadi 82,44 persen dan pada Tahun 2017 mencapai 77,87 persen.
- c) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat Tahun 2015 mencapai 45, 89 persen, pada Tahun 2016 naik menjadi 52,18 persen dan pada Tahun 2017 mencapai 57,59 persen (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2017).

Keberhasilan tersebut dilaksanakan melalui pemberian bantuan Operasional Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Pembangunan ruang kelas baru bagi SMA/MA/SMK Negeri, Swasta dan Unit Sekolah Baru (USB); Peningkatan kualitas tenaga kependidikan Pendataan di setiap sekolah bagi siswa yang putus sekolah; dan sosialisasi kepada orang tua siswa dan komite sekolah tentang pentingnya pendidikan.

i. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Manfaat dari indikator ini adalah untuk memenuhi akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran.

Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran, pada Tahun 2015 mencapai 78,06 persen dan meningkat menjadi 79.25 pada Tahun 2015. Secara administratif negara berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penyanderaan, penganiayaan, penelantaran, eksploitasi termasuk penganiayaan seksual dan perdagangan anak

(pasal 19 ayat 1 Konvensi Hak Anak). Untuk itu pihak berwenang dapat menjerat pelaku dengan ketentuan kejahatan terhadap anak di bawah umur.

2.1.1.4 Kebencanaan

Target pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana, dengan indikator:

a. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Indikator ini diperlukan untuk memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta para pihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Upaya untuk mengurangi risiko bencana secara sistematis membutuhkan pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terkait terutama para pembuat keputusan (*decision makers*). Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengembangkan kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah yang pada Tahun 2015 sebanyak 5 dokumen.

2.1.1.5 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Tanpa Kemiskinan

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan tanpa kemiskinan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tantangan Tujuan Tanpa Kemiskinan

Tujuan/goals	Kondisi	Tantangan	Strategi
1. TANPA KEMISKINAN	Masih rendahnya capaian sistem dan upaya perlindungan sosial dan akses terhadap pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah penduduk yang besar 2) Mengurangi disparitas penduduk miskin antar kabupaten dan kota, 3) Memberdayakan penduduk marjinal, penduduk yang pendapatannya/ pengeluarannya sedikit di atas garis kemiskinan. Sangat rentan untuk masuk kategori penduduk miskin bila terdapat perubahan kebijakan. 4) Meningkatkan Sistem dan Upaya Perlindungan social yang tepat sasaran 5) Meningkatkan akses pelayanan Dasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan 2) Meningkatkan ketersediaan penyediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin dan rentan berupa pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar 3) Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan kehidupan yang berkelanjutan melalui penguatan asset sosial penduduk miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan peningkatan dan perluasan akses

Tujuan/goals	Kondisi	Tantangan	Strategi
			penduduk miskin terhadap modal.

2.1.2 Tanpa Kelaparan

Fokus dari tujuan/*goal* ini adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

2.1.2.1 Menghilangkan Kelaparan dan Menjamin Akses Bagi Semua Orang, terhadap Makanan yang Aman, Bergizi, dan Cukup Sepanjang Tahun

Target 2.1 dalam *goal* tanpa kelaparan adalah pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Target tersebut merupakan jawaban terhadap tantangan mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Barat. Sehingga diperlukan komitmen berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Daerah, swasta dan masyarakat dalam hal sebagai berikut.

a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Kecukupan pangan diukur melalui Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi

pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Dengan pendekatan PPH, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi (*Nutritional Adequacy*), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (*Nutritional Balance*) yang didukung oleh cita rasa (*Palatability*), daya cerna (*Digestability*), daya terima masyarakat (*Acceptability*), dan kuantitas serta kemampuan daya beli (*Affordability*).

Skor pola pangan harapan Jawa Barat pada akhir MDGS Tahun 2015 sebesar 78,30 poin meningkat menjadi 81,00 poin pada Tahun 2016 dan 84,30 poin pada Tahun 2017 (BPS Jawa Barat, 2018). Konsumsi Protein Per hari masyarakat Jawa Barat Tahun 2014 sebesar 58,5 Gram/Kapita, pada tahun 2015 sebesar 60,5 Gram/Kapita, dan Tahun 2016 sebesar 63,9 Gram/Kapita. Secara agregat konsumsi protein masyarakat Jawa Barat telah memenuhi Angka Kecukupan Protein (AKP) yang direkomendasikan WNPG VIII Tahun 2004 sebesar 52 gram/kapita/hari. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan konsumsi energi dari tahun 2014 sebesar 2010,9 kkal/kapita/hari menjadi 2165,3 kkal/kapita/hari tahun 2015, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 2260 kkal/kap/hari (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

b. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum di Bawah 1400 Kkal/ Kapita/Hari

Pada kelompok penduduk termiskin, proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat gizi minimum di Jawa Barat pada Tahun 2015 masih tinggi yaitu 11,08 persen, kondisi ini lebih baik dibanding rata-rata nasional yang mencapai 14,65 persen (Kementrian Kesehatan RI, 2016). Konsumsi masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan pada Tahun 2016 mencapai 2.126,43 kkal per kapita per hari atau berada di bawah standar nasional (2.150 kkal untuk kalori dan 57 gram untuk protein). Namun demikian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 2.230,92 kkal per kapita per hari dan konsumsi protein mencapai 65,59 gram

per kapita per hari atau berada di atas standar nasional (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

c. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Indikator ini diperlukan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi.

Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita di Jawa Barat pada Akhir MDGs Tahun 2015 sebesar 11,3 persen, menurun menjadi 10,80 persen pada Tahun 2016 dan 10,30 persen pada Tahun 2017 (BPS, 2017).

d. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum di Bawah 1400 Kkal/ Kapita/Hari

Proporsi penduduk dengan **asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari** di Jawa Barat mencapai 11.08 persen dan ternyata pada Tahun 2016 meningkat menjadi 11.25 persen (BPS Jawa barat, 2017). Kondisi ini cukup memprihatinkan dan perlu komitmen semua pihak untuk menanggulangi kondisi tersebut.

Konsumsi masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan pada Tahun 2016 mencapai 2.126,43 kkal per kapita per hari atau berada di bawah standar nasional (2.150 kkal untuk kalori dan 57 gram untuk protein). Namun demikian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 2.230,92 kkal per kapita per hari dan konsumsi protein mencapai 65,59 gram per kapita per hari atau berada di atas standar nasional (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

Asupan kalori minimum akan menyebabkan *underweight* pada anak balita, di Jawa Barat **Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita** pada Tahun 2015 mencapai 11.3 persen dan turun menjadi 10.80 persen pada

Tahun 2016 (BPS Jawa Barat, 2017), kondisi ini lebih baik dibanding rata-rata nasional yang mencapai 14,65 persen (Kementrian Kesehatan RI, 2016).

e. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan

Pangan dan gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup penduduk. Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Ketahanan pangan dan perbaikan gizi merupakan suatu kesatuan.

- a) Kondisi di Jawa Barat ditunjukkan oleh **prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat**, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 29.23 persen dan pada Tahun 2016 turun menjadi 12.84 persen (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, 2017).
- b) Prevalensi **Ketidakcukupan Konsumsi Pangan** (*Prevalence of Undernourishment*), pada Tahun 2015 sebesar 78,30 poin, meningkat menjadi 81,00 poin pada Tahun 2016 (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, 2017).

2.1.2.2 Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi

Pada tahun 2030, Indonesia termasuk komitmen Jawa Barat bertekad untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula, dengan capaian indikator sampai dengan berakhirnya pelaksanaan MDGS sebagai berikut:

a. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Keadaan ini dipresentasikan dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari

-2 standar deviasi (SD) berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO (WHO, 2010). Secara global, sekitar 1 dari 4 balita mengalami stunting (UNICEF, 2013).

Prevalensi *stunting* pada anak di bawah lima tahun di Jawa Barat pada Tahun 2016 mencapai 34,58 persen, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 34.56 persen. Keadaan ini lebih rendah dari kondisi nasional yang mencapai 37,2% balita yang mengalami stunting.

b. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balitduta

Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi balita pendek menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2015 – 2019. Target penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) adalah menjadi 28% (RPJMN, 2015 – 2019).

Di Jawa Barat prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta sampai dengan Tahun 2016 tercatat 11.91 persen, dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 12.11persen (BPS, 2017). Peningkatan pangan prevalansi *stunting* ini akan menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya upaya perbaikan harus meliputi upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung (intervensi gizi spesifik) dan upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung (intervensi gizi sensitif). Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan di sektor kesehatan, namun hanya berkontribusi 30%, sedangkan 70% nya merupakan kontribusi intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan sebagainya.

c. Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe

Malnutrisi akut berat merupakan malnutrisi yang paling serius yang memengaruhi balita dan merupakan masalah kesehatan utama di negaranegara

berkembang. Akar permasalahan malnutrisi pada balita adalah ketidaktepatan asuhan, lingkungan yang tidak mendukung, dan makanan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan fase tumbuh kembang. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah rendahnya aksesibilitas pangan (kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya) mengancam penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman di tingkat rumah tangga.

Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, di Jawa barat tercatat pada Tahun 2015 mencapai 25.56 persen, dan pada Tahun 2016 turun menjadi 25.1 persen (Kementrian Kesehatan, 2016).

d. Prevalensi anemia pada ibu hamil

Masalah yang sering dialami ibu hamil adalah anemia yaitu kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari 10 gr/dL, sementara itu, kadar hemoglobin yang kurang dari 6 gr/dL disebut anemia gravis. Untuk wanita hamil, jumlah normal hemoglobin adalah 12-15 gr/dL dengan hematokrit 35-54%. Apabila ibu hamil menderita anemia, risiko yang dapat terjadi adalah keguguran (abortus), kelahiran prematur, proses persalinan yang lama, dan tenaga yang berkurang. Setelah kelahiran, ibu pun dapat mengalami perdarahan dan shock karena lemahnya kontraksi rahim. Pada Tahun 2015 Prevalensi anemia pada ibu hamil di Jawa Barat mencapai 37.1 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 35,20 persen (Kementrian Kesehatan, 2016).

e. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif

Kewajiban untuk memberikan ASI Eksklusif tercantum pada pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33/2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang ditetapkan pada 1 Maret 2012. Bunyinya adalah sebagai berikut, seperti ditulis Selasa (3/4/2012). "Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya" (Kementrian Kesehatan, 2016).

ASI Eksklusif perlu diberikan selama 6 bulan karena pada masa itu bayi belum memiliki enzim pencernaan yang sempurna untuk mencerna makanan atau

minuman lain. Terlebih semua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi sudah bisa dipenuhi dari ASI.

Pada Tahun 2015 persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Jawa Barat mencapai 59,82 persen, dan terjadi penurunan pada Tahun 2017 yang mencapai 59,13 persen (Kementrian Kesehatan, 2016).

f. Kualitas Konsumsi Pangan

Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan. Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi.

Saat ini, indikator kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Jawa Barat mencapai 81 poin persen dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 84.3 persen. Artinya konsumsi pangan di Jawa Barat semakin beragam dan bergizi seimbang yang mendekati angka maksimal 100, karena skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.

2.1.2.3 Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan.

Sasaran tujuannya menghilangkan kelaparan di Jawa Barat pada tahun 2030, ditargetkan menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian, dengan indikator sebagai berikut :

a. Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)

Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang.

Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) pada Tahun 2015 mencapai Rp.42.802,73 per tenaga kerja, dan pada Tahun 2016 naik menjadi Rp. 46. 621,65 (BPS, 2017). Sampai saat ini, lebih dari 35 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumah tangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018). Tenaga kerja pertanian atau yang sering disebut petani/peternak/nelayan tersedia cukup banyak di Jawa Barat. Hal ini ditandai bahwa hampir seluruh penduduk yang tinggal di perdesaan bekerja sebagai petani/peternak/nelayan.

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018) pada aspek ketenagakerjaan, tenaga kerja di sektor pertanian rata-rata sekitar 3.672.690 jiwa atau sekitar 19.84 persen dari total pekerja di Jawa Barat. Pada Tahun 2015 jumlah tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan dan jauh di bawah

rata-rata (3.672.690 jiwa) dibanding Tahun 2014 yang mencapai 3.821.320 jiwa atau turun menjadi 3.095.547 jiwa pada tahun 2015. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh terbukanya industri non pertanian yang menjanjikan penghasilan yang lebih instan dibanding jika tenaga kerja tersebut bekerja di sektor pertanian yang penghasilannya diperoleh secara musiman dan keberhasilan usahataniannya.

2.1.2.4 Sistem Produksi Pangan yang Berkelanjutan dan Menerapkan Praktek Pertanian Tangguh

Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada Tahun 2030 dicapai melalui target yang menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

a. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan

Dilaksanakan untuk peningkatan produksi :

a) Produksi Pangan

Aspek ketersediaan pangan Jawa Barat dapat dilihat dari kinerja produksi komoditas tanaman pangan strategis menunjukkan yang pertumbuhan positif pada Tahun 2015 ke Tahun 2016 (BPS Jawa Barat 2016,2017) sebagai berikut:

1. Tahun 2015 produksi padi mencapai 11.373.234 ton gabah kering giling (GKG) dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 11.644.889 ton.
2. Produksi jagung Tahun 2015 mencapai 959.933 ton giling (GKG) dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 1,047,077ton pipilan kering;
3. Produksi kedelai Tahun 2015 mencapai 197,047 ton dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 230,2701ton pipilan kering;
4. Produksi ubi jalar Tahun 2015 mencapai 445,645 ton dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 471,737 ton;

5. Produksi ubi kayu Tahun 2015 mencapai 2,000,224 ton dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 2,250,024 ton.

b) Produksi protein

Ternak dan hasil produksinya merupakan sumber bahan pangan protein yang sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan populasi ternak utama dan hasil produksinya merupakan gambaran tingkat ketersediaan sumber bahan protein. Tingkat konsumsi yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia salah satunya dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan daging dan produksi ternak lainnya. Aspek ketersediaan protein di Jawa Barat dapat dilihat dari kinerja produksi beberapa komoditas peternakan strategis yang menunjukkan pertumbuhan positif pada Tahun 2015 ke Tahun 2016 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017) sebagai berikut:

- 1) Pada kelompok daging ruminansia di Jawa Barat, Tahun 2015 produksi daging Sapi mencapai 33,698,713 kg, kerbau 3,267,891 kg, kambing 8,475,746 kg dan domba 22,667,839kg. Pada Tahun 2016 daging Sapi meningkat menjadi 73,318,658 kg, kerbau meningkat menjadi 3,381,487kg, kambing turun menjadi 7,364,433kg dan domba meningkat menjadi 23,283,147kg;
- 2) Pada kelompok daging unggas di Jawa Barat, Tahun 2015 produksi daging ayam buras mencapai 25,207,542 kg, ayam ras 537,947,218 kg, dan itik mencapai 5,838,169 kg. Pada Tahun 2016 produksi daging ayam buras meningkat menjadi 25,643,094 kg, ayam ras meningkat menjadi 610,030,626 kg, dan itik turun menjadi 5,203,819 kg.
- 3) Pada kelompok telur di Jawa Barat, Tahun 2015 produksi telur ayam ras mencapai 133,435,772 kg, ayam buras 16,673,574 kg, dan itik mencapai 53,572,992 kg. Pada Tahun 2016 produksi telur ayam ras meningkat menjadi 139,192,778 kg, ayam buras turun menjadi 15,848,676 kg, dan itik mencapai meningkat menjadi 59,853,055 kg;
- 4) Produksi perikanan di Jawa Barat Tahun 2015 mencapai 1,225,021.81 ton.

c) **Teknologi**

Dalam upaya mencapai pertanian berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan lembaga penelitian baik kementerian maupun perguruan tinggi, dalam mendukung keberhasilan peningkatan produksi melalui penyediaan teknologi yang ditujukan untuk:

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan dan ternak.
- 2) Meningkatkan daya saing produksi tanaman pangan dan ternak untuk memperoleh nilai tambah dari tumbuhnya industri pengolahan bahan pangan.
- 3) Menyediakan teknologi unggul bagi peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan dan ternak untuk mengatasi perubahan iklim yang tidak menentu, konversi lahan menjadi lahan pertanian dan pelarian tenaga kerja ke sektor industri non pertanian.
- 4) Menyediakan teknologi unggul bagi peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan ternak, dan ikan untuk mengatasi perubahan iklim yang tidak menentu, konversi lahan menjadi lahan pertanian dan pelarian tenaga kerja ke sektor industri non pertanian serta dalam rangka diversifikasi pangan.
- 5) Memberikan pembinaan kepada petani, peternak, dan nelayan dalam peningkatan nilai tambah produksi tanaman pangan dan ternak serta mengatasi perubahan iklim yang tidak menentu, konversi lahan menjadi lahan pertanian dan pelarian tenaga kerja ke sektor industri/non pertanian serta dalam rangka diversifikasi pangan.

Dalam penyediaan pangan, tantangan dan masalah yang dihadapi antara lain:

- (1) konversi lahan pertanian pangan terus berlangsung sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; (2) degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta meningkatnya persaingan pemanfaatan air dengan penggunaan lain; (3) usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin tua (*aging farmer*) dan pendidikan formal

yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas; (4) frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi; (5) proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (*food losses and waste*) masih besar; (6) prasarana logistik dan distribusi pangan belum merata terutama di wilayah timur Indonesia, menyebabkan kecukupan dan kontinuitas penyediaan pangan terbatas dan berdampak pada risiko rentan pangan di wilayah tersebut; dan (7) kemitraan yang setara antara usaha pertanian skala kecil dan besar masih sangat terbatas.

2.1.2.5 Keragaman Genetik Benih Tanaman Budidaya dan Hewan Ternak

a) Jumlah varietas unggul tanaman untuk pangan yang dilepas

Varietas unggul yang sudah dikembangkan dari tanaman yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Hasil varietas unggul disimpan pada Bank Gen Balai Besar Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik dan Balai-Balai Penelitian Komoditas Lingkup Balitbang Kementan. Bibit unggul adalah bibit unggul ternak yang mempunyai keunggulan dalam kriteria bobot, kecepatan dalam hal berkembang biak. Untuk hewan bibit unggul yaitu diperoleh melalui pemuliaan ataupun pemurnian galur.

Dengan varietas unggul produksi pangan dapat ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas, ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit dan cekaman iklim. Karena varietas unggul dan benih induknya tersimpan dengan baik dalam Bank Gen, sehingga proses penciptaan varietas unggul dapat dilaksanakan secara terus menerus untuk merespon perubahan lingkungan dan iklim. Dengan adanya Bank Gen Indonesia mampu melakukan pertukaran sumber daya genetik pangan dengan lembaga penelitian internasional (IRRI untuk padi dan CYMMIT untuk jagung. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas di Jawa Barat Pada Tahun 2015 sebanyak 5 persen dan Tahun 2016 sebanyak 6 persen.

b) Jumlah varietas unggul hewan untuk pangan yang dilepas

Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui, pada Tahun 2015 sebanyak 9 persen dan Tahun 2016 sebanyak 8 persen.

2.1.2.6 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Tanpa Kelaparan

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan tanpa kelaparan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tantangan Tujuan Tanpa Kelaparan

Tujuan/goals	Kondisi	Tantangan	Strategi
2. TANPA KELAPARAN	<ol style="list-style-type: none">Masih tingginya penduduk yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahunMasih terdapatnya penduduk yang kekurangan gizi yang ditunjukkan oleh prevalensi stunting, mal nutrisi, anemia pada ibu hamil, dan rendahnya pemberian ASI eksklusif pada bayi.Masih rendahnya Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian	<ol style="list-style-type: none">Untuk Kondisi 1 dan 2: mengusahakan agar masyarakat miskin, terutama ibu dan anak balita, dapat memperoleh bahan pangan cukup dengan gizi yang seimbang dan harga yang terjangkau. Mereka juga harus memperoleh pendidikan tentang gizi;Untuk Kondisi 3: Meningkatkan kualitas, produktivitas dan pasar komoditas pertanian strategis dan Teknologi usaha pertanian dalam menyikapi perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none">Peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein dari dalam negeri;Peningkatan kelancaran distribusi dan penguatan stok pangan dalam negeri;Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; danMitigasi gangguan iklim terhadap produksi pangan

2.1.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

2.1.3.1 Mengurangi Rasio Angka Kematian Ibu

Untuk mencapai kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, pada Tahun 2030 ditargetkan mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dengan indikator:

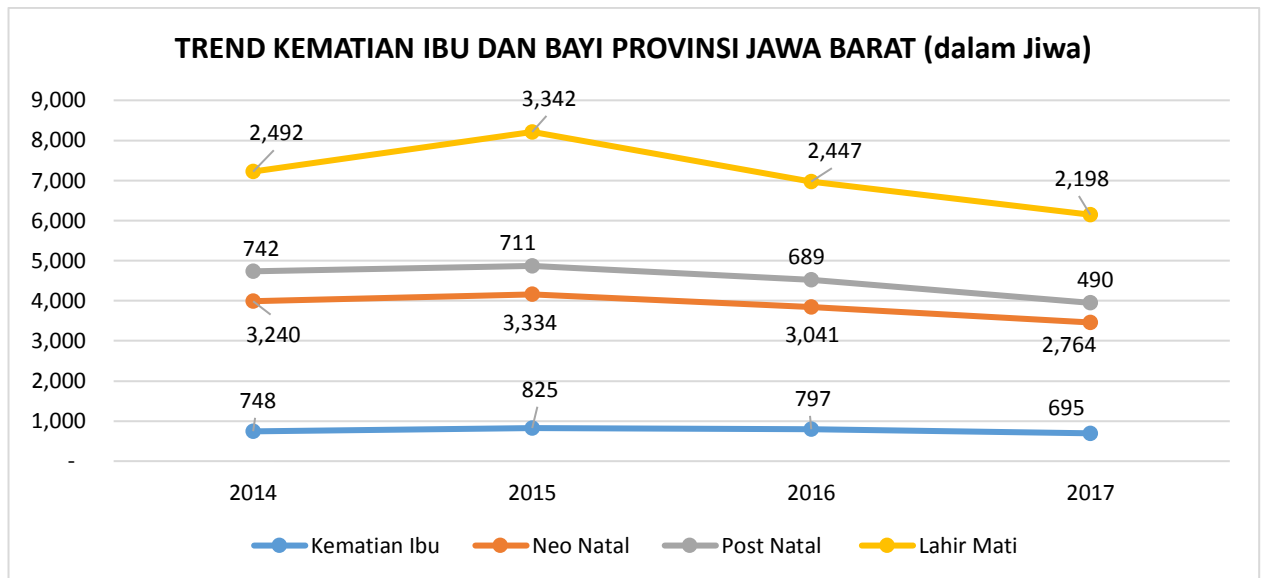
a. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebagai tahun terakhir pelaksanaan MDGs, jumlah kematian ibu maternal yang dilaporkan sebanyak 825 orang (83,47/100.000 KH) dengan proporsi kematian pada Ibu Hamil 219 orang (22,15/100.000), pada Ibu Bersalin 2412 orang (24,46/100.000 KH), dan pada Ibu Nifas, 364 orang (36,84/100.000 KH). pada tahun 2016 turun menjadi 78,00/100.000 KH (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017) (Gambar 2.5).

Gambar 2.5 Trend Kematiana Ibu Dan Bayi Di Jawa Barat



Sumber : LKPJ Pemerintah Provinsi Jawa Barat

b. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

Pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih (dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan medis lainnya) di fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit) menunjukkan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan oleh selain tenaga kesehatan terlatih menjadi rendah.

Upaya revitalisasi Puskesmas di Jawa Barat merupakan upaya peningkatan proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis profesional berdasarkan SDKI. Hasilnya telah dapat menurunkan ratio kematian bayi menjadi 3,63 per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2017. Neonatal dapat diturunkan dari 3.240 kasus pada tahun 2013 menjadi 2.764 kasus pada Tahun 2017; Postnatal dapat diturunkan dari 742 kasus pada tahun 2013 menjadi 490 kasus pada Tahun 2017; Lahir mati dapat diturunkan dari 2.492 kasus pada tahun 2013 menjadi 2.198 kasus pada Tahun 2014 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2016). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan pada Tahun 2015 sebesar 79.57 persen dan meningkat menjadi 78.09 persen pada Tahun 2016.

c. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/praktek dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes.

Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit) menunjukkan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan menjadi rendah. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengurangi AKI adalah persalinan di fasilitas kesehatan meningkat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan persalinan yang menggunakan fasilitas kesehatan yang memadai. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melengkai seluruh puskesmas di Jawa Barat (1.050 puskesmas) dengan fasilitas PONEB yang menyediakan fasilitas persalinan dan kesehatan bayi/balita baik sarana maupun bidan dan

tenaga medis keperawatan, dan gizi (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018). Fasilitas tersebut menghasilkan persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan sebanyak 89,18 persen pada Tahun 2015 dan meningkat menjadi 89,29 persen (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017).

2.1.3.2 Mengakhiri Kematian Bayi Baru Lahir dan Balita

Untuk mencapai kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, pada Tahun 2030 ditargetkan untuk mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Dengan indikator :

a. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Neo natal, post natal, kematian bayi Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) merupakan indikator yang sangat sensitif terhadap upaya pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan bayi baru lahir perinatal dan neonatal.

Tren Angka Kematian Balita (AKBa) di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 38 persen dan turun menjadi 35 persen pada Tahun 2016 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017). Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingginya kasus kematian ibu. Salah satunya adalah keterlambatan penanganan pasien di pelayanan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas). Keterlambatan tersebut bisa saja karena terlambat mendapat pertolongan, terlambat rujukan, dan terlambat mendapatkan pelayanan fasilitas.

b. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian neonatal di Jawa Barat pada Tahun 2015 tercatat sudah melampaui target MDGs yang pada tahun 2015 harus sudah mencapai 17 per 1.000 kelahiran hidup, dan pada Tahun 2016 turun menjadi 14 per 1000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017).

c. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 4,19 per 1000 kelahiran hidup dan turun menjadi 4,01 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2016 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017).

d. Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi

Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi yaitu menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tujuan pemberian imunisasi secara khusus yaitu tercapainya target *Universal Child Immunization* (UCI) yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di seluruh desa/kelurahan pada tahun 2014.

Persentase kabupaten/kota di Jawa Barat yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada Tahun 2015 mencapai 79,57 persen, dan meningkat pada Tahun 2017 sebanyak 78,09 persen (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017).

Tantangan ke depan dalam mencapai target **mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita** adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak; 4) peningkatan peran Posyandu; dan 5) peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum.

2.1.3.3 Mengakhiri Epidemii Penyakit Menular dan Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM)

Untuk mencapai kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, maka pada Tahun 2030 ditargetkan untuk mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Upaya

pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengakhiri penyakit menular dan tidak menular ditunjukkan oleh capaian (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2018) sebagai berikut :

a. Kejadian Malaria per 1000 orang

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini *Annual Parasite Incidence* (API). API adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan, penemuan dini dan pengobatan tepat, adanya resistensi terhadap obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk.

API digunakan untuk memonitor daerah berdasarkan tingkat endemisitasnya. Pemantauan ini bertujuan untuk memetakan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah sehingga intervensi pencegahan dan pengendalian kejadian malaria dapat ditentukan secara efektif dan efisien menuju eliminasi malaria.

b. Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria

Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vector malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Eliminasi malaria di Indonesia dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Jika seluruh kabupaten/kota telah mencapai eliminasi malaria, maka eliminasi malaria secara nasional dapat terwujud. Suatu daerah yang sudah mencapai eliminasi malaria, maka daerah tersebut bebas dari penularan malaria sehingga manfaat yang didapat antara lain: menurunkan beban biaya kesehatan, meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, serta pendapatan daerah dari sisi pariwisata dan investasi.

Kejadian Malaria per 1000 orang di Jawa Barat pada Tahun 2005 sebesar 1,44 per 1000 orang dapat diturunkan menjadi 0,80 per 1000 orang pada Tahun 2016. Dengan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dari 26 dapat dinaikkan menjadi 26 kabupaten/kota (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017).

c. Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Prevalensi HIV pada populasi dewasa adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan umur 15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada umur yang sama (yaitu 15-49 tahun).

2.1.3.4 Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM)

Untuk mencapai kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, pada Tahun 2030 ditargetkan untuk mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Dengan indikator :

a. Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≤ 18 tahun

Merokok merupakan faktor risiko bersama terhadap penyakit jantung, diabetes, kanker dan penyakit pernapasan kronis. Perokok usia pemula (di bawah 18 tahun) mempunyai probabilitas lebih tinggi untuk terkena penyakit PTM utama tersebut diatas, dengan demikian akan meningkatkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian prematur (umur 30-70 tahun). Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk umur 10 sampai 18 tahun yang merokok dengan jumlah penduduk umur 10-18 tahun. Yang dimaksud dengan merokok adalah termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang.

- (1) **Persentase merokok** pada penduduk umur ≤ 18 tahun pada Tahun 2015 sebanyak 7,2 persen dapat diturunkan menjadi 6,95 persen pada Tahun 2016 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017).;
- (2) **Persentase merokok** pada penduduk umur ≥ 15 tahun pada Tahun 2015 sebanyak 40,98 persen dapat diturunkan menjadi 40,28 persen pada Tahun 2016 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017).

b. Prevalensi Tekanan Darah Tinggi

Prevalensi tekanan darah tinggi adalah perbandingan jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mm Hg. Prevalensi Hipertensi di Indonesia sesuai dengan riskesdas sangat tinggi yaitu 25,8% (1 diantara 4 penduduk umur > 18 tahun menyandang hipertensi), apabila hipertensi tidak dikelola sesuai standar dan terkontrol akan menimbulkan berbagai komplikasi antara lain stroke, jantung, gagal ginjal dan lain-lain yang akan meningkatkan kecacatan, kematian prematur dan pembiayaan kesehatan serta meningkatkan beban ekonomi negara.

Prevalensi tekanan darah tinggi di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 31,56 persen dapat diturunkan menjadi 30,16 pada Tahun 2016 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017).

c. Prevalensi Obesitas pada Penduduk Umur ≥ 18 Tahun

Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun adalah persentase jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 25 . Prevalensi Obesitas di Indonesia sesuai dengan Riskesdas terus meningkat baik pada dewasa maupun anak-anak. Dampak Obesitas adalah meningkatnya probabilitas terkena penyakit diabetes, jantung, stroke, kanker, osteoarthritis, gangguan pernapasan, depresi maupun kematian mendadak (*Obstructive Sleeping Apneu*). Apabila tidak dikendalikan meningkatkan kejadian PTM, meningkatkan kecacatan, kematian prematur dan pembiayaan kesehatan serta meningkatkan beban ekonomi negara.

Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 8,83 persen dapat diturunkan menjadi 8,33 pada Tahun 2016 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017).

2.1.3.5 Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Untuk mencapai kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, pada Tahun 2030 ditargetkan untuk menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional dengan indikator:

a. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin

Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan, penyediaan pelayanan KB serta sterilisasi, pemasangan IUD, persiapan alat dan obat, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.

Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan reproduksi, angka pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus

kawin di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 74,56 persen dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 74,88 persen (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2016).

b. *Total Fertility Rate (TFR)*

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Berdasarkan SDKI Tahun 2012, angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) di Jawa Barat mengalami stagnasi dalam satu dekade terakhir, yaitu 2,5 anak per 1.000 perempuan, TFR nasional sebesar sebesar 2,5 anak per 1.000 perempuan.

Sementara itu, angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate/ASFR*) di Jawa Barat mencapai 52 kelahiran per 1.000 perempuan (Dinas Kesehatan, 2012).

2.1.3.6 Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi

Untuk mencapai kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, pada Tahun 2030 ditargetkan untuk mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang dengan indikator:

a. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (baik BPJS Kesehatan, Jamkesda maupun asuransi swasta, perusahaan atau kantor) dinyatakan

dalam satuan persen (%). Yang termasuk dalam jaminan kesehatan melalui BPJS adalah pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja, dan penerima bantuan iuran.

Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 60 persen dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 65 persen (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2016).

b. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (*universal health coverage*) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah perbandingan banyaknya penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan dengan jumlah seluruh penduduk dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Jumlah penduduk yang dicakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 60 persen, dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 65 persen (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2016).

c. Unmet Need Pelayanan Kesehatan

Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%). Indikator ini merupakan proksi untuk melihat cakupan penduduk yang seharusnya berobat ketika sakit, namun pada kenyataannya tidak berobat.

Jumlah penduduk yang mengalami *unmet need* pelayanan kesehatan di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 4,6 persen (BPS Jawa Barat, 2016).

2.1.3.7 Pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO

Untuk mencapai kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, pada Tahun 2030 ditargetkan untuk memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control* WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat dengan indikator :

a. Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

Persentase penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir adalah perbandingan antara banyaknya penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%). Definisi rokok meliputi merokok tembakau maupun cerutu. Indikator ini merupakan proksi untuk memonitor *pelaksanaan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO* di Indonesia, dimana prevalensi tinggi penduduk yang merokok dapat berisiko terhadap kondisi kesehatan masyarakat dengan indikator:

Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun, di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 43,98 persen, dan terjadi penurunan pada Tahun 2016 menjadi sebesar 40,28 persen.

2.1.3.8 Penelitian dan Pengembangan Vaksin dan Obat

Untuk mencapai kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, maka pada Tahun 2030 ditargetkan untuk mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular dengan indikator:

a. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Di Puskesmas

Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dinyatakan dalam satuan persen (%). Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis,

terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya.

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas di Jawa Barat pada Tahun 2014 sebanyak 75.5 persen dan pada Tahun 2016 terjadi kenaikan menjadi 77,94 persen (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017).

Sehingga diperlukan : (a) Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, ditunjukkan oleh persentase Rumah Sakit dengan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar pada Tahun 2016 sebanyak 37.5 persen dan meningkat pada Tahun 2016 sebanyak 50.9 persen; (b) Meningkatkan Pemerataan Distribusi Obat dan Vaksin ditunjukkan oleh Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas pada tahun 2014 sebanyak 75,50 persen dan meningkat pada Tahun 2016 menjadi 77,94 persen (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017).

Tantangan ke depan untuk mencapai target kehidupan sehat dan sejahtera adalah: 1) Gaya hidup sehat perlu diterapkan sejak dini sebagai proses pembelajaran, 2) peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan; 3) pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan; 4) meningkatkan kemandirian bahan baku obat; dan 5) meningkatkan penggunaan obat rasional dan memperkuat sistem pengawasan obat.

2.1.3.9 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan kehidupan sehat dan sejahtera adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Tantangan Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan/goals	Kondisi	Tantangan	Strategi	
3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	1. Rasio angka kematian ibu hingga masih di atas 70 per 100.000 kelahiran hidup	1) Akses penduduk terhadap fasilitas dan tenaga terlatih untuk melahirkan	1) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas	
	2. Angka Kematian Neonatal masih di atas 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 KH	2) Akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan yang menangani penyakit menular dan Tidak Menular	2) Akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.	2) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat 3) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
	3. Masih tingginya angka kematian dini akibat penyakit tidak menular,	3) Akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.	4) Rendahnya perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar	4) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas 5) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
	4. Masih rendahnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.			6) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan 7) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan
	5. Rendahnya perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap			8) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 9) Menguatkan manajemen,

Tujuan/goals	Kondisi	Tantangan	Strategi
	obat-obatan dan vaksin dasar		penelitian pengembangan dan sistem informasi 10) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan 11) Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan

2.1.4 Pendidikan Berkualitas

Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas, dengan target yang di laksanakan oleh Jawa Barat sebagai berikut;

2.1.4.1 Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Untuk mencapai pendidikan berkualitas di Jawa Barat pada Tahun 2030 ditargetkan menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Indikator dari target tersebut adalah angka partisipasi kasar dari jenjang pendidikan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Angka partisipasi pendidikan masyarakat Jawa Barat pada akhir pelaksanaan MDGs dan Tahun 2015 sebagai Tahun *baseline* SDGs berdasarkan data BPS (2018) adalah sebagai berikut:

- a. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat** Tahun 2015 sebesar 109.83 persen, dan meningkat pada Tahun 2016 menjadi 108.07 persen;
- b. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat** Tahun 2015 sebesar 98.91 persen dan meningkat pada Tahun 2016 menjadi 99.86 persen;
- c. **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat** Tahun 2015 sebesar 62.11 persen dan meningkat pada Tahun 2016 menjadi 67.56 persen;
- d. **Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun** pada Tahun 2015 mencapai 8,42 tahun dan pada Tahun 2016 mencapai 8,60 tahun.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mewujudkan “Pendidikan Gratis SD, SLTP dan SLTA di Seluruh Jawa Barat” sejak tahun 2013 yang lalu, Program dan Kegiatan tersebut fokus pada 3 (tiga) komponen pembiayaan pendidikan (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal) yaitu: Biaya Pengelolaan Pendidikan (Investasi), yang terdiri dari Biaya

Investasi Sumber Daya Manusia untuk pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Biaya Investasi Sarana dan Prasarana untuk lahan/tanah, bangunan dan peralatan melalui Biaya Operasi di Satuan Pendidikan (Operasional), yang terdiri dari Biaya Operasional Personalia untuk gaji dan tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Biaya Operasi Non Personalia; dan Biaya Pribadi Peserta Didik (Personal) yaitu Biaya yang diberikan langsung kepada siswa seperti Beasiswa.

2.1.4.2 Perkembangan dan Pengasuhan Anak Usia Dini

Untuk mencapai pendidikan berkualitas di Jawa Barat pada Tahun 2030 ditargetkan menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Dengan indikator:

a. Angka Partisipasi Kasar (Apk) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 64,11 persen dan pada Tahun 2016 mencapai 65,71 persen (BPS Jawa Barat, 2017).

2.1.4.3 Kemampuan Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi masih menjadi masalah di negara yang sedang berkembang, sehingga pada Tahun 2030 ditargetkan untuk menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Indikator dari kemampuan literasi dan numerasi adalah persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun, dengan indikator :

a. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun

Persentase Angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥ 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Capaian indikator tersebut di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 98,01 persen dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 98,22 persen (BPS,2018).

2.1.4.4 Disparitas Pendidikan antara Perempuan dan Laki-Laki

Untuk mencapai pendidikan berkualitas di Jawa Barat pada Tahun 2030 ditargetkan menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. Disparitas gender dalam pendidikan pendidikan di Jawa Barat ditunjukkan oleh data BPS (2018) sebagai berikut:

- a. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat pada Tahun 2015 sebesar 97.68 persen, meningkat pada Tahun 2016 menjadi 97.82 persen;**
- b. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/sederajat pada Tahun 2015 sebesar 79.55 persen, meningkat pada Tahun 2016 menjadi 79.76 persen;**
- c. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/sederajat pada Tahun 2015 sebesar 56.73 persen, meningkat pada Tahun 2016 menjadi 56.92 persen;**
- d. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi pada Tahun 2015 sebesar 17.47 persen, meningkat pada Tahun 2016 menjadi 19.19 persen.**

2.1.4.5 Akreditasi Satuan Pendidikan

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2018 adalah sebagai berikut :

- a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B, di Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 65.5 persen dan meningkat menjadi 69,7 persen pada Tahun 2017;
- b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B., di Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 72,80 persen dan meningkat menjadi 76 persen pada Tahun 2017;
- c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B di Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 68 persen dan meningkat menjadi 76 persen pada Tahun 2017.

2.1.4.6 Kualitas Guru, dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan proses pengembangan diri guru secara terus menerus untuk membangun kualitas pembelajaran yang lebih baik. Gambar 10 menunjukkan bahwa rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) guru yang telah memiliki sertifikat lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang tidak memiliki sertifikat, baik guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT), maupun Guru Honor Daerah (Honda). Sementara, berdasarkan data Kemdikbud dan Kemenag, persentase guru yang sudah tersertifikasi meningkat dari 23,97% (2010) menjadi sebesar 48,12% (2016). Dari gambaran ini, diharapkan bahwa guru yang berkualitas akan semakin meningkat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2013-2018).

2.1.4.7 Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Pendidikan Berkualitas

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan pendidikan berkualitas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Tantangan Tujuan Pendidikan Berkualitas

Tujuan/goals	Kondisi	Tantangan	Strategi
4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	<ol style="list-style-type: none"> Jaminan kepada penduduk untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah: yang ditunjukkan oleh APK SLTA yang masih rendah Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun yang baru mencapai 8,42 tahun pada Tahun 2015 Akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, yang baru mencapai APK 64,11 persen (2015) Disparitas Gender dalam pendidikan yang ditunjukkan oleh Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 56,73 persen (2015) 	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan Masih rendahnya jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan Masih kurangnya jumlah dan kualitas guru Masih rendahnya akses ke pendidikan tinggi Masih terdapatnya sekolah yang memungut biaya pendidikan Masih terdapat disparitas antara penyelenggaraan sekolah negeri dan swasta 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan wajib belajar 12 tahun; Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru.

2.1.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam deklarasi global, tanpa pembedaan atas dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya yang menjamin hak setara laki-laki dan perempuan untuk menikmati seluruh hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan target yang dapat dilaksanakan Jawa Barat pada kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut:

2.1.5.1 Mengakhiri Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan

Untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di Jawa Barat pada Tahun 2030 ditargetkan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun, dengan indikator sebagai berikut:

a. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan

Hukum nasional responsif gender adalah sistem atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berpihak pada kesetaraan gender tidak membedakan laki-laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan.

Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sebanyak 4 kebijakan dan pada Tahun 2017 sebanyak 2 kebijakan. Kebijakan tersebut meliputi peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Kebijakan tersebut dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan yaitu:

- a) **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** di Jawa Barat Pada tahun 2015 tercatat 69,02 poin, pada tahun 2016 meningkat menjadi 70,08 poin (tren peningkatan IDG seperti terlihat pada Tabel 2.6). Data pada Tabel tersebut menunjukkan IDG setiap tahunnya mengalami peningkatan yang menunjukkan peran dari perempuan di Jawa Barat semakin aktif dalam ekonomi maupun politik.
- b) **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** yang merupakan indikator untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin tingginya IPG menunjukkan bahwa semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Kinerja IPG Jawa Barat Pada tahun 2015 tercatat 89,11 poin, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 89,56 poin (tren peningkatan IPG seperti terlihat pada Tabel 2.6). Pencapaian baik tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun kesetaraan dan keadilan gender didukung oleh program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui Gerakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) seperti disajikan pada Tabel 2.6. Meningkatnya IPG tersebut ditunjukkan oleh (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, 2018):
 - 1) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah pada Tahun 2016 sebesar 17.85 persen.
 - 2) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. pada Tahun 2016 sebesar 40.26 persen dan meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 44.12 persen.

Tabel 2.6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Barat 2013-2017

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	67,57	70,68	69,02	70,08	71,15
Indeks Pembangunan Gender	Persen	88,21	88,35	89,11	89,56	89,56

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, 2018.

Tantangan kedepan adalah bagaimana agar peningkatan kesetaraan gender tersebut lebih signifikan karena saat ini Indonesia masih tergolong negara ASEAN yang memiliki Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender. Disamping itu, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

2.1.5.2 Menghapus Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan.

Untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di Jawa Barat pada Tahun 2030 ditargetkan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya, dengan indikator:

a. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan

Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 0,01 persen (BPS, 2017).

b. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan pada seseorang. Ini termasuk tindakan hubungan seksual yang kasar, keterlibatan paksa dalam tindakan seksual, melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, dll. Proporsi kekerasan seksual terhadap perempuan oleh selain pasangan pada sebagian besar survei mengumpulkan informasi yang terbatas pada paksaan melakukan hubungan seksual ketika perempuan tersebut tidak ingin melakukan, serta mencoba untuk memaksa seseorang untuk bertindak seksual melawan kehendaknya atau mencoba untuk memaksa dia ke hubungan seksual.

Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 0,01 persen (DP3AKB Provinsi Jawa Barat, 2017)

c. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 95,61 persen. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat mencatat angka kekerasan di Jawa Barat masih tinggi. Kekerasan yang terjadi didominasi kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Wilayah Jawa Barat pada tahun 2017 sebanyak 160 kasus kekerasan pada anak dan 168 kasus kekerasan pada perempuan.

2.1.5.3 Menghapus Semua Praktik Berbahaya

Untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di Jawa Barat pada Tahun 2030 ditargetkan untuk menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan, dengan indikator:

a. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun

Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan, dan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tinggi.

Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini serta menekan laju pertumbuhan penduduk

Penurunan pernikahan usia anak sebesar 10 persen bisa memotong lebih dari dua pertiga tingkat kematian terkait kehamilan usia dini, yang akan membahayakan bagi perempuan. Isu pernikahan anak adalah persoalan serius, BPS mencatat, persentase perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun relatif masih tinggi, yakni di atas 20 persen. Pada 2015, persentase perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 23 persen. Ini artinya, dua dari sepuluh anak perempuan di provinsi-provinsi tersebut menikah di bawah umur.

BPS juga mencatat, perempuan yang menikah pada usia anak cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia

dewasa. Pada 2015, hanya sembilan persen perempuan lulusan SMA atau sederajat yang menikah di bawah umur 18 tahun. Isu kesejahteraan juga menghantui rumah tangga yang melakukan pernikahan usia anak. Program wajib belajar 12 tahun dianggap menjadi solusi efektif untuk mengatasi pernikahan usia anak. Dengan menjalani pendidikan hingga tamat SMA, banyak anak-anak yang terselamatkan dari jeratan pernikahan dini.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat

Prevalensi perkawinan usia dini berhubungan erat dengan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, khususnya pendidikan menengah atas, kondisi ini ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat di Jawa Barat baru mencapai 67,56 persen pada Tahun 2015 dan meningkat menjadi 76.62 persen pada Tahun 2017 (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2017). APK ini akan berdampak terhadap usia perkawinan anak perempuan.

Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan angka perkawinan anak dan juga angka kelahiran pada usia 15-19 tahun adalah: 1) mensinergikan dan mengharmonisasikan perundang-undangan dan kebijakan yang ada, seperti UU Perkawinan, UU Pemilu, UU Kependudukan dengan UU Perlindungan Anak; 2) mengubah norma dan nilai dalam masyarakat akan perkawinan dini; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dan memberi kesempatan lebih besar pada anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; dan 4) meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan khususnya di daerah terluar, terpencil dan tertinggal.

2.1.5.4 Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin.

Untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di Jawa Barat pada Tahun 2030 ditargetkan untuk menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat, dengan indikator:

a. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen

Keterlibatan kaum perempuan di wilayah politik semakin mendapatkan momentum ketika pemerintah menerapkan kebijakan *affirmative action* melalui sejumlah regulasi seperti halnya UU Pemilu yang mewajibkan setiap parpol untuk menyertakan kepengurusan tingkat nasional dan pencalonan legislatif sekurang-kurangnya 30% bergenderkan perempuan.

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Jawa Barat hasil Pemilu Tahun 2013 keterwakilan perempuan di DPRD baru mencapai 19,32 persen . Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di Pemerintah juga masih rendah yang ditunjukkan oleh persentase pejabat perempuan eselon I adalah 15,6% sedangkan di eselon II adalah 22,28% (BKN, 2016 dalam Bappenas, 2018)

b. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial

Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial, di Jawa Barat masih rendah yaitu sebanyak 40.26 persen pada Tahun 2016 dan 44.12 persen pada Tahun 2016.

Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kapasitas bagi: 1) perempuan kader partai politik; 2) perempuan sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat; 3) perempuan calon kepala daerah; 4) perempuan anggota legislatif yang terpilih; dan 5) perempuan sebagai kepala daerah. Tantangan lain dalam meningkatkan keterwakilan perempuan adalah melakukan “*affirmative action*” terutama melalui terobosan politik.

2.1.5.5 Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi.

a. Median usia kawin pertama

BPS mendefinisikan umur perkawinan pertama sebagai umur pada saat wanita melakukan perkawinan secara hukum dan biologis yang pertama kali. Usia kawin pertama yang dilakukan oleh setiap wanita memiliki resiko terhadap persalinannya. Semakin muda usia kawin pertama seorang wanita, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak. Hal ini terjadi

dikarenakan belum matangnya rahim wanita usia muda untuk memproduksi anak atau belum siapnya mental dalam berumah tangga.

Di Jawa Barat menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun pada Tahun 2016 sebesar 46 persen dan pada Tahun 2017 turun menjadi 45 persen (Unpad Press, 2018).

b. *Unmet Need* pelayanan KB

Keikutsertaan aktif KB merupakan salah satu pilar fundamental keselamatan ibu di Negara berkembang termasuk Indonesia masih menjadi masalah, salah satu penyebabnya adalah tingginya angka *unmetneed*. *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) pada Tahun 2016 sebesar 11 persen (SDKI, 2012 dalam Bappenas 2018) dan yang seharusnya menurun pada Tahun 2017 tetapi kenyataannya meningkat menjadi 14,4 persen (BKKBN, 2017). Untuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan advokasi dan KIE yang efektif responsif gender yang dapat meningkatkan kesertaan berKB. Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) pada Tahun 2016 sebesar 11 persen (SDKI, 2012 Dalam Bappenas 2018).

Untuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi,

pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan advokasi dan KIE yang efektif responsif gender yang dapat meningkatkan kesertaan berKB. Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.

1. Meningkatkan Penggunaan Teknologi.

Secara Nasional pada tahun 2015 persentase perempuan yang memiliki telepon selular adalah 50,4% dan meningkat menjadi 52,1% pada tahun 2016. Sementara, untuk laki-laki adalah 63,4% pada tahun 2015 dan 64,4% pada tahun 2016 (Susenas 2015-2016 Dalam Bappenas 2018). Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan penggunaan teknologi adalah meningkatkan cakupan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan.

2.1.5.6 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Kesetaraan Gender

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan kesetaraan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Tantangan Tujuan Kesetaraan Gender

Tujuan/goals	Kondisi	Tantangan	Strategi
5. KESETARAAN GENDER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat nya diskriminasi terhadap kaum perempuan 2. Masih terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan, perdagangan orang dan eksploitasi seksual. 3. Masih terjadi perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan 4. Masih perlu jaminan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih rendahnya budayaa dan pemahaaman serta komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan 2) Masih rendahnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di dalam berbagai bidang pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat daerah 2) Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum.

2.2 BAGIAN II PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

2.2.1 Energi Bersih dan Terjangkau

Peningkatan perekonomian dan kelestarian lingkungan di Jawa Barat akan sangat tergantung kepada penyediaan energi bersih dan terjangkau oleh masyarakat, untuk itu diperlukan: (1) jaminan akses masyarakat terhadap layanan energi yang terjangkau, andal dan modern; (2) meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global; (3) perbaikan efisiensi energi dengan capaian dan target sebagai berikut.

2.2.1.1 Akses Universal Layanan Energi Yang Terjangkau, Andal Dan Modern

Akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern di Jawa Barat ditunjukkan oleh capaian :

- a. Rasio elektrifikasi** sebagai ukuran tingkat ketersediaan listrik di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 93.71 persen, dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 97.84 persen, dengan konsumsi listrik per kapita pada Tahun 2015 sebanyak 1,120 kWh dan meningkat menjadi 1,184 kWh pada Tahun 2016 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).
- b. Jumlah sambungan jaringan gas** untuk rumah tangga di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 24.577 sambungan, dengan rasio penggunaan gas rumah tangga pada Tahun 2015 sebesar 81.45 persen dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 83.89 persen (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).
- c. Rasio penggunaan gas rumah tangga** yang menurut Kementerian ESDM/ Dinas ESDM (2016) baru mencapai 81.45 persen pada Tahun 2015.

2.2.1.2 Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

- a.** Dalam upaya meningkatkan **energi terbarukan dalam bauran energi global**, telah dicapai sebesar 15,77 persen pada Tahun 2015 dan meningkat menjadi sebesar 15,67 persen pada Tahun 2016. Sampai dengan tahun 2017 kontribusi terbesar jenis energi terbarukan di Jawa Barat adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Mikrohidro. Hal tersebut didukung oleh besarnya

potensi sumber daya air di Jawa Barat khususnya di wilayah Jawa Barat bagian Selatan dan beroperasinya PLTM Cibalapulang oleh PT. Medco Power Indonesia dengan kapasitas 9 MW di tahun 2017. Untuk biogas pada tahun 2017 terdapat penambahan pembangunan dengan total kapasitas 146 m³, dimana sebesar 44 m³ dibangun oleh APBD Jawa Barat. Untuk pembangunan PLTS pada tahun 2017 terdapat tambahan pembangunan PLTS Cirata oleh PT. PLN sebesar 1000 kW dan PLTS on-grid Dinas ESDM Jawa Barat sebesar 14,4 kW (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

- b. Perbaikan efisiensi energi di tingkat global** sebanyak dua kali lipat ditunjukkan oleh Intensitas energi primer pada Tahun 2015 sebesar Rp.23.2 TOE/Milyar dan pada Tahun 2016 sebesar 23.9 TOE/Milyar. Perhitungan pencapaian jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan adalah dengan mengkonversikan satuan energi dari produksi 4 (Empat) jenis energi baru terbarukan setiap tahunnya ke dalam satuan SBM (Setara Barel Minyak); yaitu: (1). Pembangkit Listrik Tenaga Mini-MikroHidro; (2). Pengembangan Biogas; (3). Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (Biomass); dan (4). Sistem Konversi Tenaga Surya. Capaian jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan di tahun 2014 adalah 64.154,31 SBM yang kemudian meningkat tidak terlalu signifikan menjadi 87.339 SBM di tahun 2015. Pada tahun 2016 angka ini meningkat cukup tinggi menjadi 169.748 SBM dan puncaknya adalah sebesar 251.586 SBM di tahun 2017 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

2.2.1.3 Intensitas dan Efisiensi Energi (Listrik)

Potensi penghematan energi per tahun dari industri manufaktur strategis cukup besar, mencapai 10-15%, namun sampai saat ini realisasinya masih rendah. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi energi adalah: (1) kurangnya insentif kepada pelaku industri untuk melakukan penghematan energi; (2) instrumen keuangan/fiskal, seperti *project financing* dan subsidi bunga bank untuk pembiayaan efisiensi energi dari lembaga keuangan belum tersedia; (3) data mengenai penggunaan energi umumnya tidak tersedia dan lembaga

keuangan/pembiayaan belum mempunyai sumberdaya manusia yang cukup untuk melakukan kajian investasi efisiensi energi; dan (4) hambatan koordinasi antar K/L dan pemerintah daerah dalam menekan pemborosan penggunaan energi seperti pada lampu penerangan jalan dan gedung pemerintahan.

Intensitas energi primer di Jawa Barat ditunjukkan oleh perkembangannya pada Tahun 2015 sebesar 23,2 TOE/Milyar Rupiah dan meningkat pada Tahun 2016 menjadi sebesar 23,9 TOE/Milyar Rupiah

Tantangan dalam kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan antara lain: (1) masih tingginya penggunaan energi fosil dan rendahnya EBT dalam bauran energi; (2) pembangunan infrastruktur energi lambat; (3) akses terhadap listrik masih belum merata dimana pada beberapa daerah masih terdapat rumah tangga yang belum mendapat listrik; (4) harga energi terbarukan belum kompetitif dan subsidi belum tepat sasaran; (5) cadangan energi nasional terus menurun; dan (6) sumberdaya energi masih dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai modal pembangunan.

1. Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
2. Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
3. Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
4. Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
5. Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk

pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya

6. Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
7. Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

2.2.1.4 Tantangan Dalam Menuju Tercapainya Tujuan Energi Bersih dan Terjangkau

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan energi bersih dan terjangkau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Tantangan Tujuan Energi Bersih dan Terjangkau

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern di Jawa Barat yang ditunjukkan oleh Ratio Elektrifikasi telah berhasil dengan baik 2. Upaya meningkatkan energi terbarukan dalam bauran energi global masih rendah yaitu hanya mencapai sebesar 15,77 persen pada Tahun 2015 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Angggapan EBT belum merupakan komoditas ekonomi; 2) Pembangunan infrastruktur energi memerlukan biaya tinggi 3) Harga energi terbarukan belum kompetitif 4) Sumberdaya energi masih dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai modal pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; meningkatkan aksesibilitas energi 2) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik 3) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA

2.2.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

2.2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat adalah meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan yang berkeadilan. Berdasarkan data BPS Jawa Barat (2018) diperoleh pertumbuhan ekonomi makro sebagai berikut :

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat Tahun 2015 sebesar 5,05 persen dan pada Tahun 2016 sebesar 5,66% (yoy) menjadi 5,29% (yoy) pada tahun 2017. Kondisi ini lebih baik dari LPE nasional yang pada Tahun 2015 mencapai 4,88 persen, dan tahun 2016 mencapai 5,03 persen (BPS Jawa Barat 2013-2018).

b. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK) Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 5,04 persen, dan meningkat pada Tahun 2016 menjadi 5.67 persen PDRB per kapita. (ADHB) Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 32.65 juta rupiah, dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 34.88 juta rupiah (BPS Jawa Barat 2013-2018).

c. Ketimpangan pendapatan Masyarakat

Peningkatan pembangunan ekonomi perdesaan dan regional yang keberhasilannya ditunjukkan oleh: (1) dapat dipertahankannya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diatas lima persen; (2) menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan oleh menurunnya Indeks Gini dari 0,41 pada Tahun 2013 menjadi 0,39 pada Tahun 2017 (BPS Jawa Barat, 2013-2018).

2.2.2.2 Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif.

Penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif di Jawa Barat ditujukan untuk menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, dengan kondisi sebagai berikut:

a. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin

Pekerja informal di sektor non-pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas. Manfaat dari indikator ini adalah mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/ permodalan (Bappenas, 2018). Menurunnya indikator ini menunjukkan bahwa terjadi pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu menampung dan menyediakan lapangan kerja yang lebih terlindungi (*secure*).

Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin di Jawa Barat pada tahun 2015 tercatat 8,57 persen, dan menurun pada Tahun 2016 menjadi sebesar 7,33 persen (BPS, 2017). Masih tingginya tenaga kerja yang bekerja di sektor informal menyebabkan rendahnya perlindungan tenaga kerja

baik dari sisi keselamatan kerja maupun pengupahan, sedangkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan tidak dikoordinasikan oleh pemberi kerja.

b. Tenaga Kerja Formal

Tenaga kerja formal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai (BPS, 2017). Indikator ini dimaksudkan untuk mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan pada sektor non-pertanian (Bappenas, 2018).

Tenaga kerja formal di Jawa Barat pada Tahun 2015 tercatat sebesar 49,61 persen dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 51,36 persen (BPS Jawa Barat, 2017).

c. Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian

Untuk mengetahui proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal di sektor pertanian sebagai proksi proporsi pekerja yang tidak memiliki kondisi kerja yang terlindungi (*secure*) digunakan indikator pekerja informal di sektor pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas yang dihitung setiap tahun (Bappenas, 2018). Menciptakan lapangan kerja informal pada sektor pertanian akan berdampak terhadap peningkatan sumber ekonomi di perdesaan, sehingga indikator ini setiap tahunnya harus meningkat.

Jumlah tenaga kerja informal sektor pertanian di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 2,80 persen dan terjadi peningkatan pada Tahun 2016 menjadi 3,60 persen (BPS Jawa Barat, 2017).

d. Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Ke Layanan Keuangan

Layanan Keuangan merupakan bentuk layanan dari lembaga bank maupun bukan bank yang menyalurkannya pembiayaan baik berupa pinjaman maupun penyertaan modal. Sehingga dengan menggunakan indikator ini Pemerintah dapat mengidentifikasi berapa banyak UMKM yang sudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan formal.

Akses pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Jawa Barat ke layanan keuangan pada Tahun 2015 sebanyak 8.365 orang dan meningkat pada Tahun 2016 menjadi 14.868 orang (BPS Jawa Barat, 2017).

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator tingkat pengangguran terbuka ditujukan untuk mengetahui pencapaian ketenagakerjaan bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas (Bappenas, 2018), indikator ini seharusnya turun dari tahun ke tahun. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Konsep pengangguran yaitu (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS,2017).

Kondisi tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 8,72 persen dan meningkat pada Tahun 2016 menjadi 8,89 persen (BPS Jawa Barat, 2017).

Menyadari tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat merupakan permasalahan dalam pembangunan sumberdaya manusia, maka Pemerintah

Provinsi Jawa Barat berupaya melalui program penciptaan dua juta kesempatan kerja dan penciptaan 100 ribu wirausaha baru. Keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya upah rata-rata per jam kerja dari Rp. 13.483 pada Tahun 2015 menjadi Rp. 15.339 pada Tahun 2016 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 2017).
- b) Mengurangi angka pengangguran yang ditunjukkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Tahun 2015 sebesar 9,42 persen menjadi 7,92 persen pada Tahun 2016 Persentase setengah pengangguran (BPS Jawa Barat, 2017).
- c) Mengurangi jumlah setengah pengangguran dari Tahun 2015 sebesar 8,31 persen menjadi 6,18 persen pada Tahun 2016 (BPS Jawa Barat, 2017).
- d) Disamping itu dalam upaya mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan, telah dilaksanakan melalui berbagai program pelatihan ketenagakerjaan diberbagai sektor produktif dan meningkatkan kualitas dan substansi sekolah menengah kejuruan dan pendidikan kejuruan non-formal, yang dapat menurunkan jumlah usia muda usia 15 sampai 24 tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET), pada Tahun 2015 sebesar 5.33 persen dan pada Tahun 2016 seharusnya menurun, tetapi kondisinya meningkat menjadi 5,79 persen (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 2017).
- e) Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan para pelaku usaha, khususnya kecil menengah telah berhasil menyerap tenaga kerja pada Tahun 2017 sebanyak 2,002,057 orang. Upaya yang dilakukan diantaranya menyalurkan kredit modal usaha yang diterima oleh pengusaha kecil sebagai Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha sebanyak 8.365 unit pada Tahun 2015 dan meningkat pada Tahun 2016 sebanyak 14.868 unit (BPS Jawa Barat, 2017).
- f) Peningkatan Sektor Pariwisata dapat menjadi alternatif sumber pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah di Jawa Barat khususnya yang memiliki potensi

alam dan budaya namun tidak berada di sekitar pusat aglomerasi sehingga tidak memungkinkan untuk membangun industri (umumnya Jabar bagian selatan). Sebagai penyumbang devisa ke-4 terbesar dengan tren pertumbuhan yang selalu positif, sektor pariwisata diproyeksikan akan menjadi kontributor terbesar PDRB Jawa Barat, dari sisi perhotelan, pendapatan asli daerah dan usaha kecil dan menengah di wilayah obyek pariwisata.

Perkembangan sektor pariwisata di Jawa Barat dapat dilihat dari banyaknya kunjungan wisatawan ke Jawa Barat, berdasarkan asal wisatawan masih di dominasi oleh wisatawan nusantara sebanyak 58,728,666 pada Tahun 2015 dan meningkat menjadi 56,334,706 orang pada Tahun 2016. Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke akomodasi sebanyak 4.428.094 orang pada Tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata wisman ke akomodasi adalah sebesar 25,41%. Peningkatan tertinggi dicapai pada tahun 2016 dengan pertumbuhan mencapai 64,41%, keberhasilan ini tidak terlepas dari keberhasilan promosi yang menjadi salah satu media penting dalam memperkenalkan pariwisata unggulan Jawa Barat serta pembenahan sektor tersebut selama periode 2013-2017 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

Perkembangan sektor pariwisata secara umum masih menghadapi dua tantangan yaitu: Pertama, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dalam lima tahun terakhir belum diikuti oleh peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara (peningkatan devisa). Kedua, praktik pariwisata yang berorientasi pada jumlah kunjungan belum mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keterlibatan masyarakat setempat. Kedua tantangan ini membutuhkan strategi pengembangan destinasi wisata yang didukung oleh (i) kesiapan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi untuk dapat menerima kunjungan wisatawan dan berpartisipasi dalam penyediaan layanan wisata, serta (ii) pelestarian lingkungan melalui penerapan praktik wisata yang berkelanjutan.

f. Persentase Setengah Pengangguran

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa) (BPS,2017). Indikator ini diperlukan untuk mengetahui proporsi penduduk yang setengah pengangguran sebagai proksi tenaga kerja yang belum memiliki produktivitas optimal. Hal ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja (Bappenas, 2018). Indikator ini setiap tahunnya diharapkan terus menurun.

Kondisi setengah pengangguran di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 8,31 persen dan pada Tahun 2016 turun menjadi 6,18 persen (BPS Jawa Barat, 2017).

g. Persentase Usia Muda (15-24) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan (NEET)

Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) adalah kategori usia muda merupakan laki-laki dan perempuan yang berusia 15 – 24 tahun, yang digunakan untuk mengukur presentase penduduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan, sebagai proksi keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pelatihan serta pekerjaan pada usia muda (Bappenas, 2018).

Kondisi Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 5,33 persen dan pada Tahun 2016 naik menjadi 5,79 persen (BPS Jawa Barat, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu turun.

2.2.2.3 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Tantangan Tujuan Perkerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	1. LPE dan b. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh dengan baik, sedangkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat masih tinggi yaitu 0,41	1) Sulitnya perlindungan TK informal 2) Peraturan lembaga keuangan yang sulit di penuhi ole UKM 3) Kondisi SDM yang belum berkualitas dan berjiwa wirausaha	1) Memperluas lapangan kerja 2) Meningkatkan iklim investasi dan promosi ekspor 3) Meningkatkan sinergi arah kebijakan industri 4) Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja serta pengembangan sistem kerja yang layak 5) Pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja 6) Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja
	2. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian masih tinggi yaitu pada tahun 2015 tercatat 8,57%		
	3. Masih rendahnya proporsi tenaga kerja formal pada Tahun 2015 tercatat sebesar 49,61.		
	4. Masih rendahnya Akses pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) keuangan		
	5. Masih meningkatnya pengangguran terbuka pada Tahun 2015 sebanyak 8,72 persen dan meningkat pada Tahun 2016		

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
	<p>menjadi 8,89 persen</p> <p>6. Masih tingginya setengah pengangguran pada Tahun 2015 sebanyak 8,31persen</p> <p>7. Masih meningkatnya persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan (NEET). 2015 sebanyak 5,33 persen dan pada Tahun 2016 naik menjadi 5,79 persen</p>		

2.2.3 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi.

2.2.3.1 Infrastruktur yang Berkualitas, Andal, Berkelanjutan dan Tangguh

Target ini ditujukan untuk mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Indikator yang perlu dicapai untuk mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Dermaga Penyeberangan

Dermaga pelabuhan penyeberangan merupakan pelabuhan umum untuk kegiatan penyeberangan. Pelabuhan merupakan tempat yang tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai

tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Kegunaan dari indikator ini adalah sebagai salah satu proksi sarana penunjang dalam pemerataan pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Adanya jumlah dermaga penyeberangan dapat memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, teratur dan efisien (Bappenas, 2018).

Dermaga Penyeberangan dan Pelabuhan Strategis. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan Angkutan Sungai Danau dan Pelabuhan di Jawa Barat, Utara dan Selatan), Capaian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Sektor Perhubungan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat, Kegiatan Penyusunan Dokumen Kerjasama Pembangunan Pelabuhan Laut di Jawa Barat (Bagian Utara dan Selatan), Kegiatan Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan ASDP di Waduk Cirata, Kegiatan CLTH- Penyusunan AMDAL Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang) Kabupaten Sukabumi, Kegiatan CLTH-Penyusunan DED Pembangunan Dermaga Kapal Wisata (Teluk Palangpang) Kabupaten Sukabumi, Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Jawa Barat, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran di Sungai dan Danau di Jawa Barat, Kegiatan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), dan Kegiatan Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Kenavigasian Pelabuhan Pengumpan Regional di Teluk Palangpang Kabupaten Sukabumi.

Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun sampai dengan Tahun 2015 sebanyak tiga unit, dan pelabuhan strategis sebanyak 10 lokasi (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017). Indikator ini diharapkan meningkat seiring dengan pembangunan ekonomi.

b. Jumlah Pelabuhan Strategis

Pelabuhan strategis merupakan pelabuhan yang dianggap telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, diantaranya fasilitas untuk pelayaran angkutan peti kemas, barang curah, barang umum dan penumpang serta mempunyai kepadatan pergerakan kapal. Indikator ini digunakan untuk Sebagai proksi dalam mengukur daya saing produsen pasar nasional dan internasional, efisiensi distribusi internal, keterpaduan dan integritas ekonomi nasional. Semakin sistem pengangkutan dengan moda transportasi laut terkelola dengan baik dan efisien maka akan meningkatkan daya saing, efisiensi distribusi dan integritas ekonomi di Jawa Barat (Bappenas, 2018).

Jumlah pelabuhan strategis di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 1 unit dan pada Tahun 2016 masih tetap 1 unit (Dinas Perhubungan Jawa Barat, 2017). Indikator ini diharapkan meningkat seiring dengan pembangunan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur konektivitas dipercepat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Infrastruktur yang dominan untuk meningkatkan ekonomi dan lingkungan adalah: Kegiatan Mendukung Bandara BIJB. Pembebasan lahan untuk Pembangunan jalan akses non tol dan akses tol ke BIJB; Kegiatan Mendukung Kawasan Menuju Geopark Ciletuh. Pembangunan Jalan Ruas Jalan Ciemas-Ciateul-Puncak Darma; Peningkatan dan Rehabilitasi jalan ke Jawa Barat Bagian Selatan; Kegiatan Mendukung Pembangunan Infrastruktur Strategis Jalan Tol Cisumdawu, Tol Seroja, akses Tol Gedebage, dan FS Tol Cigatas; serta Pembangunan 10 Jembatan tersebar di wilayah Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

Pengelolaan jalan Provinsi di Jawa Barat dapat dilihat dengan indikator kinerja selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 yang memperlihatkan peningkatan kinerja, yang ditunjukkan antara lain oleh peningkatan kemantapan jalan. Tingkat kemantapan jalan meningkat dari 97,56% pada Desember 2013 menjadi 98,17% pada akhir Desember 2017 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

Capaian yang diperoleh didapatkan dengan menjalankan program pembangunan dan peningkatan jalan yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan struktural dan atau kapasitas jalan dan jembatan yang akan disesuaikan dengan perkembangan jumlah dan beban lalu lintas. Pada program ini dilakukan perbaikan kondisi jalan yang kemampuannya tidak mantap atau kritis, sampai pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Sedangkan untuk jembatan dilakukan penggantian jembatan yang sudah rusak berat atau umurnya sudah habis atau usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan struktural yang disesuaikan dengan perkembangan beban lalu lintas.

2.2.3.2 Mempromosikan Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan

Target ini ditujukan untuk mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. Indikator yang perlu dicapai untuk mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

a. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita

Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Nilai tambah industri manufaktur merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan pada sektor industri manufaktur. Nilai tambah manufaktur diproyeksikan sebagai presentase dari produk domestik bruto (PDB) serta per kapita untuk periode tertentu. Nilai tambah manufaktur dihitung menggunakan Atas Dasar Harga Konstan. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan.

Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi dimana membagi indikator dengan jumlah populasi (Bappenas, 2018).

Kondisi proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 4,25 persen dan pada Tahun 2016 naik menjadi 10,08 persen (BPS Jawa Barat, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu naik sesuai dengan perkembangan ekonomi Jawa Barat.

b. Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur

Indikator industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu negara selama satu periode (setahun). Perhitungan indikator ini menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan (Bappenas, 2018).

Kondisi laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur pada Tahun 2015 sebesar 31,09 persen dan pada Tahun 2016 naik menjadi 28,56 persen (BPS Jawa Barat, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu naik sesuai dengan perkembangan ekonomi Jawa Barat.

c. Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur

Untuk mengetahui Untuk mengukur presentase tenaga kerja di sektor industri manufaktur digunakan proporsi tenaga kerja pada sector manufaktur, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan/atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu *shift*) tidak dianggap pekerja.

Kondisi proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur pada Tahun 2015 sebesar 31,09 persen dan pada Tahun 2016 tetap sebesar 31,09 persen (BPS

Jawa Barat, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu naik sesuai dengan perkembangan ekonomi Jawa Barat.

2.2.3.3 Meningkatkan Infrastruktur dan *Retrofit* Industri

Meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri adalah target agar industri dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. Indikator yang perlu dicapai untuk mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca

Untuk mengetahui hasil kerja dari program pengurangan emisi CO₂, digunakan indikator persentase perubahan emisi CO₂ / emisi gas rumah kaca, dimana Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Tingkat Emisi (Juta Ton) diperoleh dengan cara mengalikan data aktifitas dengan faktor emisi. Data aktifitas (AD) adalah besaran kuantitatif kegiatan manusia yang melepas emisi gas rumah kaca, sedangkan faktor emisi adalah faktor yang menunjukkan intensitas emisi per unit aktivitas yang bergantung kepada berbagai parameter terkait proses kimia yang terjadi.

Kondisi indikator persentase perubahan emisi CO₂ / emisi gas rumah kaca pada Tahun 2015 sebesar 3,19 persen dan pada Tahun 2016 naik menjadi sebesar 11,45 persen (DLH Jawa Barat, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu naik sesuai dengan perkembangan upaya program pengurangan emisi CO₂ di Jawa Barat.

Keberhasilan capaian indikator pada era MDGs tersebut, dilaksanakan melalui peningkatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan indikator kinerja sasaran yaitu : (1) Jumlah lokasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) yang

merupakan Indikator Kinerja Utama, dengan target capaian 61 kampung iklim, realisasi target capaian yaitu 61 kampung iklim dengan prosentase capaian sebesar 100 % sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik. Target capaian pada indikator kinerja ini merupakan akumulasi pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya; (2) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan target capaian 5-6 % yang merupakan Indikator Kinerja Utama, realisasi target capaian yaitu 11.45% dengan prosentase capaian >100 % sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik. Target capaian pada indikator kinerja ini merupakan akumulasi pencapaian penurunan emisi dari tahun-tahun sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat. Selain itu, semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim melalui yang sedang terjadi saat ini sehingga mulai menerapkan hidup yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim yang terjadi.

2.2.3.4 Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dalam sector industry ditujukan untuk mencapai target : Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada Tahun 2020.

a. Proporsi Penduduk Terlayani *Mobile Broadband*

Untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK, digunakan indikator proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband*. Akses bergerak pita lebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (*fixed*) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (*backbone*) mencapai orde ratusan Gbps. Indikator ini dihitung

melalui: Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband* diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk terlayani *mobile broadband* dibagi dengan jumlah total penduduk dikalikan dengan 100 persen.

Kondisi indikator proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband* di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 59,50 persen dan pada Tahun 2016 naik menjadi sebesar 60,99 persen (BPS Jawa Barat, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu naik sesuai dengan perkembangan upaya program pembangunan di Jawa Barat

b. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

Untuk mengetahui tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (*mobile Fixed Wireless Access*) dan seluler digunakan indikator proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Telepon genggam/Telepon seluler, termasuk *smartphone* adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Cara perhitungan: Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam diperoleh dengan cara membagi jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dan dinyatakan dalam persentase.

Kondisi indikator proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 24,45 persen dan pada Tahun 2016 naik menjadi sebesar 27,92 persen (BPS Jawa Barat, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu naik sesuai dengan perkembangan pembangunan di Jawa Barat.

c. Proporsi individu yang menggunakan Internet

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet. Untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi, serta

perkembangan masyarakat digital digunakan indikator proporsi individu yang menggunakan internet. Internet (*interconnection-networking*) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman *world wide web* (www), surat elektronik (email), berita, hiburan dan data.

Kondisi indikator proporsi individu yang menggunakan internet di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 0,39 persen dan pada Tahun 2016 naik menjadi sebesar 0,40 persen (BPS Jawa Barat, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu naik sesuai dengan perkembangan pembangunan di Jawa Barat.

2.2.3.5 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Industri, Inovasi & Infrastruktur

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan industri, inovasi dan infrastruktur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Tantangan Tujuan Industri, Inovasi & Infrastuktur

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	1. Infrastruktur 1) Masih diperlukan dermaga penyeberangan dan pelabuhan strategis 2. Industri Inklusif dan Berkelanjutan 1) Kondisi baik proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 4,25 persen dan pada Tahun 2016 naik menjadi 10,08 persen		1) Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda 2) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung sistem logistik nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global 3) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi,

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
	<p>2) Menurunnya laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur pada Tahun 2015 sebesar 31,09 persen dan pada Tahun 2016 turun menjadi 28,56 persen</p> <p>3) Tidak Bergeraknya proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur pada Tahun 2015 sebesar 31,09 persen dan pada Tahun 2016 tetap sebesar 31,09 persen</p> <p>4) Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 59,50 persen dan pada Tahun 2016 naik menjadi sebesar 60,99 persen</p> <p>5) proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 24,45 persen dan pada Tahun 2016 naik menjadi sebesar 27,92 persen</p>		<p>kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi</p> <p>4) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi</p> <p>5) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan</p> <p>6) Mentransformasi kewajiban pelayanan universal (universal service obligation/USO) menjadi broadband-ready dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem broadband (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola dana USO</p> <p>7) Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas</p> <p>8) Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di</p>

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
			daerah perbatasan negara 9) mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective 10) Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK

2.2.4 Mengurangi Kesenjangan

2.2.4.1 Meningkatkan dan Mempertahankan Pertumbuhan Pendapatan Penduduk

Upaya meningkatkan pendapatan masyarakat ditujukan untuk mencapai target pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Indikator yang perlu dicapai untuk mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

a. Koefisien Gini

Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh digunakan Indeks Gini atau Koefisien Gini yang merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Kondisi indikator indeks gini di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 0,426 persen dan pada Tahun 2016 turun menjadi sebesar 0,402 persen (BPS Jawa Barat, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu turun sesuai dengan perkembangan pembangunan di Jawa Barat.

Gini Ratio Provinsi Jawa Barat masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0.3 sampai 0.5, yaitu di tahun 2013 sebesar 0,406, tahun 2014 sebesar 0.398, tahun 2015 sebesar 0,426, tahun 2016 sebesar 0.402 dan tahun 2017 sebesar 0,393. Tahun 2017 Jawa Barat termasuk dalam 10 terbesar Provinsi yang memiliki ketimpangan tertinggi setelah Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Sulawesi Utara. Selain daripada itu, Indeks Gini Jawa Barat tahun 2017 berada diatas nasional yang sebesar 0,391.

Tabel 2.11 Indeks Gini Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017

Uraian	Indeks Gini					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Barat (Kota+Desa)	0.422	0.406	0.398	0.426	0.402	0.393
Kota	0.431	0.424	0.412	0,446	0,412	0,399
Desa	0.293	0.299	0.294	0,310	0,310	0,326

Sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2013- 2018

Sebaran nilai indeks gini di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung lebih besar di daerah Kota dibandingkan dengan daerah Kabupaten. Pada tahun 2011 besaran indeks gini rata-rata di daerah Kabupaten hanya sebesar 0,319 sedangkan di tahun 2016 besaran rata-rata indeks gininya meningkat menjadi 0,345. Hal yang sama juga terjadi di daerah Kota, jika pada tahun 2011 rata-rata indeks gini daerah Kota mencapai angka 0,345 maka di tahun 2016 nilainya meningkat menjadi sebesar 0,410 (BPS Jawa Barat, 2013-2018).

b. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran) sehingga dapat didesain kebijakan dan anggaran yang memadai, digunakan indikator persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Kondisi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 9,57 persen dan pada Tahun 2016 turun menjadi sebesar 8,77 persen (BPS Jawa Barat, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu turun sesuai dengan perkembangan pembangunan di Jawa Barat.

c. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan

Perhitungan jumlah daerah tertinggal yang terentaskan akan menunjukkan perkembangan daerah atau kabupaten yang sudah berkembang dari kategori daerah atau kabupaten tertinggal. Hal ini dapat menunjukkan pembangunan daerah. Daerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Perekonomian masyarakat; (2) Sumber daya manusia; (3) Sarana dan prasarana; (4) Kemampuan keuangan daerah; (5) Aksesibilitas; dan (6) Karakteristik daerah.

Kondisi daerah tertinggal di Jawa barat sebagai akibat dari terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat antara wilayah utara dan wilayah selatan, data

Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik pada 2016, 71 persen produk domestik regional bruto Jawa Barat disumbang kabupaten atau kota di utara Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan peningkatan pemerataan terhadap wilayah utara dan selatan. Jumlah desa tertinggal di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 1.355 desa dan pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 1.220 desa, sebagian besar desa tertinggal tersebut berada di wilayah selatan Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

d. Jumlah Desa Tertinggal

Untuk mengukur pengurangan jumlah desa tertinggal yang diharapkan telah meningkat ke status desa yang lebih tinggi ditunjukkan oleh indikator jumlah desa tertinggal. Desa Tertinggal: desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

Kondisi jumlah desa tertinggal di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 1.355 desa dan pada Tahun 2016 turun menjadi 1.220 desa (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu turun sesuai dengan perkembangan pembangunan di Jawa Barat.

e. Jumlah Desa Mandiri

Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

Kondisi jumlah desa mandiri di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 6,52 persen dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 10,00 persen (BPS Jawa Barat, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu naik sesuai dengan perkembangan pembangunan di Jawa Barat.

2.2.4.2 Menjamin Kesempatan yang Sama dan Mengurangi Kesenjangan Hasil

Upaya mengurang kesenjangan merupakan target untuk menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. Dengan indikator:

a. Indeks Kebebasan Sipil

Indeks Kebebasan Sipil adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut:

- (1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Berkumpul adalah aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 (dua) orang. Sedangkan berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar atau tidak terdaftar di lembaga pemerintah;
- (2) Kebebasan Berpendapat; yakni kebebasan individu dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan, tanpa adanya dan pembatasan;
- (3) Kebebasan Berkeyakinan; yakni kebebasan individu untuk untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah, serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan;

- (4) Kebebasan dari Diskriminasi; yakni kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warganegara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki di mana perbedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ ras, umur, ODHA, dan hambatan fisik.

Kondisi kebebasan sipil di Jawa Barat pada Tahun 2016 sebanyak 634 pengaduan (Komnas HAM, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu naik sesuai dengan perkembangan pembangunan di Jawa Barat.

2.2.4.3 Kebijakan Fiskal, Upah dan Perlindungan Sosial

a. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:

- (1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (2) Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (3) Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan

memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

- (4) Jaminan Kematian (JKm): Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia berbasis kepesertaan, yang dapat dibedakan atas kepesertaan pekerja sektor swasta, pegawai negeri sipil (PNS), dan anggota TNI/Polri. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Jawa Barat pada Tahun 2016 mencapai 37,64 persen dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 38,44 persen (BPJS Jawa Barat, 2018).

2.2.4.4 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Berkurangnya Kesenjangan

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan berkurangnya kesenjangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12 Tantangan Tujuan Berkurangnya Kesenjangan

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
10. BERKURANGNYA KESENJANGAN	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi indikator indeks gini di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 0,426 persen dan pada Tahun 2016 turun menjadi sebesar 0,402 persen Kondisi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Jawa Barat pada 	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi ekonomi global Jaminan pasar produk unggulan Transformasi tenaga kerja informal ke tenaga kerja formal 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan penyerapan tenaga kerja miskin dan rentan produktif ke dalam sektor industri pengolahan unggulan Pengembangan aktivitas rantai pengolahan yang bersifat penambahan nilai (value added) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan komoditas unggulan berbasis agro industri

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
	<p>Tahun 2015 sebesar 9,57 persen dan pada Tahun 2016 turun menjadi sebesar 8,77 persen</p> <p>3. Kondisi jumlah desa tertinggal di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 1.355 desa dan pada Tahun 2016 turun menjadi 1.220 desa</p> <p>4. Kondisi jumlah desa mandiri di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 6,52 persen dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 10,00 persen</p> <p>5. Kondisi kebebasan sipil di Jawa Barat pada Tahun 2016 sebanyak 634 pengaduan</p> <p>6. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang</p>		<p>3) Perbaiki rantai distribusi komoditas unggulan yang berpihak kepada petani kecil</p> <p>4) Pengembangan ekonomi lokal di pulau-pulau terluar berbasis potensi alam daerah setempat</p>

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
	Ketenagakerjaan di Jawa Barat pada Tahun 2016 mencapai 37,64 persen		

2.2.5 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global intinya adalah memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Mendorong dan mempromosikan publik yang efektif, kemitraan masyarakat publik swasta dan sipil, membangun pengalaman dan *resourcing* strategi kemitraan, dengan target sebagai berikut:

2.2.5.1 Mobilisasi Sumberdaya Domestik

Mobilisasi sumber daya domestik adalah untuk memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya, dengan indikator sebagai berikut:

a. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya

Pendapatan Pemerintah yang dimaksud adalah Pendapatan Negara dalam hal ini adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah (UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara).

Indikator ini diperlukan untuk melihat kontribusi pendapatan negara atau pendapatan asli daerah dari masing-masing sumber terhadap nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah. Pajak daerah dan retribusi daerah

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya di Jawa Barat pada Tahun 2015 dicapai sebesar 1,05 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 1,03 persen. Indikator ini diharapkan turun dari tahun ketahun yang akan mencerminkan meningkatnya PDRB.

b. Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.

Indikator Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB, ditujukan untuk mengukur persentase total penerimaan dari pajak yang diterima oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola. Capaian indikator ini di Jawa barat pada Tahun 2015 sebesar 0,96 persen, dan pada Tahun 2016 turun menjadi 0,95 persen (Bapenda Provinsi Jawa barat, 2017).

2.2.5.2 Kemitraan Multipihak

Target 17.6 Meningkatkan kerjasama secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

Sarana pelaksanaan yang berkaitan dengan kerjasama atau kemitraan menyangkut kemitraan global dan juga kemitraan antara pemerintah dan swasta

termasuk organisasi masyarakat sipil. Salah satu kerjasama regional adalah kemitraan yang telah dibangun dengan Provinsi tetangga dalam berbagai bidang pembangunan.

Di balik pencapaian positif tersebut, Jawa Barat masih menghadapi beberapa tantangan dalam upaya peningkatan kinerja diantaranya (1) koordinasi kegiatan-kegiatan Antar perbatasan provinsi belum terstruktur, efektif dan efisien; (2) pendanaan yang belum memadai; dan (3) strategi komunikasi (aktivitas promosi dan *public relations*) yang belum komprehensif baik secara internal maupun teknologi dan informasi menjadi salah satu sarana pelaksanaan yang juga sangat penting untuk mewujudkan TPB. Salah satu indikator yang dianggap sangat vital adalah banyaknya individu yang menggunakan Internet. Proporsi individu yang menggunakan internet Indonesia sangat memuaskan namun datanya masih dalam pengolahan.

Dalam era persaingan yang semakin ketat serta perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Salah satu indikator proksi penting dari target ini adalah proporsi pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai rujukan utama. Pada tahun 2016 sebanyak 91,35% pengguna data menjadikan data dan informasi BPS sebagai rujukan utama, suatu pencapaian yang sangat baik. Selanjutnya, tingkat kepuasan pengguna data BPS pada tahun 2016 sudah mencapai 89,3% (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018).

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyediaan data SDGs di Indonesia diantaranya adalah (1) keterbatasan data yang bersifat disagregasi (data terpilah); (2) munculnya daerah administrasi baru karena sistem desentralisasi pemerintah (3) belum maksimalnya pemanfaatan sistem teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di beberapa perangkat daerah ; dan (4) belum tersedianya data untuk beberapa indikator global SDGs.

2.2.5.3 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13 Tantangan Tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turunnya total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya di Jawa Barat pada Tahun 2015 dicapai sebesar 1,05 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 1,03 persen 2. Ratio penetrimaan pajak terhadap PDRB pada Tahun 2015 sebesar 0,96 persen, dan pada Tahun 2016 turun menjadi 0,95 persen 	1) Kerjasama global, nasional dan regional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan promosi 2) Meningkatkan kerjasama ekonomi internasional di tingkat multilateral, regional, dan bilateral dengan prinsip mengedepankan kepentingan nasional, saling menguntungkan, serta memberikan keuntungan yang maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

2.3 BAGIAN III PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

2.3.1 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

2.3.1.1 Menjamin Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Terjangkau

a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 67,20 persen yang meningkat menjadi 67,62 persen pada Tahun 2016 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017). Capaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat di sektor Air Minum yang dilakukan.

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional Metropolitan Bandung Wilayah Selatan dan terselenggaranya Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Selain itu dalam hal pembangunan air minum dilaksanakan pula penyusunan Jakstrada SPAM Provinsi Jawa Barat, Penyusunan Rencana Teknis Rinci SPAM Regional Metropolitan Bandung.

b. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pertanian

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pertanian ditunjukkan oleh sistem penyediaan air minum regional saat ini berfungsi khusus di Metropolitan Bandung Wilayah Selatan (Kabupaten Bandung dan Kota Bandung). Penyusunan dokumen perencanaan juga merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunan SPAM Regional.

Pengelolaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi menunjukkan peningkatan kinerja yang terus meningkat yang tunjukan tingkat kondisi baik jaringan irigasi pada tahun 2013 sebesar 65,98 % menjadi 73,95 % pada akhir 2017 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017).

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah terbangun, mengingat belum mantapnya lembaga penyelenggara dan tarif air minum yang belum memenuhi prinsip pemulihan biaya, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Air baku untuk air minum semakin terbatas, baik secara kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas. Selain itu, pemanfaatan alternatif sumber air baku, antara lain melalui daur ulang air dan pemanfaatan air hujan belum banyak dimanfaatkan. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

Pengelolaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi menunjukkan peningkatan kinerja yang terus meningkat yang tunjukan tingkat kondisi baik jaringan irigasi pada tahun 2013 sebesar 65,98 % menjadi 73,95 % pada akhir 2017 (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017).

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah terbangun, mengingat belum mantapnya lembaga penyelenggara dan tarif air minum yang belum memenuhi prinsip pemulihan biaya, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Air baku untuk air minum semakin terbatas, baik secara kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas. Selain itu, pemanfaatan alternatif sumber air baku, antara lain melalui daur ulang air dan pemanfaatan air hujan belum banyak dimanfaatkan. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

2.3.1.2 Menjamin penyediaan sanitasi layak dan terjangkau

Sanitasi layak dan terjangkau masih merupakan indikator yang belum tercapai pada pelaksanaan MDGS, sehingga pada tahun 2030 ditargetkan untuk mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan, Kondisi sanitasi di Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018) adalah sebagai berikut :

- a. **Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak** di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 59.43 persen dan meningkat menjadi 63.79 persen pada Tahun 2016;
- b. **Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)** di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 35,32 persen dan meningkat menjadi 39,45 persen pada Tahun 2016;
- c. **Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)** di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 70,40 persen dan meningkat menjadi 91,70 persen pada Tahun 2016.
- d. **Capaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sektor air limbah domestik** yang telah dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat lebih banyak melalui kegiatan Bantuan Keuangan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sabermas) karena sektor air limbah merupakan kewenangan mutlak pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

2.3.1.3 Meningkatkan Kualitas Air

Kualitas air merupakan bagian penting dalam kehidupan umat, target aspek kualitas air pada Tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global, dengan capaian indikator untuk menuju kualitas air di Jawa Barat menurut Dinas Perumahan dan Pemukiman (2017) sebagai berikut:

- a. **Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan** dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), capaian Tahun 2015 sebesar 23 persen, dan Tahun 2016 sebesar 23 persen.
- b. **Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja**, capaian Tahun 2015 sebesar 0,80 persen.

2.3.1.4 Efisiensi Penggunaan Air Di Semua Sektor, Dan Menjamin Penggunaan Dan Pasokan Air Tawar Yang Berkelanjutan

Pada tahun 2030 ditargetkan secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Kondisi ini ditunjukkan oleh pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah, di Jawa Barat indikator tersebut pada Tahun 2015 dicapai sebanyak 338 titik pengambilan air tanah dan Tahun 2016 meningkat menjadi 1093 titik.

2.3.1.5 Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Konsep pengelolaan air dan sumber air pada dasarnya mencakup upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya air berupa menyalurkan (*redistributing*) air yang tersedia dalam konteks ruang dan waktu, dan komponen mutu dan komponen volume (jumlah) untuk memenuhi kebutuhan

pokok kehidupan. Dengan demikian pengelolaan air dan sumber air yang berkelanjutan merupakan suatu system agar alam atau suatu sistem dalam rangka upaya membentuk lingkungan hidup yang akrab serta menyenangkan (Jacobus Samidjo, 2015). Untuk itu SDGS menargetkan pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat, dengan indicator yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat sebagai berikut:

- a. Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan *updating* dan revitalisasi.
- c. Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.
- d. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
- e. Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
- f. Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.

2.3.1.6 Melindungi Dan Merestorasi Ekosistem Terkait Sumber Daya Air

Pada tahun 2020 ditargetkan melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau, dengan indikator pemerintah pusat Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi di Jawa Barat.

2.3.1.7 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan air bersih dan sanitasi layak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14 Tantangan Tujuan Air Bersih dan Sanitasi Layak

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
6. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN MANAJEMEN AIR DAN SANITASI SECARA BERKELANJUTAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya penyediaan akses air minum layak dan terjangkau bagi penduduk 2. Masih rendahnya pengembangan sanitasi layak dan terjangkau 3. Belum efisiennya penggunaan air dan belum terjaminnya pasokan air tawar yang berkelanjutan 4. Sumber daya air belum terkelola secara terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sikap dan perilaku masyarakat dan industry dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi 2) Membangun infrastruktur produktif dan manajemen layanan air yang mahal 3) Sinergitas antara pusat provinsi dan kabupaten kota yang belum terjamin dalam pengelolaan air minum dan sanitasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi 2) Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi 3) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
			4) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi

2.3.2 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

2.3.2.1 Menjamin Akses Bagi Semua terhadap Perumahan yang Layak, Aman, Terjangkau dan Pelayanan Dasar , Serta menata Kawasan Kumuh

Untuk menyelesaikan target pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh, ditetapkan indikator sebagai berikut:

a. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Indikator ini digunakan untuk memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak. Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria sebagai berikut: (1) Ketahanan bangunan (durabel housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, seng, dan bambu;) Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu, dan bambu; Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, dan bambu. (2) Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²; (3) Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup pompa/sumur bor, sumur terlindungi dan mata air terlindungi yang berjarak ≥ 10 m dari penampungan kotoran/ limbah. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum selain 3 jenis di atas (contoh: air kemasan yang tidak dihitung sebagai akses).

Kondisi proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Jawa Barat pada Tahun 2016 sebanyak 92,69 persen dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 93,30 persen (Disperkim, 2017). Indikator

ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu naik sesuai dengan perkembangan pembangunan di Jawa Barat

Keberhasilan tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan *stakeholder* lainnya yang menangani bidang perumahan. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tersebut antara lain diwujudkan melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (APBN) melalui Satker Penyediaan Perumahan di Jawa Barat maupun oleh Satker Strategis yang berada di pusat.

Permasalahan terkait cakupan rumah layak huni di Jawa Barat adalah terbatasnya kewenangan Provinsi dalam penyediaan perumahan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyediaan perumahan khususnya bagi MBR seluruhnya merupakan kewenangan urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi terbatas untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat terkena dampak pembangunan Provinsi dan bagi korban bencana Provinsi. Pemerintah Provinsi dalam konteks penyediaan rumah layak huni diluar urusannya lebih bersifat fasilitator dan mendukung khususnya penyediaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

2.3.2.2 Mempromosikan dan Menjaga Warisan Budaya Dunia dan Warisan Alam Dunia

a. Jumlah Kota Pusaka Di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang dan Kota Kecil

Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil adalah indikator dari taeket mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Kota pusaka adalah kota atau kabupaten dengan kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, pusaka budaya berwujud dan pusaka budaya tidak berwujud, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh, sebagai aset pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif (P3KP, KemenPUPR).

Kondisi jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil di Jawa Barat pada Tahun 2016 sebanyak satu kota (Disparbud, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu naik sesuai dengan perkembangan pembangunan di Jawa Barat.

2.3.2.3 Dampak Lingkungan Perkotaan

Pada tahun 2030 ditargetkan mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota dengan indikator sebagai berikut:

a. Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani

Persentase sampah perkotaan yang tertangani adalah adalah banyaknya sampah perkotaan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan. Indikator ini diperlukan untuk memonitor peningkatan jumlah penanganan sampah perkotaan dalam mengurangi dampak lingkungan dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan kota.

Cakupan pelayanan persampahan perkotaan di Jawa Barat terus mengalami peningkatan pada Tahun 2015 persentase sampah perkotaan yang tertangani

mencapai 65.65 persen, meningkat menjadi 66.26 pada Tahun 2016, dan pada Tahun 2017 mencapai 66.78% (LKPJ - AMJ).

Capaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sektor persampahan perkotaan yang telah dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo, Legoknangka; Penataan Regional Leuwigajah; Perencanaan TPPAS Regional Ciayumajakuning; Studi Penetapan Lokasi dan Kajian Lingkungan TPPAS Bekarpur; Operasional TPK Sarimukti, Perencanaan dan Penanganan Persampahan di Daerah Aliran Anak Sungai Citarum. Tidak lupa bantuan keuangan pengadaan kendaraan pengangkut sampah diperlukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan persampahan perkotaan dan upaya optimalisasi 3R di masyarakat dan ditunjang dengan mekanisme pelayanan persamaan melalui pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.

2.3.2.4 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15 Tantangan Tujuan Kota & Permukiman yang Berkelanjutan

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
11. MEMBUAT KOTA DAN PEMUKIMAN PENDUDUK YANG INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN	<ol style="list-style-type: none"> Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau masih rendah Dampak Lingkungan Perkotaan masih ditunjukkan oleh rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani 	<ol style="list-style-type: none"> Sulitnya percepatan untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan terutama persampahan memerlukan komitmen berbagai pihak, 	<ol style="list-style-type: none"> Perwujudan sistem perkotaan nasional (SPN) percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni Pembangunan kota hijau yang

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
			berketahanan iklim dan bencana 4) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal 5) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan,

2.3.3 Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

2.3.3.1 Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dan Tertangani sesuai Peraturan Perundangan

Pada tahun 2020 ditargetkan pencapaian pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan indikator:

a. Jumlah Peserta PROPER Yang Mencapai Minimal Ranking BIRU

Untuk memantau dan mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi (insentif dan disinsentif reputasi serta produksi bersih) digunakan indikator jumlah peserta Proper minimal ranking Biru adalah banyaknya peserta Proper ranking Biru ditambah dengan banyaknya peserta Proper ranking Hijau ditambah dengan banyaknya peserta Proper ranking Emas yang dinyatakan dengan satuan perusahaan.

Karena bahaya yang ditimbulkan, limbah ini harus dikelola sebelum dibuang ke tempat pembuangan. Diantara ciri-ciri limbah B3 yaitu mudah terbakar, mudah

meledak, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, mudah bereaksi dan bersifat karsinogenik.

Kondisi jumlah peserta Proper minimal ranking Biru adalah banyaknya peserta Proper ranking Biru di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebanyak 197 perusahaan dan Tahun 2016 meningkat menjadi 372 perusahaan (DLH, 2017). Indikator ini seharusnya dari tahun ke tahun selalu naik sesuai dengan perkembangan pembangunan di Jawa Barat.

2.3.3.2 Mengurangi Produksi Limbah

Target produksi limbah pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali dengan indikator:

a. Timbunan sampah yang didaur ulang

Untuk memantau pengelolaan sampah yang didaur ulang guna mengurangi, membatasi dan memanfaatkan kembali timbunan sampah, sebagai upaya penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, digunakan indikator jumlah timbunan sampah yang didaur ulang. Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang adalah jumlah timbunan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbunan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.

Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang di Jawa Barat pada Tahun 2015 tercatat sebanyak 30 persen, dan pada tahun 2016 terjadi kenaikan menjadi 34 persen (Disperkim, 2017). Timbunan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah (perumahan, komersil, perkantoran konstruksi dan pembongkaran, industri dan pertanian) di wilayah tertentu per satuan waktu (DPU, 1999). Timbunan sampah sangat diperlukan untuk

menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, fasilitas recovery material, dan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-masing komponen yang terdapat pada buangan padat dan distribusinya, biasanya dinyatakan dalam persentase berat (% berat). Komposisi sampah dikelompokkan atas sampah organik (sisa makanan, kertas, plastik, kain (tekstil), karet, sampah halaman, kayu, dan lain-lain) dan sampah anorganik (kaca, kaleng, logam, dan lain-lain).

b. Jumlah Fasilitas Publik Yang Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) Dan Teregister

Pelayanan yang bermutu dan berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus. Pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah dalam pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diimplementasikan melalui berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mendukung upaya pencapaian 100% SPM di Jawa Barat.

2.3.3.3 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16 Tantangan Tujuan Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan tertangani sesuai peraturan perundangan yang ditunjukkan oleh masih rendahnya jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU 2. Dalam rangka mengurangi produksi limbah ditunjukkan oleh masih rendahnya sampah yang didaur ulang. 3. Masih perlunya peningkatan fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan masyarakat (SPM) dan teregister 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan 2) Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah 3) Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat mengenai manfaat produk tersebut 4) Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur 5) Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 6) Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan 7) Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah 8) Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat mengenai manfaat produk tersebut 9) Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur 10) Pengembangan peraturan dan standar

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
			pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan

2.3.4 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

2.3.4.1 Memperkuat Kapasitas Ketahanan dan Adaptasi terhadap Bahaya Terkait Iklim dan Bencana Alam di Jawa Barat

Untuk memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di Jawa Barat, terdapat dua indikator yaitu:

a. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah

Ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta parapihak lainnya ke dalam strategi PRB daerah (provinsi/kabupaten/kota), merupakan alat untuk memantau indikator pengurangan risiko bencana. Yaitu dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional dan daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.

Pada tahun 2015 BPBD Provinsi Jawa Barat telah membuat lima dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat provinsi dan Tahun 2016 telah membuat 5 (lima) dokumen PRB.

b. Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana). Manfaat dari indikator ini adalah: Memantau jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak akibat bencana dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana.

Kondisi jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana di Jawa Barat pada Tahun 2016 sebanyak 325 per seribu orang.

2.3.4.2 Antisipasi Perubahan Iklim

Untuk mengantisipasi perubahan iklim diperlukan mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

a. Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia

Dokumen *Biennial Update Report* (BUR) adalah dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional serta kebutuhan dan dukungannya. Indikator ini bermanfaat untuk menunjukkan adanya kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta capaian Jawa Barat dalam menangani perubahan iklim yang dikomunikasikan ke tingkat nasional dan internasional.

Kondisi Dokumen *Biennial Update Report* (BUR) di Jawa Barat pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 masing-masing sebanyak satu dokumen (DLH, Jawa barat, 2017).

b. Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah. Laporan penurunan emisi GRK tahunan adalah dokumen pelaporan penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan RAN GRK dan RAD GRK untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah.

Kondisi Dokumen penurunan gas rumah kaca di Jawa Barat pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 masing-masing sebanyak satu dokumen (DLH, Jawa barat, 2017).

c. Jumlah kota/kabupaten yang memiliki RAD-GRK

Jumlah kota/kabupaten yang memiliki RAD-GRK sebanyak 2 kabupaten pada Tahun 2017. Selanjutnya RAD tersebut untuk seluruh Kab.kota akan dituntaskan pada Tahun 2023.

2.3.4.3 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Penanganan Perubahan Iklim

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan penanganan perubahan iklim adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17 Tantangan Tujuan Penanganan Perubahan Iklim

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	1. Masih rendahnya kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di Jawa Barat yang ditunjukkan oleh masih minimnya	1) Peningkatan kapasitas pusat dan daerah untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan bencana alam.	1) Peningkatan pelibatan sektor baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi dan pengalokasian pendanaannya;

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
	<p>poduk/dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)</p> <p>2. Masih tingginya korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana di Jawa Barat pada Tahun 2016 sebanyak 325 per seribu orang.</p> <p>3. Belum optimalnya antisipasi perubahan iklim yang ditunjukkan oleh Kondisi Dokumen Biennial Update Report (BUR) di Jawa Barat pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 masing-masing sebanyak satu dokumen (DLH, Jawa barat, 2017). Dan Dokumen penurunan gas rumah kaca di Jawa Barat pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 masing-masing sebanyak satu dokumen (DLH, Jawa barat, 2017).</p> <p>4. Jumlah kota/kabupaten yang memiliki RAD-GRK sebanyak 2 kabupaten pada Tahun 2017</p>		<p>2) Standarisasi kegiatan penurunan emisi di setiap sektor.,</p> <p>3) Meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK;</p> <p>4) Pengembangan dan penerapan insentif fiskal;</p> <p>5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK dan adaptasi;</p> <p>6) Pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi terkait dengan REDD+, baik yang berdampak langsung, maupun tidak langsung pada penurunan emisi GRK;</p> <p>7) Pengembangan indeks dan indikator kerentanan, serta penguatan sistem informasi iklim dan cuaca;</p> <p>8) Pelaksanaan kajian kerentanan dan peningkatan ketahanan (resiliensi) pada sektor yang sensitive serta pelaksanaan pilot adaptasi;</p> <p>9) Sosialisasi RAN-API dan peningkatan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi.</p>

2.3.5 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Laut juga sebagai sumber daya alam potensial perlu di jaga kelestariannya. Kerusakan biota laut dan pantai disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang mengancam kelestarian laut dan pantai, disamping itu terjadinya abrasi disebabkan telah hilangnya hutan bakau di sekitar pantai yang merupakan pelindung alami terhadap gempuran ombak.

2.3.5.1 Mengelola dan Melindungi Ekosistem Laut dan Pesisir Secara Berkelanjutan

Target mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan ditujukan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif, dengan indikator :

a. Tersedianya Kerangka Kebijakan dan Instrumen Terkait Penataan Ruang Laut Nasional

Indikator ini ditujukan untuk mendukung pengelolaan ruang laut dalam melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal; memanfaatkan potensi sumber daya dan/ atau kegiatan di wilayah laut yang berskala Jawa Barat; serta mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, jasa. Pada tahun 2015 indikator ini telah dibuat satu dokumen.

2.3.5.2 Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan

Target melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia, dengan indikator:

a. Jumlah luas kawasan konservasi perairan

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan (Permen-KP no.14/Permen-KP/2016

tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan). Jumlah kawasan konservasi perairan adalah luas keseluruhan kawasan konservasi perairan teritorial pada periode waktu tertentu, dinyatakan dalam ha.

Kondisi jumlah luas kawasan konservasi perairan di Jawa Barat pada Tahun 2016 mencapai 32,253.99 ha dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 34.960,08 ha (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2018).

2.3.5.3 Akses Untuk Nelayan Skala Kecil (*Small-Scale Artisanal Fishers*) Terhadap Sumber Daya Laut dan Pasar

Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar, dengan indikator:

a. Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil

Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil, menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi hak akses nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar sebagai lahan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kegiatan usaha perikanan, khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Tradisional. Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Tradisional sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan dan bahan baku industri perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kondisi Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil di Jawa Barat pada Tahun 2011 sebanyak satu regulasi (KKP, 2017).

b. Jumlah Nelayan yang Terlindungi

Indikator ini diperlukan untuk memantau dan mengukur peningkatan jumlah nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam yang mendapat perlindungan dan bantuan (1) sarana dan prasarana untuk mengembangkan usaha, (2) kepastian usaha, (3) penguatan kelembagaan, (4) sistem pembiayaan kelembagaan, (5) perlindungan dari risiko alam, perubahan iklim dan pencemaran, serta (6) jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergarapan (UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam).

Jumlah nelayan yang terlindungi adalah jumlah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergarapan.

Kondisi jumlah nelayan yang dilindungi di Jawa Barat pada Tahun 2016 mencapai Kondisi jumlah luas kawasan konservasi perairan di Jawa Barat pada Tahun 2016 mencapai 35.000 orang (KKP, 2017).

2.3.5.4 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Ekosistem Lautan

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan ekosistem lautan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18 Tantangan Tujuan Ekosistem Lautan

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
14. EKOSITEM LAUT	1. Ekosistem Laut Dan Pesisir belum dikelola dan dilindungi secara baik dan optimal yang ditunjukkan oleh masih rendahnya perlindungan	1) Kualitas SDM 2) Sarana prasarana 3) Regulasi	1) Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung konektivitas laut; 2) Peningkatan kawasan

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
	<p>n sumber daya dan lingkungan yang berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;</p> <p>2. Belum termanfaatkannya potensi sumber daya dan/ atau kegiatan di wilayah laut secara optimal</p> <p>3. Masih rendahnya kawasan konservasi perairan di Jawa Barat pada Tahun 2016 mencapai 32,253.99 ha</p>		<p>konservasi perairan</p> <p>3) Peningkatan sdm, iptek, wawasan dan budaya bahari;</p>

2.3.6 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Ekosistem Darat merupakan suatu sistem yang terbangun dari hubungan timbal balik antar unsur biotik (hidup) dan unsur abiotik (lingkungannya) yang perlu dilestarikan. Pelestarian ekosistem darat terdiri atas:

2.3.6.1 Menjamin Pelestarian, Restorasi Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Dari Ekosistem Daratan Dan Perairan Darat Serta Jasa Lingkungannya

Untuk menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional, diperlukan indikator:

a. Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan

Untuk memantau perkembangan tutupan kawasan hutan dan lahan. Perubahan kawasan hutan dan lahan yang tertutup pepohonan khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak legal seperti penebangan liar dan lain-lain dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup, diperlukan indikator proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan adalah perbandingan antara luas kawasan hutan

dan lahan yang tertutup vegetasi terhadap total luas daratan yang dinyatakan dalam persentase, tidak termasuk perairan umum seperti sungai besar dan danau di suatu wilayah.

Kondisi indikator proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 22,02 persen, dan pada Tahun 2016 masih tetap sebesar 22,06 persen (Dinas Kehutanan Jawa Barat, 2017).

b. Luas Taman Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 3 Tahun 2012, di Jawa Barat telah memiliki Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) sebanyak 121,5 ha, sampai dengan Tahun 2015 telah terbangun 151,2 ha. Kelembagaan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.1/Kep.1085/Yansos/2015 tentang Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat dengan instansi Pembina adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi.

2.3.6.2 Luas Kawasan Terdegradasi yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya

Membangun kawasan terdegradasi yang dipulihkan ekosistemnya adalah untuk menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi, dengan indikator:

a. Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan

Manfaat dari indikator ini adalah memantau peningkatan luas lahan kritis yang direhabilitasi guna memulihkan fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS) (Permenhut No. P.9/ menhut-II/2013 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan).

Kawasan konservasi yang berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sampai saat ini masih menghadapi ancaman yang serius.

Kondisi indikator Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 9.24 persen, dan pada Tahun 2016 masih tetap sebesar 9.24 persen (Dinas Kehutanan Jawa Barat, 2017).

b. Proporsi Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan

Unrtuk memantau peningkatan luas lahan kritis yang direhabilitasi guna memulihkan fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS, digunakan indikator proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan lahan kritis. Proporsi ini adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS) (Permenhut No. P.9/ menhut-II/2013 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan).

Kondisi indikator proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan lahan kritis di Jawa Barat pada Tahun 2016 sebesar 9,24 persen dan dapat diturunkan menjadi 8,78 persen pada tahun (Dinas Kehutanan Jawa Barat, 2017).

2.3.6.3 Tantangan dalam Menuju Tercapainya Tujuan Ekosistem Daratan

Tantangan yang akan dihadapi dalam menuju tercapainya tujuan ekosistem daratan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19 Tantangan Tujuan Ekosistem Daratan

TUJUAN/GOALS	KONDISI	TANTANGAN	STRATEGI
15. EKOSISTEM DARATAN	<ol style="list-style-type: none"> Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan di Jawa Barat masih rendah yaitu 22,02% pada Tahun 2015. Masih rendahnya Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) yaitu baru mencapai 121,5 ha pada Tahun 2015 Masih tingginya Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 9.24 persen 	<ol style="list-style-type: none"> Tingginya entisitas penebangan hutan lindung Sulitnya menerapkan Perda tentang kawasan lindung di DAS yang disebabkan oleh tekanan penduduk dan ekonomi. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan instrumen penegakan hukum; Peningkatan efektivitas penegakan hukum; Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan

2.4 BAGIAN IV PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA

2.4.1.1 Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan yang Tangguh

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dengan target sebagai berikut:

2.4.1.2 Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan

Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak merupakan target dari tujuan menciptakan perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, khususnya menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Indikator dari target ini yang akan dilaksanakan Jawa Barat adalah :

a. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun

Indikator ini melihat pengalaman seumur hidup (*life-time prevalence*) sebagai anak atau ketika berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pada Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA) respondennya adalah laki-laki dan perempuan muda yang berusia 18-24 tahun yang telah mengalami kekerasan seksual pada usia sebelum 18 tahun.

Kekerasan seksual pada anak di Jawa Barat mengalami peningkatan, di mana ada sekitar 346 kasus sejak tahun 2016 hingga 2017. pada tahun 2015 sebesar 33,5 persen perempuan rentang usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan dan turun pada tahun 2016 menjadi 29,15 persen. Kekerasan fisik dan seksual lebih banyak dialami perempuan yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 36,3% sementara di pedesaan hanya sebanyak 29,8% (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017).

2.4.1.3 Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua

Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua merupakan target dari tujuan menciptakan perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh dengan indikator :

a. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud orang miskin adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. (Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui berapa besarnya pencari bantuan hukum dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum sesuai haknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Indikator ini juga untuk mengukur efektifitas pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan penanganan yang diberikan.

Pada tahun 2015 kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi dari pemerintah sebanyak 40 orang dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 54 orang (Biro Hukum Setda Jawa Barat, 2017).

2.4.1.4 Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Membangun kelembagaan yang tangguh ditujukan untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dengan indikator:

a. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, provinsi

Jawa Barat berturut-turut sejak tahun 2015 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTA)

- b. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)** Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Tahun 2015 80 persen A dan Tahun 2016 82 persen A
- c. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik** Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). Tahun 2015 50,41 CC; Tahun 2016 67m63 B, Tahun 2017 sebanyak 72 persen BB.

2.4.1.5 Pengambilan Keputusan Yang Responsif, Inklusif, Partisipatif dan Representatif

Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan dengan indikator:

- a. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Manfaat dari indikator ini adalah Untuk mengetahui perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik.

Kondisi Jawa Barat dalam indikator ini adalah perempuan yang mewakili masyarakat di DPRD Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 persen (Setwan DPRD Jawa Barat, 2016).

- b. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)**

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II. Indikator ini berguna untuk mengetahui

perkembangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif.

Kondisi Jawa Barat dalam indikator ini adalah perempuan yang menduduki jabatan di pemerintahan lebih dari 35 persen (Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat, 2016).

c. Indeks Lembaga Demokrasi

Indeks Lembaga Demokrasi adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI yang mengukur kinerja lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah dan peradilan yang independen. Indikator ini bermanfaat untuk mengukur kinerja lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen.

Capaian indeks lembaga demokrasi di Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 51,37 persen (BPS Jawa Barat,2016).

d. Indeks Kebebasan Sipil

Indeks Kebebasan Sipil adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Indikator ini bermanfaat untuk mengukur kebebasan sipil yang dilihat hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap keempat variabel kebebasan yang diukur, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi.

Capaian indeks kebebasan sipil di Jawa barat pada Tahun 2015 mencapai 79,30 persen (BPS Jawa Barat,2016).

e. Indeks Hak Politik

Indeks Hak-hak Politik adalah indeks yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan salah satu aspek dalam pengukuran IDI yang mengangkat hak politik sebagai indikator demokrasi politik yang cukup lengkap. Hak-hak Politik adalah hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Indikator ini diperlukan untuk mengukur Hak-hak Politik warga negara baik dalam hal memilih dan dipilih serta Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan pembangunan. Mengukur kesetaraan warga dalam menggunakan hak pilihnya dan ikut dipilih serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di pemerintahan dan lembaga legislatif.

Capaian indeks hak-hak politik di Jawa Barat pada Tahun 2015 mencapai 81,89 persen.

2.4.1.6 Identitas yang Syah

Identitas yang syah merupakan pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran, dengan indikator:

a. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Manfaat dari indikator ini adalah Untuk memenuhi akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran.

Capaian Jawa Barat untuk persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah sebesar 72 persen (Disdukcapil Jawa Barat, 2017).

b. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

BAB III
TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN
PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1 BAGIAN I PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

3.1.1 Tujuan 1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

3.1.1.1 Kebijakan Tujuan 1 di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam menanggulangi kemiskinan tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon mengakhiri kemiskinan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu penanggulangan kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 9. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan, secara global terdapat 7 target yaitu :

- (1) Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.

- (2) Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- (3) Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- (4) Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- (5) Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana
- (6) Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
- (7) Target 1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

Dari 7 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 5 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 4 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target no 1.1 tidak dapat dilaksanakan karena merupakan mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari, dan

Target 1.b belum mendapatkan proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan. Sedangkan Target 1.a belum dapat dilaksanakan karena indikator-indikator dari target tersebut belum tersedia data secara regional.

Ke 4 target yang akan menyelesaikan Tujuan 1 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 1.2 terdiri atas 1 (satu) indikator; Target 1.3 terdiri atas 3 (tiga) indikator; Target 1.4 terdiri atas 11 (sebelas) indikator; Target 1.5 terdiri atas 1 (satu) indikator.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.1 tentang target pencapaian indikator Tujuan 1 tanpa kemiskinan. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 1.2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 9.57 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 4.69 persen.
- (2) Indikator 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 62.12 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 77.16 persen.
- (3) Indikator 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, pada tahun 2016 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 37.64 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 43.24 persen.

Tabel 3.1 Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional													
.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Persentase	9.57	8.77	7.83	7.32	6.97	6.27	5.74	5.21	4.69
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.													
*	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persentase	60	65	70	85	85	90	95	95	95
*	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja	Persentase	12.21	12.06	12.63	13.05	14.04	15.45	17.85	21.66	27.87
.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinsos	Orang	599.696	2,825,431	4,139,860	6,265,771	7,116,015	7,201,200	7,201,200	7,201,200	7,201,200
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.													
*	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	BPS	Persentase	79.57	78.09	79.57	81.05	82.53	84.01	85.49	86.97	88.45

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
*	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan	Persentase	93.4 (2016)	93.4	93.8	94.3	94.8	95.3	95.5	96	96.3
*	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BKKBN Jawa Barat	Persentase	74.56	74.88	75.3	76.8	78.3	79.8	81.3	82.8	84.3
.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	BPS	Persentase	67.20	67.62	70.50	73.38	76.26	79.14	82.02	84.9	87.78
.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	BPS	Persentase	59.43	63.79	64.40	65.01	65.62	66.23	66.84	67.45	68.06
.	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	BPS	Persentase	13.73	10.83	8.08	5.33	2.58	0	0	0	
*	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persentase	95.04	95.11	96.03	96.95	97.87	98.79	99.71	100.63	101.55
*	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persentase	82.13	82.44	77.87	82.44	87.01	91.58	96.15	100.72	105.29
*	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persentase	45.89	52.18	57.59	63	68.41	73.82	79.23	84.64	90.05
*	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahundengan kepemilikan akta kelahiran.	BPS	Persentase	78,06	79.25	80.22	83	86	89	93	95	97
*	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	BPS	Persentase	99,73	99.75	99.78	99.8	99.86	99.88	99.9	99.93	99.95

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana													
.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	5	5	5	5	7	7	7	7	7

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.1.2 Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

3.1.2.1 Kebijakan Tujuan 2 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGS) pada Tujuan 2 yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu: (1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan; (2) Meningkatkan ekonomi pertanian; (3) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan; dan (4) Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan, terdapat dalam *Comount Goal* (CG). Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan tanpa kelaparan akan mengacu kepada background studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 2 yaitu tanpa kemiskinan, secara global terdapat 8 target yaitu :

- (1) Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
- (2) Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan

memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

- (3) Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.
- (4) Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
- (5) Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.
- (6) Target 2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.
- (7) Target 2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat *the Doha Development Round*.

- (8) Target 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi *volatilitas* harga pangan yang ekstrim.

Dari 8 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 5 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 4 target. Seperti halnya Jawa Barat pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

Sedangkan Target 2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, Target 2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat *the Doha Development Round*, dan Target 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi *volatilitas* harga pangan yang ekstrim, belum dapat dilaksanakan karena indikator-indikator dari target tersebut belum tersedia data secara regional.

Kelima target yang akan menyelesaikan Tujuan 2 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli

dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 2.1 terdiri atas 3 (tiga) indikator; Target 2.2 terdiri atas 6 (enam) indikator; Target 2.3 terdiri atas 1 (satu) indikator; Target 2.4 terdiri atas 1 (satu) indikator; Target 2.5 terdiri atas 2 (dua) indikator.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.2 tentang target pencapaian indikator Tujuan 2 tanpa kelaparan. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 11.3 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 10.8 persen.
- (2) Indikator 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 29.23 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 12.84 persen.
- (3) Indikator 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari, pada tahun 2016 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 11.08 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 11.25 persen.

Tabel 3.2 Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.													
*	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	BPS	Persentase	11.3	10.8	10.3	9.8	9.3	8.8	8.3	7.8	7.3
.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DKPP	Presentase desa	29.23	12.84	10.5	10.5	9.5	9.5	8.5	8.5	7.5
*	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	BPS	Persentase	11.08	11.25	11.42	11.59	11.76	11.93	12.1	12.27	12.44
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.													
.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	BPS	Persentase	34.58 (2016)	34.58	34.56	34.53	34.51	34.49	34.47	34.45	34.43
.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	BPS	Persentase	11.91 (2016)	11.91	12.11	12.29	12.47	12.63	12.79	12.94	13.08
*	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Kementerian Kesehatan RI	Persentase	25.56	25.1	24.8	23.2	22.3	21.4	19.3	18.7	17.5
*	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	Persentase	37.1	35.2	33.7	31.5	29.4	27.1	24.9	23.2	20

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
*	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	BPS	Persentase	59.82	59.13	59.82	60.51	61.2	61.89	62.58	63.27	63.96
.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DKPP	Persentase	81	84.3	85.2	85	85	86	87	88	89
Target 2.3 Pada tahun 2030, meng gandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.													
*	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS	rupiah per tenaga kerja	42,802.73	46,621.65	50,817.60	55,391.18	60,376.39	65,810.26	71,733.19	78,189.17	85,226.20
Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.													
.	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DKPP	komoditas ternak	20	22	24	26	28	30	32	36	38
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian													
.	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	DKPP	Persentase	5	6	8	11	11	12	14	15	17
.	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	DKPP	Persentase	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.1.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

3.1.3.1 Kebijakan Tujuan 3 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) pada Tujuan 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon Tujuan 3 SDGs tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu: (1) meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang terdapat pada *comount goal* (CG) 2; dan (2) menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan yang terdapat pada *comount goal* (CG) 9. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, secara global terdapat 5 target yaitu :

- (1) Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- (2) Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.
- (3) Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

- (4) Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- (5) Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
- (6) Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
- (7) Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
- (8) Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
- (9) Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.
- (10) Target 3.a Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control* WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.
- (11) Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

- (12) Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.
- (13) Target 3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Dari 13 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 11 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 8 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas, dan 3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Kedelapan target yang akan menyelesaikan Tujuan 3 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 3.1 terdiri atas 3 (tiga) indikator ; Target 3.2 terdiri atas 4 (empat) indikator ; Target 3.3 terdiri atas 2 (dua) indikator ; Target 3.4 terdiri atas 3 (tiga) indikator ; Target 3.7 terdiri atas 2 (dua) indikator dengan 3 (tiga) program; Target 3.8 terdiri atas 2 (dua) indikator dengan 1 (satu) program; Target 3.a terdiri atas 1 (satu) indikator ; Target 3.b terdiri atas 1 (satu) indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.3 tentang target pencapaian indikator Tujuan 3 tanpa kehidupan sehat dan sejahtera. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 3.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI), pada tahun 2016 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 89 100.000/kelahiran hidup dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 82 100.000/kelahiran hidup.
- (2) Indikator 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup., pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 38 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 29 persen.
- (3) Indikator 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk., pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 60 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 95 persen.

Tabel 3.3 Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.													
.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	100.000/kelahiran hidup	89 (2016)	89	88	87	86	85	84	83	82
.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Persentase	89,18				89	90	91	92	93
*	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	BPS	Persentase	79.57	78.09	79.57	81.05	82.53	84.01	85.49	86.97	88.45
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.													
.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Persentase	38	35	34	34	33	32	31	30	29
.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	1000/ kelahiran hidup	17	14	14	13	13	12	12	11	11
*	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	1000/ kelahiran hidup	4.19	4.01	3.63	3.25	5.2	5	4.8	4.6	4.4
.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Persentase	90.5	80	85	90	90	90.5	91	91.5	92
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.													
*	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	Persentase	1.44	0.41	0.67	0.57	0.46	0.45	0.31	0.22	0.1
.	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kabupaten / Kota	21,2 (2013)	23	23	23	24	24	25	25	25

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.													
.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	Dinas Kesehatan	Persentase	7.2 (2013)	6.95	6.7	6.45	6.2	5.95	5.7	5.45	5
.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Persentase	31.56	30.16	28.76	27.36	32.06	32	31.94	31.88	31.84
.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persentase	8.83	8.33	7.83	7.33	6.83	6.33	5.83	5.33	4.83
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.													
.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BKKBN	Persentase	74.56	74.88	75.3	76.8	78.3	79.8	81.3	82.8	84.3
.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	BPS	Persentase	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.16	2.16	2.16	2.16
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.													
.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Persentase	60	65	70	85	85	90	95	95	95
.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Persentase	60	65	70	85	85	90	95	95	95
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.													
.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	Persentase	43.98	40.28	40.71	41.12	41.51	41.87	42.22	42.56	42.87
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.													
.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Persentase	75.5 (2014)	77.94	80.38	82.82	90	95	95	95	95

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.1.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

3.1.4.1 Kebijakan Tujuan 4 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pendidikan tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 4 yaitu Pendidikan berkualitas. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon meningkatkan kualitas pendidikan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 9. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 4 yaitu pendidikan berkualitas, secara global terdapat 5 target yaitu :

- (1) Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- (2) Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
- (3) Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

- (4) Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan *disparitas gender* dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- (5) Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan *literasi* dan *numerasi*.

Dari 10 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 9 target (STNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 5 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target 4.2 pada indikator 4.2.1. Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin, 4.2.2. Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin. Target 4.3. pada indikator 4.3.1. Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan nonformal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin. Target 4.6 pada indikator 4.6.1. Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin. Dan target 4.7. Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kelima target yang akan menyelesaikan Tujuan 4 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan

tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 4.1. terdiri atas 7 (tujuh) indikator ; Target 4.2. terdiri atas 1 (satu) indikator ; Target 4.3. terdiri atas 1 (satu) indikator ; Target 4.5 terdiri atas 1 (satu) indikator dengan..... program; Target 4.6 terdiri atas 1 (satu) indikator dengan..... program.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.4 tentang target pencapaian indikator Tujuan 4 meningkatkan kualitas pendidikan. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 4.1.1.(f). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. Tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 62.11 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 104.4 poin.
- (2) Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 56.73 poin dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 77.16 poin.
- (3) Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun. Tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 98,01 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 100 persen.

Tabel 3.4 Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.													
.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud	Persentase	65.5 (2016)	65.5	69.7	73.9	78.1	82.3	86.5	90.7	95
.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud	Persentase	72.8 (2016)	72.8	76	79.2	82.4	85.6	88.8	92	95
.	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud	Persentase	68 (2016)	68	71.8	75.6	79.4	83.2	87	90.8	95
.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persentase	109.83	108.07	106.17	106.18	106.19	106.2	106.21	106.22	106.23
.	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	Persentase	98.91	99.86	99.96	100.93	101.9	102.87	103.84	104.81	105.78
.	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	Dinas Pendidikan	Persentase	62.11	67.56	76.62	81.25	85.88	90.51	95.14	99.77	104.4
.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	BPS	Persentase	8.42	8.60	8.71	8.82	8.93	9.04	9.15	9.26	9.38
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.													
.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	BPS	Persentase	64.11	65.71	68.67	71.63	74.59	77.55	80.51	83.47	86.43
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.													
.	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	BPS	Persentase	17,47	19,19	23.29	24.59	25.90	27.20	28.50	29.81	31.11

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.													
.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	BPS	Persentase	97.68	97.82	97.96	98.1	98.24	98.38	98.52	98.66	98.8
.		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/sederajat;		79.55	79.76	79.97	80.18	80.39	80.6	80.81	81.02	81.23	
.		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/sederajat;		56.73	56.92	57.11	57.3	57.49	57.68	57.87	58.06	58.25	
.		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		17.47	19.19	20.91	22.63	24.35	26.07	27.79	29.51	31.23	
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.													
.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Kesehatan	Persentase	98,01	98.22	98.57	98.92	99.27	99.62	99.97	100	100

3.1.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender

3.1.5.1 Kebijakan Tujuan 5 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 5 yaitu kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu penanggulangan kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 9. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk kesetaraan gender akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 5 yaitu kesetaraan gender, secara global terdapat 5 target yaitu :

- (1) Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
- (2) Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- (3) Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- (4) Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Dari 9 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 6 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 4 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target 5.3. pada indikator 5.3.2 persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur; Target 5.4 pada indikator 5.4.1. Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi; Target 5.a pada indikator 5.a.1. (1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan. dan target 5.c.2. Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol; Sedangkan Target 5.c pada indikator 5.c.1 ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Keempat target yang akan menyelesaikan Tujuan 5 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 5.1 terdiri atas 1 indikator ; Target 5.2 terdiri atas 2 (dua) indikator ; Target 5.3 terdiri atas 2 (dua) indikator ; Target 5.5 terdiri atas 2 indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.5 tentang target pencapaian indikator Tujuan 1 tanpa kemiskinan. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada

pada 4 dokumen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 1 dokumen.

- (2) Indikator 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 95.61 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 100 persen.
- (3) Indikator 5.5.1* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 40.26 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 45.74 persen.

Tabel 3.5 Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun													
.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DP3AKB	dokumen	4	0	2	0	1	0	1	0	1
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.													
.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DP3AKB	Persentase	0.01%	0.01%	0.0044%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DP3AKB	Persentase	95.61	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.													
.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	BPS	Persentase	46 (2016)	46	45	44	43	42	41	40	39
.	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persentase	67,56	76.62	81.25	85.88	90.51	95.14	99.77	104.4	109.03
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.													
.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DP3AKB	Persentase	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32
.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DP3AKB	Persentase	40.26	44.12	44.39	44.65	44.89	45.12	45.34	45.55	45.75

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.1.6 Integrasi Indikator RPJMD terhadap Indikator SDGs Pilar Sosial

Hasil akhir dari RAD SDGs ini adalah mengintegrasikan indikator RPJMD terhadap Indikator SDGs yang terdapat pada matrik satu RAD. Berdasarkan telaahan dan diskusi antara tim sekretariat dengan Bidang Perencana Bappeda dengan menggunakan bahan indikator SDGs dan Permendagri nomor 86, indikator RKPD 2019, serta data base program dari bidang perencana diperoleh sandingan seperti pada Tabel 3.6. Sandingan tersebut mengacu kepada Meta Data SDGs dan cara perhitungan yang terdapat pada Permebdagri no 86.

Tabel 3.6 Sandingan Indikator RPJMD Terhadap Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Pilar Sosial

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	A.1.AKM.7	Tingkat Kemiskinan	IKU	BPS
2	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	IKP	Dinas Kesehatan
3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	A.2.UWND.1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	IKP	BPS
4	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	A.2.UWD.6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	IKK	Dinsos
5	1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah)	A.2.UWD.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	IKK	BPS
6	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	A.2.UWD.2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	IKK	Dinas Kesehatan

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
7	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)	A.2.UWND.8.10	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	IKK	BKKBN Jawa Barat
8	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	A.2.UWD.3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	IKK	BPS
9	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	A.2.UWD.3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	IKK	BPS
10	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah)	A.2.UWD.4.6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	IKK	BPS
11	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	A.2.UWD.1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (Kewenangan Kab/Kota)		Dinas Pendidikan
12	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	A.2.UWD.1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (Kewenangan Kab/Kota)		Dinas Pendidikan
13	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	A.2.UWD.1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	IKK	Dinas Pendidikan
14	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah)	A.2.UWND.6.2	Akurasi Data Kependudukan	IKP	BPS
15	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)	A.2.UP.4.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	IKK	BPS
16	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		Tingkat Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan	IKP	BPBD
17	2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	A.1.AKM.14 A.1.AKM.15	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	IKK	BPS

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
18	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan pangan.	A.1.AKM.30	Penanganan daerah rawan pangan	IKK	DKPP
19	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari.	A.2.UWD.2.15	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	IKK	BPS
20	2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	A.1.AKM.14 A.1.AKM.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	IKK	BPS
21	2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta.	A.1.AKM.14 A.1.AKM.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	IKK	BPS
22	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ <i>wasting</i> (<i>berat badan/tinggi badan</i>) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	A.1.AKM.14 A.1.AKM.15	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	IKK	Kementrian Kesehatan RI
23	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.		Meningkatnya jumlah posyandu mandiri		Dinas Kesehatan
24	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		1. Meningkatnya jumlah posyandu mandiri 2. Prevalensi Gizi Buruk 3. Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan		BPS
25	2.2.2.(c)	(i)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan	A.2.UP.8.2	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	IKK	DKPP
26	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)		1. Produksi Pertanian (Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan) 2. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	IKP	BPS
30	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.		Tingkat kesesuaian pemfaatan ruang dengan rencana tata ruang		DKPP
	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.		Sertifikasi Varietas tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/peternakan		DKPP
	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko		Produksi Komoditas Peternakan		DKPP

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
		kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.				
31	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	A.2.UWD.2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	IKU	Dinas Kesehatan
32	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	A.2.UWD.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	IKK	Dinas Kesehatan
33	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	A.2.UWD.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	IKK	BPS
34	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	A.2.UWD.2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	IKK	Dinas Kesehatan
35	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	A.2.UWD.2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	IKK	Dinas Kesehatan
36	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	A.2.UWD.2.1	Angka Kematian Bayi	IKU	Dinas Kesehatan
37	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	A.2.UWD.2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	IKK	Dinas Kesehatan
38	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	A.2.UWD.2.26	Persentase penanganan kesehatan pada Kejadian Luar Biasa Penyakit	IKP	Dinas Kesehatan
39	3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate (TFR).</i>	A.2.UWND.8.2	Total Fertility Rate (TFR)	IKK	BPS
40	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	IKP	Dinas Kesehatan
41	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	IKP	Dinas Kesehatan

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
42	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	IKP	BPS
	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	IKP	Dinas Kesehatan
	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		Kewenangan Kab/Kota		Dinas Pendidikan
46	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		Kewenangan Kab/Kota		Dinas Pendidikan
47	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.		Kewenangan Provinsi		Dinas Pendidikan
48	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	A.2.UWD.1.0	Angka partisipasi kasar (Kewenangan Kab/Kota)		Dinas Pendidikan
49	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	A.2.UWD.1.1	Angka partisipasi kasar (Kewenangan Kab/Kota)		Dinas Pendidikan
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	A.2.UWD.1.2	APK SMA/SMK Sederajat	IKK	Dinas Pendidikan
51	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	A.1.AKM.12	Rata - rata Lama Sekolah (RLS)	IKU	BPS
	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	A.2.UWD.1.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	IKK	BPS
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	A.2.UWD.1.2	APK SMA/SMK Sederajat	IKK	
54	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).		Kewenangan Pusat		
56	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat	A.2.UWD.1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (Kewenangan Kab/Kota)		BPS
57		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/ sederajat	A.2.UWD.1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (Kewenangan Kab/Kota)		BPS

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
58		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat	A.2.UWD.1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	IKK	BPS
59		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi		Kewenangan Pusat		BPS
60	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	A.2.UWD.1.18	Angka Melek Huruf (AMH)	IKK	Dinas Pendidikan
76	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu 2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	IKP	DP3AKB
77	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	IKP	DP3AKB
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	A.2.UWND.2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	IKP	DP3AKB
79	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	A.2.UWND.8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		
80	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	A.2.UWD.1.2	Angka partisipasi kasar	IKK	Dinas Pendidikan
	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	A.2.UWND.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	IKK	DP3AKB

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	IKK	DP3AKB

3.2 BAGIAN II PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

3.2.1 Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

3.2.1.1 Kebijakan Tujuan 7 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam menyediakan energi bersih dan terjangkau tercemin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 7 yaitu menyediakan energi bersih dan terjangkau. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon menyediakan energi bersih dan terjangkau tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 3. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada background studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 7 yaitu tanpa kemiskinan, secara global terdapat 5 target yaitu :

- (1) Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
- (2) Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.
- (3) Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi d tingkat global sebanyak dua kali lipat.
- (4) Target 7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih,

dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.

- (5) Target 7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara -negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.

Dari 5 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 3 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 3 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target 7.1. pada indikator 7.1.2. Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih; Target 7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. Dan target 7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara -negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.

Ketiga target yang akan menyelesaikan Tujuan 7 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 7.1 terdiri atas 4 (empat) indikator ; Target 7.2 terdiri atas 1 (satu) indikator ; Target 7.3 terdiri atas 1 (satu) indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.7 tentang target pencapaian indikator Tujuan 7 menyediakan energi bersih dan terjangkau. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 7.1.1.* Rasio elektrifikasi, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 93.71 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 100 persen.
- (2) Indikator 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 1,120 kwh dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 1,766 kwh.
- (3) Indikator 7.2.1* Bauran energi terbarukan, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 15.77 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 15.82 persen.
- (4) Indikator 7.3.1* Intensitas energi primer, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 23.2 TOE/Milyar Rupiah dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 23.8 TOE/Milyar Rupiah.

Tabel 3.7 Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Terbarukan

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.													
.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Kementerian ESDM/ Dinas ESDM	persentase	93.71	97.84	99.87	100	100	100	100	100	100
.	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Kementerian ESDM/ Dinas ESDM	kWh	1,120	1,184	1,231	1,376	1,452	1,553	1,553	1,657	1,766
.	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	Kementerian ESDM/ Dinas ESDM	Sambungan	2,012	2,013	2,015	2,016	2,016	2,022	2,020	2,021	2,022
.	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Kementerian ESDM/ Dinas ESDM	persentase	81.45	83.89	86.33	88.77	88.77	88.77	88.77	88.77	88.77
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.													
.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Kementerian ESDM/ Dinas ESDM	persentase	15.77	15.67	15.95	16.24	17.30	14.37	15.07	15.67	15.82
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.													
.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Kementerian ESDM/ Dinas ESDM	TOE/Milyar Rp.	23.2	23.9	24.1	24.2	24.4	24.3	24.3	24.1	23.8

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.2.2 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

3.2.2.1 Kebijakan Tujuan 8 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 8 yaitu peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon penyerapan tenaga kerja yang layak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Keamanan, dengan meningkatkan Ekonomi pertanian dan Non Pertanian yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 4, 5 dan 9. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 8 yaitu tanpa kemiskinan, secara global terdapat 12 target yaitu :

- (1) Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
- (2) Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

- (3) Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
- (4) Target 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan *the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production*, dengan negara-negara maju sebagai pengarah."
- (5) Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya."
- (6) Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
- (7) Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya."
- (8) Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya."
- (9) Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal."
- (10) Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua."

- (11) Target 8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui *the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance* bagi negara kurang berkembang."
- (12) Target 8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan *the Global Jobs Pact of the International Labour Organization*."

Dari 12 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 8 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 6 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan; Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya; Target 8.8 pada indikator 8.8.1. Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran dan 8.8.2. Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait; Target 8.10 pada indikator 8.10.2. Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak; Target 8.a pada indikator 8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui *the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance* bagi negara kurang berkembang dan 8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan *menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization*.

Ke 6 target yang akan menyelesaikan Tujuan 8 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 8.1 terdiri atas 2 (dua) indikator ; Target 8.3 terdiri atas 4 (empat) indikator ; Target 8.5. terdiri atas 3 (tiga) indikator ; Target 8.6 terdiri atas 1 (satu) indikator ; Target 8.9 terdiri atas 2 (dua) indikator . Target 8.10 terdiri atas 1 (satu) indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.8 tentang target pencapaian indikator Tujuan 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 8.1.1.* Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK), pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 5.67 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 7persen.
- (2) Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 8.57 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 1.75 persen.
- (3) Indikator 8.5.1.* Upah rata-rata per jam pekerja. pada tahun 2016 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 13,483 rupiah dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 23,834 rupiah.
- (4) Indikator 8.6.1.* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). pada tahun 2016 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 5.33 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 2.46 persen.

Tabel 3.8 Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.													
*	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)	BPS	Persentase	5.04	5.67	5.29	>5	>5	>5	>5	>5	>5
*	8.1.1.(a)	PDRB per kapita. (ADHB)	BPS	Juta Rupiah	32.65	34.88	37.18	39.48	41.78	44.08	46.38	48.68	50.98
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.													
.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS	Persentase	8.57	7.33	6.40	5.47	4.54	3.61	2.68	1.75	0.82
.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS	Persentase	49.61	51.36	50.22	51.36	52.5	53.64	54.78	55.92	57.06
.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	BPS	Persentase	2.80	3.60	3.01	3.60	4.19	4.78	5.37	5.96	6.55
.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	BJB	Orang	8.365	14.868	11.996	16.352	19.224	22.096	24.968	27.84	30.712
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.													
.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Disnakertrans	Rupiah	13.483	15.339	16.604	18.050	19.496	20.942	22.388	23.834	25.280
.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis	BPS	Persentase	8.72	8.89	8.55	8.72	8.38	8.55	8.21	8.38	8.04

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		kelamin dan kelompok umur.											
	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS	Persentase	8.31	6.18	6.30	8.31	6.18	6.30	8.31	6.18	6.30
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.													
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Disnakertrans	Persentase	5.33	5.79	4.30	2.76	2.68	2.60	2.53	2.46	2.39
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.													
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Parbud Jabar Dalam Angka	orang per tahun	2,027,629	4,428,094	4,984,035	5,482,439	6,030,682	6,633,751	7,297,126	8,026,838	8,829,522
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Parbud Jabar Dalam Angka	orang per tahun	56,334,706	58,728,666	59,644,070	65,608,477	72,169,325	79,386,257	87,324,883	96,057,371	105,663,108
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.													
	8.10.1*	Jumlah kantor bank	BPS		4843	5027	5057	5087	5117	5147	5177	5207	5237

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.2.3 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

3.2.3.1 Kebijakan Tujuan 9 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon mengakhiri kemiskinan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 3. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur, secara global terdapat 8 target yaitu :

- (1) Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua."
- (2) Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang."

- (3) Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar."
- (4) Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing."
- (5) Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan."
- (6) Target 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil."
- (7) Target 9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.
- (8) Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020."

Dari 8 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 6 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 4 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target 9.1. pada indikator

9.1.1. Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak. dan indikator 9.1.2. Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi; Target 9.5. pada indikator 9.5.2. Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk; Target no 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil; Target no 9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.

Keempat target yang akan menyelesaikan Tujuan 1 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 9.1 terdiri atas 2 (dua) indikator ; Target 9.2 terdiri atas 2 (dua) indikator ; Target 9.4 terdiri atas 1 (satu) indikator ; Target 9.c terdiri 2 (dua) indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.9 tentang target pencapaian indikator Tujuan 9 industri, inovasi dan infrastruktur. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 9.2.1.* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 4.25 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 39.83 persen.

- (2) Indikator 9.c.1.* Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband*, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 59.5 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 71.42 persen.

Tabel 3.9 Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur													
Target 9,1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua,													
*	9,1,2,(b)	Jumlah dermaga penyeberangan,	Dinas Perhubungan	unit	3 (2015)	3	3	3	3	3	3	3	3
*	9,1,2,(c)	Jumlah pelabuhan strategis,	BPS	lokasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Target 9,2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang,													
*	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	BPS	Persentase	4.25	10.08	14.33	18.58	22.83	27.08	31.33	35.58	39.83
*	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	Persentase	31.09	28.56	26.03	23.5	20.97	18.44	15.91	13.38	10.85
Target 9.4 Pada tahun 2030. meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan. dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan. yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.													
	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	LKPJ 2017	Persentase	10.23	11.45	12.56	13.67	14.78	15.89	17	18.11	19.22
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.													
	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	BPS	Persentase	59.5	60.99	62.48	63.97	65.46	66.95	68.44	69.93	71.42
*	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	Persentase	24.45	27.92	31.39	34.86	38.33	41.8	45.27	48.74	52.21

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.2.4 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

3.2.4.1 Kebijakan Tujuan 10 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam mengurangi kesenjangan tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 10 yaitu mengurangi kesenjangan dalam segala bentuk apa pun. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon mengurangi kesenjangan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu Dengan menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan dan modernisasi pemerintahan dan pembangunan perdesaan serta mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 3, 9 dan 10. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan, secara global terdapat 5 target yaitu :

- (1) Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- (2) Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya."
- (3) Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang

diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut."

- (4) Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar."
- (5) Target 10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya."
- (6) Target 10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi."
- (7) Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik."
- (8) Target 10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organization*."
- (9) Target 10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka."
- (10) Target 10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja."

Dari 10 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 5 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 3 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target 10.3 pada indikator 10.3.1 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.; Trget 10.4 pada indicator 10.4.1. Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB;

Target 10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya; Target 10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi; Target 10.7 pada indikator 10.7.1 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan dan 10.7.2. Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik; Target 10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organization*; Target 10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka; Target 10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja."

Ketiga target yang akan menyelesaikan Tujuan 10 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 10.1 terdiri atas 4 (empat) indikator ; Target 10.3 terdiri atas 2 (dua) indikator ; Target 10.4 terdiri atas 1 indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.10 tentang target pencapaian indikator Tujuan 10 berkurangnya kesenjangan. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 10.1.1.* Koefisien Gini., menurut jenis kelamin dan kelompok umur, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 0.42 persen

dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 0.355 persen.

- (2) Indikator 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 6.52 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 34.36 persen.
- (3) Indikator 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, pada tahun 2016 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 37.64 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 43.24 persen.

Tabel 3.10 Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10. Berkurangnya Kesenjangan													
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.													
	10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	Persentase	0.426	0.402	0.403	0.402	0.378	0.379	0.378	0.354	0.355
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Persentase	9.57	8.77	7.83	7.32	6.97	6.27	5.74	5.21	4.69
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Kemendes a	Desa	1355	1220	1085	950	815	680	545	410	275
*	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	BPS	Persentase	6.52	10.00	13.48	16.96	20.44	23.92	27.40	30.88	34.36
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.													
	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Komnas HAM	pengaduan	634 (2016)	634	100	100	100	100	100	100	100
	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Biro Hukum	Kasus	-	-	-	-	20	25	30	35	40
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.													
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPS	Persentase	37.64 (2016)	37.64	38.44	39.24	40.04	40.84	41.64	42.44	43.24

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.2.5 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

3.2.5.1 Kebijakan Tujuan 17 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam tercemin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kemitraan untuk mencapai tujuan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 7. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan kemitraan untuk mencapai tujuan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan, secara global terdapat 19 target yaitu :

- (1) Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
- (2) Target 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/ GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.

- (3) Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.
- (4) Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.
- (5) Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.
- (6) Target 17.6 Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
- (7) Target 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.
- (8) Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Kerjasama Utara- Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.

- (10) Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah *the World Trade Organization* termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah *Doha Development Agenda*.
- (11) Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.
- (12) Target 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan *World Trade Organization* termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (*rules of origin*) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.
- (13) Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.
- (14) Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.
- (15) Target 17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
- (16) Target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.
- (17) Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama
- (18) Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan

ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

- (19) Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Dari 19 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 12 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 1 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target no 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/ GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang; Target 17.3 pada indikator 17.3.1. Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari total anggaran domestik dan indikator 17.3.2 Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total GDP; Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang; Target 17.6 pada indikator 17.6.1. Jumlah kesepakatan kerjasama dan program-program di bidang sains dan/ atau teknologi antar negara menurut tipe kerjasamanya dan indikator 17.6.2 Langganan broadband internet tetap menurut tingkat kecepatannya; Target 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama; Target 17.9 pada indikator 19.9.1

Nilai dolar atas bantuan teknis dan pembiayaan (termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Tirangular) yang dikomitmenkan untuk negara-negara berkembang; Target 17.10 pada indikator 17.10.1 Rata-rata tarif terbobot dunia *Free Trade Agreement* (FTA); Target 17.11 pada indikator 17.11.1 Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global; Target 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan *World Trade Organization* termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (*rules of origin*) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar, target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan, target 17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, dan target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.

Ke 1 target yang akan menyelesaikan Tujuan 17 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 17.11 terdiri atas 2 indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.10 tentang target pencapaian indikator Tujuan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya., pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 1.05 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 0.85 persen.
- (2) Indikator 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 0.95 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 0.78 persen.

Tabel 3.11 Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan													
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.													
	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Bapenda	Persentase	1.05	1.03	1.01	0.92	0.90	0.88	0.87	0.86	0.85
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	Persentase	0.96	0.95	0.92	0.85	0.83	0.82	0.80	0.79	0.78

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.2.6 Integrasi Indikator RPJMD terhadap Indikator SDGs Pilar Ekonomi

Hasil akhir dari RAD SDGs ini adalah mengintegrasikan indikator RPJMD terhadap Indikator SDGs yang terdapat pada matrik satu RAD. Berdasarkan telaahan dan diskusi antara tim sekretariat dengan Bidang Perencana Bappeda dengan menggunakan bahan indikator SDGs dan Permendagri nomor 86, indikator RKPD 2019, serta data base program dari bidang perencana diperoleh sandingan seperti pada Tabel 3.12. Sandingan tersebut mengacu kepada Meta Data SDGs dan cara perhitungan yang terdapat pada Permebdagri no 86.

Tabel 3.12 Sandingan Indikator RPJMD Terhadap Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Pilar Ekonomi

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK /IKP	SUMBER DATA
1	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	A.2.UP.4.1	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	IKP	Kementerian ESDM/ Dinas ESDM
2	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	A.2.UP.4.1	Konsumsi Listrik Per Kapita	IKK	Kementerian ESDM/ Dinas ESDM
4	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*		Kewenangan Pusat		Kementerian ESDM/ Dinas ESDM
5	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.		Kewenangan Pusat		Kementerian ESDM/ Dinas ESDM
6	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.		Bauran energi terbarukan		Kementerian ESDM/ Dinas ESDM
7	7.3.1*	Intensitas energi primer.		Intensitas energi primer		Kementerian ESDM/ Dinas ESDM
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	A.1.AKM.1	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	IKK	BPS
9	8.1.1.(a)	PDB per kapita	A.1.AKM.3	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	IKK	BPS

11	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		BPS
12	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	IKP	BPS
13	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	IKP	BPS
14	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan		1. Pertumbuhan Koperasi Berkualitas 2. Pertumbuhan Akses Modal KUK 3. Pertumbuhan Jumlah Rasio Wirausaha	IKK	BJB
15	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Disnakertrans
16	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	A.1.AKM.19	Tingkat pengangguran terbuka	IKU	BPS
17	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran		Tingkat pengangguran terbuka	IKU	BPS
18	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)		Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Disnakertrans
21	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	A.2.UP.1.1	1. Jumlah Event Pariwisata 2. Jumlah Event promosi pariwisata 3. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat 4. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Jawa Barat	IKK	Parbud Jabar Dalam Angka
22	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	A.2.UP.1.2	1. Jumlah Event Pariwisata 2. Jumlah Event promosi pariwisata 3. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat 4. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Jawa Barat	IKK	Parbud Jabar Dalam Angka
26	8.10.1*	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa		Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa		BPS
31	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	A.2.UWND.9.4	Jumlah dermaga penyeberangan		Dinas Perhubungan
32	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	A.2.UWND.9.4	Jumlah pelabuhan		Dinas Perhubungan
33	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	A.1.AKM.42	PDRB sektor industri non-migas Jumlah Unit usaha Industri PMA sektor Industri	IKK	BPS
34	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	A.1.AKM.42	1. Nilai Tambah PDRB sektor industri non-migas 2. Jumlah Unit usaha Industri 3. Nilai PMA sektor Industri	IKP	BPS

37	9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	IKK	
38	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	A.2.UWND.10.4	1. Proporsi rumah tangga dengan akses internet 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	IKK	BPS
39	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	A.2.UWND.10.3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi		BPS
41	10.1.1*	Koefisien Gini.	A.1.AKM.4	Indeks Gini		BPS
42	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	A.1.AKM.7	Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya	IKK	BPS
43	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.		Persentase tingkat perkembangan desa mandiri	IKP	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
44	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal		Persentase tingkat perkembangan desa mandiri	IKP	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
45	10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri		Persentase tingkat perkembangan desa mandiri	IKP	BPS
47	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.		Program Kesatuan Bangsa dan Politik		Komnas HAM
48	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM		Biro Hukum
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	A.2.UWND.1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	IKP	BPS
53	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	A.1.AKM.26	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan		
54	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IKK	Bapenda

3.3 BAGIAN III PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

3.3.1 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

3.3.1.1 Kebijakan Tujuan 6 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon mengakhiri kemiskinan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 3. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, secara global terdapat 8 target yaitu :

- (1) Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua."
- (2) Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan."
- (3) Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material

dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

- (4) Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
- (5) Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
- (6) Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
- (7) Target 6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang."
- (8) Target 6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi"

Dari 8 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 6 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 4 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target. 6.1 pada indikator 6.1.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman; Target 6.2. pada indikator 6.2.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun; Target 6.3. pada indikator 6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman dan indikator 6.3.2 Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik; Target 6.4 pada indikator 6.4.1 perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu dan indikator 6.4.2 Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya; Target 6.5 pada indikator 6.5.1

Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100) dan pada indikator 6.5.2 Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumber daya air yang operasional; Target 6.6 pada indikator 6.6.1. Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu. Target 6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang. Target 6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.

Ke 4 target yang akan menyelesaikan Tujuan 6 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 6.1 terdiri atas 2 (dua) indikator ; Target 6.2 terdiri atas 5 (lima) indikator ; Target 6.3 terdiri atas 2 (dua) indikator ; Target 6.4 terdiri atas 1 (satu) indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.11 tentang target pencapaian indikator Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 9.57 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 86 persen.
- (2) Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada

angka 59.43 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 78.87 persen.

- (3) Indikator 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pada tahun 2016 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 3532 desa persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 5962 desa.

Tabel 3.13 Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua													
.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	BPS	Persentase	67.13	71.14	73.17	76	78	80	82	84	86
*	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan	Persentase	30	35	37	37	40	38.42	40.29	40.81	41.56
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan													
.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Kesehatan	Persentase	59.43	64.15	66.25	68.35	70.46	72.56	74.66	76.77	78.87
*	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	desa/kelurahan	3532	3945	4358	4771	5184	5962	5962	5962	5962
.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	desa/kelurahan	704	917	1130	1343	1556	1769	1982	2195	2408
.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Disperkim	Kabupaten / Kota	27	27	27	27	27	27	27	27	27
.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon	Persentase	9.09	NA	NA	NA	155.60	176.90	198.20	219.50	240.80
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.													

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Disperkim	Kabupaten / Kota	23	23	23	23	27	27	27	27	27
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Disperkim	Persentase	0.80	NA	NA	NA	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.													
	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat	Titik Pengambilan Air tanah	338	1093	1336	1463	1600	1760	1936	2130	2343

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.3.2 Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

3.3.2.1 Kebijakan Tujuan 11 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 11 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon mengakhiri kemiskinan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 3. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 11 yaitu kota dan pemukiman tanpa kumuh, secara global terdapat 9 target yaitu :

- (1) Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh."
- (2) Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

- (3) Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
- (4) Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
- (5) Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
- (6) Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
- (7) Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.
- (8) Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah."
- (9) Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*."

Dari 9 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 8 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 4 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target 11.1 pada indikator 11.1.1 proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak; Target 11.2 pada indikator 11.2.1.

Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas; Target 11.3 pada indikator 11.3.1 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk. Dan indikator 11.3.2. Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis; Target 11.4 pada indikator 11.4.1 Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor); Target 11.5 pada indikator 11.5.2 Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar; Target 11.6 pada indikator 11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota dan indikator 11.6.2 Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk); Target 11.7 pada indikator 11.7.1 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas dan 11.7.2. Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir); Target no 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Keempat target yang akan menyelesaikan Tujuan 11 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program

sebagai berikut : Target 11.1 terdiri atas 1 (satu) indikator ; Target 1.4 terdiri atas 1 (satu) indikator ; Target 11.5 terdiri atas 1 (satu) indikator ; Target 11.6 terdiri atas 1 (satu) indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.12 tentang target pencapaian indikator Tujuan 11 kota dan pemukiman tanpa kumuh. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau., pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 93,30 - 93,89 % persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 98,30 - 99,89 % persen.
- (2) Indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 65.65 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 80 persen.

Tabel 3.14 Target Pencapaian Indikator ujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan													
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.													
	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Disperkim	Persentase	92.69 – 93.29	93.30 – 93.89	93.89 – 94.48	94.49 – 95.09	95.09 - 95.70	95.70 – 96.33	96.32 – 96.98	97.59 – 98.34	98.24 – 99.05
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.													
	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.		kota/ kawasan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.													
.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	152.063 (325,5) (2016)	152.063 (325,5)	50.195 (105,9)	45.000 (93,7)	40.000 (82,2)	35.000 (71,0)	30.000 (60,1)	25.000 (49,5)	20.000 (39,1)
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.													
*	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase	65.65	66.26	67.1	70	72	74	76	78	80

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.3.3 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

3.3.3.1 Kebijakan Tujuan 12 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 12 yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon mengakhiri kemiskinan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu meningkatkan ekonomi pertanian dan nonpertanian serta menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 4, 5, 9. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 12 yaitu tanpa kemiskinan, secara global terdapat 11 target yaitu :

- (1) Target 12.1 Melaksanakan *the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns*, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.
- (2) Target 12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.
- (3) Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan

makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.

- (4) Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- (5) Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
- (6) Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
- (7) Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
- (8) Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.
- (9) Target 12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.
- (10) Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- (11) Target 12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan

dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.

Dari 11 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 6 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 3 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target no 12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien; Target 12.4 pada indikator 12.4.1 Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing- masing dan indikator 12.4.2 Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya; Target 12.6 pada indikator 12.6.1 Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya; Target 12.7 pada indikator 12.7.1 Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan; Target 12.8 pada indikator 12.8.1 Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa; Target 12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Sedangkan target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Adapun target 12.c merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.

Ketiga target yang akan menyelesaikan Tujuan 12 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 12.4 terdiri atas 2 indikator ; Target 12.5 terdiri atas 2 indikator ; Target 12.6 terdiri atas 1 indikator ; Target 12.8 terdiri atas 1 indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.13 tentang target pencapaian indikator Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 197 kegiatan/usaha dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 440 kegiatan/usaha.
- (2) Indikator 12.5.1 Jumlah TPS3R yang dibangun, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 17 unit dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 10 unit.

Tabel 3.15 Target Pencapaian Indikator Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12. Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab													
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk me minimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.													
*	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	DLH & KLHK	Kegiatan / Usaha	197	372	389	390	400	410	420	430	440
.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH & KLHK	Perusahaan	197	372	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.													
.	12.5.1	Jumlah TPS3R yang dibangun	Disperkim	Unit	17	24	4	2	10	10	10	10	10
*	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Disperkim			30	34	47.2	61.5	74.7	87.9	101.1	114.3
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.													
*	2.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	LKPJ	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.3.4 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

3.3.4.1 Kebijakan Tujuan 13 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 13 yaitu penanganan perubahan iklim. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon mengakhiri kemiskinan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 6. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 13 yaitu tanpa kemiskinan, secara global terdapat 2 target yaitu :

- (1) Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
- (2) Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

Dari 3 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 2 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 2 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target no 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

Kedua target yang akan menyelesaikan Tujuan 13 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 13.1 terdiri atas 2 indikator ; Target 13.2 terdiri atas 3 indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.14 tentang target pencapaian indikator Tujuan 13 penanganan perubahan iklim. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 13.1.1* Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 5 dokumen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 7 dokumen.
- (2) Indikator 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 1 dokumen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 15 dokumen.
- (3) Indikator 13.2.2 Jumlah kota/kabupaten yang memiliki RAD-GRK, pada tahun 2016 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 0 Kabupaten/kota dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 14 kabupaten/kota.

Tabel 3.16 Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13. Penanganan Perubahan Iklim													
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.													
*	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Bappeda/DLH	Dokumen	5	5	5	5	7	7	7	7	7
*	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	152.063 (325,5) (2016)	152.063 (325,5)	50.195 (105,9)	45.000 (93,7)	40.000 (82,2)	35.000 (71,0)	30.000 (60,1)	25.000 (49,5)	20.000 (39,1)
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.													
*	13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.	Bappeda/DLH	Dokumen	1	1	3	5	7	9	11	13	15
*	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	BPBD	Dokumen	1	1	3	5	7	9	11	13	15
	13.2.2.	Jumlah kota/kabupaten yang memiliki RAD-GRK	Bappeda/DLH	Kab/Kota	0	0	2	4	6	8	10	12	14

3.3.5 Tujuan 14 Ekosistem Lautan

3.3.5.1 Kebijakan Tujuan 14 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam menanggulangi kemiskinan tercemar dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada Tujuan 14 yaitu Ekosistem Lautan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon mengakhiri kemiskinan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan yang terdapat pada *Comount Goal (CG)* 6. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPDP 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 14 yaitu Target, secara global terdapat 9 target yaitu :

- (1) Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
- (2) Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.
- (3) Target 14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.
- (4) Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal

dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

- (5) Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.
- (6) Target 14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk- bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada *the World Trade Organization*.
- (7) Target 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan *the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines* tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.
- (8) Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar.
- (9) Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam *the United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “*The future we want*”.

Dari 9 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 6 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 3 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi; Target 14.2 pada indikator 14.2.1 Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem; Target 14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan; Target 14.6 pada indikator 14.6.1 Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing). Sedangkan Target 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan *the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines* tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.

Ketiga target yang akan menyelesaikan Tujuan 14 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 14.2 terdiri atas 1 indikator ; Target 14.5 terdiri atas 1 indikator ; Target 14.b terdiri atas 2 indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.15 tentang target pencapaian indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 14.5.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 9.57 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 4.69 persen.
- (2) Indikator 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 32253.99 hektar dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 34,960.08.

Tabel 3.17 Target Pencapaian Indikator Tujuan 14. Ekosistem Lautan

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14. Ekosistem Lautan													
	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	KKJI - KKP		1	0	0	1	0	0	0	0	0
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.													
	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	KKJI - KKP	Ribu Hektar	32.25	32.25	34.96	34.96	34.96	34.96	34.96	34.96	34.96
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.													
*	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	JDIH	Dokumen	1 (2011) Perda No 7	1	1	1	1	1	1	1	1
*	4.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	KKJI - KKP	Orang	35000(2016)	35000	19000	15000	12000	8000	6000	4000	2000

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.3.6 Tujuan 15 Ekosistem Daratan

3.3.6.1 Kebijakan Tujuan 15 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 15 yaitu Ekosistem Daratan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon mengakhiri kemiskinan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 6. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 15 yaitu Ekosistem Daratan, secara global terdapat 12 target yaitu :

- (1) Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
- (2) Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan

yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.

- (3) Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
- (4) Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.
- (5) Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah."
- (6) Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional."
- (7) Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.
- (8) Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.
- (9) Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan."
- (10) Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan."
- (11) Target 15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan

memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.

- (12) Target 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.

Dari 12 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 9target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 5 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target 15.1 pada indikator 15.1.1 Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan; Target 15.2 pada indikator 15.2.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan; Target 15.4. pada indikator 15.4.2. Indeks tutupan hijau pegunungan; Target 15.7. pada indikator 15.7.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap; Target 15.8. pada indikator 15.8.1 Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI); Target 15.9. pada indikator 15.9.1 Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020; Target 15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi; Target 15.c pada indikator 15.c.1 Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.

Kelima target yang akan menyelesaikan Tujuan 15 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan

tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 15.1 terdiri atas 2 (dua) indikator ; Target 15.3 terdiri atas 2 (dua) indikator ; Target 15.4 terdiri atas 1 (satu) indikator ; Target 15.9 terdiri atas 1(satu) indikator ; Target 15.a terdiri atas 1 (satu) indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.16 tentang target pencapaian indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 22.02 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 22.02 persen.
- (2) Indikator 15.3.1 Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 9.24 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 1.46 persen.
- (3) Indikator 15.a.1. Anggaran pemerintah daerah untuk konservasi dan keanekaragaman hayati, pada tahun 2016 sebagai tahun *baseline* berada pada jumlah 7.3 milyar dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 15 milyar.

Tabel 3.18 Target Pencapaian Indikator Tujuan 15. Ekosistem Daratan

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15. Ekosistem Daratan													
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.													
	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut/KL HK	Persentase	22.02	22.02	22.02	22.02	22.02	22.02	22.02	22.02	22.02
	15.1.2.	Luas taman kehati	DLH	ha	121.5	151.23	151.23	152	153	154	155	156	157
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.													
	15.3.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut/KL HK	Persentase	9.24	9.24	8.78	8.78	7.31	5.85	4.39	2.93	1.46
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut/KL HK	Persentase	3.0	3.8	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.9	5.9
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.													
	15.3.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut/KL HK	Persentase	9.24	9.24	8.78	8.78	7.31	5.85	4.39	2.93	1.46
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut/KL HK	Persentase	3.0	3.8	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.9	5.9
Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.													
	15.4.1.	Persentase Tutupan Hutan	Dishut/KL HK	Persentase	22.02	22.02	32.81	33.06	33.31	33.56	33.81	34.06	34.31

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.													
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dishut/KL HK	Dokumen	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.													
	15.a.1.	Anggaran pemerintah daerah untuk konservasi dan keanekaragaman hayati	DLH	Rupiah	Rp.7,331,000,000	Rp.8,718,000,000	Rp.9,988,585,550	Rp.10,000,000,000	Rp.11,000,000,000	Rp.12,000,000,000	Rp.13,000,000,000	Rp.14,000,000,000	Rp.15,000,000,000

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.3.7 Integrasi Indikator RPJMD terhadap Indikator SDGs Pilar Lingkungan

Hasil akhir dari RAD SDGs ini adalah mengintegrasikan indikator RPJMD terhadap Indikator SDGs yang terdapat pada matrik satu RAD. Berdasarkan telaahan dan diskusi antara tim sekretariat dengan Bidang Perencana Bappeda dengan menggunakan bahan indikator SDGs dan Permendagri nomor 86, indikator RKPD 2019, serta data base program dari bidang perencana diperoleh sandingan seperti pada Tabel 3.19 Sandingan tersebut mengacu kepada Meta Data SDGs dan cara perhitungan yang terdapat pada Permebdagri no 86.

Tabel 3.19 Sandingan Indikator RPJMD Terhadap Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Pilar Lingkungan

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.		Cakupan Pelayanan Air Minum	IKK	BPS
2	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya air		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Laporan Tahunan
4	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	A.2.UWD.3.1.7	1. Presentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh 2. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	IKK	Dinas Kesehatan
5	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		1. Presentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh 2. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	IKP	Dinas Kesehatan
6	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban Sehat	IKP	Dinas Kesehatan
7	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.		Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	IKP	Disperkim

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
8	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	IKP	Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon
9	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).		Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	IKP	Disperkim
10	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		Cakupan pelayanan air limbah domestik		
11	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.		Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perusahaan air tanah di Jawa Barat		Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
12	11.1.1.(a).	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	A.2.UWD.4.1	Rasio rumah layak huni		Disperkim
13	11.4.1.(a).	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.		Program Pengembangan Nilai Budaya		Disparbud
14	11.5.1*.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	A.2.UWD.6.8	1. Tingkat Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan 2. Tingkat Pengurangan Korban Jiwa Akibat Bencana Alam	IKP	BPBD
15	11.6.1.(a).	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	A.2.UWD.3.1.17	Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)	IKK	Dinas Lingkungan Hidup
16	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.		1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Pengelolaan Limbah dan Sampah	IKK	DLH & KLHK
17	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	A.2.UWD.5.11	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Kewenangan Pusat)		KLHK/DLH
18	12.5.1	Jumlah TPS3R yang dibangun		Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)		Disperkim
19	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	A.2.WND.5.44	Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)		Disperkim

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
20	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan		DPMPTSP
21	13.1.1*.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		1. Tingkat Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan 2. Tingkat pemulihan Pasca Bencana	IKP	BPBD
22	13.1.2*.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	A.2.UWD.6.8	1. Tingkat Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan 2. Tingkat pemulihan Pasca Bencana	IKP	BPBD
23	13.2.1*.	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.		Kewenangan Pusat		KLHK/DLH
24	13.2.1.(a).	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	A.2.UWND.5.9	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Pengelolaan Limbah dan Sampah	IKK	DLH
25	13.2.2	Jumlah kota/kabupaten yang memiliki RAD-GRK		Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		DLH
26	14.2.1 (a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.		Kewenangan Pusat		KKP/KKJI
27	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.		Jumlah Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	IKP	KKP/KKJI
28	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.		Persentase Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani	IKP	JDIH/DISKANLA
29	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.		Produksi Perikanan Tangkap	IKP	KKP/KKJI
47	15.1.1.(a).	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	A.2.UWD.3.2.5	Persentase Tutupan Hutan	IKP	Dishut/KLHK
48	15.1.2	Luas taman kehati		Indeks Tutupan Vegetasi		DLH
49	15.3.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan.		Indeks Tutupan Vegetasi		Dishut/KLHK
50	15.3.1.(a).	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	IKK	Dishut/KLHK

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
51	15.4.1	Persentase Tutupan Hutan		Indeks Tutupan Vegetasi		Dishut/KLHK
52	15.9.1.(a).	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		1. Produksi Hasil Hutan 2. Jumlah Jasa Wisata Alam 3. Bertambahnya Unit Manajemen Hutan Rakyat	IKP	Dishut/KLHK
53	15.a.1	Anggaran pemerintah daerah untuk konservasi dan keanekaragaman hayati		Indeks Tutupan Vegetasi		DLH

3.4 BAGIAN IV PILAR PEMBANGUNAN HUKUM & TATA KELOLA

3.4.1 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

3.4.1.1 Kebijakan Tujuan 16 Di Provinsi Jawa Barat

Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah Jawa Barat dalam berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan keadilan (Justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions) tercermin dalam kebijakan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan tersebut merupakan komitmen Pemerintah Jawa Barat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespon mengakhiri kemiskinan tersebut tercermin dalam prioritas pembangunan RPJMD 2013-2018 yaitu modernisasi pemerintahan dan pembangunan perdesaan yang terdapat pada *Comount Goal* (CG) 10. Jawa Barat merupakan provinsi yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2018, dengan demikian RPJMD pada periode 2018-2023 akan dibuat setelah pelantikan gubernur, sehingga kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan akan mengacu kepada *background* studi dan dokumen RKPD 2019 sebagai embrio dari RPJMD 2018-2023.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Goal/Tujuan 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, secara global terdapat 12 target yaitu :

- (1) Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
- (2) Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
- (3) Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

- (4) Target 16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
- (5) Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
- (6) Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
- (7) Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
- (8) Target 16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
- (9) Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
- (10) Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional."
- (11) Target 16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme
- (12) Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari 12 target global tersebut yang dapat dilaksanakan oleh nasional sebanyak 10 target (SETNAS SDGs, 2018), dan Jawa Barat sebanyak 5 target. Seperti halnya nasional pada saat ini belum dapat dilaksanakan yaitu : Target 16.1 pada indikator 16.1.1 Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, indikator 16.1.2 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian, indikator 16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir; Target 16.2. pada indikator 16.2.1.

Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir, indikator 16.2.2 Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi; Target 16.3 pada indikator 16.3.1. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik dan indikator 16.3.2 Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana; Target no 16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi; Target 16.5 pada indikator 16.5.1 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir dan indikator 16.5.2 Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas- petugas, selama 12 bulan terakhir; Target 16.6 pada indikator 16.6.1. Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan public; Target 16.7. pada indikator 16.7.1 Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan publik, peradilan) dibanding distribusi nasional dan indikator 16.7.2. Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat; Target 16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global; Target 16.10 pada indikator 16.10.1 Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir; Target 16.b pada indikator 16.b.1 Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

Kelima target yang akan menyelesaikan Tujuan 16 tersebut masing-masing diukur oleh indikator yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli dibidangnya. Indikator-indikator tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang terukur berdasarkan indikator output. Berdasarkan kesepakatan tersebut untuk Jawa Barat pada setiap targetnya ditetapkan indikator dan program sebagai berikut : Target 16.2 terdiri atas 1 (satu) indikator ; Target 16.3 terdiri atas 1 (satu) indikator ; Target 16.6 terdiri atas 3 indikator ; Target 16.7 terdiri atas 5 indikator ; Target 16.9 terdiri atas 1 (satu) indikator .

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.17 tentang target pencapaian indikator Tujuan 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Pada tabel tersebut dapat disampaikan pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* dan target indikator yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2023, dengan contoh sebagai berikut :

- (1) Indikator 16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 0 perkara dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 100 perkara.
- (2) Indikator 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota), pada tahun 2015 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 70.06(BB) nilai (predikat) dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 91.7 (A) nilai (predikat).
- (3) Indikator 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada tahun 2016 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 20 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 30 persen.
- (4) Indikator 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran, pada tahun 2016 sebagai tahun *baseline* berada pada angka 75 persen dan di proyeksikan pada tahun 2023 akan mencapai target sebesar 98 persen.

Tabel 3.20 Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16. PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH													
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.													
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Kesbangpol	persentase	33.5	29.15	29.15	29.15	29.15	29.15	29.15	29.15	29.15
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.													
	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Biro Hukum	Perkara	40 (2016)	40	54	40	60	70	80	90	100
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.													
	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	Inspektorat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Dalbang	Nilai (Predikat)	70.06(BB)	80,03 (A)	81,69 (A)	83,4(A)	85(A)	86.7(A)	88.3(A)	90(A)	91.7(A)
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Biro Dalbang	Nilai (Kategori)	50,41(CC)	67,63(B)	71,64(BB)	75.65	79.7	83.7	87.7	91.7	95.7
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.													

TARGET	KODE	INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2015)	Proyeksi Pencapaian							
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Sekretariat DPRD	Persentase	20	20	20	20	30	30	30	30	30
.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	Persentase	35	35	35	35	35	35	35	35	35
.	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS	indeks	51.37	49.9	51.37	52.84	54.31	55.78	57.25	58.72	60.19
.	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS	indeks	79.1	73.37	67.64	68.65	69.66	70.67	71.68	72.69	73.7
.	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Kesbangpol		81.89	72.34	62.79	68.65	74.51	80.37	86.23	92.09	97.95
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.													
.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Disdukcapil	Persentase	72	75	78.6	82.2	85.8	89.4	93	96.6	98

Sumber : Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018.

3.4.2 Integrasi Indikator RPJMD terhadap Indikator SDGs Pilar Hukum & Tata Kelola

Hasil akhir dari RAD SDGs ini adalah mengintegrasikan indikator RPJMD terhadap Indikator SDGs yang terdapat pada matrik satu RAD. Berdasarkan telaahan dan diskusi antara tim sekretariat dengan Bidang Perencana Bappeda dengan menggunakan bahan indikator SDGs dan Permendagri nomor 86, indikator RKPD 2019, serta data base program dari bidang perencana diperoleh sandingan seperti pada Tabel 3.21 . Sandingan tersebut mengacu kepada Meta Data SDGs dan cara perhitungan yang terdapat pada Permebdagri no 86.

Tabel 3.21 Sandingan Indikator RPJMD Terhadap Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Pilar Hukum & Tata Kelola

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
1	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		1. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu 2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	IKP	Kesbangpol
2	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	IKP	Biro Hukum
3	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan	IKK	Inspektorat
4	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat		Biro Dalbang
7	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		1. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah 2. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah	IKK	Biro Dalbang

NO	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	NO INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR RPJMD	IKU/IKK/IKP	SUMBER DATA
8	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	A.2.UWND.2.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	IKK	Sekretariat DPRD
9	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	A.2.UWND.2.1	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	IKK	BKD
10	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.		Program Kesatuan Bangsa dan Politik	IKK	BPS
11	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.		Program Kesatuan Bangsa dan Politik		BPS
12	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.		Program Kesatuan Bangsa dan Politik		Kesbangpol

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan penting untuk memastikan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dari waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB.

Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu kewajiban dari Tim Pelaksanaan TPB dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut di mana setiap Menteri/Kepala Lembaga dan juga Gubernur Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi landasan hukum yang diacu adalah Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Untuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan organisasi non pemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui kemajuan pencapaian TPB dari waktu ke waktu. Pemantauan ditekankan pada pengukuran kemajuan pencapaian dan perubahan atas satuan setiap Target dan Indikator TPB, termasuk di dalamnya mengetahui prestasi dan kendala pencapaian Target dan Indikator tertentu. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan pada anggaran yang telah direalisasikan dalam APBN dan APBD. Hasil

pemantauan dan evaluasi ini akan dipergunakan sebagai asupan untuk perbaikan perencanaan program dan kegiatan ke depan.

Lingkup Pemantauan dan Evaluasi. Lampiran Perpres 59/2017 menjabarkan Tujuan Global, Target global, Target Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan instansi pelaksana yang menjadi penanggung jawab. Lingkup pemantauan dan evaluasi mencakup 17 Tujuan, 70 Target dan 147 indikator.

Tabel 4.1 Target dan Indikator TPB/SDGs Jawa Barat Berdasarkan Pilar Pembangunan

Nomor	Pilar/Indikator	Jumlah Indikator
	PILAR SOSIAL	
1	Tanpa Kemiskinan	16
2	Tanpa Kelaparan	13
3	Kehidupan Sehat Dan Sejahtera	18
4	Pendidikan Berkualitas	11
5	Kesetaraan Gender	7
	Jumlah Pilar Sosial	65
	PILAR EKONOMI	
7	Energi Bersih Dan Terjangkau	6
8	Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi	13
9	Industri, Inovasi, Dan Infrastruktur	7
10	Berkurangnya Kesenjangan	8
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	2
	Jumlah Pilar Ekonomi	36
	PILAR LINGKUNGAN	
6	Air Bersih Dan Sanitasi Layak	4
11	Kota Dan Permukiman Yang Berkelanjutan	5
12	Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	5
13	Penanganan Perubahan Iklim	4
14	Ekosistem Lautan	7
15	Ekosistem Daratan	10
	Jumlah Pilar Lingkungan	35
	PILAR HUKUM	
16	Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh	11
	Jumlah 4 pilar	147

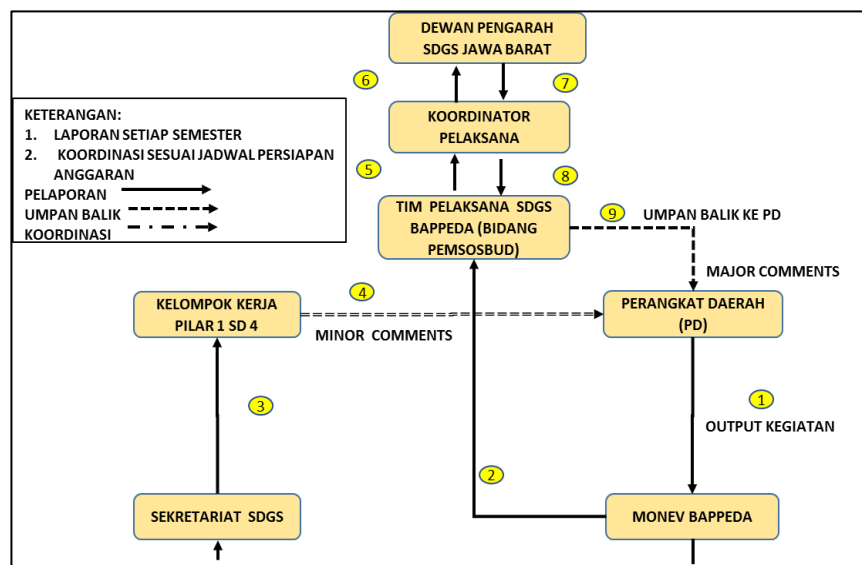
Keseluruhan Tujuan, Target dan Indikator tersebut dapat dikategorikan ke dalam 4 Pilar yang secara sederhana dapat dilihat pada Tabel 4.1.

4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

1. Mekanisme Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Alur pemantauan dan evaluasi mengikuti arahan pembagian tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam Perpres 59/2017. Diagram berikut ini menggambarkan alur pemantauan dan evaluasi untuk lingkup Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Jawa Barat.

Gambar 4.1 Alur Informasi Pemantauan untuk RAD (Matriks RAD)



Penjelasan atas diagram di atas adalah sebagai berikut:

a. Alur Laporan

- Langkah 1. Perangkat daerah menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Kepala Seksi Monev Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- Langkah 2. Kepala Seksi Monev Bappeda Jawa selanjutnya akan mengolah dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Pelaksana SDGs melalui Kepala Bappeda selaku sekretaris Tim Pelaksana SDGS

Provinsi Jawa Barat cq Kepala Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jawa Barat.

3. Langkah 3. Kepala Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jawa Barat, dalam proses rekapitulasi dan penyajian laporan tersebut, kepala seksi monev akan berkoordinasi dengan Sekretariat TPB.
4. Langkah 4. Sekretariat TPB akan menyampaikan masukan terkait Laporan Perangkat Daerah kepada Pokja Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, dan Hukum dan Tata Kelola terkait kelengkapan data, kepatuhan jadwal dan kepatuhan format.
5. Langkah 5. Pokja ke 4 Pilar TPB akan bekerja mengkaji dan validasi atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh K/L dan kemudian menyampaikan hasil kajian dan validasi tersebut kepada Tim Pelaksana. Tim Pelaksana kemudian merangkum keseluruhan laporan dan hasil kajian ke dalam suatu laporan yang utuh dan selanjutnya menyampaikannya kepada Koordinator Pelaksana yang dalam hal ini yaitu Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat.
6. Langkah 6. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat selaku Sekretaris Tim Pelaksana TPB/SDGs melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat provinsi kepada Gubernur minimal satu tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

b. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memwadahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas data indikator yang dilaporkan oleh K/L. Proses umpan balik dilakukan pada:

1. Langkah 7 Pokja akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Perangkat Daerah jika terdapat kekuranglengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.
2. Langkah 8. Umpan balik dari Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakan tentang keseluruhan pencapaian TPB dalam periode yang dilaporkan dan akan menjadi

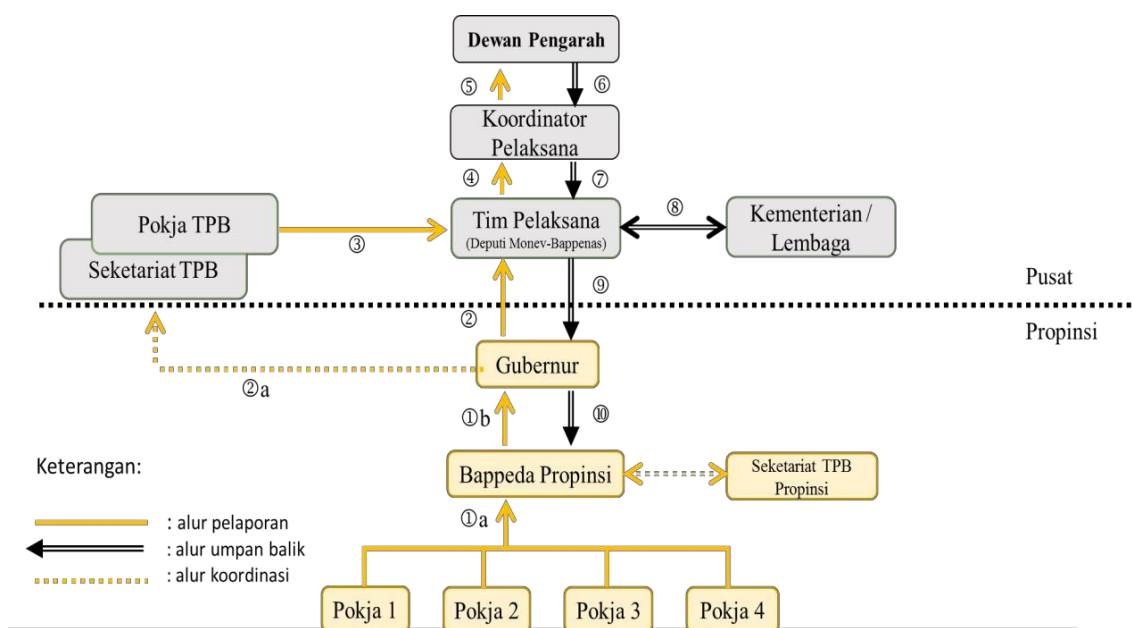
panduan kebijakan bagi proses pemantauan pencapaian periode berikutnya

3. Langkah 9. Umpan Balik dari Koordinator Pelaksana merupakan gabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator Pelaksana dan hasil kajian dan validasi dari Pokja terkait pencapaian indikator tertentu yang disampaikan oleh Perangkat Daerah. Muatan umpan balik terutama difokuskan kepada indikator yang mengalami penurunan angka pencapaian. Umpan balik jenis ini akan terkait dengan perencanaan dan penganggaran kegiatan dalam siklus penyusunan RKA K/L tahun berikutnya

2. Mekanisme Pemantauan RAD

Kewajiban penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Sementara itu laporan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB disampaikan oleh Gubernur setiap enam bulan sekali kepada Menteri PPN/Bappenas selaku koordinator Pelaksana TPB dan juga Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2.

Gambar 4.2 Alur informasi untuk pemantauan



RAD Alur pemantauan tersebut sebagai berikut:

a. Alur Laporan

1. Langkah 1. Setiap enam bulan sekali, Bappeda Propinsi mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB yang dilakukan oleh Pokja 4 pilar dan kemudian menuangkannya ke dalam format matriks 2 yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap Target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan tersebut.
2. Langkah 1 b. Matriks konsolidasi dari semua pilar dilengkapi dengan penjelasan tentang kemajuan, kendala dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai standar yang telah dinyatakan dalam RAD dikirimkan kepada Gubernur oleh Bappeda Provinsi. • Langkah 2 dan 2a
3. Langkah 2 dan 2a. Gubernur menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Laporan yang sama juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat TPB nasional untuk koordinasi pelaporan RAD dari seluruh Provinsi.
4. Langkah 3. Pokja TPB akan bekerja untuk melakukan kajian dan validasi atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur dan kemudian menyampaikan hasil kajian dan validasi tersebut kepada Tim Pelaksana. Pokja melalui sekretariat TPB akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Bappeda propinsi sebagai bagian dari tugas koordinasi dan fasilitasi yang disebutkan dalam pasal 7 Perpres 59/2017.
5. Langkah 4. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas kemudian akan mengolah dan menyampaikan hasil konsolidasi laporan dari seluruh Provinsi kepada Tim Pelaksana melalui Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Kementerian PPN/Bappenas. Tim Pelaksana kemudian merangkum keseluruhan laporan dan hasil kajian ke dalam suatu laporan yang utuh dan menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB.

6. Langkah 5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat daerah kepada Presiden / Ketua Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017.

b. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memwadahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas pencapaian indikator TPB yang dilaporkan oleh Gubernur. Proses umpan balik dilakukan pada langkah-langkah berikut:

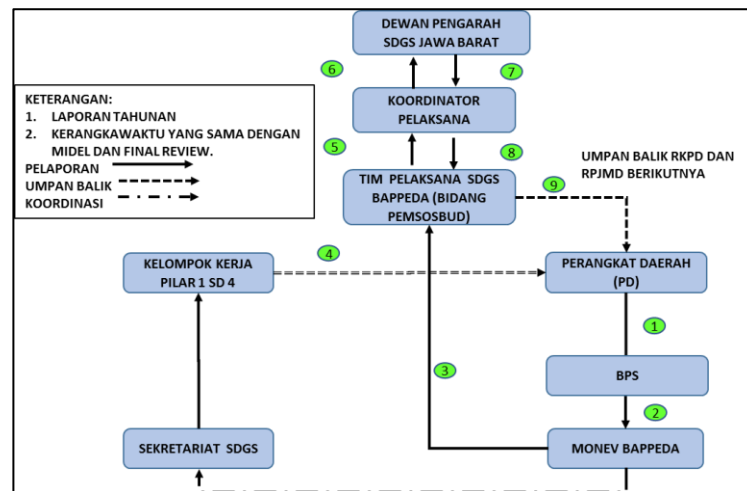
1. Langkah 6 dan 7. Umpan balik dari Dewan Pengarah / Koordinator Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakan tentang keseluruhan pencapaian TPB dalam periode yang dilaporkan dan akan menjadi panduan kebijakan bagi proses pemantauan pencapaian periode berikutnya.
2. Langkah 8. Laporan umpan balik tersebut diberikan juga kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk ditindak lanjuti dalam rapat Tim Pelaksana TPB nasional.
3. Langkah 9. Umpan Balik dari Koordinator Pelaksana merupakan gabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator Pelaksana, hasil kajian dan validasi dari Pokja, masukan dari K/L terkait tentang pencapaian indikator tertentu yang disampaikan oleh Gubernur. Muatan umpan balik terutama difokuskan kepada indikator yang mengalami penurunan angka pencapaian. Umpan balik jenis ini akan terkait dengan perencanaan dan penganggaran kegiatan dalam siklus penyusunan RAPBD tahun berikutnya.
4. Langkah 10. Berdasarkan umpan balik dari Tim Pelaksana TPB nasional, masing-masing Gubernur memperbaiki atau merumuskan ulang program dan kegiatan pencapaian TPB daerah dan menuangkannya ke dalam dokumen

Kebijakan Umum Anggaran untuk mendapatkan kesepakatan dari DPRD dan kepada Bappeda sebagai arahan penyusunan RKA-SKPD periode berikutnya.

3. Mekanisme Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan dua kali dalam periode 5 tahun sesuai dengan periode kaji ulang RPJMD (kaji ulang pertengahan dan akhir) dan ditujukan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB serta mencari jalan keluar atas kesenjangan yang terjadi antara standar pencapaian yang telah ditetapkan dan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Panel Evaluator independen yang terdiri dari para pakar di bidangnya serta wakil-wakil dari setiap unsur platform yaitu: unsur pemerintah, unsur organisasi non pemerintah, unsur akademisi dan unsur komunitas bisnis. Mekanisme yang diterapkan dalam proses evaluasi pada tingkat nasional (RAD) tampak pada diagram berikut ini:

Gambar 4.3 Alur Informasi Evaluasi untuk RAN (Matriks 1)



a. Alur laporan evaluasi

- Langkah 1 dan 2. Laporan evaluasi atas pencapaian indikator TPB utamanya datang dari BPS melalui berbagai survei skala nasional. Di samping itu, laporan evaluasi diperoleh juga dari berbagai survei sektoral dan laporan-laporan administratif yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota. Laporan evaluasi tersebut yang telah dipetakan ke dalam jenis-jenis indikator global maupun nasional disampaikan ke Bappeda Provinsi

Jawa Barat c.q. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya untuk dikonsolidasikan.

2. Langkah 3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Jawa Barat, menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana SDGs Jawa Barat. Dalam rangka menyusun laporan evaluasi TPB ini Seksi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Jawa Barat berkoordinasi dengan Sekretariat TPB.
3. Langkah 4. Pokja melakukan kajian atas laporan evaluasi untuk mengetahui status pencapaian setiap Target dan Indikator dua kali dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu evaluasi pertengahan dan evaluasi akhir. Selain itu, Pokja juga akan mengevaluasi keterpaduan pencapaian TPB dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMD.
4. Langkah 5. Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB Jawa Barat dan Nasional.
5. Langkah 6. Koordinator TPB Jawa Baratl melaporkan Laporan Evaluasi TPB Jawa Barat kepada Dewan Pengarah setelah melalui pembahasan oleh Tim Pelaksana

b. Alur Umpan Balik

1. Langkah 7. Koordinator Pelaksana mendapatkan arahan kebijakan dari Dewan Pengarah terkait hasil evaluasi TPB Indonesia untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan RPJMD periode berikutnya.
2. Langkah 8. Koordinator Pelaksana memberikan penjabaran arahan kebijakan untuk diintegrasikan dalam proses penyiapan RKPD dan RPJMD pada siklus berikutnya kepada Tim Pelaksana.
3. Langkah 9. Tim Pelaksana merincikan umpan balik yang harus direncanakan dan dianggarkan oleh masing-masing Perangkat Daerah pada program dan kegiatan masing-masing.

4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pihak Non Pemerintah

Mekanisme monitoring dan evaluasi pihak non pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak non pemerintah untuk pelaksanaan pencapaian SDGs bersifat sukarela (voluntary), oleh karena itu mekanisme pelaporannya pun juga bersifat sukarela. Akan tetapi, meskipun bersifat sukarela namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

Organisasi non pemerintah jumlahnya mencapai ribuan dengan kapasitas yang sangat beragam, oleh karena itu perlu dirumuskan mekanisme pelaporan yang sederhana dan efisien, namun tetap tidak mengurangi esensi hal yang dikerjakan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (voluntary self assesment) dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati.

TPB tingkat Nasional kepada Presiden / Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

b. 1.b. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk mewedahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja yaitu :

1. Langkah 5. Kelompok Kerja dibantu Sekretariat akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Organisasi Non Pemerintah jika terdapat kekuranglengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.
2. Langkah 6. Umpan balik dari Dewan Pengarah / Koordinator Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakan tentang keseluruhan pencapaian TPB dalam periode yang dilaporkan dan akan menjadi panduan arahan bagi pencapaian berikutnya.
3. Langkah 9. Umpan Balik dari Koordinator Pelaksana merupakan gabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator Pelaksana dan hasil kajian dan validasi dari Kelompok Kerja terkait hal strategis untuk pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Non Pemerintah.

Mekanisme evaluasi untuk Organisasi Non Pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Organisasi Non Pemerintah itu sendiri yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para personel yang diakui kompetensi, pengalaman dan integritasnya dari stakeholder berkaitan. Pada akhirnya, yang paling mengetahui tentang seluk beluk aktivitas adalah mereka sendiri yang telah lama bergelut di bidang berkaitan dalam jangka waktu yang panjang.

Dengan demikian, paling tidak akan ada tiga (3) forum atau tim independen yang dibentuk secara ad hoc untuk menilai stakeholder organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi. Forum atau tim tersebut

juga melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah serta perwakilan lain bila diperlukan dari penilai independen berdasarkan kompetensinya, misalnya pakar keuangan, manajemen, ahli evaluasi dampak, dll.

Hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Kelompok Kerja yang kemudian akan diserahkan kepada Tim Pelaksana. Tim Pelaksana akan menyampaikan kepada Koordinator Pelaksana sebagai bagian hasil evaluasi keseluruhan dari para stakeholder. Lalu, Koordinator Pelaksana akan menyampaikan hasil tersebut kepada Dewan Pengarah.

Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana akan memberikan umpan balik yang bersifat strategis kepada para stakeholder untuk pencapaian SDGs yang lebih optimal. Tim Pelaksana akan memberikan umpan balik penjabaran dari arahan kebijakan strategis dari Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana untuk Kelompok Kerja, yang akan dilanjutkan disampaikan kepada stakeholder terkait Organisasi Non Pemerintah.

4.3 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB 2017-2023

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 59/2017 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:

Enam bulan setelah Perpres 59/2017 diberlakukan Rencana Aksi Nasional 2017-2019 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB kepada Presiden RI, yaitu tanggal 10 Januari 2018 sedangkan Rencana Aksi Daerah harus dilaporkan setelah satu tahun Perpres 59/2017 diundangkan. Batas waktu penyerahan RAD TPB provinsi adalah 10 Juli 2018. Perpres tersebut juga mengamanatkan bahwa Peta Jalan TPB 2017 -2030 harus sudah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah Perpres 59/2017 diundangkan.

Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan maka pemantauan RAN akan dilakukan pada bulan Juli 2018 dan pemantauan RAD akan dilakukan pada bulan Januari 2019, bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan RAN. Pemantauan Laporan pemantauan dari Kementerian dan Lembaga serta dari Gubernur diharapkan dapat disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.

Gambar 4.5 Diagram Jadwal Pelaporan dan Pemantauan TPB Nasional dan Daerah



4.4 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Publikasi SDGS Jawa Barat akan mengacu kepada Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh Sekretariat TPB telah menyiapkan laman sdgs.bappenas.go.id sebagai media publik untuk melakukan disseminasi informasi terkait dengan Peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB, dokumen dan informasi publik lainnya.

Laman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi, hasil pemantauan dan evaluasi berkala atas kemajuan pencapaian TPB Jawa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Prinsip Pelaksanaan TPB/ SDGs

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan terdapat tiga prinsip utama dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau "Sustainable Development Goals (SDGs)", yang mencakup hal-hal mendasar dalam kehidupan masyarakat yaitu:

5.1.1 *Universality*

Pada pembuatan RAD SDGs Jawa Barat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, menghormati hak individu, perdamaian, dan kemitraan, artinya menyeluruh dengan melibatkan semua unsur mulai dari pemerintah hingga masyarakat, sehingga memiliki persepsi yang sama terhadap SDGs. Unsur tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur No : 050.05/Kep.520-Bapp/2018, tentang Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat terdiri atas:

- 1) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota yang terdiri atas seluruh Perangkat daerah dan Biro, serta Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
- 2) Organisasi Masyarakat terdiri atas Walhi, penggiat pendidikan, dan media Harian Umum Pikiran Rakyat;
- 3) Bisnis dan Filantropi terdiri atas 20 CSR dan 8 filantropi
- 4) SDGs Centre Unpad dari akademisi.

5.1.2 *Integration*

Penyusunan RAD SDGs di Jawa Barat dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling terkait. Pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan, dan memahami, sekaligus bertindak dalam kesalinghubungan yang kompleks yang ada di antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial ini menjadi

tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan. Integrasi dalam penyusunan RAD ini ditunjukkan dalam bahasan setiap pilar yang terdiri atas berbagai disiplin ilmu. Seperti pembahasan pilar Ekonomi akan terkait pada bidang perencana Bappeda dari Bidang Ekonomi, Fisik (lingkungan), dan Sosial Budaya serta pemerintahan. Bahasan pada satu aspek akan terkait pada aspek lain sehingga satu aspek akan memperhatikan aspek atau pilar lain.

Sebagai contoh: Untuk mengantisipasi perubahan iklim diperlukan mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah, seperti: (a) Dokumen Biennial Update Report (BUR) yang bermanfaat untuk menunjukkan adanya kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta capaian Jawa Barat dalam menangani perubahan iklim yang dikomunikasikan ke tingkat nasional dan internasional.

5.1.3 *No One Left Behind*

Prinsip no-one left behind. atau kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disebut juga Sustainable Development Goals, memiliki prinsip pelaksanaannya no one left behind. Artinya, pelaksanaan pembangunan tersebut harus memberi manfaat untuk semua serta melibatkan semua kepentingan. Sesuai prinsip tersebut maka penyusunan RAD SDGs Jawa Barat mengoptimalkan koordinasi Bappeda perencanaan yang melibatkan semua pihak yang bersinergi sesuai peran, serta kelembagaan strategis maupun operasional. Pihak yang terlibat dalam penyusunan RAD SdGs Jawa Barat tersebut adalah : (1) Perangkat daerah provinsi; (2) Kabupaten/kota; (3) Filantropi; (4) CSR; (5) UPT Kementrian/Lembaga yang bertugas di Jawa Barat; (6) Akademisi .

Selain itu, prinsip ketiga ini juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendapatan, serta kelaparan.

5.2 Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB/SDGs

5.2.1 Perluasan penggunaan teknologi

Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi merupakan upaya perluasan penggunaan teknologi untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat. Kondisi ini ditunjukkan oleh masih rendahnya: (1) Proporsi Penduduk Terlayani *Mobile Broadband* sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebesar 59,50 persen dan pada Tahun 2015 ; (2) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada Tahun 2015 sebesar 24,45 persen; (3) Proporsi individu yang menggunakan internet pada Tahun 2015 sebesar 0,39.

Untuk itu diperlukan meningkatkan kerjasama secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

5.2.2 Penguatan Kerja Sama Multipihak

Sarana pelaksanaan yang berkaitan dengan kerjasama atau kemitraan menyangkut kemitraan global dan juga kemitraan antara pemerintah dan swasta termasuk organisasi masyarakat sipil. Salah satu kerjasama multi pihak adalah kemitraan yang telah dibangun dengan Provinsi Jawa Barat dalam berbagai bidang pembangunan dengan: (1) UPT Kementrian/ Lembaga sebanyak 14 UPT yang melaksanakan pembangunan di Jawa Barat terkait dengan pencapaian SDGs; (2) sebanyak 27 kabupaten kota ; (3) Filantropi sebanyak 8 lembaga yang melaksanakan program untuk pencapaian indikator SDGs untuk Goal 1,2,3,4,5, 8, dan 11, (4) CSR sebanyak 20 perusahaan ; dan (5) Perguruan Tinggi di Jawa Barat. Penguatan kerjasama ini di bentuk melalui Keputusan Gubernur dengan rincian lembaga yang terlibat sebagai berikut:.

Tabel 5.1 Daftar *Stake Holder* Dalam Pelaksanaan SDGs Jawa Barat

Peserta	Keterangan
1. Perangakat daerah provinsi	PD/BIRO/Setwan DPRD
2. Kabupaten/kota	Bappeda Kabupaten/kota
3. Filantropi	Aisyiyah, Baznaz, Koalisi Perempuan Indonesia, SAPA Institute, PEKKA, Trafiking Care, Lazismu, Migrant Care,
4. CSR	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 2. Perum Jasa Tirta II 3. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Bandung 6. PT Bio Farma (Persero) 7. PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi 8. PT Pegadaian (Persero) Kanwil X Bandung 9. PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang 10. PT Pertamina EP Asset 3 11. PT PLN (Persero) 12. PT Pupuk Kujang 13. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 14. PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) 15. PT Indocement Tunggul Prakarsa (Citeureup-Bogor) Tbk 16. PT Indonesia Power UP Kamojang 17. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia 18. Star Energy Geothermal Darajat 19. PT PJB Muara Tawar 20. PT Jababeka Tbk
21. UPT Kementrian/Lembaga yang bertugas di Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Daerah Jawa Barat 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat 3. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat 4. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 5. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat 6. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandung 7. BPJS Kesehatan Regional Wilayah Jawa Barat 8. BPJS Ketenagakerjaan Regional Wilayah Jawa Barat 9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

	10. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Jawa Barat 11. Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, Jawa Barat 12. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat 13. Balai Inseminasi Buatan Jawa Barat 14. Balai Besar Pelatihan Pertanian Jawa Barat
22. Akademisi	SDGs Centre UNPAD

5.2.3 Penguatan Koordinasi dan Kapasitas Sumberdaya Manusia SDGs

Upaya pencapaian setiap indikator dari target masing-masing goal pada RAD SDGs Jawa barat dilaksanakan untuk meningkatkan kerjasama secara regional dengan kabupaten/kota, perguruan tinggi dan CSR, dan internasional seperti Lembaga UGLC ASPAC, Mapu kerjasama Indonesia Australia yang terkait meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

Kegiatan Penguatan tersebut telah dikerjasamakan antara SDGs Jawa Barat dengan Organisasi Mampu yang dibiayai Australia Indonesia untuk kegiatan peningkatan SDM di Kabupaten Cianjur, Karawang, Cirebon, dan Sumedang. Sendang dengan UGLC ASPAC telah diadakan pelatihan pelokalan SDGS bagi Tim Sekretariat SDGs Jawa Barat dan untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

5.2.4 Penguatan Pelaksanaan Strategi Komunikasi

Penguatan strategi komunikasi SDGs Jawa Barat dilakukan dengan : (1) melalui WEB Bappeda Jawa Barat <http://bappeda.jabarprov.go.id/>; (2) Harian Umum Pikiran rakyat

5.3 Pemutakhiran Dokumen

Pemutakhiran dokumen menganut prinsip kaji ulang, serta konsultasi dan partisipasi public secara *off-line & on-line*. Secara *off-line* dilaksanakan melalui kunjungan dan diskusi secara langsung baik tingkat pusat, kabupaten/ kota maupun dengan perangkat daerah dilingkungan Provinsi Jawa Barat dan UPT Kementerian Lembaga yang ada di Jawa Barat serta filantropi dan CSR. Secara *on-line* terus

dilakukan melalui email, WEB, dan WA Grup. Di sekretarian SDGs Jawa Barat tersedia grup UPT kementerian/Lembaga, Grup Forum Komunikasi SDGS Provinsi Jawa barat, Grup SDGs Kabupaten Kota. Hal-ha yang didiskusikan terkait dengan pemutakhiran dokumen adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan Tim Penyusun RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023, terkait data, program dan kegiatan serta sandingan antara indikator SDGs dengan Indikator RPJMD.
- 2) Dengan BPS, terkait data, disagregasi data.
- 3) Dengan Sekretariat Nasional SDGs, untuk berbagai aspek kebijakan dan teknis, serta
- 4) Dengan Kementerian Dalam Negeri terkait indikator RPJMD, KLHS, dan kebijakan perencanaan.
- 5) Dengan kabupaten kota tentang indikator, program, dan penguatan sumberdaya manusia.
- 6) Dengan Filantropi, terkait penguatan sumberdaya, program dan kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
- Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2018. Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.
- Bappenas, 2018. Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2016-2023.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3.
- BBS Jawa Barat, Statistik Dasar, Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, 2013–2018.
- BPS Jawa Barat 2018. Berita resmi statistic. Pola pangan harapan Tahun 2016,2017.
- BPS Jawa Barat, 2017. Indikator Strategis. Nilai Tukar Petani, Mei 2017.
- BPS Jawa Barat, 2017. Indikator Strategis. Produksi Padi, Jagung, Kedele, Ubi Kayu dan Ubi Jalar di Jawa Barat

BPS Jawa Barat, 2018. Statistik Dasar. Angka partisipasi murni (APM) menurut kabupaten/kota dan jenjang pendidikan tahun 2011-2017.

BPS Jawa Barat, 2018. Statistik Dasar. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2005-2016

BPS. Jawa Barat, 2018. Statistik Sektor. Jumlah Peserta KB Pria Berdasarkan Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru di Jawa Barat, 2018.

Dinas Kelautan dan Perikanan, 2018, Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Perikanan.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2017. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Dinas Lingkungan Hidup, 2018, Data Perusahaan Peserta PROPER.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, 2018, Data Indeks Pembangunan Gender.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2017, Data Pokok Pendidikan/Dapodik.

Kementerian Kesehatan RI, 2016. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016.

Kementerian Sosial RI, 2017. Basis Data Terpadu Penduduk Miskin di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, 2018. Angka Kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Wilayah Jawa Barat pada tahun 2017 .

Unpad Press, 2018. Seri Menyongsong SDGs, Kesiapan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Biro Pelayanan dan
Pengembangan Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Biro Pelayanan dan Pengembangan
Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Biro Sarana Perekonomian,
Investasi, dan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Biro Sarana Perekonomian,
Investasi, dan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Biro Produksi dan Industri
Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Biro Produksi dan Industri
Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Biro Pengendalian
Pembangunan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Biro Pengendalian Pembangunan
Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Biro Organisasi Pemerintah
Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Biro Organisasi Pemerintah
Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Biro Hubungan Masyarakat
dan Protokol Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Biro Hubungan Masyarakat dan
Protokol Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Biro Umum Pemerintah
Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Biro Umum Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Inspektorat Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Inspektorat Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Perhubungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Badan Penghubung Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Badan Penghubung Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah (PD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Aksi Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia, Tahun 2018

Rencana Strategis (Renstra), Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra), Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) Republik Indonesia, Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra), BPJS Kesehatan Regional Wilayah Jawa Barat, Tahun
2015-2019

Rencana Strategis (Renstra), Balai Inseminasi Buatan Jawa Barat, Tahun 2015-
2019

Rencana Kerja Tahunan (RKT), Balai Inseminasi Buatan Jawa Barat, Tahun 2015-
2019

LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023								
TUJUAN 1	TANPA KEMISKINAN [MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN]																	
TARGET 1.2.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional																	
INDIKATOR 1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.																	
PROGRAM 1 (SATU)	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah																	
KEGIATAN	Tim Koordinasi Penanggulanga Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat	1.1.	Kebijakan (Rakor TKPK)	Volume	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Rp	1,000,000,000	APBD	BAPPEDA	
		1.2.	Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	1,500,000,000	APBD	BAPPEDA
		1.3.	Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Dokumen	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Rp	400,000,000	APBD	BAPPEDA
		1.4.	Bimbingan Teknis Penanggulangan Kemiskinan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp	1,200,000,000	APBD	BAPPEDA
		1.5.	Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Rp	200,000,000	APBD	BAPPEDA
		1.6.	Dashboard TKPKD Info	Dashboard	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Rp	80,000,000	APBD	BAPPEDA
TARGET 1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.																	
INDIKATOR 1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.																	
PROGRAM 1 (SATU)	Perlindungan dan Jaminan Sosial																	
KEGIATAN 1	Bantuan Tunai Bersyarat/ Jaminan Sosial Keluarga (Program Keluarga Harapan)	1.1.	Indikator Output Terpenuhinya Kebutuhan Hidup KPM melalui Akses Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Sosial	KPM	-	2,825,431	4,139,860	6,265,771	7,116,015	7,201,200	7,201,200	7,201,200	7,201,200	Rp	48,706,731,000	APBD	Dinas Sosial	
				KPM	-	2,825,431	4,139,860	6,265,771	7,116,015	7,201,200	7,201,200	7,201,200	7,201,200	Rp	8,810,547,600	APBN	Dinas Sosial	
TARGET 1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.																	
INDIKATOR 1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahundengan kepemilikan akta kelahiran.																	
PROGRAM 1 (SATU)	Penataan Administrasi Kependudukan																	
KEGIATAN 1	Akselerasi Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	1.1.	Indikator Output : Persentase Cakupan Kepemilikan akte kelahiran	Persentase	78,06	79.25	80.22	83	86	89	93	95	97	Rp	1,300,000,000	APBD Provinsi Jawa Barat	Disdukcapil Provinsi Jawa	
		1.2.	Indikator Output : Jumlah anak pada Panti Asuhan dibawah Pemprov Jabar yang memiliki Akte Kelahiran	Orang	0	0	0	20	50	50	100	100	100			APBD Provinsi Jawa Barat	Disdukcapil Provinsi Jawa Barat	

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)											Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023								
TUJUAN 2	TANPA KELAPARAN																	
TARGET 2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.																	
INDIKATOR 2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)																	
PROGRAM 1 (SATU)	Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan																	
KEGIATAN	Pengembangan Teknologi, Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.1	Meningkatkan Kualitas Mutu Hasil Pertanian	Kelompok	2015	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	APBD	DINAS TPH	
INDIKATOR 2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.																	
PROGRAM 1 (SATU)	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi daerah																	
KEGIATAN 1	Kegiatan Harmonisasi dan Supervisi Aspek Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan	1.1.	rumusan kebijakan peningkatan ketahanan pangan	dokumen	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Rp	500,000,000	APBD	BIRO PRODUKSI DAN INDUSTRI DKPP
INDIKATOR 2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.																	
PROGRAM 1 (SATU)	Peningkatan Ketahanan Pangan																	
KEGIATAN 1	Peningkatan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	1.1	Jumlah intervensi penanganan potensi kerawanan pangan (Desa)	Desa	0	0	7	10	15	20	25	30	35	Rp	4,327,425,000	APBD	Bid Ketersediaan dan Distribusi DKPP	
		1.2	Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan (Point).	point	84.6	86	88	89	89	89	89	89	89	89				
KEGIATAN 2	Penguatan Pemasaran dan Distribusi Pangan	2.1	Persentase Stabilitas pasokan dan harga pangan	persen	0	125	100	100	100	100	100	100	100	Rp	4,317,750,000	APBD		
KEGIATAN 3	Pengembangan Sumber Daya dan Cadangan Pangan	3.2	Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (ton)	ton	180	270	916.540	940	980	1020	1060	2000	2040	Rp	9,018,850,000	APBD		
		3.3	Jumlah Penyaluran Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (kelompok)	kelompok	70	0	184	100	150	200	250	300	350					
Program 2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat													Rp	28,239,500,000	APBN		
INDIKATOR 2.2.2 c	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.																	
PROGRAM 1 (SATU)	Peningkatan Ketahanan Pangan																	
KEGIATAN 1	Peningkatan Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan	1.3	Konsumsi pangan hewani	gr/Kap/hr	54.31	62.41	68.3	70.35	72.46	74.63	76.87	79.18	81.55	Rp	13,522,138,000	APBD	Bidang Konsumsi dan SDM	
		1.1	Penurunan konsumsi beras	kg/Kap/thn	86.95	87.48	83.93	82.67	81.43	80.21	79.01	77.82	76.65					
		1.5	Tingkat konsumsi umbi-umbian	gr/Kap/hr	28.06	32.54	48.99	51.44	54.01	56.71	59.55	62.53	65.65					
		1.6	Tingkat konsumsi sayur dan buah	gr/Kap/hr	203.79	188.29	202.74	205.17	207.63	210.13	212.65	215.2	217.78					
Program 2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat													Rp	689,200,000	APBN		

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp.Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
TARGET 2.3.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
INDIKATOR 2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).																
PROGRAM 1 (SATU)	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian																
KEGIATAN 1	Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Perkebunan	1.1.	Prosentasi Peningkatan Produksi Rata-Rata Komoditas Strategis Perkebunan	%	2.2	2.3	2.4	2.5	2	2.1	2.2	2.3	2.4	Rp	100,000,000	APBD/APBN	Disbun
		1.2.	Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas Strategis Perkebunan	%	2.2	2.3	2.4	2.5	2	2.1	2.2	2.3	2.4	Rp	100,000,000	APBD/APBN	Disbun
		1.3.	Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis	%	2.2	2.3	2.4	2.5	2	2.1	2.2	2.3	2.4	Rp	50,000,000	APBD/APBN	Disbun
		1.4.	Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi	%	2.2	2.3	2.4	2.5	2	2.1	2.2	2.3	2.4	Rp	50,000,000	APBD/APBN	Disbun
KEGIATAN 2	Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian	2.1.	Jumlah Peserta Pelatihan Petani perkebunan	Org	600	425	480	1290	600	700	800	900	1000	Rp	100,000,000	APBD/APBN	Disbun
		2.2.	Peningkatan Status Kelembagaan Petani Perkebunan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2.1	2.2	2.3	2.4	Rp	50,000,000	APBD/APBN	Disbun
		2.3.	Peningkatan Penyuluh Perkebunan Swadaya	%	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2.1	2.2	2.3	2.4	Rp	50,000,000	APBD/APBN	Disbun
KEGIATAN 3	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan	3.1.	Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan	%	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Rp	100,000,000	APBD/APBN	Disbun
KEGIATAN 4	Pemasaran dan Pengolahan Hasil	4.1.	Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org)	Org	40	90	30	40	40	50	60	70	80	Rp	100,000,000	APBD/APBN	Disbun
TARGET 2.4.	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, yang membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.																
INDIKATOR 2.4.1	Penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.																
PROGRAM 1 (SATU)	Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan																
KEGIATAN 1	Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Usaha Peternakan	1.1	Kawasan komoditi peternakan	kawasan		5	5	5	5	5	5	5	5	Rp	3,266,250,000	APBD	Bid Produksi Peternakan DKPP
TARGET 2.5	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, yang membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.																
INDIKATOR 2.5.1	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas																
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: beresiko, tidak beresiko dan resiko yang tidak diketahui																
PROGRAM 1 (SATU)	Peningkatan Produksi Peternakan																
KEGIATAN 1	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak	1.1	pengembangan varietas unggul SDGT lokal	persen	5	6	8	11	11	12	14	15	17	Rp	26,013,346,000	APBD	Bid Produksi Peternakan DKPP
	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pasar Ternak	1.1	Proporsi penurunan resiko hewan ternak dari kepunahan	persen	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Rp	750,000,000	APBD	Bid Produksi Peternakan DKPP
PROGRAM 2	Pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat													Rp	26,748,472,000	APBN	

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
TUJUAN 3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA																
TARGET 3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.																
INDIKATOR 3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).																
PROGRAM 1 (SATU)	Penataan Administrasi Kependudukan																
KEGIATAN	Pengendalian Kependudukan di Jawa Barat	1.1	Indikator Output Terealisasinya Pertemuan Tenaga Penggerak Desa	orang	162	162	132	54	54	54	54	54	54	Rp	1,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat
PROGRAM 2 (DUA)	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga																
KEGIATAN	Ketahanan Keluarga	1.1.	Indikator Output Terealisasinya Rakor Motekar	kegiatan	5	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	45,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat
		1.2.	Indikator Output Terealisasinya Bimtek Motekar	kegiatan	0	s	0	5	5	5	5	5	5	
		1.3.	Indikator Output Terealisasinya Pembinaan Motekar	orang	0	776	666	666	666	666	666	666	666	666			
		1.4.	Indikator Output Terealisasinya Pembinaan Motekar	kegiatan	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2			
		1.5.	Indikator Kajian Turunan Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	draft naskah	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0			
		1.6.	Indikator FGD Turunan Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	kegiatan	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0			
		1.7.	Indikator Output Terealisasinya Peringatan Hari Keluarga Tingkat Nasional	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		1.8.	Indikator Output Terealisasinya Peringatan Hari Keluarga Tingkat Provinsi	kegiatan	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1			
		1.9.	Indikator Output Terealisasinya Seminar Hari Keluarga	orang	150	200	0	125	125	125	125	125	125	125			
		1.10.	Indikator Output Terpenuhinya Honor Tenaga Motekar	orang	0	0	11	8	8	8	8	8	8	8			
		1.11.	Indikator Output Terealisasinya Pembuatan Sistem Informasi Pelaporan Motekar	aplikasi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
		1.12.	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Sistem Informasi Pelaporan Motekar	orang	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0			
		1.13.	Indikator Output Terealisasinya Bimbingan Konseling Ketahanan Keluarga	orang	0	0	666	0	0	0	0	0	0	0			
		1.14.	Indikator Output Terealisasinya Kajian Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketahanan Keluarga	dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
		1.15.	Indikator Output Terealisasinya Pertemuan Kepala Desa 9 Kabupaten Pengirim Buruh Migran	kegiatan	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0			
1.16.	Indikator Output Terealisasinya Pembekalan Motekar	orang	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.17.	Indikator Output Terealisasinya Penguohan Motekar	orrrang	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.18.	Indikator Output Terealisasinya Seleksi Motekar	orrrang	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.19.	Indikator Output Terealisasinya Pemantapan Motekar	orang	0	582	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.20.	Indikator Output Terealisasinya Sosialisasi Program Motekar bagi UPT Kab/Kota	orang	0	564	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.21.	Indikator Output Terealisasinya FGD Program Motekar	kegiatan	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0					

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
PROGRAM 3 (TIGA)	Program Pelayanan Keluarga Berencana																
KEGIATAN 1	Peningkatan Kesertaan ber-KB	1.1	Indikator Output Terealisasinya Bakti Sosial pelayanan KB	orang	5400	4000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	Rp	3,300,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat
		1.2	Indikator Output Terealisasinya Pertemuan Paguyuban KB Pria	kegiatan	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		1.3	Indikator Output Terealisasinya Pembinaan Paguyuban KB Pria	kab/kota	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6
		1.4	Indikator Output Terealisasinya Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	orang	700	750	0	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
		1.5	Indikator Output Terealisasinya Bhakti TNI Manunggal KB Kesehatan	orang	500	750	400	0	0	0	0	0	0	0			
		1.6	Indikator Output Terealisasinya Penguatan Paguyuban KB Pria	kelompok	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0			
TUJUAN 5	KESETARAAN GENDER																
TARGET 5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun																
INDIKATOR 5.1.1*	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.																
PROGRAM 1 (SATU)	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan																
KEGIATAN 1	Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	1.1.	Indikator Output Terealisasinya Buku SIGA yang up to date	buku	300	0	350	0	250	0	250	0	250	Rp	2,500,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat
		1.2.	Indikator Output Terpenuhinya honor operator SIGA	bulan	1	9	10	10	10	10	10	10	10	10
		1.3.	Indikator Output Terealisasinya Bimtek Operator SIGA	orang	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54			
		1.4.	Indikator Output Terealisasinya Rakor Data SIGA	kegiatan	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0
KEGIATAN 2	Pengarusutamaan Gender (PUG)	2.1	Indikator Output Terealisasinya Rakor Persiapan Penilaian APE	kali	0	0	0	4	0	4	0	4	0	Rp	2,500,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat
		2.2	Indikator Output Terealisasinya Penilaian APE	orang	0	0	0	250	0	250	0	250	0				
		2.3	Indikator Output Terealisasinya Penghargaan APE	kali	1	1	1	1	0	1	0	1	0				
		2.4	Indikator Output Terealisasinya Rakor Pokkja PUG	kegiatan	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0			
		2.5	Indikator Output Terealisasinya Capacity Building PUG	kegiatan	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0			
		2.6	Indikator Output Terealisasinya Capacity Building PPRG	kegiatan	14	9	7	0	0	0	0	0	0	0			
		2.7	Indikator Output Terealisasinya Kajian PUG di Bidang Hukum Politik dan Sosial	dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
		2.8	FGD PUG di Bidang Hukum	dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
		2.9	Indikator Output Terealisasinya Sosialisasi PUG	kegiatan	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2.10	Indikator Output Terealisasinya Workshoph PUG	kegiatan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.11	Indikator Output Terealisasinya kebijakan yang responsif gender	dokumen	6	5	3	0	1	0	1	0	1	0	1				

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)									Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
TARGET	5.2.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya																
INDIKATOR	5.2.1.a	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak																
KEGIATAN 1	Perlindungan Khusus Anak	1.1	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Sistem Perlindungan Anak	kali	200	160	100	100	100	100	100	100	100	Rp	4,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat	
		1.2	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan KTA bagi Kelompok Sebaya	orang	300	240	500	200	200	200	200	200	200	200				
		1.3	Indikator Output Terealisasinya Visit Psikologi Anak	lokasi	0	0	6	8	8	8	8	8	8	8				
		1.4	Indikator Output Terealisasinya Bhakti Sosial	kali	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200				
		1.5	Indikator Output Terealisasinya Kunjungan Kerja ke daerah yang maju dalam menangani perlindungan Anak Khusus	provinsi	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0				
		1.6	Indikator Output Terealisasinya Pendampingan Korban KTA	kegiatan	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0				
		1.7	Indikator Output Terealisasinya Penanganan Anak Korban Bencana	orang	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0				
		1.8	Indikator Output Terealisasinya Monitoring dan Evaluasi	kegiatan	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0				
		1.9	Indikator Output Terealisasinya Workshop Data Situasi Anak Jabar	orang	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0				
		1.10	Indikator Output Terealisasinya Model Pendampingan Anak Korban Kekerasan	orang	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0				
KEGIATAN 2	Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	2.1	Indikator Output Terealisasinya Pemilihan Duta Anak Jawa Barat	orang	0	0	0	135	135	135	135	135	135	Rp	4,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat	
		2.2	Indikator Output Terealisasinya Pengiriman Duta Anak Jabar ke Forum Anak Nasional	orang	27	27	27	27	27	27	27	27	27					
		2.3	Indikator Output Terealisasinya Puncak Acara HAN	peserta	400	600	200	200	200	200	200	200	200					
		2.4	Indikator Output Terealisasinya Monev Forum Anak	kab/kota	0	0	0	27	27	27	27	27	27					
		2.5	Indikator Output Terealisasinya Award Forum Anak Jawa Barat	kab/kota	0	0	27	27	27	27	27	27	27					
		2.6	Indikator Output Terealisasinya Pameran Kreatifitas Anak	kali	0	1	0	1	1	1	1	1	1					
		2.7	Jambore Forum Anak	orang	0	0	265	0	0	0	0	0	0					
		2.8	Indikator Output Terealisasinya Pengiriman Duta Anak Jabar ke Kongres Anak Indonesia	orang	10	10	0	0	0	0	0	0	0					
		2.9	Indikator Output Terealisasinya Pertemuan Forum Anak Jawa Barat	orang	135	200	0	0	0	0	0	0	0					
		1.10	Indikator Output Terealisasinya Pemilihan Pengurus Forum Anak Provinsi	orang	81	0	135	0	0	0	0	0	0					

Matriks Bagian 2 Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)									Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
KEGIATAN 3	Pengembang-an Kabupaten/ Kota Layak Anak	3.1	Indikator Output Terealisasinya Sosialisasi Indikator Kab/Kota Layak Anak	orang	330	0	270	300	300	300	300	300	300	Rp	2,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat
		3.2	Indikator Output Terealisasinya Advokasi Gugus Tugas KLA	orang	0	0	0	150	150	150	150	150	150				
		3.3	Indikator Output Terealisasinya RAD Menuju Provila Tahap II	orang	0	0	0	30	30	30	30	30	30				
		3.4	Indikator Output Terealisasinya Workshop KLA	wilayah	0	0	5	0	0	0	0	0	0				
		3.5	Indikator Output Terealisasinya Monev KLA	kegiatan	0	0	1	0	0	0	0	0	0				
		3.6	Indikator Output Terealisasinya sosialisasi Sekolah Ramah Anak	orang	400	570	0	0	0	0	0	0	0				
		3.7	Indikator Output Terealisasinya KLA Award Tingkat Provinsi	orang peserta	0	270	0	0	0	0	0	0	0				
		3.8	Indikator Output Terealisasinya Temuwicara KLA Provinsi	orang	0	108	0	0	0	0	0	0	0				
		3.9	Indikator Output Terealisasinya sosialisasi Pengembangan KLA bagi OPD Provinsi	orang	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3.10	Indikator Output Terealisasinya Sosialisasi Pengembangan KLA	kab/kota	11	0	0	0	0	0	0	0	0				
KEGIATAN 4	Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Pendidikan, dan Budaya	4.1	Indikator Output Terealisasinya TOT Sekolah Ramah Anak	orang	0	0	0	100	100	100	100	100	100	Rp	2,500,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat
		4.2	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Parenting Skill	orang	0	0	250	150	150	150	150	150	150				
		4.3	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	orang	0	0	100	0	0	0	0	0	0				
KEGIATAN 5	Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	5.1	Indikator Output Terealisasinya TOT Puskesmas Ramah Anak	orang	0	0	0	100	100	100	100	100	100	Rp	2,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat
		5.2	Indikator Output Terealisasinya Award Puskesmas Ramah Anak	kab/kota	0	0	0	15	15	15	15	15	15				
		5.3	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Tenaga Kesehatan	orang	0	0	250	0	0	0	0	0	0				

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023					
INDIKATOR 5.2.2.a Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.																		
PROGRAM 1 (SATU) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak																		
KEGIATAN 1	Perlindungan Perempuan dan Advokasi Gugus Tugas Trafficking	1.1	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak bagi Babinsa & Babinkamtibnas	orang	0	0	0	300	300	300	300	300	300	Rp	10,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat	
		1.2	Indikator Output Terealisasinya Advokasi Gugus Tugas	kegiatan	0	1	1	3	3	3	3	3	3					
		1.3	Indikator Output Terealisasinya Community Watch	orang	0	0	0	500	500	500	500	500	500					
		1.4	Indikator Output Terealisasinya Reguler Meeting	kegiatan	0	0	1	1	1	1	1	1	1					
		1.5	Indikator Output Terealisasinya Penjemputan Korban	orang	48	20	25	50	50	50	50	50	50					
		1.6	Indikator Output Terealisasinya Penguatan Jejaring Pencegahan Trafficking	orang	0	800	400	0	0	0	0	0	0					
		1.7	Indikator Output Terealisasinya Sosialisasi Trafficking KDRT, dan Pornografi bagi Siswa Sekolah dan aparat desa	peserta	900	800	400	300	0	0	0	0	0					
		1.8	Indikator Output Terealisasinya Rakor Gugus Tugas Trafficking	orang	125	200	200	100	0	0	0	0	0			
		1.9	Indikator Output Terealisasinya Pertemuan Penegakan Hukum	orang	0	0	81	0	0	0	0	0	0					
		1.10	Indikator Output Terealisasinya MoU dengan provinsi lain	provinsi	0	2	2	0	0	0	0	0	0					
		1.11	Indikator Output Terealisasinya konsultasi ke pusat	kegiatan	0	0	2	0	0	0	0	0	0					
		1.12	Indikator Output Terealisasinya MPU	kegiatan	0	2	3	0	0	0	0	0	0					
		1.13	Indikator Output Terealisasinya Rakor Teknis Perlindungan Perempuan	orang	60	54	0	0	0	0	0	0	0			
		1.14	Indikator Output Terealisasinya Stand Up Comedy dengan Tema Trafficking, KDRT, dan Pornografi	kab/kota	0	27	0	0	0	0	0	0	0					
		1.15	Indikator Output Terealisasinya Evaluasi Perjanjian Kerjasama dengan Provinsi Lain	provinsi	0	5	0	0	0	0	0	0	0					
		1.16	Indikator Output Terealisasinya Pembinaan Gugus Tugas	kab/kota	0	27	0	0	0	0	0	0	0					
		1.17	Indikator Output Terealisasinya Penjajagan Kerjasama dengan Negara Lain	kegiatan	0	2	0	0	0	0	0	0	0					
		1.18	Indikator Output Terealisasinya Kajian Memperkarakan Kasus Trafficking	orang	60	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1.19	Indikator Output Terealisasinya Sosialisasi Korban Trafficking KDRT ke aparat hukum	orang	100	0	0	0	0	0	0	0	0					

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023				
KEGIATAN 2	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	2.1	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Kader PATBM	orang	0	0	120	120	120	120	120	120	Rp	4,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat	
		2.2	Indikator Output Terealisasinya Sosialisasi advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	0	300	750	210	210	210	210	210	210				
		2.3	Indikator Output Terealisasinya TOT Pendidikan dan Bullying di Lingkungan sekolah	orang	0	0	54	52	52	52	52	52	52				
		2.4	Indikator Output Terealisasinya Kegiatan Gathering dengan Radio Komunitas di Jawa Barat	kab/kota	0	0	27	0	0	0	0	0	0				
		2.5	Indikator Output Terealisasinya Pemantauan Tenaga Kerja di Bawah Umur di Perusahaan	kab/kota	0	0	5	0	0	0	0	0	0				
		2.6	Indikator Output Terealisasinya Kerjasama Informasi Tolak Kekerasan	provinsi	0	0	3	0	0	0	0	0	0				
		2.7	Indikator Output Terealisasinya Pengadaan Roll dan Leaflet	buah	0	0	108	0	0	0	0	0	0				
		2.8	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan TOT GN AKSA	orang	0	0	54	0	0	0	0	0	0				
		2.9	Indikator Output Terealisasinya Pendampingan Korban KTA	kab/kota	0	0	5	0	0	0	0	0	0				
		2.10	Indikator Output Terealisasinya Kegiatan Tolak Kekerasan Perempuan dan Anak	orang	0	0	750	0	0	0	0	0	0				
		2.11	Indikator Output Terealisasinya TOT Pendidikan dan Bullying di Lingkungan sekolah	peserta	0	0	54	52	0	0	0	0	0				
KEGIATAN 3	Kesekretariatan P2TP2A Provinsi Jawa Barat	3.1.	Indikator Output Terpenuhinya kebutuhan operasional kesekretariatan P2TP2A	bulan	0	12	12	12	12	12	12	12	Rp	5,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat	
KEGIATAN 4	P2TP2A Provinsi Jawa Barat	4.1	Indikator Output Terealisasinya Iklan Layanan Masyarakat	bulan	0	0	12	7	7	7	7	7	Rp	10,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat	
		4.2	Indikator Output Terealisasinya visit home	kab/kota	0	0	0	27	27	27	27	27	27				
		4.3	Indikator Output Terpenuhinya Kebutuhan Korban	bulan	0	12	0	12	12	12	12	12	12				
		4.4	Indikator Output Terpenuhinya Honor Psikolog Tenaga Ahli	bulan	0	0	0	12	12	12	12	12	12				
		4.5	Indikator Output Terimplementasikannya PPABM	orang	0	0	40	0	0	0	0	0	0				
		4.6	Indikator Output Terealisasinya Kampanye Anti Kekerasan	orang	0	0	200	0	0	0	0	0	0				
		4.7	Indikator Output Terealisasinya Penguatan Pendampingan Korban P2TP2A	orang	0	0	56	0	0	0	0	0	0				
		4.8	Indikator Output Terealisasinya Jambore Warga Binaan P2TP2A	orang	0	0	50	0	0	0	0	0	0				
		4.9	Indikator Output Terealisasinya Rakor P2TP2A	orang	0	180	0	0	0	0	0	0	0				
		4.10	Indikator Output Terealisasinya Diseminasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	orang	0	300	0	0	0	0	0	0	0				
		4.11	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Pemberdayaan Korban	orang	0	32	0	0	0	0	0	0	0				
		4.12	Indikator Output Terealisasinya TOT PATBM	orang	0	60	0	0	0	0	0	0	0				
		4.13	Indikator Output Terealisasinya Silaturahmi dengan Mitra	orang	0	157	0	0	0	0	0	0	0				

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
		4.14	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Penanganan Korban	orang	0	30	0	0	0	0	0	0	0				
		4.15	Indikator Output Terealisasinya Kerjasama Program dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Bali	kegiatan	0	2	0	0	0	0	0	0	0				
		4.16	Indikator Output Terealisasinya Pemantauan Binaan P2TP2A	kab/kota	0	6	0	0	0	0	0	0	0				
		4.17	Indikator Output Terealisasinya Capacity Building Binaan Kelompok Rentan Kekerasan	orang	0	80	0	0	0	0	0	0	0				
KEGIATAN 5	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1.1	Indikator Output Terealisasinya Rakor P2WKSS	orang	108	168	162	81	81	81	81	81	81	Rp	5,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat
		1.2	Indikator Output Terdatanya Desa/Kelurahan Binaan P2WKSS	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		1.3	Indikator Output Terealisasinya Penilaian Awal P2WKSS	desa/kel	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
		1.4	Indikator Output Terealisasinya Monitoring Rechecking P2WKSS	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		1.5	Indikator Output Terealisasinya Penilaian Akhir P2WKSS	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		1.6	Indikator Output Terealisasinya Pemberian Penghargaan bagi Pelaksana Program P2WKSS	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		1.7	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Keterampilan Kelompok PEKKA	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		1.8	Indikator Output Terealisasinya Malam Apresiasi	kegiatan	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1			
		1.9	Indikator Output Terealisasinya Puncak Peringatan Hari Ibu	orang	500	500	200	200	200	200	200	200	200	200			
		1.10	Indikator Output Terealisasinya Lomba Kreatifitas Perempuan	orang	270	500	75	108	108	108	108	108	108	108			
		1.11	Indikator Output Terealisasinya Bhakti Sosial	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		1.12	Indikator Output Terpenuhinya Honor PL PEKKA	bulan	12	12	8	0	0	0	0	0	0	0			
		1.13	Indikator Output Terealisasinya Dialog tentang Perempuan	orang	200	200	100	0	0	0	0	0	0	0			
		1.14	Indikator Output Terealisasinya Pembinaan PL PEKKA	kegiatan	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.15	Indikator Output Terealisasinya Pertemuan Anggota PEKKA	orang	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1.16	Indikator Output Terealisasinya Pameran	kegiatan	3	6	6	0	0	0	0	0	0	0			

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)									Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
TARGET	5.3.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.																
INDIKATOR	5.2.1.a	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga																
KEGIATAN 1	Pendewasaan Usia Perkawinan	1.1	Indikator Output Terealisasinya Sosialisasi PUP	lokasi	5	6	2	2	2	2	2	2	2	Rp	1,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat	
TARGET	5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.																
INDIKATOR	5.5.1.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak																
KEGIATAN 1	Pemberdayaan Hukum, Politik dan Sosial Perempuan	1.1	Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan bagi Camat Perempuan dan Kepala Desa/Lurah Perempuan	orang	0	0	0	108	108	108	108	108	108	Rp	4,000,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat	
		1.2	Sosialisasi Ketahanan Keluarga bagi IKLAD	orang	0	0	0	320	320	320	320	320	320					
		1.3	Sosialisasi bidang Politik bagi KPPI	orang	0	0	0	120	120	120	120	120	120					
		1.4	Forum Komunikasi dan Konsultasi	orang	0	0	0	100	100	100	100	100	100					
		1.5	Penguatan Organisasi Perempuan Bidang Hukum dengan menghadirkan Menkumham	orang	0	0	0	120	120	120	120	120	120					
		1.6	Pelatihan kewirausahaan bagi perempuan disabilitas	orang	0	0	0	50	50	50	50	50	50					
		1.7	Indikator Output Terealisasinya Lomba Paduan Suara	orang	0	0	0	30	30	30	30	30	30					
		1.8	Pagelaran Seni dan Budaya	orang	0	0	0	100	100	100	100	100	100					
		1.9	Training Mubalighoh	orang	0	0	0	50	50	50	50	50	50					
		1.10	Bazar menyambut Idul Fitri	orang	0	0	0	100	100	100	100	100	100					
		1.11	Khitanan Masal	orang	0	0	0	50	50	50	50	50	50					
		1.12	Indikator Output Terealisasinya Capacity Building bagi Anggota KPPI	orang	200	200	270	0	0	0	0	0	0					
		1.13	Indikator Output Terealisasinya Capacity Building bagi Anggota IKIAD	orang	0	0	800	0	0	0	0	0	0					
		1.14	Indikator Output Terealisasinya Seminar Pendidikan Karakter bagi Perempuan	orang	0	0	100	0	0	0	0	0	0					
		1.15	Indikator Output Terealisasinya Saresehan Wawasan Kebangsaan	orang	0	0	100	0	0	0	0	0	0					
		1.16	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Komunikasi Publik	orang	0	30	65	0	0	0	0	0	0					
		1.17	Indikator Output Terealisasinya Lomba Kreatifitas	kegiatan	0	0	1	0	0	0	0	0	0					
1.18	Indikator Output Terealisasinya Wawasan Kebangsaan	orang	0	0	100	0	0	0	0	0	0							
1.19	Indikator Output Terealisasinya Peningkatan Ketahanan Keluarga bagi Perempuan Politik	orang	0	0	324	0	0	0	0	0	0							
1.20	Indikator Output Terealisasinya Penguatan Organisasi Perempuan	orang	75	75	0	0	0	0	0	0	0				

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
INDIKATOR 5.5.2.		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.															
PROGRAM 1 (SATU)		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak															
KEGIATAN 1	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	1.1	Indikator Output Terealisasinya Pendataan Industri Rumahan	lokasi	0	0	0	15	15	15	15	15	15	Rp	1,750,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat
		1.2	Indikator Output Terpenuhinya Honor PL PEKKA	bulan	0	0	0	5	5	5	5	5	5				
KEGIATAN 2	Peningkatan Potensi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat	2.1	Lomba Asmaul Husna	orang	0	0	0	100	100	100	100	100	100	Rp	2,500,000	APBD	DP3AKB Jawa Barat
		2.2	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Usaha Mandiri	orang	0	200	80	120	120	120	120	120	120				
		2.3	Indikator Output Terealisasinya Sosialisasi Ketahanan Keluarga	orang	0	0	300	200	200	200	200	200	200				
		2.4	Indikator Output Terealisasinya Peringatan HUT DWP Jabar	orang	0	0	300	300	300	300	300	300	300				
		2.5	Indikator Output Terealisasinya Pembinaan Pengurus dan Anggota DWP Prov Jawa Barat dan Kab/Kota se-Jawa Barat	kegiatan	0	1	0	1	1	1	1	1	1				
		2.6	Indikator Output Terealisasinya Olah Tubuh	orang	0	0	100	100	100	100	100	100	100				
		2.7	Indikator Output Terealisasinya Bhakti Sosial Donor Darah, kunjungan panti asuhan, panti jompo dan posyandu	orang	0	0	400	600	600	600	600	600	600				
		2.8	Indikator Output Terealisasinya Pelatihan Penyusunan e Reporting	orang	0	0	250	0	0	0	0	0	0				
		2.9	Indikator Output Terealisasinya Seminar Perempuan Anti Korupsi	orang	0	0	300	0	0	0	0	0	0				
		2.10	Indikator Output Terealisasinya Pelaksanaan dan Sosialisasi Paket ABC	orang	0	0	50	0	0	0	0	0	0				
		2.11	Indikator Output Terealisasinya Khitanan Masal	orang	0	0	30	0	0	0	0	0	0				
		2.12	Indikator Output Terealisasinya Lomba Merangkai Hand Bouquet dari Kain Tradisional Indonesia	orang	0	0	175	0	0	0	0	0	0				
		2.13	Indikator Output Terealisasinya Halal Bilhalal	orang	0	0	400	0	0	0	0	0	0				
		2.14	Indikator Output Terealisasinya Halal Bihalal	orang	0	0	400	0	0	0	0	0	0				
2.15	Indikator Output Terealisasinya Pembinaan Bidang Pendidikan bagi Istri-istri PNS	kegiatan	0	3	0	0	0	0	0	0	0						
2.16	Indikator Output Terealisasinya Peningkatan Wawasan Sosial Budaya bagi Istri-istri PNS	kegiatan	0	3	0	0	0	0	0	0	0						

LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

TUJUAN	7	TANPA KEMIS KINAN [MENGAKHIRI KEMIS KINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN]	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
TARGET	7.1.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.																	
INDIKATOR	7.1.1.(a)	Konsumsi Listrik Per Kapita.																	
PROGRAM	1 (SATU)	PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI																	
	KEGIATAN 1	Pembangunan Sambungan Listrik yang Bersumber dari PLN	1.1.	Jumlah Sambungan Rumah/Instalasi Rumah yang terpasang	SR	94,27				100	100						ESDM		
	KEGIATAN 2	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan	2.1.	Jumlah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (UPTL-KS) yang terbin, terawasi dan terkendali		59,94											ESDM		
			2.2.	Jumlah Sistem Informasi yang termutakhirkan data-datanya															ESDM
TARGET	7.2	Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.																	
INDIKATOR	7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan																	
PROGRAM	1 (SATU)	PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI																	
	KEGIATAN 1	Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	1.1.	Jumlah dokumen kajian, riset, dan perencanaan EBT	dokumen												ESDM		
			1.2.	Jumlah instalasi EBT yang dibangun & operasional	MW	1530,5													ESDM
			1.3.	Jumlah kluster dengan pengelola EBT yang terbin	unit				20	3	3	4	5	5					ESDM
			1.4.	Jumlah Desa Mandiri Energi (DEM) yang terbentuk dari Program Mandiri Energi Jabar	desa														ESDM
			1.5.	jumlah kelompok masyarakat di Jabar paham EBT	orang														ESDM
TARGET	7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.																	
INDIKATOR	7.3.1*	Intensitas Energi Primer																	
PROGRAM	1 (SATU)	PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI																	
	KEGIATAN 1	Peningkatan Efisiensi Energi	1.1.	Dokumen kajian/riset, perencanaan, dan materi sosialisasi efisiensi energi	dokumen	4			15	3	3	3	3	3			ESDM		
			1.2.	Jumlah bangunan instansi Pemerintahan yang mengaplikasikan konsep hemat energi	unit				20	2	3	5	5	5				ESDM	
			1.3.	Jumlah kelompok masyarakat yang tersosialisasikan program efisiensi energi (dari hasil kajian & perencanaan efisiensi energi)	kelompok	5			25	5	5	5	5	5				ESDM	
			1.4.	Jumlah Perda Hemat Energi yang disusun dari hasil Fasilitas Pemprov Jabar	dokumen				27	3	5	5	7	7				ESDM	
			1.5.	jumlah kebijakan emisi GRK	dokumen														ESDM
TUJUAN	8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi																	
TARGET	8.3	Megalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.																	
INDIKATOR	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.																	
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																	
	KEGIATAN 1	Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Melalui Padat Karya Infrastruktur Pengerasan Jalan	1.1.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Orang	1,955	385	660	1,100	1,210	1,331	1,464	1,611	1,772	9,958,250,000	APBD	Disnakertrans		
	KEGIATAN 2	Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Melalui padat karya pemberdayaan lingkungan	2.1.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Orang	950	1,100	1,625	850	935	1,029	1,131	1,244	1,369	3,831,142,500	APBD	Disnakertrans		
	KEGIATAN 3	Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	1.1.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Orang	100	70	50	50	55	61	67	73	81	1,131,625,000	APBD	Disnakertrans		
	KEGIATAN 4	Kegiatan Pelaksanaan Penciptaan 2 Juta Serapan Kesempatan Kerja	1.1.	Persentase tenaga kerja formal.	Orang				0	0	0	0	0	0	4,604,580,000	APBD	Disnakertrans		
	KEGIATAN 5	Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL)	1.1.	Persentase tenaga kerja formal.	Orang	150	150	100	100	110	121	133	146	161	1,741,250,000	APBD	Disnakertrans		

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
PROGRAM	2 (DUA)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja															
	KEGIATAN 1	Pelatihan Kerja Mandiri Melalui Mobile Training Unit (MTU)	1.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Orang	1820	90	150	240	264	290	319	351	387	6,389,500,000	APBD	Disnakertrans
			1.2	Persentase tenaga kerja formal.	Orang	1820	90	150	240	264	290	319	351	387	6,389,500,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 2	Uji Kompetensi Tenaga Kerja	2.1	Persentase tenaga kerja formal.	Orang	660	520	240	260	286	315	346	381	419	4,985,000,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 3	Bimtek Produktivitas Pengembangan Usaha Mikro Menengah	3.1	Persentase tenaga kerja formal.	Orang	300	140	20	40	44	48	53	59	64	1,491,500,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 4	Pelatihan Kerja Mandiri Sesuai Minat Usaha	4.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Orang		160	40	100	110	121	133	146	161	2,997,500,000	APBD	Disnakertrans
			4.2	Persentase tenaga kerja formal.	Orang		160	40	100	110	121	133	146	161	2,997,500,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 5	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi	5.1	Persentase tenaga kerja formal.	Orang	416	208	160	160	176	194	213	234	258	6,495,000,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 6	Pelatihan bagi Purna TKI	6.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Orang	340	120	20	60	66	73	80	88	97	2,499,000,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 7	Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri	7.1	Persentase tenaga kerja formal.	Orang	460	260	80	140	154	169	186	205	225	7,283,722,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 8	Pelatihan berbasis masyarakat untuk purna TKI (MTU)	8.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Orang				20	22	24	27	29	32	955,900,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 9	Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	9.1	Persentase tenaga kerja formal.	Orang	180	680	360	380	418	460	506	556	612	3,988,750,000	APBD	Disnakertrans
PROGRAM	2 (DUA)																
	KEGIATAN 1	Kegiatan Pelatihan Pencetakan 100.000 Wirausaha Baru Bidang Pariwisata	1.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Orang				160	176	194	213	234	258	7,500,000,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 1	Kegiatan CLTH Pelatihan Produk Seni	1.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Orang				40	44	48	53	59	64	1,000,000,000	APBD	Disnakertrans
INDIKATOR	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah															
	KEGIATAN 1	Peningkatan Akses Pembiayaan bagi KUMKM	1.1	Persentase Debitur Penyerapan Kredit bagi KUMKM (KCR)	Orang (Debitur)	13,899	8,6%	7,68%	-	-	-	-	-	-	Rp 501.150.000 (2016)	APBD	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
TARGET	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.															
INDIKATOR	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan															
	KEGIATAN 1	Kegiatan Penerapan Sistem Pengupahan di Jawa Barat	1.1.	Upah rata-rata per jam pekerja.	dokumen	13,483	15,339	16,604	18,050	19,494	21,054	22,738	24,557	26,522	4,000,000,000	APBD	Disnakertrans

Matriks Bagian 2 Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGs

PROGRAM	2 (DUA)	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)									Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
PROGRAM	2 (DUA)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja															
	KEGIATAN 1	Pelatihan Kerja Mandiri Melalui Mobile Training Unit (MTU)	1.1.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang	1820	90	150	240	264	290	319	351	387	6,389,500,000	APBD	Disnakertrans
			1.2.	Persentase setengah pengangguran.	Orang	1820	90	150	240	264	290	319	351	387	6,389,500,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 2	Uji Kompetensi Tenaga Kerja	2.1	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang	660	520	240	260	286	315	346	381	419	4,985,000,000	APBD	Disnakertrans
			2.2	Persentase setengah pengangguran.	Orang	660	520	240	260	286	315	346	381	419	4,985,000,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 3	Bimtek Produktivitas Pengembangan Usaha Mikro Menengah	3.1	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang	300	140	20	40	44	48	53	59	64	1,491,500,000	APBD	Disnakertrans
			3.2	Persentase setengah pengangguran.	Orang	300	140	20	40	44	48	53	59	64	1,491,500,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 4	Pelatihan Kerja Mandiri Sesuai Minat Usaha	4.1	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang		160	40	100	110	121	133	146	161	2,997,500,000	APBD	Disnakertrans
			4.2	Persentase setengah pengangguran.	Orang		160	40	100	110	121	133	146	161	2,997,500,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 5	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi	5.1	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang	416	208	160	160	176	194	213	234	258	6,495,000,000	APBD	Disnakertrans
			5.2	Persentase setengah pengangguran.	Orang	416	208	160	160	176	194	213	234	258	6,495,000,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 6	Pelatihan bagi Purna TKI	6.1	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang	340	120	20	60	66	73	80	88	97	2,499,000,000	APBD	Disnakertrans
			6.2	Persentase setengah pengangguran.	Orang	340	120	20	60	66	73	80	88	97	2,499,000,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 7	Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri	7.1	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang	460	260	80	140	154	169	186	205	225	7,283,722,000	APBD	Disnakertrans
			7.2	Persentase setengah pengangguran.	Orang	460	260	80	140	154	169	186	205	225	7,283,722,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 8	Pelatihan berbasis masyarakat untuk purna TKI (MTU)	8.1	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang				20	22	24	27	29	32	955,900,000	APBD	Disnakertrans
			8.2	Persentase setengah pengangguran.	Orang				20	22	24	27	29	32	955,900,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 9	Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	9.1	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang	180	680	360	380	418	460	506	556	612	3,988,750,000	APBD	Disnakertrans
			9.2	Persentase setengah pengangguran.	Orang	180	680	360	380	418	460	506	556	612	3,988,750,000	APBD	Disnakertrans
PROGRAM	3 (TIGA)	Program Pengembangan Destinasi Wisata															
	KEGIATAN 1	Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Melalui Padat Karya Infrastruktur Pengerasan Jalan	1.1.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang	1,955	385	660	1,100	1,210	1,331	1,464	1,611	1,772	9,958,250,000	APBD	Disnakertrans
			1.2.	Persentase setengah pengangguran.	Orang	1,955	385	660	1,100	1,210	1,331	1,464	1,611	1,772	9,958,250,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 2	Kegiatan Perluasan Lapangan Kerja Melalui padat karya pemberdayaan lingkungan	2.1	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang	950	1,100	1,625	850	935	1,029	1,131	1,244	1,369	3,831,142,500	APBD	Disnakertrans
			2.2	Persentase setengah pengangguran.	Orang	950	1,100	1,625	850	935	1,029	1,131	1,244	1,369	3,831,142,500	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 3	Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	3.1	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang	100	70	50	50	55	61	67	73	81	1,131,625,000	APBD	Disnakertrans
			3.2	Persentase setengah pengangguran.	Orang	100	70	50	50	55	61	67	73	81	1,131,625,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 4	Kegiatan Pelaksanaan Penciptaan 2 Juta Serapan Kesempatan Kerja	4.1	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang					0	0	0	0	0	4,604,580,000	APBD	Disnakertrans
			4.2	Persentase setengah pengangguran.	Orang						0	0	0	0	4,604,580,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 5	Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL)	5.1	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang	150	150	100	100	110	121	133	146	161	1,741,250,000	APBD	Disnakertrans
			5.2	Persentase setengah pengangguran.	Orang	150	150	100	100	110	121	133	146	161	1,741,250,000	APBD	Disnakertrans

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
PROGRAM 4 (EMPAT) Program Peningkatan Kesempatan Kerja																	
KEGIATAN 1 Kegiatan Pelatihan Pencetakan 100.000 Wirausaha Baru Bidang Pariwisata	1.1.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang					160	176	194	213	234	258	7,500,000,000	APBD	Disnakertrans	
	1.2.	Persentase setengah pengangguran.	Orang					160	176	194	213	234	258	7,500,000,000	APBD	Disnakertrans	
	KEGIATAN 2 Kegiatan CLTH Pelatihan Produk Seni	2.1.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Orang					40	44	48	53	59	64	1,000,000,000	APBD	Disnakertrans
		2.2.	Persentase setengah pengangguran.	Orang					40	44	48	53	59	64	1,000,000,000	APBD	Disnakertrans
TARGET 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.																	
INDIKATOR 8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.																	
PROGRAM 1 (SATU) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																	
KEGIATAN 1 Penyebaran/luasan Informasi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1.1.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Perusahaan											1,909,000,000	APBD	Disnakertrans	
	KEGIATAN 2 Supervisi dan Pemeriksaan Norma Kerja Perempuan, Anak dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2.1.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Perusahaan											969,280,000	APBD	Disnakertrans
		KEGIATAN 3 Gerakan Efektif Masyarakat Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1.1.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Perusahaan										2,234,155,000	APBD	Disnakertrans
	KEGIATAN 4 Supervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan BPPK Wilayah II	2.1.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Perusahaan			4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,985,000,000	APBD	Disnakertrans	
	KEGIATAN 5 Supervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan BPPK Wilayah I	1.1.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Perusahaan			2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	3,990,050,000	APBD	Disnakertrans	
	KEGIATAN 6 Supervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan BPPK Wilayah III	2.1.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Perusahaan			1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	2,995,000,000	APBD	Disnakertrans	
	KEGIATAN 7 Supervisi/Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan BPPK Wilayah IV	1.1.	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Perusahaan			3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	5,500,000,000	APBD	Disnakertrans	
TARGET 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.																	
INDIKATOR 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.																	
PROGRAM 1 (SATU) Pengembangan Pemasaran Pariwisata																	
KEGIATAN 1 Promosi Pariwisata Jawa Barat Pasar Mancanegara	1.1.	Partisipasi Event Promosi, Seni dan Budaya Pasar Mancanegara	event promosi	3 (2016)			2	0	3	3	3	3	3	15,000,000,000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	1.2.	Familiarization Tour Pasar Mancanegara	kali	1 (2016)			0	0	1	1	1	1	1	2,500,000,000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	1.3.	Promosi Pariwisata, Seni dan Budaya melalui Media	media	3 (2016)			3	0	3	3	3	3	3	2,000,000,000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
INDIKATOR 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.																	
PROGRAM 1 (SATU) Pengembangan Pemasaran Pariwisata																	
KEGIATAN 1 Promosi Pariwisata Jawa Barat Pasar Nusantara	1.1.	Penyelenggaraan Event Promosi, Seni dan Budaya Pasar Nusantara	event promosi	2 (2016)			1	1	2	2	2	2	2	10,000,000,000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	1.2.	Partisipasi Event Promosi, Seni dan Budaya Pasar Nusantara	event promosi	4 (2016)			1	2	3	3	3	3	3	7,500,000,000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	1.3.	Familiarization Tour Pasar Nusantara	kali	1 (2016)			1	0	1	1	1	1	1	1,750,000,000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	1.4.	Promosi Pariwisata, Seni dan Budaya melalui Media	media	3 (2016)			3	0	3	3	3	3	3	2,000,000,000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
TUJUAN 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur																	
TARGET 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.																	
INDIKATOR 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.																	
PROGRAM 1 (SATU) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi daerah																	
KEGIATAN 1 Kegiatan Harmonisasi dan Supervisi Aspek Industri Perdagangan dan Pariwisata	1.1.	rumusan kebijakan penggunaan produk dalam negeri Provinsi Jawa Barat	dokumen	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	500,000,000	APBD	BIRO PRODUKSI DAN INDUSTRI	
	1.2.	rumusan kebijakan Pengembangan rencana pembangunan industri Provinsi (RPIP) tahun 2017-2037	dokumen	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	500,000,000	APBD	BIRO PRODUKSI DAN INDUSTRI	

**LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN**

Matriks Bagian 2 Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGs																	
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)			SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023		
TUJUAN	6	Air Bersih dan Sanitasi Layak															
TARGET	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua															
INDIKATOR	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman															
KEGIATAN 1	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan	1.1	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan						60000 SR	60000 SR	60000 SR	60000 SR	60000 SR	750,000	APBD Provinsi	DISPERKIM	
	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	1.2	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan/Desa Miskin/Rawan Air												APBD Provinsi		
	a. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Universal Akses Air Minum								200 desa	200 desa	200 desa	200 desa	200 desa	500,000	APBD Provinsi		
	b. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan								50 desa	50 desa	50 desa	50 desa	50 desa	125,000	APBD Provinsi		
	c. Penyelenggaraan Program Pansimas								15 kabupaten	15 kabupaten	15 kabupaten	15 kabupaten	15 kabupaten	3,750	APBD Provinsi		
KEGIATAN 2	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Khusus	2.1	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Khusus						2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	42,000	APBD Provinsi		
KEGIATAN 3	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional	3.1	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional						1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	801,000	APBD Provinsi		
KEGIATAN 4	Identifikasi Cakupan Pelayanan Air Minum	2.2	Teridentifikasinya data cakupan pelayanan air minum												APBD Provinsi		
	a. Penyusunan Data Baseline SPAM Jawa Barat								1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5,000	APBD Provinsi		
	b. Monitoring Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2,500	APBD Provinsi		
PROGRAM 2 (DUA)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman																
KEGIATAN 1	Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.1	Tersedianya dokumen perencanaan dalam rangka mendukung pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan		-	3 dokumen	4 dokumen	3 Dokumen	5 Dok	6 Dok	2 Dok	-	-	14,500		DISPERKIM	
KEGIATAN 2	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (SPALD)	2.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik (%)		65.03	65.64	67.01	-	-	-	-	379 KK	379.167 KK	7,505			
KEGIATAN 3	Penyelenggaraan Pembangunan Sanitasi Permukiman Jawa Barat (BTL - Hibah Sanimas Jabar)				65.03	65.64	67.01	-	125.856 KK	125.856 KK	125.856 KK	125.856 KK	125.856 KK	3,146.4			
KEGIATAN 4	Pendampingan Penyelenggaraan Pembangunan Sanitasi Permukiman Jawa Barat (Pendampingan Sanimas Jabar)				65.03	65.64	67.01	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	390,000			
KEGIATAN 5	Fasilitasi Bantuan Teknis Penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Jawa Barat (Sanimas IDB)				-	-	-	-	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	8,600			

Matriks Bagian 2 Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGs																
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
TUJUAN 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan																
TARGET 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.																
INDIKATOR 11.1.1(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau																
PROGRAM 1 (SATU) Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman																
KEGIATAN 1	Penyusunan Pedoman Model Rumah Swadaya Sederhana Sehat	1.1	Cakupan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni						1 kegiatan					500	APBD Provinsi	
KEGIATAN 2	Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.1	Cakupan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	2460	2989	653	9956	20000	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	132,800	APBD Provinsi		
KEGIATAN 3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.1	Cakupan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni						20,000	20,000	20,000	20,000	1,500	APBD Provinsi		
KEGIATAN 4	Evaluasi dan Updating Data Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Swadaya	4.1	Cakupan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni						1 kegiatan				500	APBD Provinsi		
KEGIATAN 5	Pembuatan Model Prototif Rumah Tanggap Darurat Bencana	5.1	Cakupan penanganan perumahan kawasan bencana						1 Unit				1,000	APBD Provinsi		
TARGET 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.																
INDIKATOR 11.4.1(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.																
PROGRAM 1 (SATU) Pengembangan Nilai Budaya																
KEGIATAN 1	Gelar Seni dan Budaya	1.1	Dialog Budaya	kali	1 (2016)	1	1	0	0	1	1	1	1	2,500,000,000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.2	Gelar Seni Tradisi	kali	1 (2016)	1	1	0	0	1	1	1	1	5,000,000,000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KEGIATAN 2	Aktualisasi Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah	2.1	Lomba Presenter	kali	1 (2016)	1	1	0	1	1	1	1	1	2,000,000,000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		2.2	Lomba Pantun	kali	1 (2016)	1	0	0	1	1	1	1	1	2,000,000,000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KEGIATAN 3	Festival Keraton Nusantara	3.1	Keikutsertaan pada Festival Keraton Nusantara	kali	1 (2016)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,250,000,000	APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
TUJUAN 12 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab																
TARGET 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.																
INDIKATOR 12.4.1 (a) Jumlah Peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU																
PROGRAM 1 (SATU) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan																
KEGIATAN 1	Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup	1.1	Jumlah Dokumen lingkungan yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat	dokumen	13 (2016)	13	36	20	20	20	20	20	20	2,239,451,600	APBD	DLH
KEGIATAN 2	Pelaksanaan PROPERDA	1.2	Jumlah industri peserta PROPERDA yang mencapai minimal ranking BIRU	perusahaan	372 (2016)	372	389	390	400	410	420	430	440	5,000,000,000	APBD	DLH

Matriks Bagian 2 Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGs																	
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023	
TARGET	13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.															
INDIKATOR	13.2.1(a)	Jumlah dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).															
PROGRAM	1 (SATU)	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim															
KEGIATAN 1	Penyusunan Laporan PEP RAD-GRK	1.1	Jumlah Dokumen PEP RAD-GRK	dokumen	1 (2016)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000,000,000	APBD	BPBD
INDIKATOR	13.2.2.	Jumlah kota/kabupaten yang memiliki RAD-GRK.															
PROGRAM	1 (SATU)	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim															
KEGIATAN 1	Pembinaan Penyusunan RAD-GRK	1.2	Jumlah dokumen RAD-GRK yang dimiliki kota/kabupaten	dokumen	2 (2016)	2	4	6	8	10	12	14	16	2,500,000,000	APBD	Bappeda	
KEGIATAN 2	Pengembangan Kampung Iklim	2.1	Jumlah lokasi yang dilakukan pengembangan program kampung iklim	kampung	40 (2016)	40	60	80	100	120	140	160	180	10,000,000,000	APBD	DLH	
KEGIATAN 3	Pembinaan Pelaporan Inventarisasi Emisi GRK Kab/Kota	3.1	Jumlah Pelaporan Inventarisasi Emisi GRK Kab/Kota	dokumen	2 (2016)	2	4	6	8	10	12	14	16	2,500,000,000	APBD	DLH	
TUJUAN	14	Ekosistem Lautan															
TARGET	14.2.	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.															
INDIKATOR	14.2.1(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.															
PROGRAM	1 (SATU)	Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan															
KEGIATAN 1	Penyusunan dan Sosialisasi RZWP3K	14.1.	PERDA Tentang RZWP3K No. Tahun 2018	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,616,600,000	APBD	DKP Provinsi Jawa Barat	
TARGET	14.4	Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.															
INDIKATOR	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.															
PROGRAM	1 (SATU)	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan															
KEGIATAN 1	Operasi Pengawasan Bersama (APBN)	14.1.	Operasi Pengawasan Bersama di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Barat selama 40 hari operasi	40 hari	40 hari	40 hari	40 hari	50 hari	50 hari	50 hari	50 hari	50 hari	1,050,000,000	dekon APBN satker 05	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	
TARGET	14.5.	14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.															
INDIKATOR	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan															
KEGIATAN 1			14.1.	Pemanfaatan Kawasan Konservasi Berkelanjutan	Hektar	32,253.99	32,253.99	32,253.99	32,253.99	32,253.99	32,253.99	32,253.99	32,253.99	32,253.99	2,000,000,000	APBN	DKP Provinsi Jawa Barat
			14.2.	Revitalisasi Kawasan Pesisir	km	-	0	8.5	12.25	18	26	37	54	79	45,000,000,000	APBN	DKP Provinsi Jawa Barat
			14.3.	Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Ha	20	60	60	100	150	200	260	350	500	3,500,000,000	APBD	DKP Provinsi Jawa Barat

Matriks Bagian 2 Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGs																	
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023	
TARGET	14.6.	14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization .															
INDIKATOR	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.															
PROGRAM	1 (SATU)	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan															
	KEGIATAN 1	Kegiatan Sosialisasi Aturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Pengawasan Berbasis Masyarakat	14.1.	Sosialisasi Aturan Perundang-Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Pengawasan Berbasis Masyarakat di 8 Kab/Kota	Kab/Kota	10	10	8	11	24	24	24	24	700,000,000	PAD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
TARGET	14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.															
INDIKATOR	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terindangi.															
PROGRAM	1 (SATU)	Pengembangan Perikanan Tangkap															
	KEGIATAN 1	Sehat Nelayan	14.1.	Terfasilitasinya Sehat Nelayan	Bidang Tanah	6534	1250	1000	1500	1000	1000	500	500	500	2000000000	APBN/APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	KEGIATAN 2	Asuransi Nelayan	14.1.	terfasilitasinya Asuransi Nelayan	Orang	35000	19000	15000	12000	8000	5000	1000	500	4500000000	APBN/APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
TUJUAN	14	Ekosistem Lautan															
TARGET	14.b.	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan laut yang sehat dan produktif.															
INDIKATOR	14.b.1*	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.															
PROGRAM	1 (SATU)	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi daerah															
	KEGIATAN 1	Kegiatan Harmonisasi dan Supervisi Aspek Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan	14.1.	Rumusan kebijakan perlindungan nelayan skala kecil	dokumen	0	0	0	0	1	1	1	1	1	400,000,000	APBD	BIRO PRODUKSI DAN INDUSTRI
TUJUAN	15	Ekosistem Daratan															
TARGET	15.2.	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.															
INDIKATOR	15.1.2	Luas taman kehati															
PROGRAM	1 (SATU)	Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup															
	KEGIATAN 1	Pengembangan Taman Kehati	1.1	Peningkatan luas taman kehati	Ha	6534	151.23	151.23	152	153	154	155	156	157	50,000	APBD	DLH
	KEGIATAN 2	Pengembangan Kelembagaan Taman Kehati	1.2	Peningkatan pengelolaan Taman Kehati	Unit	2 (2016)	2	2	3	3	4	4	5	6	1,000	APBD	DLH
	KEGIATAN 3	Pengembangan Nilai Manfaat Taman Kehati	1.3	Peningkatan Manfaat Taman Kehati	Unit	2 (2016)	2	2	3	3	4	4	5	6	1,000	APBD	DLH
	KEGIATAN 4	Pengayaan Koleksi Tanaman Taman Kehati	1.4	Peningkatan Jumlah Jenis Tanaman	Jenis	104 (2016)	104	5	5	5	5	5	5	5	2,500	APBD	DLH
TARGET	15.3.	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.															
INDIKATOR	15.3.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan															
PROGRAM	1 (SATU)	Pengelolaan Kawasan Lindung															
	KEGIATAN 1	Kajian Tutupan Lahan pada Kawasan Lindung	1.1	Jumlah dokumen kajian	Dokumen	1 (2016)	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000	APBD	Dishut

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022	2023		
PROGRAM 2 (DUA) Pengelolaan Kawasan Lindung																
KEGIATAN 1	Penyiapan Penataan Batas Kawasan Hutan	L1	Jumlah lokasi kawasan hutan yang siap ditata batas	Lokasi	1 2 (2016)	12	4	7	4	4	4	4	4	2,898	APBD	Dishut
KEGIATAN 2	Pembinaan Kelompok Model Desa Konservasi	2.1	Jumlah Kelompok Desa Konservasi Binaan	Kelompok	7 (2016)	7	2	2	2	2	2	2	2	1,000	APBD	Dishut
KEGIATAN 3	Pembentukan Model Desa Konservasi	3.1	Jumlah Desa Konservasi	Desa	7 (2016)	7	2	2	2	2	2	2	2	5,250	APBD	Dishut
INDIKATOR 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.																
PROGRAM 1 (SATU) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi daerah																
KEGIATAN 1	Kegiatan Harmonisasi dan Supervisi Aspek Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup	15.1.	rumusan kebijakan rehabilitasi lahan kritis	dokumen	0	0	0	1	1	1	1	1	1	500,000,000	APBD	BIRO PRODUKSI DAN INDUSTRI
		15.2.	rumusan kebijakan pengendalian gangguan keamanan hutan negara	dokumen	0	0	0	1	1	1	1	1	1	500,000,000	APBD	BIRO PRODUKSI DAN INDUSTRI
		15.3.	rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan	dokumen	0	0	0	1	1	1	1	1	1	500,000,000	APBD	BIRO PRODUKSI DAN INDUSTRI
PROGRAM 1 (SATU) Pengelolaan Kawasan Lindung																
KEGIATAN 1	Pengelolaan Sumber Benih Hutan Daerah Kiara Payung	L1	Tersedianya kebun benih semai	Ha	1 2 (2016)	0	0	5	5	5	5	5	5	1,800	APBD	Dishut
KEGIATAN 2	Pelayanan Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Hutan	2.1	Tersediany alayan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit dan penetapan pengada pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan terdaftar	Sertifikat	0 (2016)	0	0	50	50	50	50	50	50	2,400	APBD	Dishut
KEGIATAN 3	Pembinaan Penangkar dan Pengedar Benih	3.1	Terbinanya pengada dan pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan; tertibnya tata usaha perbenihan tanaman hutan	Kab/Kota	0 (2016)	0	0	11	12	13	14	15	16	1,472	APBD	Dishut
KEGIATAN 4	Fasilitasi Penyediaan Sumber benih dan sertifikasi benih/bibit tanaman hutan di Jawa Barat	4.1	Dokumen hasil identifikasi sumber benih dan bibit tanaman hutan	Dokumen	0 (2016)	0	1	0	1	1	1	1	1	3,000	APBD	Dishut
KEGIATAN 5	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Benih Tanaman Hutan dan Sumber Daya Genetik (SDG)	5.1	Terbangunnya kebun benih semai ; teridentifikasi dan terinventrisasi sumberdaya genetik (SDG)	Ha	0 (2016)	0	0	9	9	9	9	9	9	25,300	APBD	Dishut
KEGIATAN 6	Penyusunan Rencana Pengelolaan Tahura/Rencana Pengelolaan DAS/Rencana Tindak DAS/RPRHL Provinsi Jawa Barat	6.1	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	0 (2016)	0	3	2	2	2	2	2	2	2,400	APBD	Dishut
KEGIATAN 7	Pembuatan Persemaian di Jawa Barat	7.1	Jumlah ketersediaan bibit	Bibit	1000000 (2016)	1,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	54,000	APBD	Dishut
KEGIATAN 8	Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	8.1	Jumlah Kelompok jasa lingkungan kawasan konservasi	Kelompok Masyarakat	1 (2016)	1.00	1	2	2	2	2	2	2	6,000	APBD	DLH
KEGIATAN 9	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jasa Lingkungan	9.1	Data hasil monitoring	Dokumen	0 (2016)	0	0	0	4	4	4	4	4	2000	APBD	Dishut

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023		
PROGRAM	2 (DUA)	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan														
KEGIATAN 1	Sertifikasi PHBML dan Monitoring evaluasi UMHR	1.1	Jumlah UMHR dalam proses sertifikasi	Sertifikat	14 (2016)	14	1	6	7	8	9	10	11	12,873	APBD	Dishut
KEGIATAN 2	RTM Ploting penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	2.1	Jumlah peserta pelatihan	Orang	0 (2016)	0	0	60	60	60	60	60	60	900	APBD	Dishut
KEGIATAN 3	Kegiatan Penyuluhan Kehutanan di Jawa Barat	3.1	Terbinanya pengada dan pengedar benih dan atau bibit tanaman hutan; terbnyta tata usaha perbenihan tanaman hutan	Orang	0 (2016)	0	100	30	30	30	30	30	30	3666	APBD	Dishut
KEGIATAN 4	Pendampingan Pembentukan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR)	4.1	Jumlah Unit Manajemen Hutan Rakyat Lestari yang didampingi pembentukannya	Unit	14 (2016)	14	3	9	10	10	10	10	10	7945	APBD	Dishut
KEGIATAN 5	WUB-Penciptaan Wirausaha Baru Bidang Kehutanan	5.1	Jumlah peserta pelatihan	Orang	0 (2016)	0	100	500	500	500	500	500	500	17,546	APBD	Dishut
KEGIATAN 6	Pelatihan Aneka Usaha Kehutanan	6.1	Jumlah peserta pelatihan	Orang	0 (2016)	0	50	240	250	250	250	250	250	6,367	APBD	Dishut
TARGET	15.4	Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.														
INDIKATOR	15.4.1	Persentase Tutupan Hutan														
PROGRAM	1 (SATU)	Pengelolaan Kawasan Lindung														
KEGIATAN 1	Pembangunan Hutan Daerah Kiara Payung	1.1	Luas pengkayaan tanaman di hutan daerah Kiara payung	Ha	260 (2016)	260	90	100	100	100	100	100	100	11,189	APBD	Dishut
KEGIATAN 2	Rehabilitasi Hutan Mangrove	2.1	Luas mangrove dan hutan pantai yang ter-rehabilitasi	Ha	2360 (2016)	2,360	500	500	500	500	500	500	500	52,321	APBD	Dishut
KEGIATAN 3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Hutan Tahura Ir. H.Djuanda	3.1	Luas pengkayaan tanaman di Kawasan Tahura Ir. H. Djuanda	Ha	480 (2016)	480	80	5	5	5	5	5	5	8,197	DAK	Dishut
KEGIATAN 4	Rehabilitasi Daerah Aliran sungai (DAS) di Jawa Barat	4.1	Luas DAS yang terehabilitasi	Ha	16500 (2016)	16,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	277,500	APBD	Dishut
TARGET	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.														
INDIKATOR	15.9.1(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.														
PROGRAM	1 (SATU)	Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup														
KEGIATAN 1	Penyusunan Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	1.1	Rencana Pemanfaatan Kehati	Kawasan	1 (2016)	1.00	o	1	1	1	1	1	1	2,500	APBD	DLH
KEGIATAN 2	Inventarisasi kawasan Esensial Jawa Barat	2.1	Kawasan Esensial Jawa Barat	Dokumen	0 (2016)	0.00	o	1	1	1	1	1	1	5,000	APBD/APBN	DLH
KEGIATAN 3	Inventarisasi kawasan Karst Jawa Barat	3.1	Kawasan Karst Jawa Barat	Dokumen	0 (2016)	0.00	0	1	1	1	1	1	1	5,000	APBD/APBN	DLH
KEGIATAN 4	Penyusunan Profil dan Rencana Induk Kehati Jawa Barat	4.1	Profil Kehati Jawa Barat	Dokumen	1 (2016)	1.00	1	1	1	1	1	1	1	2,000	APBD/APBN	DLH
TARGET	15.a	Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.														
INDIKATOR	15.a.1.	Anggaran pemerintah daerah untuk konservasi dan keanekaragaman hayati														
PROGRAM	1 (SATU)	Penataan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup														
KEGIATAN 1	Pengalokasian anggaran untuk konservasi dan keanekaragaman hayati	1.1	Jumlah anggaran	Rupiah	Rp8,718,000,000	Rp8,718,000,000	Rp9,988,585,550	Rp10,000,000,000	Rp11,000,000,000	Rp12,000,000,000	Rp13,000,000,000	Rp14,000,000,000	Rp15,000,000,000	65,000	APBD	DLH dan Dishut

**LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA**

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
TUJUAN	16	PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh															
TARGET	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.															
INDIKATOR	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pendidikan Politik Masyarakat															
KEGIATAN 1	Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan	1.1.	Indikator Output Terbinanya Anggota Parpol yang memahami tata cara Pengelolaan Bantuan Keuangan sebanyak 800 orang Peserta	Orang	738,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 2	Penguatan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat	2.1	Indikator Output Terlaksananya Aspek Indeks Demokrasi di Jawa Barat	Dokumen	0	0	123,995,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	APBD	BAKESBANGPOL
INDIKATOR	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah															
KEGIATAN 1	Penguatan Peran dan Fungsi Forum Forum Mitra Strategis Bakesbangpol Jawa Barat	1.1.	Indikator Output Terbangunnya sinkronisasi, koordinasi dan komunikasi mitra - mitra kesbangpol se Jawa Barat	Dokumen	0	369,200,000	128,410,000	200,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	400,000,000	400,000,000	1,850,000,000	APBD	BAKESBANGPOL	
PROGRAM	2 (SATU)	Program Pendidikan Politik Masyarakat															
KEGIATAN 1	Bimbingan Teknis Tata Cara Pengajaran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban	1.1.	Indikator Output Terbinanya Anggota Ormas yang memahami tata cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah sebanyak 800 orang Peserta	Orang	742,828,800	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 2	Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa	2.1	Indikator Output Terbinanya peserta untuk menjadi Kader Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa, sebanyak 900 orang peserta kegiatan yang telah dilaksanakan, dan 2000 orang peserta target 5 tahun yang akan datang yang berasal dari unsur Generasi Muda.	722,966,250	0	404,900,000	300,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	600,000,000	600,000,000	2,700,000,000	APBD	BAKESBANGPOL	
KEGIATAN 3	Pemantapan Bela Negara	3.1	Indikator Output Meningkatnya Pemahaman Bela Negara bagi Generasi Muda sebanyak 1.381 peserta telah melaksanakan kegiatan, dan 2.500 orang peserta target 5 tahun yang akan datang	Orang	494,525,000	702,655,000	203,816,000	399,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	600,000,000	600,000,000	2,700,000,000	APBD	BAKESBANGPOL	
KEGIATAN 4	Peningkatan Tata Nilai dan Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara bagi Generasi Muda	4.1	Indikator Output Terbinanya peserta untuk menjadi Kader Peningkatan Tata Nilai dan Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara bagi Generasi Muda sebanyak 510 orang telah melaksanakan kegiatan dan 2600 orang peserta target 5 th yang berasal dari unsur Generasi Muda.	Orang	-	376,800,000	-	298,700,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	3,000,000,000	APBD	BAKESBANGPOL	
KEGIATAN 5	Pemantapan Ideologi	5.1	Indikator Output Terbinanya peserta untuk menjadi Kader Pemantapan Ideologi Bangsa sebanyak 800 orang peserta telah melaksanakan kegiatan dan 2000 orang peserta menjadi target 5 tahun	Orang	-	419,940,000	332,547,200	298,700,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	2,500,000,000	APBD	BAKESBANGPOL	

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023		
PROGRAM 2 (DUA) Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat																
KEGIATAN 1	Forum Komunikasi Masyarakat dalam Pencegahan Konflik	1.1	Indikator Output Terciptanya kesamaan persepsi seluruh elemen masyarakat dalam rangka membangun kebersamaan dalam menciptakan kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang aman, tenang dan kondusif.	Dokumen	409,478,000	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 2	Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama	2.1	Indikator Output Jumlah Anggota Ormas Keagamaan yang mendapatkan Pembinaan melalui Komunikasi dan Kerjasama sebanyak 480 orang Peserta telah melaksanakan kegiatan dan 1400 orang peserta untuk target kegiatan 5 tahun	Orang	489,987,000	430,400,000	80,045,000	349,920,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	2,000,000,000	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 3	Pemberdayaan Ormas di Jawa Barat	3.1.	Indikator Output Meningkatnya jumlah anggota ormas yang memahami Peran dan Fungsi Ormas sebagai Mitra kerja Pemerintah Daerah sebanyak 1500 orang peserta	Orang	468,512,500	393,350,000	50,560,000	248,865,000	350,000,000	350,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	1,900,000,000	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 4	Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan SDA di Jawa Barat	4.1.	Indikator Output Jumlah Kelompok Masyarakat/Ormas yang memahami Penguatan ketahanan Ekonomi yang berbasis Kearifan Lokal sebanyak 475 orang peserta	Orang	510,017,500	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 5	Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Potensi Konflik di Jawa Barat	6.1	Indikator Output Meningkatnya Kewaspadaan dan Deteksi Dini Indikasi timbulnya Konflik di Jawa Barat	Dokumen	723,403,000	585,880,000	178,080,000	299,000,000	400,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	400,000,000	1,850,000,000	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 6	Rencana Aksi penanganan Konflik Sosial di Jawa Barat	7.1.	Indikator Output Tersedianya Peta Situasi dan Kondisi Sosial di Jawa Barat	Data	584,981,000	447,499,000	88,987,500	298,100,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	1,750,000,000	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 8	Jambore Ormas	8.1.	Indikator Output Terlaksananya Pemberdayaan anggota Ormas sebanyak 1.496 orang peserta dalam usaha Mendukung Pembangunan di Jawa Barat melalui Jambore Ormas dan 2500 orang anggota ormas menjadi target 5 tahun	Orang	0	0	551,148,000	398,640,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	3,000,000,000	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 9	Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Jawa Barat	9.1	Indikator Output Terfasilitasinya Pembentukan PPWK (Pusat Pembinaan Wawasan Kebangsaan) dan 5962 kader yang menjadi target 5 tahun	Dokumen	0	0	0	196,817,437	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	3,750,000,000	APBD	BAKESBANGPOL

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023		
TARGET	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.														
INDIKATOR	16.7.2.(c)	Indeks Hak - Hak Politik														
KEGIATAN 1	Pendidikan Budaya dan Etika Politik bagi Pelajar dan Mahasiswa	1.1.	Indikator Output Meningkatnya Pemahaman 900 orang Pelajar dan Mahasiswa tentang Budaya dan Etika Politik	Orang	491,590,000	668,220,000	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 2	Pendidikan Politik Masyarakat	2.1.	Indikator Output Terlaksananya Pendidikan Politik kepada 2.035 peserta dari berbagai Elemen Masyarakat	Orang	491,094,275	735,600,000	161,675,000	749,000,000	1,000,000,000	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 3	Peningkatan Pelayanan/Kemudahan Anggota Masyarakat Difabel dalam Pemilukada	3.1	Indikator Output Terlaksananya Pelayanan dan Pemahaman tentang Pendidikan Politik serta Hak - Hak Kaum Difabel kepada 700 orang Peserta	Orang	0	588,575,000	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 4	Diseminasi Komunikasi Politik antara Supra dan Infra Politik dengan Komponen Masyarakat di Jawa Barat	2.1	Indikator Output meningkatnya Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Dokumen	0	0	139,070,000	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 5	Bazar Politik Demokrasi Rakyat Jawa Barat menjelang Pilkada serentak Tahun	5.1.	Indikator Output Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak di Jawa Barat Tahun 2018	Orang	0	0	1,000,000,000	APBD	BAKESBANGPOL
TARGET	16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.														
INDIKATOR	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.														
INDIKATOR	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.														
PROGRAM	1 (SATU)	Penataan Administrasi Kependudukan														
KEGIATAN 1	Akselerasi Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	1.1	Indikator Output : Persentase Cakupan Kepemilikan akte kelahiran	Persentase	72	75	78.6	82.2	85.8	89.4	93	96.6	98	1,300,000,000	APBD Provinsi Jawa Barat	Disdukcapil Provinsi Jawa Barat
		1.2	Indikator Output : Jumlah anak pada Panti Asuhan dibawah Pemprov Jabar yang memiliki Akte Kelahiran	Orang	0	0	0	20	50	50	100	100	100		APBD Provinsi Jawa Barat	Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

MATRIKS BAGIAN 2 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
TUJUAN 1	TANPA KEMISKINAN [MENGAHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN]													
INDIKATOR SDGs : 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.														
PROGRAM 1 : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. (Prosentase KFM Yang Meningkatkan Produktifitasnya Secara Sosial Ekonomi)		%			16	16	17	17	18			129.565.627.014	APBD	Dinsos
KEGIATAN 1 :	Distribusi Raskin	1.1.	Jumlah RTSM yang menerima Raskin	Orang		0	0	0	0	0	0	100.383.504.514	APBD	Dinsos
KEGIATAN 2 :	Penataan sasaran penerima bantuan Sosial	2.1.	Jumlah Sasaran Penerima Bantuan Sosial	Orang		0	0	1.500	1.500	1.700		528.000.000	APBD	Dinsos
INDIKATOR SDGs : 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.														
PROGRAM	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. (Persentase penduduk miskin yang menerima bantuan iuran)	%			100	100	100	100	100	100	100	121.587.480.516	APBD	Dinkes
KEGIATAN 1 :	Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin	1.1.	Jumlah Pembayaran Premi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Jiwa		116.091	116.092	116.092	116.092	116.092	116.092	#VALUE!	APBD	Dinkes
KEGIATAN 2 :	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Bantuan Gubernur)	2.1.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin dengan SKTM	-		0	0	0	0	0	0	36.117.028.800	Bantuan Gubernur	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.														
PROGRAM	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	%	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%		51	52	53	54	55			APBD	Disnaker
KEGIATAN 1 :	Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	1.1.	Jumlah Kegiatan Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsos Ketenagakerjaan	Kegiatan		8	8	8	8	8	8		APBD	Disnaker
INDIKATOR SDGs : 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.														
PROGRAM	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	%	Prosentase KFM Yang Meningkatkan Produktifitasnya Secara Sosial Ekonomi	%		16	16	17	17	18			APBD	Dinsos
KEGIATAN 1 :	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	1.1.	Jumlah KFM yang menerima bantuan stimulan KUBE (Orang)	Orang		0	0	0	0	0	0		APBD	Dinsos
INDIKATOR SDGs : 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.														
PROGRAM	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	%	Persentase Yankes Ibu Hamil	%		100	100	100	100	100	100		APBD	Dinkes
KEGIATAN 1 :	Jampersal (DAK Non Fisik)	1.1.	Jumlah Persalinan Oleh Nakes	Orang		23.401	23.402	23.402	23.402	23.402	23.402		APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.														
PROGRAM	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	%	Persentase Indikator Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target, Pelayanan Kesehatan orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV	%		100	100	100	100	100	100		APBD	Dinkes
KEGIATAN 1 :	Peningkatan imunisasi	1.1.	Jumlah Kegiatan Peningkatan Imunisasi	Kegiatan		7	8	8	8	9			APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs : 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.														
PROGRAM	Program Keluarga Berencana	%	Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif	%		84	82	83	83	83			APBD	Dinkes
KEGIATAN 1 :	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	1.1.	Jumlah peserta KB baru	Peserta baru		56	53	51	49	47			APBD	Dinkes
KEGIATAN 2 :	Pembinaan Keluarga Berencana	2.1.	Penerapan berbagai jenis R/R pd program KB	Jumlah jenis R/R		3	3	3	3	3	3		APBD	Dinkes

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
INDIKATOR SDGs : 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.																
PROGRAM		Program Lingkungan Sehat Perumahan		Akses aman terhadap air bersih di kawasan pedesaan	%			14	15	15	16	17			APBD	Disperkimtan
KEGIATAN 1 :		Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	1.1.	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	Unit			135	140	145	150	155			APBD	Disperkimtan
INDIKATOR SDGs : 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.																
PROGRAM		Program Lingkungan Sehat Perumahan		Akses aman terhadap air bersih di kawasan pedesaan	%			14	15	15	16	17			APBD	Disperkimtan
KEGIATAN 1 :		Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin	1.1.	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik)	KK			2.300	2.450	2.600	2.750	1.900			APBD	Disperkimtan
KEGIATAN 2 :		Pengelolaan Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum (Bantuan Gubernur)	2.1.	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik)	KK			0	0	0	0	0	0	0	Bantuan Gubernur	Disperkimtan
INDIKATOR SDGs : 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.																
PROGRAM		Program Pengembangan Perumahan		Persentase Ketersediaan Rumah Layak huni	%			86	86	86	86	86	86	86	APBD	Disperkimtan
KEGIATAN 1 :		Penataan Kawasan Kumuh	1.1.	Jumlah Lokasi kawasan kumuh yang ditata dan Jumlah dokumen perencanaan penataan sarana dan prasarana kawasan kumuh	Lokasi			6	0	0	0	0	0	0	APBD	Disperkimtan
KEGIATAN 2 :		Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (DAK)	2.1.	Jumlah rumah layak huni	Unit			0	529	0	0	0	0	0	APBD	Disperkimtan
PROGRAM	2 (DUA)	Program Pengembangan Kawasan Permukiman		Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	ha			1.149	1.052	970	905	856			APBD	Disperkimtan
KEGIATAN 1 :		Penataan Kawasan Kumuh	1.1.	Jumlah Lokasi kawasan kumuh yang ditata dan Jumlah dokumen perencanaan penataan sarana dan prasarana kawasan kumuh	ha			6	7	7	6	5			APBD	Disperkimtan
INDIKATOR SDGs : 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.																
PROGRAM		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		APM SD	%			95	95	95	95	95	95	95	APBD	Disdik
KEGIATAN 1 :		Pembangunan gedung sekolah	1.1.	jumlah gedung sekolah yang dibangun	Sekolah			1	1	1	1	1	1	1	APBD	Disdik
KEGIATAN 2 :		Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	2.1.	jumlah siswa penerima BOS	Siswa			335.000	335.200	0	0	0	335.400	335.600	APBD	Disdik
KEGIATAN 3 :		Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	3.1.	jumlah pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Exp			48.100	48.100	1.414	1.414	1.414			APBD	Disdik
KEGIATAN 4 :		Rehabilitasi Ruang Kelas SD	4.1.	Jumlah rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dasar	Lokal			0	0	40	40	40	40	40	APBD	Disdik
KEGIATAN 5 :		Pembangunan Ruang Kelas Bertingkat SD	5.1.	jumlah pembangunan ruang kelas bertingkat SD	Lokal			0	0	10	10	10	10	10	APBD	Disdik
INDIKATOR SDGs : 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ sederajat.																
PROGRAM		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		APM SD	%			95	95	95	95	95	95	95	APBD	Disdik
KEGIATAN 1 :		Pengadaan Tanah SMP	4.1.	Jumlah Pengadaan Tanah SMP	Sekolah			1	1	1	1	1	1	1	APBD	Disdik
KEGIATAN 2 :		Pembangunan gedung sekolah SMP	5.1.	jumlah pengadaan sekolah SMP	Sekolah			0	0	1	1	1	1	1	APBD	Disdik

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023	
INDIKATOR SDGs : 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahudengan kepemilikan akta kelahiran.																	
PROGRAM		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Jumlah Kebijakan Inovasi Pelayanan	Dokumen			1	3	1	1	1			APBD	Disdukcapil	
KEGIATAN 1 :		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1.1.	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta			185.000	114.000	117.000	120.000	123.000			APBD	Disdukcapil	
INDIKATOR SDGs : 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.																	
PROGRAM		Program Penanganan Darurat Kebencanaan		Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	%			100	100	100	100	100	100	100	APBD	BPBD	
KEGIATAN 1 :		Penyelenggaraan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Alam	1.1.	Jumlah kegiatan operasi penanganan penyelenggaraan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam	%			100	100	100	100	100	100	100	APBD	BPBD	
KEGIATAN 2 :		Tanggap Darurat di Daerah Bencana	2.1.	Jumlah operasi penanganan darurat bencana	%			0	100	0	0	0	100	100	APBD	BPBD	
INDIKATOR SDGs : 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.																	
PROGRAM		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		Persentase pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung	%			100	100	100	100	100	100	100	APBD	BPBD	
KEGIATAN 1 :		Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	1.1.	Jumlah tempat penampungan sementara dan evakuasi bagi penduduk korban bencana alam	%			100	100	0	0	0	100	100	APBD	BPBD	
KEGIATAN 2 :		Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	2.1.	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi dari ancaman / korban bencana alam	%			100	100	0	0	0	100	100	APBD	BPBD	
INDIKATOR SDGs : 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.																	
PROGRAM		Program pengembangan data/informasi								0	0	0			APBD	BPBD	
KEGIATAN 1 :		Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	1.1.	Jumlah dokumen data base pasca bencana yang berbasis spasial dan dokumen pemetaan kawasan permukiman rawan banjir	Dokumen			2	2	0	0	0	2	2	APBD	BPBD	
			2.1.	Jumlah dokumen profil kebencanaan	Dokumen			1	1	0	0	0	1	1	APBD	BPBD	
TUJUAN	2	TANPA KELAPARAN															
INDIKATOR SDGs : 2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).																	
PROGRAM Program Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan Masyarakat																	
KEGIATAN 1 :		Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	1.1.	Dokumen kajian rantai pasokan pangan di Kabupaten Bandung.	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	225.000.000	APBD	DISPANGKAN
KEGIATAN 2 :		Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	2.1.	Jumlah Dokumen kajian pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	150.000.000	APBD	DISPANGKAN
KEGIATAN 3 :		Pengembangan model distribusi pangan	1.1	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat	Gapoktan	0	0	4	4	4	4	4	1.550.000.000	APBD	DISPANGKAN

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs : 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.																
PROGRAM	Program Perbaikan Gizi Masyarakat															
KEGIATAN 1 :	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	1.1.	Tersedianya Dokumen Prevalensi Balita Gizi Buruk (sangat kurus)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	2.794.908.800	APBD	DINKES
KEGIATAN 2 :	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	2.1.	Jumlah Balita Kurus Mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Balita	48	50	50	50	50	51	51	1.549.173.500	APBD	DINKES
INDIKATOR SDGs : 2.1.2* 'Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.																
PROGRAM	Program Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan Masyarakat		Persentase penanganan wilayah rawan pangan	%			0	0	0	0	0	-	0	9.180.797.478	APBD	DISPANGKAN
KEGIATAN 1 :	Penanganan daerah rawan pangan	1.1.	Peta situasi kerawanan pangan wilayah (kecamatan dan desa) bulanan dan tahunan	Tahun Anggaran	0	0	1	1	1	1	1	1.250.000.000	APBD	DISPANGKAN
KEGIATAN 2 :	Pengembangan desa mandiri pangan	2.1.	Jumlah daerah rawan pangan kronis terintervensi	Desa	0	0	4	5	6	7	8	1.467.942.082	APBD	DISPANGKAN
KEGIATAN 3 :	Pengembangan cadangan pangan daerah	1.1	Jumlah pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan daerah	Ton	0	0	103	120	150	181	219	1.800.000.000	APBD	DISPANGKAN
KEGIATAN 4 :	Pengembangan lumbung pangan desa	2,1	Jumlah pemantauan/fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat	Desa	0	0	4	6	10	16	25	1.312.855.396	APBD	DISPANGKAN
INDIKATOR SDGs : 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.																
PROGRAM	Program Perbaikan Gizi Masyarakat															
KEGIATAN 1 :	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	1.1.	Jumlah Ibu Hamil Mengonsumsi Fe dan Jumlah Sekolah Yang Diberi Fe Pada Remaja Putri	Bumil kek	48	50	50	50	52	53	54	1.227.415.500	APBD	DINKES
INDIKATOR SDGs : 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.																
PROGRAM	Program Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase Produk olahan makanan dan minuman yang telah tersertifikasi layak edar	%	40	45	48	50	52	56	59	981.850.127	APBD	DINKES
KEGIATAN 1 :	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	1.1.	Frekuensi Persentase Pengawasan Terhadap IRTP	Kecamatan	11	12	12	12	13	14	14	981.850.127	APBD	DINKES
TUJUAN	3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA															
INDIKATOR SDGs : 3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)																
PROGRAM	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Kegiatan			0	40	60	80	100	136	185	110.981.834		
KEGIATAN 1 :	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	1.1.	Meningkatnya Pemahaman Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	1	110.981.834

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
INDIKATOR SDGs : 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.																
PROGRAM		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		Persentase Yankes Balita	%		100	100	100	100	100					
KEGIATAN 1 :		Penyuluhan kesehatan anak balita	1.1.	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	82	85	88	90	95			APBD	DINKES
PROGRAM		2 (DUA)	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bagi kesehatan anak dan balita	%		20	0	0	80	100	120	140	76.000.000	APBD	KEC. KATAPANG
KEGIATAN 1 :		Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	1.1	Kesehatan anak dan balita bagi keluarga kurang mampu tingkat kecamatan katapang	Kegiatan	1	0	0	1	1	1	1	76.000.000	APBD	KEC. KATAPANG
INDIKATOR SDGs : 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.																
PROGRAM		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular														
KEGIATAN 1 :		Peningkatan imunisasi	1.1.	Jumlah Kegiatan Peningkatan Imunisasi	Kegiatan	7	8	8	8	9	10	10	3540000000	APBD	DINKES
INDIKATOR SDGs : 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria																
PROGRAM		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular														
KEGIATAN 1 :		Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	1.1.	Frekuensi penyemprotan / Fogging sarang nyamuk	Titik	238	240	240	240	240	244	249	2.267.550.000	APBD	DINKES
KEGIATAN 2 :		Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	2.1.	Jumlah Alat Fogging dan Bahan - bahan Fogging	Bahan	3	4	4	4	4	4	5	1.253.500.000	APBD	DINKES
INDIKATOR SDGs : 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).																
PROGRAM		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular														
KEGIATAN 1 :		Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	1.1.	Jumlah kegiatan pengendalian penyakit zoonosis, HIV, Filariasis, dan Kusta	Kegiatan	7	8	8	8	9	10	10	2.046.450.000	APBD	DINKES
INDIKATOR SDGs : 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).																
PROGRAM		Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
KEGIATAN 1 :		Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	1.1.	Frekuensi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah	0	0	0	0	0			2.730.000.000	APBD	DINKES
PROGRAM		2 (DUA)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular													
KEGIATAN 1 :		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.1	Jumlah kegiatan pengendalian penyakit menular langsung	Kegiatan	9	10	10	10	11	12	12	3.474.402.425	APBD	DINKES
INDIKATOR SDGs : 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.																
PROGRAM		Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
KEGIATAN 1 :		Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	1.1.	Terlaksananya kegiatan kesehatan gigi, kes jiwa , kes mata, integrasi pelayanan laboratorium manajemen kes kerja, manajemen kes, olahraga dan spks	%	100	100	100	100	100	100	100	16.154.366.776	APBD	DINKES

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
INDIKATOR SDGs : 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.																
PROGRAM Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)																
KEGIATAN 1 :	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	1.1.	Jumlah Tuna Sosial yang memiliki Keterampilan	Orang	25	26	50	50	50	57	64	602.155.988	APBD	DINSOS
KEGIATAN 2 :	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	2.1.	Jumlah Tuna Sosial yang memperoleh Bimbingan Sosial melalui UEP	Orang	50	26	100	100	100	159	253	1.525.000.000	APBD	DINSOS
INDIKATOR SDGs : 3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.																
PROGRAM		Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase Kelompok remaja yang mendapatkan pembinaan tentang program penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	%			29	29	29	29	29					
KEGIATAN 1 :	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	1.1.	Jumlah kelompok remaja yang mendapatkan pembinaan /penyuluhan tentang program penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kelompok	29	29	0	0	0	29	29	252.561.866	APBD	DP2KBP3A
INDIKATOR SDGs : 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.																
PROGRAM		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa	%			5	5	5	5	5	5	5	11190972644	APBD	DP2KBP3A
KEGIATAN 1 :	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	1.1.	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa	Jumlah PPKBD + SUB P	5	5	5	5	5	5	5	11190972644	APBD	DP2KBP3A
PROGRAM 2 (DUA)		Program Keluarga Berencana	Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif	%			84	82	83	83	83	83	83	21.386.672.154	APBD	DP2KBP3A
KEGIATAN 1 :	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	1.1.	Jumlah peserta KB baru	Pus peserta KB baru	56	53	51	49	47	45	43	2.683.089.960	APBD	DP2KBP3A
KEGIATAN 2 :	Pembinaan Keluarga Berencana	2.1.	Penerapan berbagai jenis R/R pd program KB	Jumlah Jenis R/R	3	3	3	3	3	3	3	2.973.759.263	APBD	DP2KBP3A
INDIKATOR SDGs : 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.																
PROGRAM		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	%			77	76	77	77	77	77	77	14475002500	APBD	DINKES
KEGIATAN 1 :	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	1.1.	Jumlah Regulasi Kesehatan Yang Diterbitkan	Dokumen Perbup	1	2	2	2	3	4	6	813.356.500	APBD	DINKES
KEGIATAN 2 :	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	2.1.	Frekuensi evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Puskesmas	18	20	20	20	2	2	2	1.308.717.500	APBD	DINKES
KEGIATAN 3 :	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	1.1.	Jumlah dokumen laporan inventory	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	661.663.000	APBD	DINKES
KEGIATAN 4 :	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2.1.	Terlaksananya SIK/Sistem Informasi kesehatan	Dokumen	3	3	3	3	4	4	5	4.316.826.500	APBD	DINKES

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs : 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.																
PROGRAM Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin																
KEGIATAN 1 :		Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Bantuan Gubernur)	1.1.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin dengan SKTM	0	0	0	0	0	0	0	12.039.009.600	APBD	DINKES
PROGRAM 2 (DUA) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
KEGIATAN 1 :		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	1.1	Jumlah Peserta Medical Check-Up	Orang	40	45	45	45	45	46	48	280.000.000
INDIKATOR SDGs : 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.																
PROGRAM Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
KEGIATAN 1 :		Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok dan Penyakit Lainnya (DBHCHT)	1.1.	Jumlah tersedia-nya sarana dan prasarana peningka-tan pelayanan dan penangg-ulangan masalah kesehatan (DBHCT)	0	0	0	0	0			APBD	DINKES
			1.2.	Jumlah Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok dan Penyakit Lainnya	Bangunan	1	0	0	0	0			APBD	RSUD MAJALAYA
INDIKATOR SDGs : 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.																
PROGRAM Program Obat dan Perbekalan Kesehatan																
KEGIATAN 1 :		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.1.	Jumlah Ketersediaan Obat yang Bermutu	poin	100	100	100	100	100	100	100	28.525.946.126	APBD	DINKES
KEGIATAN 2 :		Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	2.1.	Jumlah Pemerataan obat yang bermutu untuk Puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	1.101.359.750	APBD	DINKES
INDIKATOR SDGs : 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.																
PROGRAM Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																
KEGIATAN 1 :		Pendidikan dan pelatihan formal	1.1.	tersedianya kebutuhan untuk pendididn dan pelatihan formal pegawai	%	100	100	100	100	100	100	100	719.663.882	APBD	DINKES
PROGRAM 2 (DUA) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat																
KEGIATAN 1 :		Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	1.1	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan dengan kemampuan advokasi bina suasana gerakan pemberdayaan	Orang	32	33	33	33	34			40.000.000	APBD	DINKES
PROGRAM 3 (TIGA)		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		Cakupan penguatan pelayanan kesehatan primer	%		65	73	81	89	100	111	124	42268685550	APBD	DINKES
KEGIATAN 1 :		Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	1.1	Jumlah PTT Tenaga Dokter dan Paramedis di Puskesmas	Puskesmas	49	50	50	50	50	50	51	37.644.339.300	APBD	DINKES
KEGIATAN 2 :		Peningkatan kualitas SDM kesehatan	2.1	Jumlah tenaga kesehatan terdidik	Orang	63	65	65	65	65	66	66	4.624.346.250	APBD	DINKES

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023		
TUJUAN 4	PENDIDIKAN BERKUALITAS														
INDIKATOR SDGs :	4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.														
PROGRAM	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		APM SD	%			95	95	95	95	95	95		APBD	Disdik
KEGIATAN 1 :	Pengadaan Alat Peraga Praktif Aktif Bermatematika untuk Guru dan Siswa SD (Bantuan Gubernur)	1.1.	jumlah alat peraga praktif aktif bermatematika untuk guru dan siswa SD (Bantuan Gubernur)	Sekolah			20	20	0	0	0	20	20	Bantuan Gubernur	Disdik
KEGIATAN 2 :	Pengadaan Alat Peraga Matematika Inquiri untuk SD (Bantuan Gubernur)	2.1.	jumlah pengadaan alat peraga matematika inquiri untuk SD (BANTUAN GUBRNUR)	Paket			20	20	0	0	0	20	20	Bantuan Gubernur	Disdik
INDIKATOR SDGs :	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.														
PROGRAM	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		jumlah dokumen kelembagaan											APBD	Disdik
KEGIATAN 1 :	Penyelenggaraan proses akreditasi SD	1.1.	Jumlah SD yang terakreditasi	SD			0	0	120	120	120	120	120	APBD	Disdik
INDIKATOR SDGs :	4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.														
PROGRAM	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		jumlah dokumen kelembagaan											APBD	Disdik
KEGIATAN 1 :	Penyelenggaraan proses akreditasi SMP	1.1.	Jumlah SMP yang terakreditasi	SMP			0	0	10	10	10	10	10	APBD	Disdik
INDIKATOR SDGs :	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).														
PROGRAM	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Persentase peserta didik PAUD	%			55	57	59	60	61			APBD	Disdik
KEGIATAN 1 :	Pembangunan gedung sekolah	1.1.	JUMLAH gedung sekolah yang dibangun				0	0	1	1	1	1	1	APBD	Disdik
KEGIATAN 2 :	Penambahan ruang kelas sekolah	2.1.	jumlah ruang kelas PAUD yang dibangun				0	0	4	6	7			APBD	Disdik
INDIKATOR SDGs :	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).														
PROGRAM	Program peningkatan kualitas layanan publik pemerintah kabupaten/kota melalui pemanfaatan TIK		Persentase manajemen pemerintahan yang terintegrasi	%			20	40	60	80	100	120	140	APBD	Diskominfo
KEGIATAN 1 :	Pengembangan Sumberdaya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1.1.	Jumlah peningkatan kapasitas SDM TIK	Orang			500	517	451	387	390			APBD	Diskominfo
INDIKATOR SDGs :	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).														
PROGRAM	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Persentase peserta didik PAUD	%			55	57	59	60	61			APBD	Disdik
KEGIATAN 1 :	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	1.1.	jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Lokal			0	0	15	15	15	15	15	APBD	Disdik
KEGIATAN 2 :	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	2.1.	jumlah rehab sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi				0	0	3	3	3	3	3	APBD	Disdik
PROGRAM 2 (DUA)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		APM SD	%			95	95	95	95	95	95	95	APBD	Disdik
KEGIATAN 1 :	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	1.1.	JUMLAH sarana air bersih dan sanitasi SMP yang dibangun	Sekolah			231	94	12	12	12			APBD	Disdik
KEGIATAN 2 :	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	2.1.	jumlah rehab sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi SD	Lokal			0	0	7	7	7	7	7	APBD	Disdik
KEGIATAN 3 :	Pengadaan sarana air bersih dan sanitasi	3.1.	jumlah pengadaan sarana air bersih dan sanitasi	Sekolah			5	5	0	0	0	5	5	APBD	Disdik
KEGIATAN 4 :	Pengadaan Media Pembelajaran SD (TIK)	4.1.	Jumlah Pengadaan Media Pembelajaran SD (TIK)	Paket			0	0	15	15	15	15	15	APBD	Disdik
INDIKATOR SDGs :	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.														
PROGRAM	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		PROSENTASE GURU DAN KEPALA SEKOLAH SD SESUAI KUALIFIKASI				0	0	0	0	0	0	0	APBD	Disdik
KEGIATAN 1 :	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	1.1.	Jumlah Dokumen Laporan Validasi Data Guru SD bersertifikat	Orang			310	310	0	0	0	310	310	APBD	Disdik
KEGIATAN 2 :	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMP	2.1.	Jumlah Dokumen Laporan Validasi Data Guru SMP Bersertifikat	Orang			600	600	600	600	600	600	600	APBD	Disdik

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)			SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
TUJUAN	5	KESETARAAN GENDER													
INDIKATOR SDGs : 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.															
PROGRAM	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Prosentase organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan tentang PUG dan penyuluhan KDRT	%		6	6	6	7	7				APBD	DP2KBP3A
KEGIATAN 1 :	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	1.1.	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan tentang PUG, lomba penyuluhan KDRT dan gelar produk PEKKA	Organisasi		6	6	6	7	7				APBD	DP2KBP3A
INDIKATOR SDGs : 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.															
PROGRAM	Prosentase jenis organisasi untuk Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Prosentase organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan tentang PUG dan penyuluhan KDRT	%		4	4	5	5	5				APBD	DP2KBP3A
KEGIATAN 1 :	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	1.1.	Jumlah Terbentuknya lembaga P2TP2A di setiap Kecamatan	Lembaga		5	5	5	5	5	5	5		APBD	DP2KBP3A
INDIKATOR SDGs : 6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.															
PROGRAM	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Persentase cadangan Air yang dapat diresapkan untuk air bersih	%		0	0	0	0	0	0	0		APBD	DLH
KEGIATAN 1 :	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	1.1.	Jumlah Sarana Penunjang Konservasi Sumber Daya Air	SR dan LRB		10.000	0	11.000	12.200	13.000				APBD	DLH
INDIKATOR SDGs : 6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.															
PROGRAM	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		Persentase Kegiatan Pendukung Penanganan Genangan	%		15	20	25	30	35				APBD	DPUPR
KEGIATAN 1 :	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	1.1.	Jumlah lokasi embung / bangunan penampung air lainnya yg dipelihara	m2		0	0	417	450	450	450	450		APBD	DPUPR
KEGIATAN 2 :	Pembangunan Embung dan Penampung lainnya	2.1.	Jumlah lokasi embung / bangunan penampung air lainnya yg dibangun	Lokasi		0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		APBD	DPUPR
TUJUAN	8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi													
INDIKATOR SDGs : 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.															
PROGRAM	Program pengembangan pemasaran pariwisata		Jumlah kunjungan Wisatawan	Orang		2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000				APBD	Disparbud
KEGIATAN 1 :	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	1.1.	Jumlah Web aplikasi database informasi pariwisata	Web/ Aplikasi		1	1	1	1	1	1	1		APBD	Disparbud
KEGIATAN 2 :	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	2.1.	Jumlah Event Pameran promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Event		4	4	5	6	7				APBD	Disparbud

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
TUJUAN 9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur																
INDIKATOR SDGs :		9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.															
PROGRAM	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi		Persentase Kontribusi sub sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Bandung	%			6	6	6	6	6	6			APBD	Disperin	
KEGIATAN 1 :	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	1.1.	Jumlah penguatan kemampuan industri berbasis Teknologi bagi pelaku IKM	Orang			128	160	150	160	165				APBD	Disperin	
KEGIATAN 2 :	Pengembangan industri kreatif berbasis fashion	2.1.	Jumlah IKM yang dilatih pengembangan industri kreatif berbasis fashion	Orang			291	140	125	143	162				APBD	Disperin	
TUJUAN 11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan																
INDIKATOR SDGs :		11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.															
PROGRAM	Program Pengembangan Kawasan Permukiman																
KEGIATAN 1 :	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	1.1.	Jumlah Keputusan Bupati tentang rencana tindak perbaikan lingkungan permukiman	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	800.000.000	APBD	DISPERKIMTAN
PROGRAM 2 (DUA)	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Bidang Perumahan Permukiman																
KEGIATAN 1 :	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.1.	Jumlah dokumen rencana tindak penataan sarana dan prasarana kawasan permukiman strategis	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1.186.200.000	APBD	DISPERKIMTAN	
INDIKATOR SDGs :		11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.															
PROGRAM	Program pengembangan data/informasi																
KEGIATAN 1 :	Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung	1.1.	Jumlah dokumen (Perda/perbup) Pedoman standarisasi keciptakaryaan di Kabupaten Bandung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dokumen	1	1	0	0	0	1	1	204.015.819	APBD	DISPERKIMTAN	
INDIKATOR SDGs :		11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.															
PROGRAM	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan		Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi serta memenuhi persyaratan pengangkutan penumpang umum	Kendaraan			1718	1718	0	0	0	1718	1718	1.910.939.907	APBD	DISHUB	
KEGIATAN 1 :	Pembinaan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek	1.1.	Pembinaan awak angkutan tidak dalam trayek	Orang		0	30	0	0	0			46.532.500	APBD	DISHUB	
KEGIATAN 2 :	Pembinaan angkutan penumpang umum dalam trayek	2.1.	Pembinaan angkutan umum di ruas jalan/ terminal/ pool	Lokasi		7	4	0	0	0	2	1	359.569.000	APBD	DISHUB	
PROGRAM 2 (DUA)	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang																
KEGIATAN 1 :	Pembinaan dan penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam trayek	1.1.	Pembinaan angkutan umum di jalan	Lokasi	0	0	4	4	4	4	4	750.000.000	APBD	DISHUB	
KEGIATAN 2 :	Pembinaan dan penyelenggaraan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek	2.1.	Pengaturan operasional angkutan sewa khusus daring (penyusunan penetapan Perbup dan pengawasan di jalan)	Kegiatan	0	0	2	0	0	2	2	450.000.000	APBD	DISHUB	
KEGIATAN 3 :	Pengembangan sarana transportasi umum	2.1.	Penyediaan layanan angkutan umum gratis (bottom up 12 trayek, top down 3 trayek)	Trayek	0	0	12	4	5	4	3	4.363.930.170	APBD	DISHUB	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs :	11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.															
PROGRAM	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan															
KEGIATAN 1 :	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	1.1.	Rencana induk perkereta apian	Dokumen	0	1	0	0	0	1	1	1.019.311.407	APBD	DISHUB
INDIKATOR SDGs :	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.															
PROGRAM	Program Penanganan Darurat Kebencanaan															
KEGIATAN 1 :	Penyelenggaraan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Alam	1.1.	Jumlah kegiatan operasi penanganan penyelenggaraan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam	%	100	100	100	100	100	100	100	1.546.580.800	APBD	BPBD
INDIKATOR SDGs :	11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.															
PROGRAM	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		Persentase pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung	%			100	100	100	100	100	100	100	14.710.686.510	APBD	BPBD
KEGIATAN 1 :	Mitigasi non struktural	1.1	Jumlah peserta yg mengikuti bintek, sosialisasi kebencanaan dan gladi dan simulasi	Orang	0	0	100	100	100	100	100	1.200.000.000	APBD	BPBD
KEGIATAN 2 :	Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana	1.1.	Jumlah forum PRB berbasis masyarakat dan desa tangguh yg terbentuk	Tim	0	0	1	1	1	1	1	1.400.000.000	APBD	BPBD
INDIKATOR SDGs :	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.															
PROGRAM	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam															
KEGIATAN 1 :	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	1.1.	Jumlah ketersediaan bahan informasi kebencanaan yang tersebar di wilayah kecamatan rawan bencana	Kecamatan	31	31	31	31	31	31	31	2.437.444.590	APBD	BPBD
KEGIATAN 2 :	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana	2.1.	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi dari ancaman / korban bencana alam	%	100	100	0	0	0	100	100	2.967.941.920	APBD	BPBD
KEGIATAN 3 :	Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan	2.1	Jumlah koordinasi mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan	%	0	0	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	BPBD
KEGIATAN 4 :	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	1.1.	Jumlah Linmas Siaga Bencana	Orang	115	115	115	115	115	115	115		APBD	BPBD
INDIKATOR SDGs :	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.															
PROGRAM	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Presentase volume sampah yang dapat dikelola	Persen			24	40	60	80	80	110	151	159.850.458.851	APBD	DLH
KEGIATAN 1 :	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	1.1.	Jumlah Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Dokumen	1	2	1	1	1			1.078.770.000	APBD	DLH
KEGIATAN 2 :	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	2.1.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang penataan TPA Babakan dan Pengelolaan persampahan	Paket	48	0	0	0	0			29.649.561.327	APBD	DLH
KEGIATAN 3 :	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1.1	Jumlah Sampah yang terangkut	Ton	320	0	0	0	0			118.729.105.075	APBD	DLH
INDIKATOR SDGs :	11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.															
PROGRAM	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau perkotaan	%			5	10	15	20	25			21.974.687.072	APBD	DISPERKIMTAN
KEGIATAN 1 :	Penataan RTH	1.1.	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertata	Lokasi	8	10	15	20	25			10.405.967.000	APBD	DISPERKIMTAN
KEGIATAN 2 :	Pemeliharaan RTH	2.1.	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertata	Lokasi	17	20	25	30	40			11.312.920.072	APBD	DISPERKIMTAN

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
INDIKATOR SDGs : 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.																
PROGRAM Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar																
KEGIATAN 1 :	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial	1.1.	Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial dan hasil rekomendasinya	Dokumen	1	1	0	0	0			232.800.000	APBD	BAPPEDA
PROGRAM 2 (DUA) Program Penanganan Darurat Kebencanaan																
KEGIATAN 1 :	Pengembangan aplikasi, teknologi, informasi, komunikasi dan kehumasan	1.1	Persentase penyebaran informasi kebencanaan dan jumlah ketersediaan data dan informasi melalui PUSDALOPS	%	0	0	100	100	100	100	100	1.150.000.000	APBD	BPBD
PROGRAM Program perbaikan sarana dan prasarana akibat bencana																
KEGIATAN 1 :	Sosialisasi pedoman teknis pembangunan rumah tahan gempa kepada masyarakat	1.1.	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang kebencanaan	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	1.150.000.000	APBD	BPBD
INDIKATOR SDGs : 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.																
PROGRAM Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam																
KEGIATAN 1 :	Penyusunan dokumen kajian resiko bencana	1.1.	Jumlah dokumen kajian resiko banjir yang tersusun	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	850.000.000	APBD	BPBD
TUJUAN 12 Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab																
INDIKATOR SDGs : 12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.																
PROGRAM Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																
KEGIATAN 1 :	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	1.1.	Jumlah usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang dibina/diawasi dan jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti program PROPER, PROPERDA, PROPERKAB	Usaha/Kegiatan	0	0	200	200	200	200	200	205.000.000	APBD	DLH
INDIKATOR SDGs : 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).																
PROGRAM Program Lingkungan Sehat Perumahan																
KEGIATAN 1 :	Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin	1.1.	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik)	KK	2.300	2.450	2.600	2.750	2.900			24.409.802.764	APBD	DISPERKIMTAN
KEGIATAN 2 :	Pengelolaan Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum (Bantuan Gubernur)	2.1.	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik)	KK	0	0	0	0	0			-	APBD	DISPERKIMTAN
PROGRAM 2 (DUA) Program peningkatan pengendalian polusi																
KEGIATAN 1 :	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	1.1	Jumlah data hasil pengujian kualitas air	Data	600	25	25	25	25			1.959.910.200	APBD	DLH
INDIKATOR SDGs : 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.																
PROGRAM	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Presentase volume sampah yang dapat dikelola	%			24	40	60	80	80			159.850.458.851	APBD	DLH
KEGIATAN 1 :	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	1.1.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat	Orang	400	200	200	200	200			836.205.500	APBD	DLH
KEGIATAN 2 :	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	2.1.	Jumlah Kader Pengelola Sampah	Orang	80	0	0	0	0			8.839.866.949	APBD	DLH

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
INDIKATOR SDGs : 12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.																
PROGRAM Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan																
KEGIATAN 1 :	Penyusunan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	1.1.	Tersedianya Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	350.000.000	APBD	RSUD CICALENGA
PROGRAM 2 (DUA) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan																
KEGIATAN 1 :	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	1.1.	Jumlah Regulasi Kesehatan Yang Diterbitkan	Dokumen Perbup	1	2	2	2	3			813.356.500	APBD	DINKES
KEGIATAN 2 :	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	2.1.	Frekuensi evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Puskesmas	18	20	20	20	2			1.308.717.500	APBD	DINKES
KEGIATAN 2 :	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	2.1.	Jumlah dokumen laporan inventory	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	661.663.000	APBD	DINKES
TUJUAN	14	Ekosistem Lautan														
INDIKATOR SDGs : 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan.																
PROGRAM Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																
Persentase cadangan Air yang dapat diresapkan untuk air bersih				%			0	0	0	0	0			14.086.696.246	APBD	DLH
KEGIATAN 1 :	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	1.1.	Jumlah Sarana Penunjang Konservasi Sumber Daya Air	SR dan LRB	10.000	0	11.000	12.200	13.000			1.411.607.106	APBD	DLH
KEGIATAN 2 :	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	2.1.	Jumlah Desa/Kampung Berbudaya Lingkungan	Desa/ Kampung	10	10	10	10	10	10	10	3.775.382.309	APBD	DLH
INDIKATOR SDGs : 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.																
PROGRAM Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan																
KEGIATAN 1 :	Pengembangan Pengolahan Pemasaran dan Pelayanan Usaha Perikanan	1.1.	Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan yang terlatih	Orang	120	180	0	0	0			766.391.000	APBD	DISPANGKAN
KEGIATAN 2 :	Pembinaan dan Pelayanan Izin Perikanan	2.1.	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terlayani (kumulatif orang)	Orang (TPUPI)	60	90	135	200	300			347.430.000	APBD	DISPANGKAN
INDIKATOR SDGs : 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.																
PROGRAM Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan																
KEGIATAN 1 :	Promosi Produk Perikanan	1.1.	Gerakan memasyarakatkan makan ikan pada balita, ibu hamil dan anak sekolah (kumulatif orang)	Orang	1030	1750	2500	3250	4000			1.483.505.000	APBD	DISPANGKAN
KEGIATAN 2 :	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan	2.1.	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana perikanan (kumulatif)	Kelompok	0	0	34	51	71			1.391.430.589	APBD	DISPANGKAN
KEGIATAN 3 :	Peningkatan daya saing produk perikanan	1.1.	Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan yang terlatih	0	0	240	300	360			1.135.027.228	APBD	DISPANGKAN
TUJUAN	15	Ekosistem Daratan														
INDIKATOR SDGs : 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.																
PROGRAM Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																
KEGIATAN 1 :	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	1.1.	Laporan Status kerusakan tanah untuk biomassa	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	2.214.807.718	APBD	DLH
INDIKATOR SDGs : 15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.																
PROGRAM Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam																
KEGIATAN 1 :	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	1.1.	Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan terhadap sekolah adiwiyata, Saka kalpataru dan program lintas sektor terkait perlindungan dan konservasi SDA	Orang	800	800	800	800	800	800	800	4.161.690.000	APBD	DLH

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
TUJUAN 16 PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh																
INDIKATOR SDGs: 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya.																
PROGRAM	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal															
KEGIATAN 1 :	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan	1.1.	Jumlah pelaksanaan Kerjasama dengan aparat untuk mencegah kejahatan	Angkatan	8	10	11	12	13			7.069.748.987	APBD	BAKESBANGPOL
KEGIATAN 2 :	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	2.1.	Jumlah kegiatan kewaspadaan dini masyarakat	Angkatan	9	10	10	11	12			2.175.913.341	APBD	BAKESBANGPOL
INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.																
PROGRAM	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															
KEGIATAN 1 :	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	1.1.	Jumlah anak yang mendapat pengayoman dan pembinaan tentang haknya	Kelompok Masyarakat	310	310	310	310	310			890.483.000	APBD	DP2KBP3A
KEGIATAN 2 :	Peningkatan sistem perlindungan anak	2.1.	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembekalan tentang hak dan perlindungan anak	0	0	8	8	8	8	8	518.364.242	APBD	DP2KBP3A
PROGRAM 2 (DUA)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan															
KEGIATAN 1 :	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	1.1.	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan tentang PUG, lomba penyuluhan KDRT dan gelar produk PEKKA	Jumlah Organisasi	6	6	6	7	7			1.366.211.277	APBD	DP2KBP3A
INDIKATOR SDGs: 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).																
PROGRAM	Program perencanaan pembangunan daerah															
KEGIATAN 1 :	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.1.	Tersusunnya laporan kinerja pemerintah	Laporan	2	2	0	0	0			723.379.382	APBD	SETDA
KEGIATAN 2 :	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	2.1.	Tersusunnya laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah	Laporan	1	1	0	0	0			492.807.125	APBD	SETDA
INDIKATOR SDGs: 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).																
PROGRAM 1 :	Program															
KEGIATAN 1 :	Peningkatan Pelayanan Publik	1.1.	Jumlah Jenis Peningkatan Pelayanan Publik	Jenis	1	1				250.000.000	APBD	DPMPTSP
INDIKATOR SDGs: 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.																
PROGRAM 1 : Program Penataan Administrasi Kependudukan																
KEGIATAN 1 :	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1.1.	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta	185.000	114.000	117.000	120.000	123.000			7.064.590.403	APBD	DISDUKCAPIL
INDIKATOR SDGs: 16.10.2(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.																
PROGRAM 1 : Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi																
KEGIATAN 1 :	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi	1.1.	Terlaksananya sosialisasi bidang komunikasi dan Informasi	Kegiatan	1	0	0	0	0			165.000.000	APBD	SETDA
PROGRAM 2 : Program kerjasama informasi dengan mas media																
KEGIATAN 1 :	Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Massa	1.1	Terlaksananya pengembangan komunikasi dan sinergitas bersama media massa	Kegiatan	2	0	0	0	0			400.000.000	APBD	SETDA

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023		
TUJUAN 17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan															
INDIKATOR SDGs : 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.																
PROGRAM 1: Program Peningkatan Pendapatan I		Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah Bidang I														
KEGIATAN 1 :	Penyusunan Perencanaan, pendataan dan pengendalian pendapatan (Non PBB dan BPHTB)	1.1.	Jumlah dokumen Perencanaan pendapatan I dan dan dokumen pendataan pajak Daerah Bidang	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	2.916.243.555	APBD
INDIKATOR SDGs : 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.																
PROGRAM 1 : Program Peningkatan Pendapatan I																
KEGIATAN 2 :	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan (Non PBB dan BPHTB)	2.1.	Prosentase realisasi penerimaan Pajak Daerah Bidang I	Jenis Pajak	8	8	8	8	8	8	8	1.353.479.505	APBD

**LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON**

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
TARGET	4.c.1*	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.											
INDIKATOR	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.											
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik		Jumlah peserta Diklat Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	orang			800						
	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi		Jumlah Pelatihan dan Sertifikat	paket			1						
TUJUAN	5	KESETARAAN GENDER											
TARGET	5.1.	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.											
INDIKATOR	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.											
TARGET	5.2.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											
INDIKATOR	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.											
PROGRAM	1 (SATU)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak											
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu		Jumlah korban kekerasan yang terlayani	orang			30						
PROGRAM	1 (SATU)	Program Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria											
	Pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis		Jumlah petugas Lapangan/Motivator Ketahanan Keluarga yang terlatih	orang			97						
	Penatalaksanaan Manajemen Hak Anak		Jumlah Lembaga/Kelompok Pemerhati Hak Anak yang terbina	kelompok			4						
INDIKATOR	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.											
PROGRAM	1 (SATU)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak											
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu		Jumlah korban kekerasan yang terlayani	orang			30						
TARGET	5.3.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.											
INDIKATOR	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.											
INDIKATOR	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.											

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023	
PROGRAM	1 (SATU)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak												
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu		Jumlah gugus tugas yang terbentuk	orang			35							
	Sosialisasi dan Pembinaan Fungsi KLA dan Forum Anak Daerah		Jumlah orang yang tersosialisasikan tentang KLA	orang			500							
	Bintek dan Seminar Pengarusutamaan Gender		Jumlah orang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender	orang			680							
	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan		Jumlah peserta dari organisasi perempuan yang mendapatkan workshop	orang			200							
PROGRAM	1 (SATU)	Program Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria												
	Pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis		Jumlah petugas Lapangan/Motivator Ketahanan Keluarga yang terlatih	orang			97							
	Penatalaksanaan Manajemen Hak Anak		Jumlah Lembaga/Kelompok Pemerhati Hak Anak yang terbina	kelompok			4							
INDIKATOR	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).												
PROGRAM	1 (SATU)	Program Cirebon Berkesetaraan Gender dan Anak Ceria												
	Pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis		Jumlah petugas Lapangan/Motivator Ketahanan Keluarga yang terlatih	orang			97							
	Penatalaksanaan Manajemen Hak Anak		Jumlah Lembaga/Kelompok Pemerhati Hak Anak yang terbina	kelompok			4							
INDIKATOR	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.												

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)			SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023								
PROGRAM	1 (SATU)	Program Kesehatan Reproduksi Remaja													
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan		Jumlah remaja yang mengikuti Orientasi Advokasi dan KIE KRR	orang				350							
	Workshop Program Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi Tokoh Remaja		Jumlah mengikuti workshop Program KKB	orang				100							
TARGET	5.b.	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.													
INDIKATOR	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.													
TUJUAN	6	Air Bersih dan Sanitasi Layak													
TARGET	6.1.	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua													
INDIKATOR	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.													
INDIKATOR	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.													
INDIKATOR	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.													
PROGRAM	1 (SATU)	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar													
	Koordinasi Perencanaan Air		Jumlah Dokumen Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	dokumen				3							
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah													
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum		Jumlah lokasi ketersediaan Prasarana Air minum bagi MBR	desa				10							
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum		Jumlah ketersediaan sistem distribusi air minum	desa				4							
	Pembangunan Sanitasi		Jumlah ketersediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	desa				4							
	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat		Jumlah ketersediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	desa				4							

LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

MATRIKS BAGIAN 2 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN											
TARGET 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua termasuk kelompok yang paling miskin dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											
Indikator SDGs : 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.											
Program Upaya Kesehatan Perorangan											
Kegiatan : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, pemberian Bantuan Iuran BPJS bagi masyarakat miskin serta penyediaan layanan kesehatan	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	68,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.048.114.440.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
TARGET 1.4 Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua laki laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses terhadap pelayanan dasar kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan.											
Indikator SDGs : 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.											
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat											
Kegiatan : Peningkatan Kondisi kesehatan lingkungan	Persentase desa Siaga Aktif	%	6,95%	11,00%	12,00%	13,00%	13,00%	14,00%	780.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator SDGs : 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.											
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat											
Kegiatan : Peningkatan Kondisi kesehatan lingkungan	Persentase Posyandu aktif	%	28,00%	30,00%	32,00%	34,00%	36,00%	38,00%	718.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
Indikator SDGs : 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.											
Program Keluarga Berencana											
Kegiatan : Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dan meningkatkan kualitas tenaga penyuluh KB	Cakupan PUS peserta KB aktif	%	67,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58.516.434.937,50	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indikator SDGs : 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.											
Program Lingkungan Sehat											
Kegiatan : Peningkatan Kondisi kesehatan lingkungan	Cakupan Akses dan sumber air bersih	%	65,77%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	1.201.250.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Program penyediaan dan pengolahan air baku											
Kegiatan : Penyediaan sarana air minum	Jumlah KK yang mempunyai akses sarana air minum nonperpipaan terbangun	KK	13400	8000	16000	22000	28000	32.000,00	104.877.623.812,50	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indikator SDGs : 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.											
Program Lingkungan Sehat											
Kegiatan : Peningkatan Kondisi kesehatan lingkungan	Cakupan Akses Sanitasi	%	74,9%	87,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	8.008.750.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator SDGs : 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.											
Program pengembangan infrastruktur permukiman											
Kegiatan : Peningkatan pembangunan infrastruktur permukiman	persentase desa teridentifikasi kumuh yang ditangani	%	0,00%	% tersusunnya DE	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	52.933.500.000,00	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
	persentase kawasan kumuh yang tertangani	%	2,94%	14,13%	41,29%	68,46%	100,00%	Pemeliharaan	126.770.013.000,00	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN											
TARGET 2.1 Pada tahun 2030 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk bayi terhadap makanan yang aman bergizi dan cukup sepanjang tahun.											
Indikator SDGs : 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).											
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial											
Kegiatan : Meningkatkan pelayanan & jaminan sosial	Jumlah penanganan anak terlantar, penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk pemenuhan kebutuhan	%	N/A	71,9%	78,9%	85,9%	92,9%	100,00	714.100.000.000,00	APBD	Dinas Sosial
Indikator SDGs : 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.											
Program pengembangan distribusi dan stabilitas harga pangan											
Kegiatan : Meningkatkan distribusi pangan	Persentase penanganan penduduk rawan pangan	%	11,7%	10,70%	9,70%	8,70%	7,70%	6,70%	1.944.490.080,00	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Program pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan											
Kegiatan : Meningkatkan cadangan pangan	cadangan pangan	Ton	40 TON	50 ton	60 ton	70 ton	80 ton	90 ton	10.213.596.000,00	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Indikator SDGs : 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.											
Program pengembangan penganekaragaman pangan konsumsi dan keamanan pangan											
Kegiatan : Meningkatkan keberagaman hasil pertanian dan perkebunan	AngkaKecukupan Energi (AKE)	Kilo Kalori	2066,19	2300	2310	2325	2335	2350	20.936.829.940,00	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
TARGET 2.2 Pada tahun 2030 menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan ibu hamil d											
Indikator SDGs : 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.											
Program Perbaikan Gizi Masyarakat											
Kegiatan : Peningkatan status gizi masyarakat	Prevalensi Balita sangat pendek dan pendek		6,33%	0,046	0,063	0,062	0,061	0,06	451.500.000,00	APBD	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
Indikator SDGs : 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.											
Program Perbaikan Gizi Masyarakat											
Kegiatan : Peningkatan status gizi masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang		4,59%	0,046	0,045	0,044	0,043	0,04	1.845.250.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator SDGs : 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.											
Program Upaya Kesehatan Perorangan											
Kegiatan : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, pemberian Bantuan Luran BPJS bagi masyarakat miskin serta penyediaan layanan kesehatan	Prevalensi KEK pada WUS		N/A	0,2	0,19	0,18	0,17	0,16	1.866.100.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
TARGET 2.3 Pada tahun 2030 menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil khususnya perempuan masyarakat penduduk asli keluarga petani penggembala dan nelayan termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan											
Indikator SDGs : 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).											
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan											
Kegiatan : Meningkatkan nilai tambah hasil produksi perikanan	Cakupan promosi produk hasil perikanan	%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2.533.616.500,00	APBD	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Cakupan unit pengolahan ikan yang dibina	%	13,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	4.554.404.600,00	APBD	Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan											
Kegiatan : Meningkatkan teknologi pertanian dan optimalisasi lahan pertanian	Persentase penerapan teknologi pertanian	%	4,61%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	35.874.605.467,00	APBD	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Budidaya Perikanan											
Kegiatan : Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya, perikanan laut dan perairan umum	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	7,9%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	12.478.824.400,00	APBD	Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap											
Kegiatan : Meningkatkan produksi perikanan laut dan perairan umum	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	4.901.174.280,00	APBD	Dinas Perikanan dan Kelautan

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian											
Kegiatan : Membuka akses pemasaran hasil pertanian	Peningkatan Volume Penjualan hasil produksi Pertanian	%	70,00%	80%	82%	84%	86%	88%	10.670.982.188,00	APBD	Dinas Pertanian
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan											
Kegiatan : Meningkatkan hasil pemasaran	Peningkatan Volume Penjualan hasil produksi Peternakan	%	14,76%	15%	15%	15%	15%	15%	2.110.044.662,00	APBD	Dinas Pertanian
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan											
Kegiatan : Meningkatkan penggunaan teknologi peternakan	Persentase Peternak yang telah mengadopsi teknologi	%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	1.335.124.319,00	APBD	Dinas Pertanian
Program peningkatan produksi hasil peternakan											
Kegiatan : Meningkatkan produksi hasil peternakan	Persentase kenaikan hasil produksi peternakan (daging, unggas, telur)	%	2,03%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	12.988.233.944,00	APBD	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan											
Kegiatan : Meningkatkan kualitas produksi pertanian	Persentase kenaikan hasil produksi pertanian, perkebunan dan hortikultura	%	1,46%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	16.335.355.019,00	APBD	Dinas Pertanian
	Persentase Meningkatnya kompetensi penyuluh pertanian/perkebunan	%	78,10%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8.570.583.584,00	APBD	Dinas Pertanian
TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA											
TARGET 3.1 Pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											
Indikator SDGs : 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.											
Program Upaya Kesehatan Perorangan											
Kegiatan : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, pemberian Bantuan luran BPJS bagi masyarakat miskin serta penyediaan layanan kesehatan kelas III gratis bagi masyarakat miskin non PBI	Cakupan Persalinan oleh Nakes di Faskes	%	80,53%	100%	100%	100%	100%	100%	9.998.500.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	80,53%	100%	100%	100%	100%	100%	7.295.500.000,00	APBD	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
TARGET 3.2 Pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.											
Indikator SDGs : 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.											
Program Upaya Kesehatan Perorangan											
Kegiatan : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, pemberian Bantuan Luran BPJS bagi masyarakat miskin serta penyediaan layanan kesehatan	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	62,45%	100%	100%	100%	100%	100%	2.142.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator SDGs : 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.											
Program Upaya Kesehatan Masyarakat											
Kegiatan : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, pemberian Bantuan Luran BPJS bagi masyarakat miskin serta penyediaan layanan kesehatan	Cakupan Puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial Terpadu (PKRET) terpadu	%	11,36%	18,00%	25,00%	32,00%	39,00%	45,00%	834.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Perorangan											
Kegiatan : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, pemberian Bantuan Luran BPJS bagi masyarakat miskin serta penyediaan layanan kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	79,85%	100%	100%	100%	100%	100%	3.201.500.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator SDGs : 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.											
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit											
Kegiatan : Penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Imunisasi Lengkap	%	67,52%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	6.804.500.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
TARGET 3.3 Pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS tuberkulosis malaria dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis penyakit bersumber air serta penyakit menular lainnya.											
Indikator SDGs : 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).											
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit											
Kegiatan : Penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular	Penemuan Kasus Filariasis dengan Micro Filaria Rate < 1 %	%	MFR < 1 %	MFR < 1 %	MFR < 1 %	MFR < 1 %	MFR < 1 %	MFR < 1 %	524.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
TARGET 3.4 Pada tahun 2030 mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.											
Indikator SDGs : 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.											
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit											
Kegiatan : Penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	1.344.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Hipertensi		N/A	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	1.970.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator SDGs : 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.											
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit											
Kegiatan : Penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular	Prevalensi Gangguan Mental		N/A	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	5.347.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
TARGET 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											
Indikator SDGs : 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.											
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat											
Kegiatan : Peningkatan Kondisi kesehatan lingkungan	Proporsi merokok	%	59,61%	70%	60%	50%	40%	30%	2.767.500.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
TARGET 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen pengembangan pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil.											
Indikator SDGs : 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.											
Program pengembangan, pengendalian, pengelolaan bangunan negara											
Kegiatan : Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas DTP dan PONED dan jaringannya serta RSUD	jumlah bangunan Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang dibangun		0	10 puskesmas	10 puskesmas	9 puskesmas	9 puskesmas	8 puskesmas	195.373.838.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah Rumah Sakit dibangun	Unit	2 UNIT	10 puskesmas	DED	1	DED	1	350.600.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
Program Pengadaan tenaga RS											
Kegiatan : Menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten	Prosentase ketersediaan tenaga RS sesuai standar	%	74,8%	0,8	0,84	0,88	0,9	0,95	84.550.835.566,41	APBD	Rumah Sakit Umum Daerah
Program Sumber Daya Kesehatan											
Kegiatan : Peningkatan sumber daya kesehatan	Persentase dokter yang mengikuti bimbingan teknis (workshop) internship	%	6,90%	20,00%	40,00%	60,00%	75,00%	95,00%	1.200.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan	%	9,54%	20,00%	40,00%	60,00%	75,00%	95,00%	6.196.000.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Program Sertifikasi tenaga Rumah Sakit											
Kegiatan : Menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten	Prosentase tenaga medis, tenaga keperawatan, keteknisian medis bersertifikat (berijin)	%	0,6	0,65	0,7	0,8	0,9	1	5.400.757.500,00	APBD	Rumah Sakit Umum Daerah
TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS											
TARGET 4.1 Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.											
Indikator SDGs : 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											
Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan											
Kegiatan : Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio guru : murid		1:32	1:22	1:22	1:21	1:21	1:21	690.576.825.000,00	APBD	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun											
Kegiatan : Penerapan Standar Nasional Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase kelulusan/rata-rata kelulusan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	260.386.973.696,75	APBD	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
TARGET 4.2 Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini pengasuhan pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dan											
Indikator SDGs : 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).											
Program Pendidikan Anak Usia Dini											
Kegiatan : Penerapan Standar Nasional PAUD dalam menyusun kurikulum PAUD	Persentase PAUDNI	%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	16.256.407.137,50	APBD	Dinas Pendidikan
TARGET 4.6 Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu baik laki laki maupun perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi.											
Indikator SDGs : 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.											
Program pendidikan Non Formal											
Kegiatan : Peningkatan kualitas lembaga pendidikan masyarakat	Persentase kelulusan pendidikan informal	%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	11.667.812.434,88	APBD	Dinas Pendidikan
TARGET 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak ramah penyandang cacat dan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang aman anti kekerasan inklusif dan efektif bagi semua.											
Indikator SDGs : 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin,											
Program manajemen pelayanan pendidikan											
Kegiatan : Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	Persentase sekolah sesuai standar pengelolaan pendidikan	%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	73.481.060.001,38	APBD	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini											
Kegiatan : Penambahan sarana penunjang pendidikan anak usia dini dan nonformal	Persentase sarana belajar mengajar PAUD sesuai standar	%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	2.762.815.625,00	APBD	Dinas Pendidikan
program pengembangan pengendalian pengelolaan bangunan negara											
Kegiatan : Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan	Jumlah bangunan pendidikan yang di bangun	RKB	1215 RKB	160	200	200	200	200	852.101.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	jumlah bangunan penunjang pendidikan yang terbangun	Ruang	193 R	100	100	100	100	100	241.001.512.095,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun											
Kegiatan : Pemenuhan sarana prasarana belajar mengajar sesuai standar pendidikan dasar	Persentase sarana belajar mengajar SD dan SMP sesuai standar	%	55,00%	65,00%	75,00%	85,00%	95,00%	100,00%	154.150.889.828,13	APBD	Dinas Pendidikan
Kegiatan : Penerapan Standar Nasional Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase sekolah melaksanakan UNBK	%	0,00%	19,10%	39,33%	59,55%	79,78%	100,00%	86.721.292.983,09	APBD	Dinas Pendidikan
	Persentase sekolah memanfaatkan software pendidikan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7.949.062.603,63	APBD	Dinas Pendidikan
TARGET 4.c Pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang terutama negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil.											
Indikator SDGs : 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.											
Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan											
Kegiatan : Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Cakupan guru yang berkualitas	%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	82.884.468.750,00	APBD	Dinas Pendidikan
TUJUAN 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak											
TARGET 6.2 Pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat											
Indikator SDGs : 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.											
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat											
Kegiatan : Peningkatan Kondisi kesehatan lingkungan	Proporsi perilaku cuci tangan dengan benar	%	N/A	50%	60%	70%	80%	90%	3.702.500.000,00	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator SDGs : 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).											
Program lingkungan sehat permukiman											
Kegiatan : Meningkatkan pembangunan MCK	Persentase desa rawan akses sanitasi	%	60,00%	50,00%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	33.153.787.500,00	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
Indikator SDGs : 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.											
Program Pengembangan kinerja air minum dan air limbah											
Kegiatan : Meningkatkan pelayanan air limbah domestik	Persentase cakupan layanan air limbah	%	900 KK	5,00%	7,00%	9,00%	11,00%	13,00%	66.307.575.000,00	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indikator SDGs : 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.											
Program Pengendalian Banjir											
Kegiatan : Normalisasi saluran pembuang	Panjang saluran pembuang yang dinormalisasi	Km	25	45	85	145	165	205	90.013.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TARGET 6.5 Pada tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.											
Indikator SDGs : 6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.											
Program pembangunan turap/talud/bronjong/lenning											
Kegiatan : Meningkatkan pembangunan turap/talud/bronjong/lenning	Panjang turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	Km	25 km	35	50	65	80	85	143.394.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pengembangan ,pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya											
Kegiatan : Penyediaan sarana air minum	Jumlah embung dalam kondisi baik	Unit	0	1	2	3	4	5	56.293.550.000,00	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pengendalian Banjir											
Kegiatan : Penyediaan kolam retensi	Jumlah kolam retensi dalam kondisi baik	Unit	0	Dokumen DED	2 kolam	4 kolam	6 kolam	8 kolam	32.888.557.200,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Indikator SDGs : 6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.											
Program Pengendalian Banjir											
Kegiatan : normalisasi sungai kewenangan Kabupaten	Panjang sungai yang dinormalisasi	Km	25 km	5	5	5	5	5	39.118.150.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
TARGET 6.1 Pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua											
Indikator SDGs : 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.											
Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawa dan jaringan lainnya											
Kegiatan : Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang terbangun	Meter	25000	3000 m	3000 m	3000 m	3000 m	3000 m	11.537.518.050,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Panjang jaringan irigasi yang terpelihara	Meter	10000 m	5000	5000	5000	5000	5.000	14.653.974.075,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Pembangunan dan pemeliharaan pintu air	Jumlah pintu air dalam kondisi baik	Unit	25 unit	6	6	6	6	6	12.156.388.750,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUJUAN 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi											
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.											
Indikator SDGs : 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.											
Program peningkatan dan pengembangan ekspor											
Kegiatan : meningkatkan nilai ekspor produk unggulan	persentase peningkatan nilai ekspor produk unggulan	%	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	7.824.113.007,00	APBD	Dinas Perdagangan
Program peningkatan investasi daerah											
Kegiatan : Mendorong percepatan pertumbuhan investasi	Pertumbuhan investasi (PMA/PMDN)	%	36%	5%	5%	5%	5%	5%	10.194.789.656,25	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif penciptaan lapangan kerja layak kewirausahaan kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah termasuk melalui akses terhadap											
Indikator SDGs : 8.3.1*Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.											
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan											
Kegiatan : Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan perempuan sehingga mandiri secara ekonomi	Persentase perempuan yang membuka wirausaha mandiri	%	0,001%	0,003%	0,007%	0,01%	0,013%	0,016%	9.633.000.000,00	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indikator SDGs : 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.											
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan											
Kegiatan : mengoptimalkan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	%	0,00%	1,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	6.888.017.500,00	APBD	Dinas Perdagangan
Target 8.5 Pada tahun 2030 mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki laki termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.											
Indikator SDGs : 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.											
Program peningkatan hubungan industrial yang harmonis											
Kegiatan : Pembinaan hubungan industrial meliputi LKS, BIP, pekerja, PP, PKB, P2K3, pengupahan perusahaan	Rekomendasi Kepala Daerah tentang UMK	Rekomen dasi	1 Rek	1 Rek	1 Rek	1 Rek	1 Rek	1 Rek	5.799.845.000,00	APBD	Dinas Tenaga Kerja
Indikator SDGs : 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.											
Program Peningkatan Kesempatan Kerja											
Kegiatan : Meningkatkan serapan tenaga kerja pada pasar kerja formal	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka		10,03	9,53	9,03	8,53	8,03	7,53	106.916.662.668,00	APBD	Dinas Tenaga Kerja
Program peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja											
Kegiatan : Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		63,17	63,87	64,57	65,27	65,97	66,67	39.498.592.827,00	APBD	Dinas Tenaga Kerja

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
Indikator SDGs : 8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran.											
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan											
Kegiatan : Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan perempuan sehingga mandiri secara ekonomi	Persentase Perusahaan yang memperkerjakan tenaga perempuan lebih dari 50 orang	%	0,06	26,00%	46,00%	66,00%	86,00%	100,00%	1.653.000.000,00	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 8.9 Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
Indikator SDGs : 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.											
Program pengembangan destinasi wisata											
Kegiatan : Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui pembuatan kebijakan kepariwisataan	jumlah regulasi kepariwisataan	Perda	1	2	4	5	5	6	4.274.113.750,00	APBD	Dinas Pariwisata
	jumlah destinasi wisata	Destinasi	10	ureum 3.Des	Agri Perkemahan K	Reliharaan 4.touris	in dan pemelihar	dera, 4.pantai beti	63.100.000.000,00	APBD	Dinas Pariwisata
Program pengembangan kemitraan pariwisata											
Kegiatan : fasilitasi dan mediasi pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah event ekonomi kreatif	Event	12	10	12	14	16	18	26.125.000.000,00	APBD	Dinas Pariwisata
	Jumlah MOU antara pelaku usaha pariwisata dan pelaku industri dalam mengembangkan pariwisata	Mou	N/A	3	3	3	3	3	3.000.000.000,00	APBD	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata											
Kegiatan : Diversifikasi destinasi wisata seperti wisata alam, industri, sejarah, ziarah dan bahari	Kunjungan wisata alam	Kunjungan	11000	20000	40000	60000	80000	100.000	6.350.000.000,00	APBD	Dinas Pariwisata
	Kunjungan wisata bahari	Kunjungan	8800	24000	60000	108000	180000	264.000	3.800.000.000,00	APBD	Dinas Pariwisata
	Kunjungan Wisata Industri	Kunjungan	23000	24000	54000	108000	216000	432.000	6.550.000.000,00	APBD	Dinas Pariwisata
	Kunjungan wisata pilgrime	Kunjungan	N/A	2500	5000	6500	7500	10.000	2.750.000.000,00	APBD	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
TUJUAN 9. Industri Inovasi dan Infrastruktur											
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di											
Indikator SDGs : 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.											
Program penciptaan iklim umkm yang kondusif											
Kegiatan : Pengembangan Koperasi dan UMKM	Persentase peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil	%	0,00%	3,00%	2,00%	2,00%	3,00%	2,00%	4.755.199.500,00	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM
Program Pengembangan IKM											
Kegiatan : Melaksanakan pelatihan dan kemampuan IKM	Jumlah Wirausaha baru sektor IKM	Wirausaha	N/A	500	500	500	500	500	38.794.520.000,00	APBD	Dinas Perindustrian
	Peningkatan jumlah industri kecil menjadi industri menengah	Unit Usaha	40	54	63	67	70	72	37.283.590.000,00	APBD	Dinas Perindustrian
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM											
Kegiatan : Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	Persentase UMKM yang memiliki sertifikat mutu produk	%	2,00%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	4,00%	988.173.897,50	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi umkm											
Kegiatan : Pengembangan Koperasi dan UMKM	Persentase pelaku umkm yang terfasilitasi akses permodalan	%	41,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6.807.577.700,00	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM
Program peningkatan kemampuan teknologi industri											
Kegiatan : mendorong Akses Teknologi Tepat Guna IKM	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menerapkan teknologi IKM	%	2,86%	0,50%	5,32%	6,01%	6,63%	7,17%	33.368.190.000,00	APBD	Dinas Perindustrian
Program peningkatan pemasaran produk UMKM											
Kegiatan : mendorong Akses Teknologi Tepat Guna umkm	Jaringan pemasaran UMKM	Pameran	6 event	1 event	1 event	1 event	1 event	2 EVENT	2.022.341.250,00	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan											
Kegiatan : Peningkatan Akses bagi UMKM	Pertumbuhan wirausahawan baru umkm	%	8%	12%	20%	20%	20%	20%	6.407.039.062,50	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM
	wirausahawan umkm baru yang diberi bantuan	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	2.282.085.706,25	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara negara kurang berkembang pada tahun 2020.											
Indikator SDGs : 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet.											
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi											
Kegiatan : Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik menuju Kabupaten Bekasi smart city	Persentase jaringan FO yang terbangun	%	44,00%	64,44%	73,33%	82,22%	91,11%	100,00%	163.926.000.000,00	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana TIK untuk kaum difabel	%	0	13%	22%	57%	78%	100%	6.834.175.000,00	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas andal berkelanjutan dan tangguh termasuk infrastruktur regional dan lintas batas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi											
Indikator SDGs : 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan.											
program rehabilitasi dermaga sungai, air danau dan penyebrangan											
Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan air, sungai, danau	jumlah dermaga yang terbangun dan dipelihara	Unit	0	0	1	1	2	2	3.575.000.000,00	APBD	Dinas Perhubungan
TUJUAN 10. Berkurangnya Kesenjangan											
Target 10.2 Pada tahun 2030 memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial ekonomi dan politik bagi semua terlepas dari usia jenis kelamin difabilitas ras suku asal agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.											
Indikator SDGs : 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.											
Program peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja											
Kegiatan : Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	Jumlah kaum difabel yang mendapatkan pekerjaan	Orang	25 org	45 org	45 org	45 org	45 org	45 org	915.765.000,00	APBD	Dinas Tenaga Kerja

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil termasuk dengan menghapus hukum kebijakan dan praktik yang diskriminatif dan mempromosikan legislasi kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
Indikator SDGs : 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.											
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan											
Kegiatan : Perwujudan Kabupaten Bekasi sebagai kota layak anak	cakupan penanganan laporan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)	%	32,00%	45,00%	59,00%	72,00%	86,00%	100,00%	21.973.100.000,00	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TUJUAN 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan											
Target 11.1 Pada tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak aman terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh.											
Indikator SDGs : 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.											
Program pengembangan perumahan											
Kegiatan : Peningkatan indikator Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	95,72%	96,25%	96,78%	97,31%	97,84%	98,37%	6.630.757.500,00	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Target 11.5 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang rentan											
Indikator SDGs : 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.											
Program Pemenuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana											
Kegiatan : Menyediakan sarana dan prasarana pertolongan bencana alam	Persentase Terpenuhinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana	%	10,00%	12,00%	14,00%	17,00%	21,00%	26,00%	15.000.000.000,00	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana											
Kegiatan : Peningkatan pemahaman dan kesiapan masyarakat terhadap Pencegahan dan Mitigasi Bencana	persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	12,00%	13,00%	15,00%	17,00%	20,00%	23,00%	2.025.126.067,79	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Program Penguatan Lembaga/ Pengorganisasian SDM PB											
Kegiatan : Memfasilitasi dan mengoordinir Lembaga Pengorganisasian SDM PB	Berfungsinya satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana	%	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	11.966.753.375,00	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	persentase lembaga/organisasi penggiat kebencanaan yang aktif	%	15,00%	15,00%	16,00%	17,00%	18,00%	19,00%	2.691.666.666,67	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indikator SDGs : 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.											
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana											
Kegiatan : Peningkatan pemahaman dan kesiapan masyarakat terhadap Pencegahan dan Mitigasi Bencana	persentase desa/kelurahan rawan bencana yang menerapkan sistem peringatan dini bencana	%	10,00%	12,00%	14,00%	17,00%	21,00%	26,00%	3.427.500.000,00	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 11.2 Pada tahun 2030 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman terjangkau mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua meningkatkan keselamatan lalu lintas terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi per											
Indikator SDGs : 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.											
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan											
Kegiatan : penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang terbangun	%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	30.390.971.875,00	APBD	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan											
Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan	cakupan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	16.576.893.750,00	APBD	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas											
Kegiatan : Penyediaan marka dan rambu - rambu lalu lintas	cakupan penanganan kemacetan	%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	16.471.906.756,25	APBD	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor											
Kegiatan : pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan	jumlah angkutan barang dan orang yang layak beroperasi	Ijin	42000	56000	59500	63000	66500	70000	17.051.262.500,00	APBD	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan											
Kegiatan : Penataan pelayanan angkutan	cakupan fasilitas angkutan umum yang tersedia	%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	11.051.262.500,00	APBD	Dinas Perhubungan

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan : Penataan pelayanan angkutan	cakupan fasilitas angkutan umum yang tersedia	%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	11.051.262.500,00	APBD	Dinas Perhubungan
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ											
Kegiatan : peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	5.525.631.250,00	APBD	Dinas Perhubungan
Target 11.6 Pada tahun 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara termasuk penanganan sampah kota.											
Indikator SDGs : 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.											
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
Kegiatan : Meningkatkan volume sampah yang diproses di TPS 3R	Persentase jumlah TPST terbangun	%	3% (4 TPS)	16,00%	26,00%	36,00%	46,00%	56,00%	1.881.996.187,50	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan sampah di daerah layanan	%	43,00%	44,00%	46,30%	48,80%	51,30%	53,53%	494.934.032.500,00	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Target 11.7. Pada tahun 2030 menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak manula dan penyandang difabilitas.											
Program lingkungan sehat permukiman											
Kegiatan : Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Luasan penghijauan sepadan sungai	Meter ²	14,000 M	15,600 M	16,376 M	17,152 M	17,928 M	18,704 M	12.127.958.669,13	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
	Luasan taman kota tematik	Meter ²	18,685 M ²	24,685 M ²	30,685 M ²	36,685 M ²	42,685 M ²	48,685 M ²	29.556.601.556,25	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
	Luasan taman lingkungan	Meter ²	3378 M ²	4378 M ²	6378 M ²	7378 M ²	8378 M ²	9378 M ²	33.540.530.725,00	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
	Luasan taman median dan taman pulau	Meter ²	45,718 M ²	M ² , Pemeliharaan	Pembangunan ta	Pembangunan ta	Pembangunan ta	Pembangunan ta	87.130.000.000,00	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
TUJUAN 14. Ekosistem Lautan											
TARGET 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.											
Indikator SDGs : 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.											
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan											
Kegiatan : Meningkatkan nilai tambah hasil produksi perikanan	Persentase cakupan bina kelompok nelayan	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	4.218.746.202,00	APBD	Dinas Perikanan dan Kelautan
TUJUAN 16. PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH											
TARGET 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.											
Indikator SDGs : 16.10.2(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.											
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa											
Kegiatan : Peningkatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tingkat layanan informasi dan pengaduan secara online (PPID)	%	0%	20%	40%	60%	80%	100%	6.354.475.937,50	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian HUMAS)
TARGET 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif akuntabel dan transparan di semua tingkat.											
Indikator SDGs : 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.											
Program Pengadaan Barang dan jasa											
Kegiatan : Peningkatan regulasi serta sarana dan prasarana pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah	Persentase paket pengadaan yang selesai dilelangkan	%	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	36.538.928.449,66	APBD	Sekretariat Daerah (ULP)
Indikator SDGs : 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).											
Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan											
Kegiatan : Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta penerapan standar pelayanan publik	kesesuaian kelembagaan dengan peraturan perundang-undangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7.597.742.968,75	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	Tingkat kesesuaian SOP dengan Tupoksi	%	49%	51%	54%	55%	57%	59%	6.496.129.195,31	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
Indikator SDGs : 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).											
Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan											
Kegiatan : Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta penerapan standar pelayanan publik	Tingkat penerapan standar pelayanan publik	%	38%	46%	54%	61%	68%	75%	7.280.383.601,56	APBD	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
TARGET 16.9 Pada tahun 2030 memberikan identitas yang syah bagi semua termasuk pencatatan kelahiran.											
Indikator SDGs : 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.											
Program pengelolaan administrasi kependudukan											
Kegiatan : Penataan pengelolaan administrasi kependudukan berbasis TIK	Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	3.315.378.750,00	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indikator SDGs : 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.											
Program pengelolaan administrasi kependudukan											
Kegiatan : Penataan pengelolaan administrasi kependudukan berbasis TIK	cakupan penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun yang bersangkutan	%	76,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	5,00%	20.000.000.000,00	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TARGET 16.9 Pada tahun 2030 memberikan identitas yang syah bagi semua termasuk pencatatan kelahiran.											
Indikator SDGs : 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.											
Program pengelolaan administrasi kependudukan											
Kegiatan : Penataan pengelolaan administrasi kependudukan berbasis TIK	Cakupan penduduk yang memiliki akta nikah	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.243.267.031,25	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	2017 (Tahun Dasar)	Tahun Pelaksanaan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2018	2019	2020	2021	2022				
TARGET 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif inklusif partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											
Indikator SDGs : 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil.											
Program peningkatan ketentraman dan kenyamanan lingkungan											
Kegiatan : Peningkatan Pembinaan terhadap FKUB, LSM, Ormas, OKP, Majelis Ta'lim, Imam Marbot, Amil Jenazah dll	Dialog dan kerjasama intern dan antar umat beragama	%	25%	40%	55%	70%	85%	100%	6.741.000.000,00	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	persentase FKUB, LSM, Ormas, OKP, dll yang dibina	%	40,00%	52,00%	64,00%	76,00%	88,00%	100,00%	19.057.000.000,00	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indikator SDGs : 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik.											
Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik.											
Kegiatan : Peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat	cakupan pembinaan politik yang diberikan kepada masyarakat	%	75,9%	79,9%	83,9%	87,9%	91,9%	95,9%	6.105.000.000,00	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	61%	61,4%	61,8%	62,2%	62,6%	63%	13.237.000.000,00	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program peningkatan ketentraman dan kenyamanan lingkungan											
Kegiatan : Peningkatan Pembinaan terhadap FKUB, LSM, Ormas, OKP, Majelis Ta'lim, Imam Marbot, Amil Jenazah dll	Persentase ormas yang aktif berpartisipasi dalam kemitraan pembangunan	%	73,00%	77,00%	81,00%	85,00%	89,00%	93,00%	3.052.000.000,00	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TARGET 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.											
Indikator SDGs : 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.											
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan											
Kegiatan : Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Persentase jumlah linmas di setiap kecamatan dan desa/kelurahan	%	N/A	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10.940.749.875,00	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja

LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN

MATRIKS BAGIAN 2 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
TUJUAN	1	TANPA KEMISKINAN [MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN]															
TARGET	1.2.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional															
INDIKATOR	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya															
	KEGIATAN 1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Buliding) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.1.	Meningkatnya kemampuan petugas pendamping sosial	Orang	n.a	8,0	9	10	15	20	25	30	35	1.270	APBD	DINSOS PMD
	KEGIATAN 2	Pendampingan Family Suport bagi keluarga Lanjut Usia	2.1.	Jumlah keluarga Lanjut Usia yang dibantu Family Suport	KK	na	46	52	58	63	68	73	78	83	911,35	APBD	DINSOS PMD
	KEGIATAN 3	Pendampingan Home Care bagi keluarga Lanjut Usia	3.1.	Jumlah Keluarga miskin yang diberi bantuan home care	Orang	n.a	310	310	345	350	355	360	365	370	1.120,50	APBD	DINSOS PMD
	KEGIATAN 4	Pendampingan UEP untuk Penyandang Disabilitas Ringan	4.1.	Terpasilitasinya UEP Penyandang Disabilitas Ringan	Orang	n.a	16	18	20	25	30	35	40	45	2.241	APBD	DINSOS PMD
	KEGIATAN 5	Penanggulangan Darurat Bencana di Kabupaten Pangandaran	5.1.	Jumlah penyelenggaraan Penanggulangan Darurat Bencana	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2.726,25	APBD	DINSOS PMD
	KEGIATAN 6	Bimbingan Sosial dan Bantuan Bagi Lansia Terlantar	6.1.	Jumlah lansia terlantar yang dibantu	Orang	n.a	50	50	60	70	80	90	100	110	351,15	APBD	DINSOS PMD
	KEGIATAN 7	Pendampingan Rutilahu	7.1.	Jumlah KK yang diberi Rutilahu	KK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	485,25	APBD	DINSOS PMD
	KEGIATAN 8	Bimbingan Sosial bagi Keluarga Miskin	8.1.	Jumlah Keluarga Miskin yang diberi bantuan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	355,93	APBD	DINSOS PMD
PROGRAM	2 (DUA)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial															
	KEGIATAN 1	Pelayanan dan KIE konseling kampanye sosial bagi PMKS	1.1	Jumlah peserta konseling kampanye sosial bagi PMKS	Orang	n.a	50	50	50	50	50	50	50	50	785,25	APBD	DINSOS PMD
TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.															
INDIKATOR	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pembinaan Lingkungan Sosial															
	KEGIATAN 1	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan	1.1.	Jumlah penduduk yang diberikan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah (orang)	Orang	0	6167	7000	7700	8500	9300	9500	9700	100000	12.000	APBD	DINAS KESEHATAN
TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.															
INDIKATOR	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.															
TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.															
INDIKATOR	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.															
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
INDIKATOR	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.															
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
INDIKATOR	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.															
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
INDIKATOR	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022	2023			
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.														
INDIKATOR	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.														
PROGRAM	1 (SATU) Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan															
KEGIATAN 1	Penyediaan Sarana Air Bersih	1.1.	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi dasar	Buah	n.a	1	0	0	10	10	10	10	10	21.202,30	APBD	DPUTRPRKP
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.														
INDIKATOR	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.														
PROGRAM	1 (SATU) Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan															
KEGIATAN 1	Pembuatan Sanitasi Lingkungan	1.1.	Jumlah sanitasi lingkungan	Buah	n.a	4	1	1	6	6	6	6	6	10.681,83	APBD	DPUTRPRKP
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.														
INDIKATOR	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.														
PROGRAM	1 (SATU) Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan															
KEGIATAN 1	Pembangunan Trotoar	1.1.	Panjang trotoar	km	n.a	0,5	0	0	1	1	1	1	1	5.388,57	APBD	DPUTRPRKP
KEGIATAN 2	Pembangunan Drainase	2.1.	Panjang drainase	km	n.a	1	1	1	1	1	1	1	1	4.632,79	APBD	DPUTRPRKP
KEGIATAN 3	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTLAHU)	3.1.	Jumlah rutilahu	Unit	n.a	0	450	1000	500	600	600	600	600	18.600	APBD	DPUTRPRKP
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.														
INDIKATOR	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.														
PROGRAM	1 (SATU) Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun															
KEGIATAN 1	Pengadaan Buku Pelajaran Agama SD	1.1.	Tersedianya Buku PAI	Eksemplar	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	203	APBD	DISDIKPOR
KEGIATAN 2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD	2.1.	Tersedianya Ruang Kelas Sekolah	Unit	2071	0	2078	2085	2092	2099	2107	2114	2121	4.200	APBD	DISDIKPOR
KEGIATAN 3	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD	3.1.	Tersedianya Perpustakaan	Unit	164	0	171	178	185	192	199	206	213	4.200	APBD	DISDIKPOR
KEGIATAN 4	Pembangunan Ruang UKS SD	4.1.	Tersedianya Ruang UKS	Unit	48	0	0	0	5	10	15	20	25	900	APBD	DISDIKPOR
KEGIATAN 5	Pembangunan Ruang Komputer SD	5.1.	Tersedianya Ruang Komputer	Unit	0	0	0	0	5	10	10	10	10	3.450	APBD	DISDIKPOR
KEGIATAN 6	Pengadaan Buku Gratis SD	6.1.	Buku pelajaran gratis SD 3 paket ; sekolah	Unit	3	0	68	142	216	293	293	293	293	2.530,80	APBD	DISDIKPOR

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)			SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023		
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
INDIKATOR	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun															
	KEGIATAN 1	Pengadaan Buku Pelajaran Agama SMP	1.1.	Tersedianya Buku PAI	Eksemplar	0	0	350	0	0	0	0	0	0	24,50	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	2.1.	Tersedianya Ruang Kelas Sekolah	Unit	190	0	193	196	199	202	0	0	0	1.980	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 3	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP	3.1.	Tersedianya Perpustakaan	Unit	40	0	42	44	46	0	0	0	0	1.620	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 4	Pembangunan Ruang UKS SMP	4.1.	Tersedianya Ruang UKS	Unit	16	16	17	18	20	22	22	24	24	1.190	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 5	Pembangunan Ruang Komputer SMP	5.1.	Tersedianya Ruang Komputer	Unit	13	13	15	18	20	22	24	26	26	1.785	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 6	Pengadaan Buku Gratis SMP	6.1.	Buku pelajaran gratis SMP 5 paket ; sekolah	Unit	1	0	11	22	33	46	0	0	0	3.557,40	APBD	DISDIKPORA
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
INDIKATOR	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.															
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
INDIKATOR	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahundengan kepemilikan akta kelahiran.															
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
INDIKATOR	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin danrentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.															
TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana															
INDIKATOR	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.															
TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana															
INDIKATOR	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.															
TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana															
INDIKATOR	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.															
TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana															
INDIKATOR	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.															
TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana															
INDIKATOR	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023				
TUJUAN	3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA															
TARGET	3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.															
INDIKATOR	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															
	KEGIATAN 1	Pelayanan Persalinan	1.1.	Jumlah ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapatkan jaminan	Orang	n.a	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	21.023,98	APBD	DINAS KESEHATAN
	KEGIATAN 2	Pelatihan Kemampuan Kompetensi Bidan	2.1.	Jumlah peserta yang dilatih	Orang	n.a	32	0	32	0	0	32	32	32	668,40	APBD	DINAS KESEHATAN
	KEGIATAN 3	Refreshing Kelas Ibu	3.1.	Jumlah peserta kelas ibu yang dibina	Orang	n.a	0	0	60	60	60	60	60	60	134,59	APBD	DINAS KESEHATAN
	KEGIATAN 4	Monev Program Keselamatan ibu melahirkan dan anak	4.1.	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	n.a	4	4	4	4	4	4	4	4	84,40	APBD	DINAS KESEHATAN
	KEGIATAN 5	Jampersal (DAK Non Fisik)	5.1.	Jumlah ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapatkan jaminan	Orang	n.a	1344	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	12.123,98	APBD	DINAS KESEHATAN
INDIKATOR	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.															
TARGET	3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.															
INDIKATOR	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.															
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
INDIKATOR	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.															
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
INDIKATOR	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.															
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
INDIKATOR	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita															
	KEGIATAN 1	Pembinaan Pelaksanaan 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Antenatal Care terpadu	1.1.	Jumlah peserta yang dibina	Orang	n.a	219	219	169	169	169	170	170	170	268,47	APBD	DINAS KESEHATAN
	KEGIATAN 2	Review Maternal Perinatal	1.2.	Jumlah peserta review maternal perinatal	Orang	n.a	108	108	108	108	108	108	108	108	162,28	APBD	DINAS KESEHATAN
	KEGIATAN 3	Monev Program Kesehatan anak balita	1.3.	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	n.a	4	4	4	4	4	4	4	4	111,89	APBD	DINAS KESEHATAN
	KEGIATAN 4	Pemantapan Pencatatan dan pelaporan KIA/KB	1.4.	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	n.a	4	4	4	4	4	4	4	4	60	APBD	DINAS KESEHATAN
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
INDIKATOR	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.															
TARGET	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.															
INDIKATOR	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.															
TARGET	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.															
INDIKATOR	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria															
TARGET	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.															
INDIKATOR	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
TARGET	3,3		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
INDIKATOR	3.3.5*		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).									
TARGET	3,3		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
INDIKATOR	3.3.5.(a)		Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.									
TARGET	3,3		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
INDIKATOR	3.3.5.(b)		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).									
TARGET	3.4.		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
INDIKATOR	3.4.1.(a)		Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.									
TARGET	3.4.		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
INDIKATOR	3.4.1.(b)		Prevalensi tekanan darah tinggi.									
TARGET	3.4.		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
INDIKATOR	3.4.1.(c)		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.									
TARGET	3.4.		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
INDIKATOR	3.4.2*		Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.									
TARGET	3.4.		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
INDIKATOR	3.4.2.(a)		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.									
TARGET	3.5.		Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
INDIKATOR	3.5.1.(a)		Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.									
TARGET	3.5.		Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
INDIKATOR	3.5.1.(b)		Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.									
TARGET	3.5.		Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
INDIKATOR	3.5.1.(c)		Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.									
TARGET	3.5.		Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
INDIKATOR	3.5.1.(d)		Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.									
TARGET	3.5.		Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
INDIKATOR	3.5.1.(e)		Prevalensi penyalahgunaan narkoba.									
TARGET	3.7.		Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
INDIKATOR	3.7.1*		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.									

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
INDIKATOR	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.															
TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
INDIKATOR	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).															
TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
INDIKATOR	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).															
TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
INDIKATOR	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).															
TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.															
INDIKATOR	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.															
TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.															
INDIKATOR	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.															
TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.															
INDIKATOR	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).															
TARGET	3.a.1*	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.															
INDIKATOR	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.															
TARGET	3.b.1.(a)	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.															
INDIKATOR	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan															
	KEGIATAN 1	Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai	1.1.	Jumlah paket obat dan BMHP yang disediakan (paket)	Paket	n.a	1	1	1	1	1	1	1	1	44.500	APBD	DINAS KESEHATAN
	KEGIATAN 2	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	2.1.	Cakupan distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke sarana kesehatan	Persentase	n.a	0	0	100	100	100	100	100	100	480	APBD	DINAS KESEHATAN
TARGET	3.c.1*	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.															
INDIKATOR	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
TUJUAN	4	PENDIDIKAN BERKUALITAS														
TARGET	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
INDIKATOR	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.														
TARGET	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
INDIKATOR	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.														
TARGET	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
INDIKATOR	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.														
TARGET	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
INDIKATOR	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.														
TARGET	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
INDIKATOR	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun														
KEGIATAN 1	Rehabilitasi ruang kelas SD	1.1.	Tersedianya Ruang Kelas SD Kondisi Baik	Unit	131	161	231	331	431	531	531	0	0	35.000	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 2	Rehabilitasi ruang perpustakaan SD	2.1.	Tersedianya Ruang Perpustakaan SD Kondisi Baik	Unit	0	0	0	10	20	30	40	50	60	2.400	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 3	Lomba Penerapan Pengelolaan Lingkungan Sekolah (SD).	3.1.	Terlaksananya Lomba Lingkungan Sekolah	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	100	100	1.100	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 4	Sapta Lomba PAI Tk. Provinsi (Jenjang SD)	4.1.	Keikutsertaan sekolah SD dalam lomba sebanyak 100%	Persentase	100	0	100	100	100	100	100	100	100	500	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 5	Penguatan Ekstrakurikuler Jenjang SD	5.1.	Terlaksananya penguatan ekstrakurikuler	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	100	100	11.370	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 6	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendataan penerima PIP/BSM SD	6.1.	Terlaksananya bimbingan teknis pendataan PIP/BSM	Lembaga	0	0	293	293	293	293	293	0	0	423,31	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 7	Pelatihan Kurikulum Nasional untuk Guru Kelas SD	7.1.	Telatohnya guru kelas	Persentase	6	25	30	60	100	100	100	100	100	1.591,20	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 8	Penyelenggaraan US SD	8.1.	Ikutsertanya siswa dalam kegiatan US	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.265	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 9	Penyusunan kisi-kisi SD	9.1.	tersusunnya kisi-kisi SD	Lembaga	293	0	293	293	293	293	293	293	293	300	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 10	Penyelenggaraan SSN SD	10.1.	tersusunnya SSN SD	Lembaga	8	0	5	15	25	35	45	55	65	600	APBD	DISDIKPORA

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
TARGET	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
INDIKATOR	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun														
KEGIATAN 1	Rehabilitasi ruang kelas SMP	1.1.	Tersedianya Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	Unit	55	60	84	133	138	143	148	151	156	5.950	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 2	Rehabilitasi ruang perpustakaan SMP	2.1.	Tersedianya Ruang Perpustakaan SMP Kondisi Baik	Unit	0	0	0	3	6	9	12	15	18	840	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 3	Rehabilitasi Ruang UKS SMP	3.1.	Tersedianya Ruang UKS SMP Kondisi Baik	Unit	10	0	0	1	2	2	2	2	2	220	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 4	Rehabilitasi Ruang Lab komputer SMP	4.1.	Lab komputer SMP kondisi baik	Unit	10	0	0	13	14	15	15	15	15	200	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 5	Rehabilitasi Ruang Lab IPA SMP	5.1.	Lab IPA SMP kondisi baik	Unit	24	0	0	26	28	31	31	31	31	500	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 6	Lomba Penerapan Pengelolaan Lingkungan Sekolah (SMP).	6.1.	Terlaksananya Lomba Lingkungan Sekolah	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	100	100	1.100	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 7	Sapta Lomba PAI Tk. Provinsi (Jenjang SMP)	7.1.	Keikutsertaan sekolah SMP dalam lomba sebanyak 100%	Persentase	100	0	100	100	100	100	100	100	100	750	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 8	Penguatan Ekstrakurikuler Jenjang SMP	8.1.	Terlaksananya penguatan ekstrakurikuler	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	100	100	11.370,00	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 9	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendataan penerima PIP/BSM SMP	9.1.	Terlaksananya bimbingan teknis pendataan PIP/BSM	Lembaga	0	0	46	46	46	46	46	46	46	400,00	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 10	Pelatihan Kurikulum Nasional untuk Guru Bidang SMP	10.1.	Telatinya guru bidang	Persentase	10	25	30	60	100	100	100	100	100	561,60	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 11	Penyelenggaraan US SMP	11.1.	Ikutsertanya siswa dalam kegiatan US	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	580	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 12	Penyelenggaraan SSN SMP	12.1.	tersusunnya SSN SMP	Lembaga	8	0	5	15	25	35	45	55	65	600	APBD	DISDIKPORA
TARGET	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
INDIKATOR	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.														
TARGET	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
INDIKATOR	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pendidikan Non Formal														
KEGIATAN 1	TRY OUT UJIAN NASIONAL PAKET A	4.1.	Persentase Kesiapan Warga Belajar Menghadapi UN	Persentase	0	0	0	90	90	90	90	90	90	800	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 2	UJIAN NASIONAL PAKET A	4.2.	Kelulusan 100%	Persentase	0	0	0	100	100	100	100	100	100	800	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 3	TRY OUT UJIAN NASIONAL PAKET B	4.3.	Persentase Kesiapan Warga Belajar Menghadapi UN	Persentase	0	0	0	90	90	90	90	90	90	800	APBD	DISDIKPORA
KEGIATAN 4	UJIAN NASIONAL PAKET B	4.4.	Kelulusan 100%	Persentase	n.a	100	100	100	100	100	100	100	100	1.007,19	APBD	DISDIKPORA

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)					SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
	KEGIATAN 5	TRY OUT UJIAN NASIONAL PAKET C	4.5.	Persentase Kesiapan Warga Belajar Menghadapi UN	Persentase	0	0	0	90	90	90	90	90	90	800	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 6	UJIAN NASIONAL PAKET C	4.6.	Kelulusan 100%	Persentase	n.a	100	100	100	100	100	100	100	100	1.059,33	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 7	Bimtek Peningkatan Mutu Pengelola Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal	4.7.	Persentase Kemampuan Manajerial Pengelolaan lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal	Persentase	40	0	0	60	60	90	100	100	100	400	APBD	DISDIKPORA
TARGET	4.2.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.															
INDIKATOR	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pendidikan Anak Usia Dini															
	KEGIATAN 1	Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kualitas Pendidik PAUD	4.1.	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kualitas Pendidik PAUD	Kali	1	0	2	8	8	8	8	8	8	5.250	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 2	Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kualitas Manajerial Pengelola PAUD	4.2.	Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan / Bimtek Peningkatan Kualitas Manajerial Pengelola PAUD	Kali	1	1	0	4	4	4	4	4	4	2.994,09	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 3	Tunjangan Kualifikasi bagi Pendidik PAUD	4.3.	Terealisasinya Tunjangan Kualifikasi bagi Pendidik PAUD	Orang	387	0	0	360	360	360	360	360	360	5.040	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 4	Lomba Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Kabupaten	4.4.	Terselenggaranya Kegiatan Lomba Lomba Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Kabupaten	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.321,75	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 5	Lomba Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat	4.5.	Ikut serta Kegiatan Lomba Lomba Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.162,70	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 6	Pameran Gebyar PAUD Tingkat Kabupaten	4.6.	Terselenggaranya Kegiatan Pameran Gebyar PAUD Tingkat Kabupaten	Kali	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1.200	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 7	Gebyar PAUD Tingkat Provinsi Jawa Barat	4.7.	Ikut Serta dalam Kegiatan Gebyar PAUD Tingkat Provinsi Jawa Barat	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.784,07	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 8	Porseni PAUD & Dikmas	4.8.	Terselenggaranya Porseni PAUD & Dikmas	Kali	n.a			1	1	1	1	1	1	1.200	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 9	Akreditasi Lembaga PAUD	4.9.	Ikut Serta dalam Kegiatan Akreditasi Lembaga PAUD	Kali	44	0	74	129	184	240	240	240	240	3.630	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 10	Penyusunan Materi Bahan Ajar PAUD	4.10.	Terlaksanakannya Kegiatan Penyusunan Materi Bahan Ajar PAUD	Kali	0	0	0	3	3	3	3	3	3	1.800	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 11	Pengadaan Materi Bahan Ajar PAUD	4.11.	Terlaksanakannya Cetak Materi Bahan Ajar PAUD	Paket	0	0	0	750	1500	2250	2250	2250	2250	300	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 12	Pengadaan Buku - Buku dan Alat Tulis Siswa PAUD	4.12.	Terlaksananya Pengadaan Buku - Buku dan Alat Tulis Siswa PAUD	Paket	0	0	7270	15400	16800	18200	18200	18200	18200	1.497	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 13	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.13.	Terealisasinya Pembangunan Ruang Kelas Baru	Lokal	0	4	63	124	185	246	246	246	246	46.250	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	4.14.	Terealisasinya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	120	0	0	162	204	246	246	246	246	4.400	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 15	Pembangunan Taman Bermain PAUD	4.15.	Terealisasinya Pembangunan Taman Bermain PAUD	Unit	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3.500	APBD	DISDIKPORA

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
TARGET	4.3.	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.															
INDIKATOR	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat.															
TARGET	4.3.	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.															
INDIKATOR	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).															
TARGET	4.4.	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.Global															
INDIKATOR	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).															
TARGET	4.5.	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.															
INDIKATOR	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.															
TARGET	4.6.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.															
INDIKATOR	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pendidikan Non Formal															
	KEGIATAN 1	Pengembangan pendidikan keaksaraan (Peningkatan kualitas tutor keaksaraan)	4.1.	Peningkatan Kompetensi Tutor	Persentase	40	0	0	55	70	90	90	95	95	400	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 2	Pengembangan pendidikan keaksaraan (Peningkatan Sarana Prasarana TBM: Pengadaan Buku-buku)	4.2.	Terealisasinya Pengadaan Buku-buku TBM	Paket	0	0	0	3	6	9	10	10	10	100	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 3	Pengembangan pendidikan keaksaraan (Peningkatan Sarana Prasarana TBM: Pengadaan Meubeler TBM)	4.3.	Terealisasinya Pengadaan Meubeler TBM	Paket	0	0	0	3	6	9	10	10	10	200	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 4	Pengembangan pendidikan keaksaraan (Pelaksanaan Gerakan Indonesia Membaca)	4.4.	Meningkatnya Wawasan Pengelola TBM	Persentase	40	0	0	55	70	90	90	95	95	400	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 5	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga PKBM	4.5.	Jumlah Program Layanan	Program Layanan	0	0	0	20	40	60	80	80	80	1.200	APBD	DISDIKPORA
	KEGIATAN 6	PAMERAN HARI AKSARA INTERNASIONAL (HAI) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT	4.6.	Jumlah Juara pada HAI Tk. Provinsi	Juara	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1.891,30	APBD	DISDIKPORA
TARGET	4.a.1*	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.															
INDIKATOR	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).															
TARGET	4.c.1*	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.															
INDIKATOR	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
TUJUAN	5	KESETARAAN GENDER															
TARGET	5.1.	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.															
INDIKATOR	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.															
TARGET	5.2.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.															
INDIKATOR	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.															
TARGET	5.2.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.															
INDIKATOR	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan															
	KEGIATAN 1	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	4.1.	Jumlah peserta yang dilatih	Orang	n.a	0	0	0	50	50	50	50	50	200	APBD	DKBP3A
	KEGIATAN 2	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	4.2.	Jumlah peserta yang dilatih	Orang	n.a	0	0	0	50	50	50	50	50	100	APBD	DKBP3A
	KEGIATAN 3	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	4.3.	Jumlah peserta yang dilatih	Orang	n.a	0	0	20	20	20	20	20	20	75	APBD	DKBP3A
	KEGIATAN 4	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	4.3.	Jumlah kasus	kasus	10	0	1	1	1	1	1	1	1	300	APBD	DKBP3A
TARGET	5.3.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.															
INDIKATOR	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.															
TARGET	5.3.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.															
INDIKATOR	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.															
TARGET	5.3.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.															
INDIKATOR	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).															
TARGET	5.3.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.															
INDIKATOR	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.															
TARGET	5.5.	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.															
INDIKATOR	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan															
	KEGIATAN 1	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	5.1.	Jumlah Perda yang dibuat	dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	200	APBD	DKBP3A
	KEGIATAN 2	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5.2.	Jumlah peserta	Orang	0	0	100	100	300	0	0	0	0	400	APBD	DKBP3A
	KEGIATAN 3	Data Terpilah Gender, Perempuan Dan Anak	5.3.	Jumlah data partisipasi perempuan dan anak	dokumen	1	0	1	0	1	0	0	0	0	171,57	APBD	DKBP3A

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023				
TARGET	5.5.	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.															
INDIKATOR	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.															
TARGET	5.6.	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.															
INDIKATOR	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.															
TARGET	5.6.	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.															
INDIKATOR	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pelayanan Kontrasepsi															
KEGIATAN 1	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	5.1.	Jumlah akseptor yang terlayani	Akseptor	12787	200	200	200	200	200	200	200	200	200	514,12	APBD	DKBP3A
TARGET	5.6.	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.															
INDIKATOR	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.															
TARGET	5.6.	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.															
INDIKATOR	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.															
TARGET	5.b.	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.															
INDIKATOR	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.															
TUJUAN	6	Air Bersih dan Sanitasi Layak															
TARGET	6.1.	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua															
INDIKATOR	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.															
TARGET	6.1.	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua															
INDIKATOR	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.															
TARGET	6.1.	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua															
INDIKATOR	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.															
TARGET	6.2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan															
INDIKATOR	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.															
TARGET	6.2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan															
INDIKATOR	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.															
TARGET	6.2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan															
INDIKATOR	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023										
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Lingkungan Sehat															
KEGIATAN 1	Pelaksanaan Pemicuan STBM	6.1.	Jumlah lokasi yang dipicu	Lokasi	n.a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1.071	APBD	DINAS KESEHATAN
KEGIATAN 2	Pelatihan STBM Bagi Petugas	6.2.	Jumlah peserta yang dilatih	Orang	n.a	30	0	0	0	0	0	0	0	0	95	APBD	DINAS KESEHATAN
TARGET	6.2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan															
INDIKATOR	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).															
TARGET	6.2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan															
INDIKATOR	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.															
TARGET	6.2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan															
INDIKATOR	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.															
TARGET	6.3.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.															
INDIKATOR	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).															
TARGET	6.3.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.															
INDIKATOR	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.															
TARGET	6.4.	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.															
INDIKATOR	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.															
TARGET	6.4.	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.															
INDIKATOR	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.															
TARGET	6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.															
INDIKATOR	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)															
TARGET	6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.															
INDIKATOR	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.															
TARGET	6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.															
INDIKATOR	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.															
TARGET	6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.															
INDIKATOR	6.5.1.(d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.															
TARGET	6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.															
INDIKATOR	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.															
TARGET	6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.															
INDIKATOR	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.															
TARGET	6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.															
INDIKATOR	6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.															
TARGET	6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.															
INDIKATOR	6.5.1.(f)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.															
TARGET	6.6.	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.															
INDIKATOR	6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
INDIKATOR	6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.											
TARGET	6.6.	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.											
INDIKATOR	6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.											
TARGET	6.6.	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.											
INDIKATOR	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.											
TARGET	6.6.	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.											
INDIKATOR	6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.											
TUJUAN	7	Energi Bersih dan Terjangkau											
TARGET	7.1.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.											
INDIKATOR	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.											
TARGET	7.1.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.											
INDIKATOR	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.											
TARGET	7.1.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.											
INDIKATOR	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.											
TARGET	7.1.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.											
INDIKATOR	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.											
TUJUAN	8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi											
TARGET	8.1.	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.											
INDIKATOR	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.											
TARGET	8.1.	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.											
INDIKATOR	8.1.1.(a)	PDB per kapita.											
TARGET	8.2.	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.											
INDIKATOR	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.											
TARGET	8.3.	Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.											
INDIKATOR	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.											
TARGET	8.3.	Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.											

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)			SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
INDIKATOR	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.																
TARGET	8.3.	Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.																
INDIKATOR	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.																
TARGET	8.5.	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.																
INDIKATOR	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.																
TARGET	8.5.	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.																
INDIKATOR	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																
	KEGIATAN 1	Pengadaan Tanah BLK	8.1.	Tersedianya Lahan	Ha	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.000	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 2	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK	8.2.	Meningkatannya kemampuan tenaga BLK	Orang	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	224,81	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 3	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	8.3.	Meningkatnya kemampuan pencari kerja	Orang	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	500	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 4	Kegiatan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK)	8.4.	Tersedianya gedung BLK	Gedung	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1.500	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 5	Pengadaan Sarana dan Prasaana BLK	8.5.	Tersedianya Sarana dan Prasarana BLK	Unit	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	350	APBD	DTKIT
PROGRAM	2 (DUA)	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																
	KEGIATAN 1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	8.1.	Tersedianya data bursa kerja	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	249,36	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 2	Penyuluhan dan penyebaran informasi ketenagakerjaan	8.2.	Terinformasikan informasi lowongan kerja	Kabupaten	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24,02	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 3	Pelatihan bagi Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	8.3.	Meningkatnya Kemandirian Tenaga Kerja	Orang	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 4	Pelatihan Penggunaan Teknologi Tepat Guna	8.4.	Meningkatnya Kemampuan Penggunaan Teknologi Tepat Guna	Orang	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	300	APBD	DTKIT
PROGRAM	3 (TIGA)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																
	KEGIATAN 1	Pembinaan Bagi Industri Kecil dan menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	8.1.	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha	Pelaku Usaha	3	75	0	0	0	0	0	0	0	0	128,52	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 2	Pembinaan dan Pelatihan Industri Kecil Makanan Olahan	8.2.	meningkatkan pengetahuan pelaku IKM	Pelaku Usaha	0	0	215	155	175	190	140	140	140	140	1.790	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 3	Pembangunan Rumah Kemasan (Banprov)	8.3.	Tersedianya Rumah Kemasan	Unit	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1.000	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 4	Renovasi Rumah Produksi Gula Merah (Banprov)	8.4.	Terlaksananya renovasi bangunan rumah produksi gula merah	Paket	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	150	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 5	Fasilitasi peralatan produksi Gula Merah (Banprov)	8.5.	Jumlah paket peralatan produksi gula merah	Paket	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	100	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 6	Magang Kerajinan Anyaman Hatta (Banprov)	8.6.	Tersedianya pengrajin anyaman hatta yang terlatih	Orang	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	150	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 7	Pelatihan Keterampilan Kerajinan Batok (Banprov)	8.7.	Terfasilitasinya kegiatan pelatihan keterampilan kerajinan batok	Orang	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	150	APBD	DTKIT
	KEGIATAN 8	Bantuan alat (Pengolahan Juice Honje) (Banprov)	8.8.	Tersedianya alat mesin Juice Honje dan Kemasan Juice Honje	Paket	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100	APBD	DTKIT

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
TARGET	8.5.			Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
INDIKATOR	8.5.2.(a)			Persentase setengah pengangguran.									
TARGET	8.6.			Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
INDIKATOR	8.6.1*			Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).									
TARGET	8.9.			Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
INDIKATOR	8.9.1.(a)			Jumlah wisatawan mancanegara.									
TARGET	8.9.			Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
INDIKATOR	8.9.1.(b)			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.									
TARGET	8.10.			Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.									
INDIKATOR	8.10.1*			Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.									
TARGET	8.10.			Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.									
INDIKATOR	8.10.1.(a)			Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).									
TUJUAN	9			Industri, Inovasi, dan Infrastruktur									
TARGET	9.1.			Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
INDIKATOR	9.1.2.(b)			Jumlah dermaga penyeberangan.									
TARGET	9.2.			Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
INDIKATOR	9.2.1*			Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.									
TARGET	9.2.			Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
INDIKATOR	9.2.1.(a)			Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.									
TARGET	9.4.			Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.									
INDIKATOR	9.4.1*			Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.									
TARGET	9.4.			Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.									
INDIKATOR	9.4.1(a)			Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.									
TARGET	9.c.			Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									
INDIKATOR	9.c.1*			Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.									
TARGET	9.c.			Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									
INDIKATOR	9.c.1.(a)			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.									
TARGET	9.c.			Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									
INDIKATOR	9.c.1.(b)			Proporsi individu yang menggunakan Internet.									

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
TARGET	11.3.			Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.									
INDIKATOR	11.3.1.(a)			Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.									
TARGET	11.3.			Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.									
INDIKATOR	11.3.1.(b)			Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).									
TARGET	11.3.			Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.									
INDIKATOR	11.3.2.(a)			Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.									
TARGET	11.3.			Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.									
INDIKATOR	11.3.2.(b)			Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.									
TARGET	11.4.			Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.									
INDIKATOR	11.4.1.(a)			Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.									
TARGET	11.5.			Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
INDIKATOR	11.5.1*			Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.									
TARGET	11.5.			Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
INDIKATOR	11.5.1.(a)			Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).									
TARGET	11.5.			Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
INDIKATOR	11.5.1.(b)			Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.									
TARGET	11.5.			Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
INDIKATOR	11.5.1.(c)			Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.									
TARGET	11.5.			Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
INDIKATOR	11.5.2.(a)			Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.									
TARGET	11.6.			Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
INDIKATOR	11.6.1.(a)			Persentase sampah perkotaan yang tertangani.									

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
PROGRAM	1 (SATU)					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan													
	KEGIATAN 1	Pembangunan Bank Sampah	11.1.	Tersedianya Bank Sampah	Unit	n.a	1	1	1	1	1	1	1	1.221,02	APBD	DLHK
	KEGIATAN 2	Pengadaan Alat pencacah dan pemilah sampah	11.2.	Terfasilitasinya Pengelolaan Bank sampah	Unit	0	2	2	2	2	2	2	2	671,56	APBD	DLHK
	KEGIATAN 3	Pengadaan Tong sampah	11.3.	Jumlah tong sampah yang diadakan	Unit	400	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4.517,77	APBD	DLHK
	KEGIATAN 4	Pengadaan Kendaraan Pengangkut sampah roda 3	11.4.	Terlaksananya Pengadaan Motor roda 3 pengangkut sampah	Unit	6	15	15	15	15	15	15	15	3.535	APBD	DLHK
	KEGIATAN 5	Pengadaan Pengangkut Sampah Roda 4	11.5.	Tersedianya Kendaraan roda 4 Pengangkut sampah	Unit	0	2	2	2	2	2	2	2	4.408,95	APBD	DLHK
	KEGIATAN 6	Pengadaan Bak sampah	11.6.	Tersedianya Pembuangan sampah sementara	Titik	0	2	2	2	2	2	2	2	1.160,25	APBD	DLHK
	KEGIATAN 7	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	11.7.	Jumlah peraturan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Dok	n.a	0	5	2	2	1	0	0	500	APBD	DLHK
	KEGIATAN 8	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	11.8.	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Unit	50	1	1	1	1	1	1	1	7.318,75	APBD	DLHK
	KEGIATAN 9	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	11.9.	Jumlah Prasarana dan Sarana persampahan yang terpelihara	Unit	8	1	1	1	1	1	1	1	5.602,95	APBD	DLHK
	KEGIATAN 10	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	11.10.	Jumlah pengolahan yang menerapkan teknologi persampahan	Buah	n.a	0	10	10	10	10	10	10	11.715	APBD	DLHK
	KEGIATAN 11	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	11.11.	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan pengelolaan persampahan	Orang	3	0	3	3	4	3	3	3	22	APBD	DLHK
	KEGIATAN 12	Kerjasama Pengelolaan Sampah	11.12.	Jumlah Mou Pengelolaan sampah	Dok	n.a	1	5	5	0	0	0	0	1.794,00	APBD	DLHK
	KEGIATAN 13	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	11.13.	Jumlah peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Buah	n.a	1	1	1	1	1	1	1	652	APBD	DLHK
	KEGIATAN 14	Penyusunan Rancangan Perda Persampahan	11.14.	Jumlah rancangan perda persampahan	Dok	1	0	2	3	2	1	1	1	560	APBD	DLHK
	KEGIATAN 15	Pengadaan Alat Pengolahan Sampah	11.15.	Jumlah alat pengolahan sampah	Unit	n.a	0	20	20	20	35	40	45	1.875,50	APBD	DLHK
	KEGIATAN 16	Penyediaan Lahan TPA	11.16.	Jumlah luas lahan TPA	Ha	n.a	0	10	0	0	0	0	0	6.300	APBD	DLHK
TARGET	11.7.	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.														
INDIKATOR	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.														
TARGET	11.b.	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.														
INDIKATOR	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.														
TARGET	11.b.	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.														
INDIKATOR	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.														

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
TARGET	16.6.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.															
INDIKATOR	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.															
TARGET	16.6.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.															
INDIKATOR	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).															
TARGET	16.6.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.															
INDIKATOR	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).															
TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.															
INDIKATOR	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan															
	KEGIATAN 1	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	16.1.	Jumlah Perda yang dibuat	Dokumen	n.a	0	0	1	0	0	0	0	0	200	APBD	DKBP3A
	KEGIATAN 2	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	16.2.	Jumlah Perda yang dibuat	Dokumen	n.a	0	0	1	0	0	0	0	0	200	APBD	DKBP3A
	KEGIATAN 3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	16.3.	Jumlah peserta	Orang	n.a	0	100	100	300	300	300	300	300	342,35	APBD	DKBP3A
TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.															
INDIKATOR	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).															
TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.															
INDIKATOR	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.															
TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.															
INDIKATOR	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.															
TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.															
INDIKATOR	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.															
TARGET	16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.															
INDIKATOR	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.															
TARGET	16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.															
INDIKATOR	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.															
TARGET	16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.															
INDIKATOR	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.															
TARGET	16.10.	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.															
INDIKATOR	16.10.2(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.															
TARGET	16.10.	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.															
INDIKATOR	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.															
TARGET	16.10.	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.															
INDIKATOR	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.															

**LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KOTA BEKASI**

MATRIKS BAGIAN 2 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
TUJUAN	1	TANPA KEMISKINAN [MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN]															
TARGET	1.2.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional															
INDIKATOR	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya															
	KEGIATAN 1	Pembinaan Pengembangan Potensi Keluarga Binaan Sosial (KBS) dalam KUBE	1.1.	Terbinanya KBS dalam KUBE dalam hal pengelolaan usaha keluarga	keluarga	0	40	40	40	40	40	40	40	40	720	APBD Kota Bekasi	Dinas Sosial
	KEGIATAN 2	Pemberian Sembako Kepada Lanjut Usia Dari Keluarga Miskin	2.1.	Terpenuhinya sebagian kebutuhan pokok bagi lansia yang miskin	orang	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1.125	APBD Kota Bekasi	Dinas Sosial
PROGRAM	2 (DUA)	Program Perencanaan Sosial Budaya															
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bekasi	2.1	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2016	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.000	APBD Kota Bekasi	Bappeda
TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.															
INDIKATOR	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
KEGIATAN 1	Penggantian Pelayanan Keluarga Miskin	1,1	Jumlah kunjungan Pasien Rawat Inap;	orang	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	67.500	APBD Kota Bekasi	RSUD	
		1,2	Jumlah kunjungan Pasien Rawat Jalan	orang	10265	10265	10265	10265	10265	10265	10265	10265		10265		APBD Kota Bekasi
KEGIATAN 2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin diluar Jaminan Kesehatan Nasional dan Operasional Pelaksanaan kegiatan	2,1	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan Jamkesda 2015 Tim Pelaksana dan Pengendali;	orang	75	75	75	75	75	75	75	75	225.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
		2,2	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Jamkesda dengan Rumah Sakit;	orang	100	100	100	100	100	100	100	100		100		APBD Kota Bekasi
		2,3	Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Jamkesda 2015 dengan Rumah Sakit;	orang	100	100	100	100	100	100	100	100		100		APBD Kota Bekasi
		2,4	Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Jamkesda 2015 dengan Lintas Sektoral	orang		50	50	50	50	50	50	50	50		50		APBD Kota Bekasi
KEGIATAN 3	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Banprov)	3.1	-											40.000	APBD Prov. Jabar	Dinas Kesehatan	
KEGIATAN 4	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (DAK)	4.1	-											10.000	APBN (DAK) + APBD Kota Bekasi	RSUD	
TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.															
INDIKATOR	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	KEGIATAN 1	Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	1.1.	Pelatihan Kerja Las CO2;	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.800	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja	
			1.2.	Pelatihan Kelistrikan;	Orang	20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
			1.4.	Pelatihan Bahasa Asing;	Orang	20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
			1.3.	Pelatihan Menyetir Mobil	Orang		20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
	KEGIATAN 2	Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan	2.1.	Pelatihan Las Listrik;	Orang	20	20	20	20	20	20	20	2.700	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja	
			2.2.	Pelatihan Servis Alat Rumah Tangga;	Orang	20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
			2.3.	Pelatihan Perbengkelan;	Orang	20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
			2.4.	Pelatihan Tekhnik Komputer;	Orang		20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
			2.5.	Servis AC;	Orang		20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
			2.6.	Servis HP, Komputer	Orang		20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
	KEGIATAN 3	Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat	3.1.	Pelatihan Menjahit;	Orang		20	20	20	20	20	20	20	900	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja	
			3.2.	Pelatihan Tata Boga;	Orang		20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
			3.4.	Pelatihan Tata Rias	Orang		20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
	KEGIATAN 4	Penyelenggaraan Pola Magang Kerja di Perusahaan	4.1.	Uji latih kerja atau magang di perusahaan bagi peserta yang sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DISNAKER	Orang		40	40	40	40	40	40	40	1.350	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja	
PROGRAM	2 (DUA)	Program Peningkatan Kesempatan Kerja															
	KEGIATAN 1	Pengembangan Kesempatan Kerja	1,1	Pembentukan kelompok binaan;	Kelompok		5	5	5	5	5	5	5	450	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja	
			1,2	Pelatihan bagi kelompok binaan;	Orang		75	75	75	75	75	75	75		75	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja
			1,3	Pembinaan terhadap kelompok binaan	Kelompok		5	5	5	5	5	5	5		5	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)					SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	KEGIATAN 2	Pembinaan Soft Skill Kepada Pelajar SMK Dalam Rangka Menghadapi MEA	2.1	Terlatihnya Siswa didik di Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Bekasi	Siswa		8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	1.125	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja
	KEGIATAN 3	Pengerahan, Perpindahan, dan Penempatan Transmigrasi	3.1	Terlaksananya Penjajagan lokasi, pemantapan lokasi dan pengiriman transmigran asala Kota Bekasi	KK		10	10	10	10	10	10	10	10	2.250	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja
		Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.															
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.															
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial															
TARGET	1.3.	Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)	1.1.	Terselenggaranya Program Keluarga Harapan	Unit		1	1	1	1	1	1	1	1	900	APBD Kota Bekasi	Dinas Sosial
INDIKATOR	1.3.1.(d)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
PROGRAM	1 (SATU)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.															
	KEGIATAN 1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	1.1.	Terlaksananya Evaluasi pro KB sebanyak 2 kali;	kali		2	2	2	2	2	2	2	2	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
			1.2.	Terlaksananya pembinaan kepada bidan Praktek Swasta tth RR KIA dan Otopsi Verbal serta Penanganan Komplikasi dan Deteksi Dini	Angkatan		2	2	2	2	2	2	2				
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Remaja	2.1.	Workshop Kesehatan Remaja di Rumah Singgah;	Sekolah		4	4	4	4	4	4	4	750	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
			2.2.	Workshop Program UKS bagi Petugas Puskesmas;	Orang		24	24	24	24	24	24	24				

TARGET	INDIKATOR	PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
	1.4.		Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)															
	1.4.1.(a)	1 (SATU)	3.1	Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Bidan Praktek Mandiri Kota Bekasi:	Orang		93	93	93	93	93	93	93	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan		
			3.2	Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Bidan I Puskesmas Kota Bekasi:	Orang		62	62	62	62	62	62						
			3.3	Evaluasi Program Poned sebanyak 2 kali	Puskesmas		10	10	10	10	10	10						
	KEGIATAN 1		4.1	Pemberian Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)										70.000	APBN (DAK)	Dinas Kesehatan		
			Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
			Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.															
	KEGIATAN 2		Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
			1.1.	Gizi Imunisasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	49.445	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan		
	KEGIATAN 3		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															
			1,1	Terlaksananya Review pengisian Kohort ibu,bayi dan balita lintas program (KIA,GIZI dan Imunisasi)	Angkatan	2	2	2	2	2	2	2	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan		
	KEGIATAN 1		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
	PROGRAM	2 (DUA)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.															
	KEGIATAN 1		Program Keluarga Berencana															
			1.1.	Distribusi Alat Obat dan Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	-	625	APBN (DAK Non Fisik)	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perindungan Anak dan KB		
			Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.															
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
TARGET	1.4.					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR	1.4.1.(c)	Pengawasan Kualitas Air Minum	1.1.	Terinformasikan Kondisi Kualitas Air Minum di Kota Bekasi;	Kali		1	1	1	1	1	1	1	125	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
			1.2.	Tersosialisasinya Jadwal kegiatan Pengambilan Sample Air Minum;	Kali		1	1	1	1	1	1	1			
PROGRAM	1 (SATU)		1.3.	Terlaksananya Pengawasan dan pengujian Kualitas Air Minum PDAM	Kali		1	1	1	1	1	1	1			
	KEGIATAN 1	Program penyediaan dan pengolahan air bersih														
TARGET	1.4.	Pipanisasi SPAM Jatisari 100 M3/detik	1,1		orang	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	60.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
INDIKATOR	1.4.1.(d)	Pipanisasi SPAM Jatiluhur	2,1		orang	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	20.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
PROGRAM	1 (SATU)	Pembangunan Reservoir untuk SPAM Jatiluhur	3,1		M3	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	55.000	APBN (DAK)	Dinas Bangunan dan Permukiman
	KEGIATAN 1	Infrastruktur Air Minum (DAK)	4,2											35.000	APBN (DAK)	Dinas Bangunan dan Permukiman
		Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Wilayah Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatisari (DAK)	5,1												125.000	APBN (DAK)
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															

PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)			SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
PROGRAM	2 (DUA)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.															
	KEGIATAN 1	Program penyediaan dan pengolahan air bersih															
	KEGIATAN 2	Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (DAK)	1.1												30.000	APBN (DAK)	Dinas Bangunan dan Permukiman
	KEGIATAN 3	Program Pengembangan Perumahan															
	KEGIATAN 4	Pengembangan Fasilitas Sanitasi Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara (DAK)	1.1		Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	625	APBN (DAK)	Dinas Bangunan dan Permukiman
	KEGIATAN 5	Pendampingan Bantuan Program SANITASI 2016	2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
		Pembinaan dan Evaluasi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2012-2013	3.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.375	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
		Pengembangan Fasilitas Sanitasi Kel. Pejuang Kec. Medan Satria (DAK)	4.2		Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	875	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
		Pengembangan Fasilitas Sanitasi Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur (DAK)	5.3		Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	875	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)					SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
TARGET	1.4.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas ... (12 kecamatan)	1.1	Terselenggaranya inspeksi sanitasi	kali		6	6	6	6	6	6	6	49.445	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
INDIKATOR	1.4.1.(e)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.														
PROGRAM	1 (SATU)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.														
	KEGIATAN 1	Program Pengembangan Perumahan														
PROGRAM	2 (DUA)	Review Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Bekasi (Audio Visual)	1.1.	CD durasi 10 Menit	unit		5	-	-	-	-	-	-	350	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
	KEGIATAN 1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.														
	KEGIATAN 2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.														
	KEGIATAN 3	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar														
	KEGIATAN 4				Sekolah	66	66	66	66	66	66	66			
	KEGIATAN 5	Penyelenggaraan Pendidikan BOSDA SDN Gugus I Kecamatan (12 kecamatan)	1.1.	Tercapainya Angka partisipasi Murni (APM) SD 100%	bulan		12	12	12	12	12	12	12	39.600	APBD Kota Bekasi	Dinas Pendidikan
PROGRAM	3 (TIGA)															
	KEGIATAN 1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.														

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
TARGET	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN 1			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
TARGET	1.4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.															
INDIKATOR	1.4.1.(f)	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar															
PROGRAM	1 (SATU)	Penyelenggaraan Pendidikan BOSDA SMPN Gugus I Kecamatan (12 kecamatan)	1.1.	Tercapainya Angka partisipasi Murni (APM) SMP 100%	Sekolah	43	43	43	43	43	43	43	602.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Pendidikan	
	KEGIATAN 1				bulan		12	12	12	12	12	12	12				12
					Siswa												
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.															
		Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar															
TARGET	1.4.	Penyelenggaraan Pendidikan BOSDA SMAN Gugus I Kecamatan (12 kecamatan)	1.1.	Tercapainya Angka partisipasi Murni (APM) SMA 100%	Sekolah	42	42	42	42	42	42	42	1.050.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Pendidikan	
INDIKATOR	1.4.1.(g)				bulan		12	12	12	12	12	12	12				12
PROGRAM	1 (SATU)				Siswa												
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
		KEGIATAN 1			Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.												
		Program Penataan Administrasi Kependudukan															
TARGET	1.4.	Peningkatan Pelayanan Akta-Akta Catatan Sipil	1.1.	Tersedianya Akta Kelahiran	Akta	11200	11200	11200	11200	11200	11200	11200	675	APBD Kota Bekasi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
INDIKATOR	1.4.1.(h)		1.2.	Akta Perkawinan;	Akta	600	600	600	600	600	600	600				
PROGRAM	1 (SATU)	Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan, Anak Terlantar Dan Anak Jalanan	2.1.	Tersedianya Akta Kelahiran	Akta	200	200	200	200	200	200	200	340	APBD Kota Bekasi	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	KEGIATAN 1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.															
		Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana															
		Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.															
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
		Penanganan Masalah Kesehatan Korban Bencana	1.1.	Pertemuan Tim Reaksi Cepat (TCR)/Tim Penilaian Cepat (TPC) dan Tim Bantuan Kesehatan, dalam rangka Penanggulangan Krisis	Orang	80	80	80	80	80	80	80	500	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
			1.2.	Tersedianya Laporan Tim Penilaian Cepat (TPC)/Tim Rapid Health Assessment (RHA) di Lokasi Bencana di wilayah Kota Bekasi;	laporan	1	1	1	1	1	1	1				
TARGET	1.4.		1.3.	Terlaksananya Piket Posko Kesehatan Krisis Kesehatan Akibat Bencana oleh Tim Reaksi Cepat (TRC)	Petugas	5	5	5	5	5	5	5				
INDIKATOR	1.4.1.(i)	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana															
PROGRAM	1 (SATU)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.															
	KEGIATAN 1	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran															
		Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	1.1.	Terselenggaranya penyuluhan & pembinaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran;	Kegiatan		16	16	16	16	16	16	16	16	500	APBD Kota Bekasi	Kantor Pemadam Kebakaran
			1.2.	Terbentuknya Tim BALAKAR/SATLAKAR di RW	Orang		480	480	480	480	480	480	480	480			
TARGET	1.4.	Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dilingkungan Pendidikan Dasar Menengah dan Perguruan Tinggi	2.1.	Terlaksananya Sosialisasi dan Simulasi Pengenalan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi	Siswa		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	500	APBD Kota Bekasi	Kantor Pemadam Kebakaran	
INDIKATOR	1.4.1.(j)	Pengadaan Peralatan-Peralatan Pemadam Kebakaran dan Rescue	3,1	Pengadaan Alat Operasional Kebakaran, dan APAR	Unit + APAR	175	175	175	175	175	175	175	3.000	APBD Kota Bekasi	Kantor Pemadam Kebakaran	
PROGRAM	1 (SATU)	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana															
	KEGIATAN 1	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.															
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam															
	KEGIATAN 2	Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	1.1.	Terlaksananya Pemetaan Daerah awan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	860	APBD Kota Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)					SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
		Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Peningkatan Sadar Bencana Kepada Dunia Pendidikan	2.1.	Terlaksananya Koordinasi dengan Dunia Pendidikan Dalam Upaya Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	675	APBD Kota Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penyusunan Rencana Kontigensi Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi	3.1	Terlaksananya Penyusunan Renkon Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi	%	100	100	100	100	100	100	1.125	APBD Kota Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Operasional Penanggulangan Bencana	4.1.	Terlaksananya Operasional penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	450	APBD Kota Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Pengadaan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	5.1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	1.800	APBD Kota Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
TARGET	1.4.	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Rawan Lokasi Rawan Bencana	6.1.	Tersebarinya Informasi Kebencanaan dan Pemahaman Bencana Melalui Penyuluhan Kepada Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	450	APBD Kota Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
INDIKATOR	1.4.1.(k)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial														
TARGET	1.5.	Pembinaan TAGANA Kota Bekasi	1,1	Terbinanya Kesiapsiagaan Anggota TAGANA dalam penanggulangan bencana	Orang	50	50	50	50	50	50	50	450	APBD Kota Bekasi	Dinas Sosial
INDIKATOR	1.5.1*	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana														
PROGRAM	1 (SATU)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.														
	KEGIATAN 1	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana														
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.														
		TANPA KELAPARAN														
		Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.														
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).															
	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.															
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
TARGET	1.5.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
INDIKATOR	1.5.1.(a)	Peningkatan Gizi Masyarakat	1.1.	Terlaksananya Lomba Balita Sehat ;	Balita	24	24	24	24	24	24	24	1.125	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
PROGRAM	1 (SATU)		1.2.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas sektoral dlm Upaya peningkatan capaian program gizi;	Kali	2	2	2	2	2	2	2				
	KEGIATAN 1		1.3.	Pendampingan Puskesmas dengan capaian prog gizi rendah;	Puskesmas	26	26	26	26	26	26	26				
TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.															
INDIKATOR	1.5.1.(e)	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.															
	KEGIATAN 1	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.															
	KEGIATAN 2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.															
	KEGIATAN 3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.															
	KEGIATAN 4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
	KEGIATAN 5	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas (12 kecamatan se Kota Bekasi)	1.1.	Gizi Imunisasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	15.500	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
	KEGIATAN 6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat															
PROGRAM	2 (DUA)	Peningkatan Gizi Masyarakat	1,1	Terlaksananya Evaluasi Program Gizi	Kali	3	3	3	3	3	3	3	1.125	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
	KEGIATAN 1	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.															
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.															
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas (12 kecamatan se Kota Bekasi)	1.1.	Gizi Imunisasi	Bulan	12	15.500	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat															

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
TARGET	1.5.	Peningkatan Gizi Masyarakat	1,1	Terlaksananya Evaluasi Program Gizi	Kali	3	1.125	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
INDIKATOR	1.5.2.(a)	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
TARGET	1.5.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.																
INDIKATOR	1.5.3*	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
		Prevalensi anemia pada ibu hamil.																
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas (12 kecamatan se Kota Bekasi)	1.1.	Pemberian Fe remaja putri dengan anemia;	Lokasi	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1.125	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
		Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
TUJUAN	2	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.																
TARGET	2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
INDIKATOR	2.1.1*	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.																
TARGET	2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
INDIKATOR	2.1.1.(a)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).																
PROGRAM	1 (SATU)	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA																
		Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.																
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.																
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak																
			1.1.	Terlaksananya Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi Oleh TIM AMK Tk. Kota														
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	1.2.	Terlaksananya Investigasi kasus kematian ibu dan bayi ke RS;	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
			1.3.	Terlaksananya Pembelajaran Hasil Analisa kasus Kematian Ibu dan Bayi														
TARGET	2.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.																
INDIKATOR	2.1.2*	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.																
TARGET	2.1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
INDIKATOR	2.1.2.(a)	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 kecamatan)	1.1.	Terlaksananya Sweeping ibu Hamil/ Ibu Melahirkan	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak																
		Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	1,1	Pembentukan Kelas Ibu Hamil Tentang Pemahaman P4K Bagi kader kesehatan ; Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Bidan I Puskesmas Kota Bekasi; Pembentukan Kelas Ibu Hamil Tentang Pemahaman P4K Bagi TP PKK Kota Kecamatan	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
		Pemberian Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	2,1													75.000	APBN (DAK) Fisik	Dinas Kesehatan
		Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.																

TARGET	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)									Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
TARGET	2.2.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.															
INDIKATOR	2.2.1*	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															
PROGRAM	1 (SATU)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	1,1	Terlaksananya penguatan pelaporan opsi verbal kematian ibu dan bayi bagi rs swasta ;	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
	KEGIATAN 1		1,2	Terlaksananya Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi Oleh TIM AMK Tk. Kota;	Orang	35	35	35	35	35	35	35	35			
PROGRAM	2 (DUA)		1,3	Terlaksananya Investigasi kasus kematian ibu dan bayi ke RS;	Kecamatan	12	12	12	12	12	12	12	12			
	KEGIATAN 1	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
TARGET	2.2.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.															
INDIKATOR	2.2.1.(a)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															
PROGRAM	1 (SATU)	Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	1.1.	Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Bidan Praktek Mandiri Kota Bekasi; Pembentukan Kelas Ibu Hamil Tentang Pemahaman P4K Bagi Kader Kesehatan di Kota Bekasi;	Puskemas	31	31	31	31	31	31	31	31	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
	KEGIATAN 1	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
PROGRAM	2 (DUA)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.															
	KEGIATAN 1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 kecamatan)	1.1.	Terdapatnya jumlah kematian bayi	bayi	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
		Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.															
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
TARGET	2.2.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas	1.1.	Gizi Imunisasi	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
INDIKATOR	2.2.2*	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.															
TARGET	2.2.	Kejadian Malaria per 1000 orang.															
INDIKATOR	2.2.2.(a)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit															
PROGRAM	1 (SATU)	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DBD, Filariasis, Malaria, TBC, Kusta, Diare dan Pneumonia)	1.1.	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	2.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
	KEGIATAN 1	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.																
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria																
		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.																
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.																
		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.																
TARGET	2.2.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).																
INDIKATOR	2.2.2.(b)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit																
PROGRAM	1 (SATU)	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DBD, Filariasis, Malaria, TBC, Kusta, Diare dan Pneumonia)	1.1.	Tersedianya Kartu/ Format Program TB dan Kusta	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
PROGRAM	2 (DUA)	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1	Telaksananya Kunjungan Rumah Penderita Kusta	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
	KEGIATAN 1	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.																
TARGET	2.2.	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.																
INDIKATOR	2.2.2.(c)	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.																
		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).																
		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.																
		Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.																
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
TARGET	2.3.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1.	Telaksananya penyuluhan penyakit menular dan tidak menular	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
INDIKATOR	2.3.1*	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.																
TUJUAN	3	Prevalensi tekanan darah tinggi.																
TARGET	3.1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
INDIKATOR	3.1.2*	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1.	Telaksananya penyuluhan penyakit menular dan tidak menular	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
PROGRAM	1 (SATU)	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.																

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria														
		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.														
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.														
		Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.														
TARGET	2.2.	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).														
INDIKATOR	2.2.2.(b)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit														
PROGRAM	1 (SATU)	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DBD, Filariasis, Malaria, TBC, Kusta, Diare dan Pneumonia)	1.1.	Tersedianya Kartu/ Format Program TB dan Kusta	bulan	12	12	12	12	12	12	12	2.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
	KEGIATAN 1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
PROGRAM	2 (DUA)	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1	Terlaksananya Kunjungan Rumah Penderita Kusta	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
	KEGIATAN 1	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.														
TARGET	2.2.	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.														
INDIKATOR	2.2.2.(c)	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.														
		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).														
		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.														
		Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.														
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
TARGET	2.3.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1.	Terlaksananya penyuluhan penyakit menular dan tidak menular	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
INDIKATOR	2.3.1*	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.														
TUJUAN	3	Prevalensi tekanan darah tinggi.														
TARGET	3.1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
INDIKATOR	3.1.2*	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1.	Terlaksananya penyuluhan penyakit menular dan tidak menular	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023				
PROGRAM	1 (SATU)	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.															
	KEGIATAN 1	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.															
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1.	Terlaksananya penyuluhan penyakit menular dan tidak menular	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.															
		Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.															
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
TARGET	3.1.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1.	Terlaksananya penyuluhan penyakit menular dan tidak menular	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
INDIKATOR	3.1.2.(a)	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.															
	KEGIATAN 1	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.															
PROGRAM	2 (DUA)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.															
	KEGIATAN 1	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba															
	KEGIATAN 2	Penyuluhan Bahaya Narkoba Untuk Masyarakat	1.1.	Penyuluhan Narkoba untuk generasi muda;	orang	100	100	100	100	100	100	100	100	1.350	APBD Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TARGET	3.2.		1.2.	Penyuluhan bahaya Narkoba untuk Remaja Masjid dan Karang Taruna;	orang	100	100	100	100	100	100	100	100			
INDIKATOR	3.2.1*		1.3.	Penyuluhan bahaya Narkoba untuk anggota FKDM	orang	100	100	100	100	100	100	100	100			
PROGRAM	1 (SATU)	Peringatan Hari Anti Narkotika Nasional	2.1	Jumlah sosialisasi melalui spanduk; Terlaksananya peringatan Hari Anti Narkotika Internasional; Jumlah sosialisasi melalui media massa; Jumlah sosialisasi melalui radio; Jumlah sosialisasi melalui baliho; Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti	event/soan duk/media cetak/radio baliho		4;15;3; 3;3	4;15;3;3;4	4;15;3; 3;5	4;15;3; 3;6	4;15;3; 3;7	4;15;3; 3;8	4;15;3; 3;9	4;15;3; 3;10	2.475	APBD Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	KEGIATAN 1	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.															
		Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.															
TARGET	3.2.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.															
INDIKATOR	3.2.2*	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.															
	KEGIATAN 1	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.															
TARGET	3.2.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.															
INDIKATOR	3.2.2.(a)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.															
PROGRAM	1 (SATU)	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
	KEGIATAN 1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.															
		Program Keluarga Berencana															
		Pelayanan Pemasangan MO, IUD, IMPLANT dan Pencabutan IMPLANT	1.1.	6 moment kegiatan HUT Kota Bekasi, TNI Manunggal KB Kes, Hari Keluarga, HUT RI, Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Akseptor	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1.575	APBD Kota Bekasi	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Distribusi Alat Obat dan Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	2.1.	-	-										625	APBN (DAK Non Fisik)	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Penyelenggaraan Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	3.1	-	-										2.700	APBN (DAK Non Fisik)	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
INDIKATOR	3.2.2.(b)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Keluarga Berencana															
	KEGIATAN 1	Pelayanan Pemasangan MO, IUD, IMPLANT dan Pencabutan IMPLANT	1.1.	6 moment kegiatan HUT Kota Bekasi, TNI Manunggal KB Kes, Hari Keluarga, HUT RI, Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Akseptor	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1.575	APBD Kota Bekasi	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
TARGET	3,3	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
INDIKATOR	3.3.3*	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Keluarga Berencana															
	KEGIATAN 1	Pelayanan Pemasangan MO, IUD, IMPLANT dan Pencabutan IMPLANT	1.1.	6 moment kegiatan HUT Kota Bekasi, TNI Manunggal KB Kes, Hari Keluarga, HUT RI, Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Akseptor	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1.575	APBD Kota Bekasi	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
		Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).															
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															
		Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	1.1.	Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Bidan Praktek Mandiri Kota Bekasi; Pembentukan Kelas Ibu Hamil Tentang Pemahaman P4K Bagi Kader Kesehatan di Kota Bekasi;	Puskemas	31	31	31	31	31	31	31	31	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
TARGET	3,3	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
INDIKATOR	3.3.3.(a)	Total Fertility Rate (TFR).															
TARGET	3,3	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															

INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
	Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	1.1.	Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Bidan Praktek Mandiri Kota Bekasi; Pembentukan Kelas Ibu Hamil Tentang Pemahaman P4K Bagi Kader Kesehatan di Kota Bekasi;	Puskemas	31	31	31	31	31	31	31	31	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.																
	Unmet need pelayanan kesehatan.																
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1.	Terlaksananya penyuluhan penyakit menular dan tidak menular	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
TARGET	3,3	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.															
INDIKATOR	3.3.5*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
	KEGIATAN 1	Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas se Kota Bekasi	1.1.	-	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	38.750	APBN (DAK Non Fisik)	Dinas Kesehatan
PROGRAM	2 (DUA)	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.															
	KEGIATAN 1	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).															

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
TARGET	3,3	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR	3.3.5.(a)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin diluar Jaminan Kesehatan Nasional dan Operasional Pelaksanaan kegiatan	1.1.	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan Jamkesda 2015 Tim Pelaksana dan Pengendali; Rapat Evaluasi Pelaksanaan Jamkesda dengan Rumah Sakit; Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Jamkesda 2015 dengan Rumah Sakit; Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Jamkesda 2015 dengan Lintas Sektoral	Orang	75;100;100;50	75;100;100;51	75;100;100;52	75;100;100;53	75;100;100;54	75;100;100;55	75;100;100;56	75;100;100;57	10.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (DAK)	2.1.	-										40.000	APBN (DAK Non Fisik)	RSUD Kota Bekasi
		Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.														
		Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.														
		Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.														
TARGET	3,3	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.														
INDIKATOR	3.3.5.(b)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
TARGET	3.4.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi	1.1.	Monitoring pemberian obat filariasis; Pelaksanaan pemberian obat filariasis; Pengambilan vaksin/logistik ke Dinkes/Gudang farmasi;	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
INDIKATOR	3.4.1.(a)	Pengendalian Penyelenggaraan Imunisasi di Kota Bekasi	2.1.	Terlaksananya Cold chain ke Gudang Vaksin	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	40.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
PROGRAM	1 (SATU)	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.														
	KEGIATAN 1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.														
		PENDIDIKAN BERKUALITAS														
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
		Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.														
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.														
TARGET	3.4.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.														
INDIKATOR	3.4.1.(b)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.														
PROGRAM	1 (SATU)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.														
	KEGIATAN 1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.														
TARGET	3.4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat.														
INDIKATOR	3.4.1.(c)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.														
PROGRAM	1 (SATU)	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.														
	KEGIATAN 1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).														
		Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.														
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat.														
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).														
		Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.Global														

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
TARGET	3.4.			Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).									
INDIKATOR	3.4.2*			Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
PROGRAM	1 (SATU)			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.									
	KEGIATAN 1			Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
TARGET	3.4.			Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.									
INDIKATOR	3.4.2.(a)			Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									
				Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).									
				Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
				Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.									
				KESETARAAN GENDER									
TARGET	3.5.			Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
INDIKATOR	3.5.1.(a)			Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.									
PROGRAM	1 (SATU)			Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
	KEGIATAN 1			Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.									
				Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.									
				Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
	KEGIATAN 2			Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.									
TARGET	3.5.			Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.									
INDIKATOR	3.5.1.(b)			Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).									
PROGRAM	1 (SATU)			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.									
				Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.									
				Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.									
				Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.									

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
TARGET	3.5.			Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.								
INDIKATOR	3.5.1.(c)			Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).								
TARGET	3.5.			Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.								
INDIKATOR	3.5.1.(d)			Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.								
				Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
				Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.								
				Air Bersih dan Sanitasi Layak								
				Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua								
TARGET	3.5.			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.								
INDIKATOR	3.5.1.(e)			Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.								
TARGET	3.7.			Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.								
INDIKATOR	3.7.1*			Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan								
PROGRAM	1 (SATU)			Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.								
	KEGIATAN 1			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.								
	KEGIATAN 2			Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).								
	KEGIATAN 3			Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).								
				Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.								
				Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.								
				Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
				Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).								
TARGET	3.7.			Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.								
INDIKATOR	3.7.1.(a)			Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
PROGRAM	1 (SATU)			Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.								
	KEGIATAN 1			Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.								
TARGET	3.7.			Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
INDIKATOR	3.7.1.(b)			Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)								
PROGRAM	1 (SATU)			Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.								
	KEGIATAN 1			Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.								
				Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.								
				Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.								
				Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.								
				Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.								

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
TARGET	3.7.			Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.									
INDIKATOR	3.7.2*			Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.									
PROGRAM	1 (SATU)			Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.									
	KEGIATAN 1			Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.									
TARGET	3.7.			Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.									
INDIKATOR	3.7.2.(a)			Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.									
PROGRAM	1 (SATU)			Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.									
	KEGIATAN 1			Energi Bersih dan Terjangkau									
				Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.									
				Rasio elektrifikasi.									
				Konsumsi listrik per kapita.									
				Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.									
TARGET	3.8.			Rasio penggunaan gas rumah tangga.									
INDIKATOR	3.8.1.(a)			Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi									
PROGRAM	1 (SATU)			Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
	KEGIATAN 1			Laju pertumbuhan PDB per kapita.									
TARGET	3.8.			PDB per kapita.									
INDIKATOR	3.8.2*			Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.									
PROGRAM	1 (SATU)			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.									
	KEGIATAN 1			Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									
TARGET	3.8.			Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.									
INDIKATOR	3.8.2.(a)			Persentase tenaga kerja formal.									
PROGRAM	1 (SATU)			Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.									
	KEGIATAN 1			Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
	KEGIATAN 2			Upah rata-rata per jam pekerja.									
TARGET	3.a.1*			Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.									
INDIKATOR	3.a.1*			Persentase setengah pengangguran.									
				Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
				Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).									
				Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
				Jumlah wisatawan mancanegara.									
				Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.									
				Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.									

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
TARGET	3.b.1.(a)			Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.									
INDIKATOR	3.b.1.(a)			Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).									
PROGRAM	1 (SATU)			Industri, Inovasi, dan Infrastruktur									
	KEGIATAN 1			Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
	KEGIATAN 2			Jumlah dermaga penyeberangan.									
TARGET	3.c.1*			Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
INDIKATOR	3.c.1*			Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.									
				Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.									
				Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.									
				Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.									
				Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.									
TUJUAN	4			Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									
TARGET	4.1.			Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.									
INDIKATOR	4.1.1*			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.									
INDIKATOR	4.1.1.(a)			Proporsi individu yang menggunakan Internet.									
INDIKATOR	4.1.1.(b)			Berkurangnya Kesenjangan									
INDIKATOR	4.1.1.(c)			Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
INDIKATOR	4.1.1.(d)			Koefisien Gini.									
INDIKATOR	4.1.1.(e)			Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.									
INDIKATOR	4.1.1.(f)			Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.									
INDIKATOR	4.1.1.(g)			Jumlah desa tertinggal.									
TARGET	4.2.			Jumlah Desa Mandiri									
INDIKATOR	4.2.2.(a)			Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.									
TARGET	4.3.			Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.									
INDIKATOR	4.3.1.(a)			Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
INDIKATOR	4.3.1.(b)			Indeks Kebebasan Sipil.									
TARGET	4.4.			Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).									
INDIKATOR	4.4.1*			Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.									

LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KOTA BEKASI

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

KOTA BEKASI

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023									
TUJUAN	1	TANPA KEMISKINAN [MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN]																		
TARGET	1.2.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional																		
INDIKATOR	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.																		
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya																		
	KEGIATAN 1	Pembinaan Pengembangan Potensi Keluarga Binaan Sosial (KBS) dalam KUBE	1.1.	Terbinanya KBS dalam KUBE dalam hal pengelolaan usaha	keluarga	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	720	APBD Kota Bekasi	Dinas Sosial	
	KEGIATAN 2	Pemberian Sembako Kepada Lanjut Usia Dari Keluarga Miskin	2.1.	Terpenuhinya sebagian kebutuhan pokok bagi lansia yang miskin	orang	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1.125	APBD Kota Bekasi	Dinas Sosial	
PROGRAM	2 (DUA)	Program Perencanaan Sosial Budaya																		
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bekasi	2.1	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2016	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.000	APBD Kota Bekasi	Bappeda	
TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.																		
INDIKATOR	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan.																		
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin																		
	KEGIATAN 1	Penggantian Pelayanan Keluarga Miskin	1,1	Jumlah kunjungan Pasien Rawat Inap;	orang	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	67.500	APBD Kota Bekasi	RSUD	
			1,2	Jumlah kunjungan Pasien Rawat Jalan	orang	10265	10265	10265	10265	10265	10265	10265	10265	10265	10265		10265		APBD Kota Bekasi
	KEGIATAN 2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin diluar Jaminan Kesehatan Nasional dan Operasional Pelaksanaan kegiatan	2,1	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan Jamkesda 2015 Tim Pelaksana dan Pengendali;	orang	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	225.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
			2,2	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Jamkesda dengan Rumah Sakit;	orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		APBD Kota Bekasi		
			2,3	Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Jamkesda 2015 dengan Rumah Sakit;	orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		APBD Kota Bekasi
			2,4	Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Jamkesda 2015 dengan Lintas Sektoral	orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		50		APBD Kota Bekasi
	KEGIATAN 3	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Banprov)	3.1	-													40.000	APBD Prov. Jabar	Dinas Kesehatan	
	KEGIATAN 4	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (DAK)	4.1	-													10.000	APBN (DAK) + APBD Kota Bekasi	RSUD	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.															
INDIKATOR	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja															
	KEGIATAN 1	Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	1.1.	Pelatihan Kerja Las CO2;	Orang	20	20	20	20	20	20	20	20	1.800	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja
			1.2.	Pelatihan Kelistrikan;	Orang	20	20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja
			1.4.	Pelatihan Bahasa Asing;	Orang	20	20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja
			1.3.	Pelatihan Menyetir Mobil	Orang		20	20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja
	KEGIATAN 2	Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan	2.1.	Pelatihan Las Listrik;	Orang	20	20	20	20	20	20	20	2.700	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja	
			2.2.	Pelatihan Servis Alat Rumah Tangga;	Orang	20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
			2.3.	Pelatihan Perbengkelan;	Orang	20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
			2.4.	Pelatihan Teknik Komputer;	Orang		20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
			2.5.	Servis AC;	Orang		20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
			2.6.	Servis HP, Komputer	Orang		20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
	KEGIATAN 3	Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat	3.1	Pelatihan Menjahit;	Orang		20	20	20	20	20	20	20	900	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja	
			3.2	Pelatihan Tata Boga;	Orang		20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
			3.4	Pelatihan Tata Rias	Orang		20	20	20	20	20	20	20			Dinas Tenaga Kerja	
	KEGIATAN 4	Penyelenggaraan Pola Magang Kerja di Perusahaan	4.1	Uji latih kerja atau magang di perusahaan bagi peserta yang sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DISNAKER	Orang		40	40	40	40	40	40	40	1.350	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja	
PROGRAM	2 (DUA)	Program Peningkatan Kesempatan Kerja															
	KEGIATAN 1	Pengembangan Kesempatan Kerja	1,1	Pembentukan kelompok binaan;	Kelompok		5	5	5	5	5	5	5	450	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja	
			1,2	Pelatihan bagi kelompok binaan;	Orang		75	75	75	75	75	75	75			Dinas Tenaga Kerja	
			1,3	Pembinaan terhadap kelompok binaan	Kelompok		5	5	5	5	5	5	5			Dinas Tenaga Kerja	
	KEGIATAN 2	Pembinaan Soft Skill Kepada Pelajar SMK Dalam Rangka Menghadapi MEA	2,1	Terlatihnya Siswa didik di Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Bekasi	Siswa		8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	1.125	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja	
	KEGIATAN 3	Pengerahan, Perpindahan, dan Penempatan Transmigrasi	3,1	Terlaksananya Penjajagan lokasi, pemantapan lokasi dan pengiriman transmigran asal Kota Bekasi	KK		10	10	10	10	10	10	10	2.250	APBD Kota Bekasi	Dinas Tenaga Kerja	
TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.															
INDIKATOR	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial															
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)	1.1.	Terselenggaranya Program Keluarga Harapan	Unit		1	1	1	1	1	1	1	1	900	APBD Kota Bekasi	Dinas Sosial

TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023								
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.																	
INDIKATOR	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.																	
	KEGIATAN 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	1.1.	Terlaksananya Evaluasi pro KB sebanyak 2 kali;	kali		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
			1.2.	Terlaksananya pembinaan kepada bidan Praktek Swasta tth RR KIA dan Otopsi Verbal serta Penanganan Komplikasi dan Deteksi Dini Intelegensia	Angkatan		2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	KEGIATAN 2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Remaja	2.1.	Workshop Kesehatan Remaja di Rumah Singgah;	Sekolah		4	4	4	4	4	4	4	4	4	750	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
			2.2.	Workshop Program UKS bagi Petugas Puskesmas;	Orang		24	24	24	24	24	24	24	24	24				
	KEGIATAN 3	Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	3.1.	Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Bidan Praktek Mandiri Kota Bekasi;	Orang		93	93	93	93	93	93	93	93	93	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
			3.2.	Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Bidan I Puskesmas Kota Bekasi;	Orang		62	62	62	62	62	62	62	62	62				
			3.3.	Evaluasi Program Poned sebanyak 2 kali	Puskesmas		10	10	10	10	10	10	10	10	10				
	KEGIATAN 4	Pemberian Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	4.1	-												70.000	APBN (DAK)	Dinas Kesehatan	
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.																	
INDIKATOR	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.																	
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																	
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas (di 12 Puskesmas)	1.1.	Gizi Imunisasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	49.445	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
PROGRAM	2 (DUA)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak																	
	KEGIATAN 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	1.1	Terlaksananya Review pengisian Kohort ibu,bayi dan balita lintas program (KIA,GIZI dan Imunisasi)	Angkatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.																	
INDIKATOR	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.																	
PROGRAM	1 (SATU)	Program Keluarga Berencana																	
	KEGIATAN 1	Distribusi Alat Obat dan Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	1.1.	-	-	625	APBN (DAK Non Fisik)	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB	
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.																	
INDIKATOR	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.																	
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Lingkungan Sehat																	
	KEGIATAN 1	Pengawasan Kualitas Air Minum	1.1.	Terinformasikan Kondisi Kualitas Air Minum di Kota Bekasi;	Kali		1	1	1	1	1	1	1	1	1	125	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
			1.2.	Tersosialisasinya Jadwal kegiatan Pengambilan Sample Air Minum;	Kali		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			1.3.	Terlaksananya Pengawasan dan pengujian Kualitas Air Minum PDAM	Kali		1	1	1	1	1	1	1	1	1				

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
PROGRAM	2 (DUA)	Program penyediaan dan pengolahan air bersih				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
PROGRAM	2 (DUA)	Program penyediaan dan pengolahan air bersih														
	KEGIATAN 1	Pipanisasi SPAM Jatisari 100 M3/detik	1,1	orang	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	60.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
	KEGIATAN 2	Pipanisasi SPAM Jatiluhur	2,1	orang	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	20.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
	KEGIATAN 3	Pembangunan Reservoir untuk SPAM Jatiluhur	3,1	M3	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	55.000	APBN (DAK)	Dinas Bangunan dan Permukiman
	KEGIATAN 4	Infrastruktur Air Minum (DAK)	4,2											35.000	APBN (DAK)	Dinas Bangunan dan Permukiman
	KEGIATAN 5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Wilayah Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatisih (DAK)	5,1											125.000	APBN (DAK)	Dinas Bangunan dan Permukiman
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.														
INDIKATOR	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program penyediaan dan pengolahan air bersih														
	KEGIATAN 1	Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat (DAK)	1,1											30.000	APBN (DAK)	Dinas Bangunan dan Permukiman
PROGRAM	2 (DUA)	Program Pengembangan Perumahan														
	KEGIATAN 1	Pengembangan Fasilitas Sanitasi Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara (DAK)	1,1	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	625	APBN (DAK)	Dinas Bangunan dan Permukiman
	KEGIATAN 2	Pendampingan Bantuan Program SANITASI 2016	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
	KEGIATAN 3	Pembinaan dan Evaluasi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2012-2013	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.375	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
	KEGIATAN 4	Pengembangan Fasilitas Sanitasi Kel. Pejuang Kec. Medan Satria (DAK)	4,2	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	875	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
	KEGIATAN 5	Pengembangan Fasilitas Sanitasi Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur (DAK)	5,3	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	875	APBD Kota Bekasi	Dinas Bangunan dan Permukiman
PROGRAM	3 (TIGA)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas ... (12 kecamatan)	1,1	kali	6	6	6	6	6	6	6	6	6	49.445	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
		(1)				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana														
INDIKATOR	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
	KEGIATAN 1	Penanganan Masalah Kesehatan Korban Bencana	1.1.	Pertemuan Tim Reaksi Cepat (TCR)/Tim Penilaian Cepat (TPC) dan Tim Bantuan Kesehatan, dalam rangka Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Bidang Kesehatan;	Orang	80	80	80	80	80	80	80	500	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
			1.2.	Tersedianya Laporan Tim Penilaian Cepat (TPC)/Tim Rapid Health Assessment (RHA) di Lokasi Bencana di wilayah Kota Bekasi;	laporan	1	1	1	1	1	1	1			
			1.3.	Terlaksananya Piket Posko Kesehatan Krisis Kesehatan Akibat Bencana oleh Tim Reaksi Cepat (TRC)	Petugas	5	5	5	5	5	5	5			
TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana														
INDIKATOR	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran														
	KEGIATAN 1	Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	1.1.	Terselenggaranya penyuluhan & pembinaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran;	Kegiatan	16	16	16	16	16	16	16	500	APBD Kota Bekasi	Kantor Pemadam Kebakaran
			1.2.	Terbentuknya Tim BALAKAR/SATLAKAR di RW	Orang	480	480	480	480	480	480	480		APBD Kota Bekasi	Kantor Pemadam Kebakaran
	KEGIATAN 2	Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dilingkungan Pendidikan Dasar Menengah dan Perguruan Tinggi	2.1.	Terlaksananya Sosialisasi dan Simulasi Pengenalan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi	Siswa	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	500	APBD Kota Bekasi	Kantor Pemadam Kebakaran
	KEGIATAN 3	Pengadaan Peralatan-Peralatan Pemadam Kebakaran dan Rescue	3.1	Pengadaan Alat Operasional Kebakaran, dan APAR	Unit + APAR	175	175	175	175	175	175	175	3.000	APBD Kota Bekasi	Kantor Pemadam Kebakaran
TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana														
INDIKATOR	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam														
	KEGIATAN 1	Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	1.1.	Terlaksananya Pemetaan Daerah awan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	860	APBD Kota Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	KEGIATAN 2	Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Peningkatan Sadar Bencana Kepada Dunia Pendidikan	2.1.	Terlaksananya Koordinasi dengan Dunia Pendidikan Dalam Upaya Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	675	APBD Kota Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	KEGIATAN 3	Penyusunan Rencana Kontigensi Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi	3.1	Terlaksananya Penyusunan Renkon Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi	%	100	100	100	100	100	100	100	1.125	APBD Kota Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	KEGIATAN 4	Operasional Penanggulangan Bencana	4.1.	Terlaksananya Operasional penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	450	APBD Kota Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	KEGIATAN 5	Pengadaan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	5.1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	1.800	APBD Kota Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	KEGIATAN 6	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Rawan Lokasi Rawan Bencana	6.1.	Tersebaranya Informasi Kebencanaan dan Pemahaman Bencana Melalui Penyuluhan Kepada Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	450	APBD Kota Bekasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM	2 (DUA)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial														
	KEGIATAN 1	Pembinaan TAGANA Kota Bekasi	1,1	Terbinanya Kesiapsiagaan Anggota TAGANA dalam penanggulangan bencana	Orang	50	50	50	50	50	50	50	450	APBD Kota Bekasi	Dinas Sosial

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
TUJUAN	2	TANPA KELAPARAN																
TARGET	2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.																
INDIKATOR	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Perbaikan Gizi Masyarakat																
	KEGIATAN 1	Peningkatan Gizi Masyarakat	1.1.	Terlaksananya Lomba Balita Sehat ;	Balita	24	24	24	24	24	24	24	24	24	1.125	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
			1.2.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas sektoral dlm Upaya peningkatan capaian program gizi;	Kali	2	2	2	2	2	2	2	2				
			1.3.	Pendampingan Puskesmas dengan capaian prog gizi rendah;	Puskesmas	26	26	26	26	26	26	26	26				
TARGET	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
INDIKATOR	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas (12 kecamatan se Kota Bekasi)	1.1.	Gizi Imunisasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	15.500	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
PROGRAM	2 (DUA)	Program Perbaikan Gizi Masyarakat																
	KEGIATAN 1	Peningkatan Gizi Masyarakat	1,1	Terlaksananya Evaluasi Program Gizi	Kali	3	3	3	3	3	3	3	3	1.125	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
TARGET	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
INDIKATOR	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas (12 kecamatan se Kota Bekasi)	1.1.	Gizi Imunisasi	Bulan	12	15.500	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
PROGRAM	2 (DUA)	Program Perbaikan Gizi Masyarakat																
	KEGIATAN 1	Peningkatan Gizi Masyarakat	1,1	Terlaksananya Evaluasi Program Gizi	Kali	3	1.125	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
TARGET	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																
INDIKATOR	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas (12 kecamatan se Kota Bekasi)	1.1.	Pemberian Fe remaja putri dengan anemia;	Lokasi	84	84	84	84	84	84	84	84	1.125	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023				
TUJUAN	3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA															
TARGET	3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.															
INDIKATOR	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															
	KEGIATAN 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	1.1.	Terlaksananya Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi Oleh TIM AMK Tk. Kota;	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
		1.2.	Terlaksananya Investigasi kasus kematian ibu dan bayi ke RS;														
		1.3.	Terlaksananya Pembelajaran Hasil Analisa kasus Kematian Ibu dan Bayi;														
TARGET	3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.															
INDIKATOR	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 kecamatan)	1.1.	Terlaksananya Sweeping ibu Hamil/ Ibu Melahirkan	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
PROGRAM	2 (DUA)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															
	KEGIATAN 1	Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	1,1	Pembentukan Kelas Ibu Hamil Tentang Pemahaman P4K Bagi kader kesehatan ; Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Bidan I Puskesmas Kota Bekasi; Pembentukan Kelas Ibu Hamil Tentang Pemahaman P4K Bagi TP PKK Kota , Kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi; Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Kader ; Rakor Poned - Ponek sebanyak 2 kali; Evaluasi Program Poned sebanyak 2 kali	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
	KEGIATAN 2	Pemberian Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	2,1												75.000	APBN (DAK) Fisik	Dinas Kesehatan
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
INDIKATOR	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															
	KEGIATAN 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	1,1	Terlaksananya penguatan pelaporan otopsi verbal kematian ibu dab bayi bagi rs swasta ;	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
			1,2	Terlaksananya Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi Oleh TIM AMK Tk. Kota;	Orang	35	35	35	35	35	35					
			1,3	Terlaksananya Investigasi kasus kematian ibu dan bayi ke RS;	Kecamatan	12	12	12	12	12	12					
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
INDIKATOR	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															
	KEGIATAN 1	Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	1.1.	Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Bidan Praktek Mandiri Kota Bekasi; Pembentukan Kelas Ibu Hamil Tentang Pemahaman P4K Bagi Kader Kesehatan di Kota Bekasi;	Puskemas	31	31	31	31	31	31	31	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023			
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.														
INDIKATOR	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 kecamatan)	1.1.	Terdapatnya jumlah kematian bayi	bayi	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615	1615	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.														
INDIKATOR	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas	1.1.	Gizi Imunisasi	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
TARGET	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.														
INDIKATOR	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit														
KEGIATAN 1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DBD, Filariasis, Malaria, TBC, Kusta, Diare dan Pneumonia)	1.1.	-	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	2.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
TARGET	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.														
INDIKATOR	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit														
KEGIATAN 1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DBD, Filariasis, Malaria, TBC, Kusta, Diare dan Pneumonia)	1.1.	Tersedianya Kartu/ Format Program TB dan Kusta	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	2.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
PROGRAM	2 (DUA)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1,1	Terlaksananya Kunjungan Rumah Penderita Kusta	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.														
INDIKATOR	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1.	Terlaksananya penyuluhan penyakit menular dan tidak menular	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023								
TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.																	
INDIKATOR	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.																	
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																	
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1.	Terlaksananya penyuluhan penyakit menular dan tidak menular	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.																	
INDIKATOR	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.																	
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																	
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1.	Terlaksananya penyuluhan penyakit menular dan tidak menular	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.																	
INDIKATOR	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.																	
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																	
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1.	Terlaksananya penyuluhan penyakit menular dan tidak menular	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
TARGET	3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.																	
INDIKATOR	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.																	
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba																	
	KEGIATAN 1	Penyuluhan Bahaya Narkoba Untuk Masyarakat	1.1.	Penyuluhan Narkoba untuk generasi muda;	orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.350	APBD Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			1.2.	Penyuluhan bahaya Narkoba untuk Remaja Masjid dan Karang Taruna;	orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
			1.3.	Penyuluhan bahaya Narkoba untuk anggota FKDM	orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
	KEGIATAN 2	Peringatan Hari Anti Narkotika Nasional	2.1	Jumlah sosialisasi melalui spanduk; Terlaksananya peringatan Hari Anti Narkotika Internasional; Jumlah sosialisasi melalui media massa; Jumlah sosialisasi melalui radio; Jumlah sosialisasi melalui baliho; Jumlah kegiatan pemusnahan barang bukti	event/soan duk/media cetak/radio .baliho		4;15;3;3 ;3	4;15;3;3;4	4;15;3;3 ;5	4;15;3;3 ;6	4;15;3;3 ;7	4;15;3;3 ;8	4;15;3;3 ;9	4;15;3;3 ;10	2.475	APBD Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.																	
INDIKATOR	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.																	
PROGRAM	1 (SATU)	Program Keluarga Berencana																	
	KEGIATAN 1	Pelayanan Pemasangan MO, IUD, IMPLANT dan Pencabutan IMPLANT	1.1.	6 moment kegiatan HUT Kota Bekasi, TNI Manunggal KB Kes, Hari Keluarga, HUT RI, Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Akseptor	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1.575	APBD Kota Bekasi	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perindungan Anak dan KB	
	KEGIATAN 2	Distribusi Alat Obat dan Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	2.1.	-	-											625	APBN (DAK Non Fisik)	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perindungan Anak dan KB	
	KEGIATAN 3	Penyelenggaraan Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	3,1	-	-											2.700	APBN (DAK Non Fisik)	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perindungan Anak dan KB	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023				
TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
INDIKATOR	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Keluarga Berencana															
	KEGIATAN 1	Pelayanan Pemasangan MO, IUD, IMPLANT dan Pencabutan IMPLANT	1.1.	6 moment kegiatan HUT Kota Bekasi, TNI Manunggal KB Kes, Hari Keluarga, HUT RI, Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Akseptor	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1.575	APBD Kota Bekasi	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
INDIKATOR	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Keluarga Berencana															
	KEGIATAN 1	Pelayanan Pemasangan MO, IUD, IMPLANT dan Pencabutan IMPLANT	1.1.	6 moment kegiatan HUT Kota Bekasi, TNI Manunggal KB Kes, Hari Keluarga, HUT RI, Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Akseptor	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1.575	APBD Kota Bekasi	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
INDIKATOR	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															
	KEGIATAN 1	Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	1.1.	Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Bidan Praktek Mandiri Kota Bekasi; Pembentukan Kelas Ibu Hamil Tentang Pemahaman P4K Bagi Kader Kesehatan di Kota Bekasi;	Puskemas	31	31	31	31	31	31	31	31	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.															
INDIKATOR	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak															
	KEGIATAN 1	Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	1.1.	Pembelajaran Deteksi Bumil Resti dengan Skor Poeji Rochyati Bagi Bidan Praktek Mandiri Kota Bekasi; Pembentukan Kelas Ibu Hamil Tentang Pemahaman P4K Bagi Kader Kesehatan di Kota Bekasi;	Puskemas	31	31	31	31	31	31	31	31	1.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.															
INDIKATOR	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi (12 Kecamatan)	1.1.	Terlaksananya penyuluhan penyakit menular dan tidak menular	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
(1)				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.																
INDIKATOR	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
	KEGIATAN 1	Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas se Kota Bekasi	1.1.	-	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	38.750	APBN (DAK Non Fisik)	Dinas Kesehatan
TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.																
INDIKATOR	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin																
	KEGIATAN 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin diluar Jaminan Kesehatan Nasional dan Operasional Pelaksanaan kegiatan	1.1.	Terlaksananya Rapat Pelaksanaan Jamkesda 2015 Tim Pelaksana dan Pengendali; Rapat Evaluasi Pelaksanaan Jamkesda dengan Rumah Sakit; Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Jamkesda 2015 dengan Rumah Sakit; Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Jamkesda 2015 dengan Lintas Sektoral	Orang	75;100;100;50	75;100;100;51	75;100;100;52	75;100;100;53	75;100;100;54	75;100;100;55	75;100;100;56	75;100;100;57	10.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	
	KEGIATAN 2	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (DAK)	2.1.	-											40.000	APBN (DAK Non Fisik)	RSUD Kota Bekasi	
TARGET	3.b.1.(a)	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.																
INDIKATOR	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi	1.1.	Monitoring pemberian obat filariasis; Pelaksanaan pemberian obat filariasis; Pengambilan vaksin/logistik ke Dinkes/Gudang farmasi;	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan
	KEGIATAN 2	Pengendalian Penyelenggaraan Imunisasi di Kota Bekasi	2.1.	Terlaksananya Cold chain ke Gudang Vaksin	Puskesmas	31	31	31	31	31	31	31	31	40.000	APBD Kota Bekasi	Dinas Kesehatan	

**LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.																
INDIKATOR	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya																
	KEGIATAN 1	Pemberdayaan PMKS Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	1.1.	Jumlah Fakir Miskin Yang Menerima Bantuan Melalui Program UEP	Orang	79	100	APBD II	Dinsos P3A	
	KEGIATAN 2	Pemberdayaan PMKS Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	2.1.	Jumlah Fakir Miskin Yang Menerima Bantuan Melalui Mekanisme KUBE	Kelompok	15	APBD II	Dinsos P3A	
PROGRAM	2 (DUA)	Program Jaminan Sosial																
	KEGIATAN 1	Pendampingan Program Keluarga Harapan	1,1	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan	KPM	6200	APBD II	Dinsos P3A	
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.																
INDIKATOR	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan																
	KEGIATAN 1	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	1.1.	Pelayanan persalinan di Puskesmas	Orang	1200	DAK	Dinkes	
1.2.			Pelayanan Rujukan persalinan	Resti	240
1.3.			Pelayanan rujukan dan perawatan Bayi Baru Lahir dengan indikasi medis di RSUD	BBL	24
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.																
INDIKATOR	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Surveilans Epidemiologi																
	KEGIATAN 1	Surveilans Epidemiologi	1.1.	Investigasi Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	Persen	100	DBHCHT	Dinkes	
1.2.			Tercapainya UCI	Persen	> 90
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.																
INDIKATOR	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana																
	KEGIATAN 1	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1.1.	Jumlah Promosi KKBPK	Kali	12	APBD II	DPPKB	
	KEGIATAN 2	Peningkatan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2.1.	Jumlah Calon Peserta Pria Ber -KB	Orang	52	APBD II	DPPKB	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)					SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	KEGIATAN 4	Pelayanan KB Medis Operasi dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	2.1.	Jumlah Akseptor MOW	Orang	200	APBD II	DPPKB
				2.2.	Jumlah Akseptor MOP	Orang	5
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.														
INDIKATOR	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan														
	KEGIATAN 1	Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan Lainnya	1,1	Jumlah pengurus BP-SPAM yang dilatih	Orang	50	APBD II	DPMD
INDIKATOR	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Lingkungan Sehat														
	KEGIATAN 1	Penyehatan Lingkungan Permukiman	1,1	Menurunnya Keterjadian Penyakit Berbasis Lingkungan	Persen	40	Dinkes
	KEGIATAN 2	Percepatan dan Penguatan STBM	1,1	Persentase Lingkungan Sehat	Persen	20	Dinkes
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.														
INDIKATOR	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku														
	KEGIATAN 1	Penyediaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	1.1.	Persentase areal kawasan kumuh	APBD II	Perkimtan
PROGRAM	2 (DUA)	Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
	KEGIATAN 1	Penanganan Kawasan Kumuh Perumahan dan Permukiman	1,1	Cakupan Penanganan Kawasan Kumuh	Persen	100	APBD II	Perkimtan
	KEGIATAN 2	Penyusunan Database Perumahan dan Permukiman	2,1	Data base tentang perumahan permukiman, air bersih, sarana sanitasi dasar (IPAL & MCK)	Dok	1	APBD II	Perkimtan
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.														
INDIKATOR	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun														
	KEGIATAN 1	Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang SD	1.1.	Jumlah Ruang Kelas Siswa	RKS	6	APBD II	Disdik
	KEGIATAN 2	Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SD	1.1.	Jumlah Ruang Kelas Baru	RKB	1	APBD II	Disdik

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
PROGRAM	2 (DUA)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan															
	KEGIATAN 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN di Kabupaten Sumedang	1,1	Jumlah Siswa Penerima BOS	Siswa	APBN	Disdik
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
INDIKATOR	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sede rajat.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun															
	KEGIATAN 1	Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang SMP	2.1.	Jumlah Ruang Kelas Siswa	RKS	2	APBD II	Disdik
	KEGIATAN 2	Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang SMP	2.1.	Jumlah Ruang Kelas Baru	RKB	APBD II	Disdik
PROGRAM	2 (DUA)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan															
	KEGIATAN 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN di Kabupaten Sumedang	1,1	Jumlah Siswa Penerima BOS	Siswa	APBN	Disdik
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
INDIKATOR	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahundengan kepemilikan akta kelahiran.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Penataan Administrasi Kependudukan															
	KEGIATAN 1	Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.1.	Jumlah Distribusi KK, KTP dan Akta Catatan Sipil	KK/KTP/Akta	30rb	APBD II	Disdukcapil
	KEGIATAN 2	Peningkatan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil	2.1.	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Akta Pencatatan Sipil	Persen	100	APBD II	Disdukcapil
TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana															
INDIKATOR	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam															
	KEGIATAN 1	Penanganan Darurat Bencana	1.1.	Persentase Penanganan Bencana	Persen	100	APBD II	BPBD
	KEGIATAN 2	Akselarasi Penanggulangan Bencana	2.1.	Pelayanan penanggulangan bencana	Bulan	12	APBD II	BPBD

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.															
INDIKATOR	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan															
	KEGIATAN 1	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1.1.	Premi peserta Jamkesda terintegrasi JKN	Orang	37681	Pajak Rokok	Dinkes
			1.2.	Kapitasi berbasis kinerja pada FKTP	Persen	20
	KEGIATAN 2	Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	2.1.	Klaim pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di kab sumedang pada RS dan Puskesmas	Persen	14	Pajak Rokok	Dinkes
	KEGIATAN 3	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) diluar kuota jamkesda (Bangub)	2.1.	Premi asuransi kesehatan bagi penduduk miskin diluar APBD Kabupaten (BanGub)	Orang	25121	Bantuan Gubernur	Dinkes
TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.															
INDIKATOR	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pembiayaan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan															
	KEGIATAN 1	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1.1.	Premi peserta Jamkesda terintegrasi JKN	Orang	37681	Pajak Rokok	Dinkes
			1.2.	Kapitasi berbasis kinerja pada FKTP	Persen	20
	KEGIATAN 2	Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	2.1.	Klaim pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di kab sumedang pada RS dan Puskesmas	Persen	14	Pajak Rokok	Dinkes
	KEGIATAN 3	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) diluar kuota jamkesda (Bangub)	2.1.	Premi asuransi kesehatan bagi penduduk miskin diluar APBD Kabupaten (BanGub)	Orang	25121	Bantuan Gubernur	Dinkes
TARGET	3.a.1*	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.															
INDIKATOR	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur 15 tahun.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
	KEGIATAN 1	Kesehatan Olah Raga	1.1.	Persentase club/sanggar/posbindu yang melaksanakan kesehatan olah raga	Persen	100	Dinkes
TARGET	3.b.1.(a)	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.															
INDIKATOR	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan															
	KEGIATAN 1	Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	1.1.	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai	Jenis	8	DBHCHT	Dinkes
	KEGIATAN 2	Distribusi Obat, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan	2.1.	Persentase terdistribusikannya obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas	Persen	100	DBHCHT	Dinkes

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
TARGET	3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.															
INDIKATOR	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
	KEGIATAN 1	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Manajemen Puskesmas	1.1.	Persentase petugas perkesmas mampu menangani masalah kesehatan pada masyarakat rawan	Persen	100	Dinkes
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
INDIKATOR	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat															
	KEGIATAN 1	Pelayanan Kesehatan Terstandar	1.1.	Cakupan SDIDTK Balita	Persen	100	DBHCT	Dinkes
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
INDIKATOR	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat															
	KEGIATAN 1	Pelayanan Kesehatan Terstandar	1.1.	Cakupan penanganan komplikasi neonatal	Persen	30	DBHCT	Dinkes
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
INDIKATOR	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat															
	KEGIATAN 1	Pelayanan Kesehatan Terstandar	1.1.	Cakupan SDIDTK Bayi	Persen	100	DBHCT	Dinkes
			1.2.	Cakupan Kunjangan Balita	Persen	96
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.															
INDIKATOR	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Surveilans Epidemiologi															
	KEGIATAN 1	Surveilans Epidemiologi	1.1.	Investigasi Kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	Persen	100	DBHCT	Dinkes
			1.2.	Tercapainya UCI	Persen	> 96
TARGET	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.															
INDIKATOR	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi															
	KEGIATAN 1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	1.1.	Deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil	Persen	40	DBHCT	Dinkes

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
TARGET	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
INDIKATOR	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi															
	KEGIATAN 1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	1.1.	Proporsi penemuan kusta cacat tk 2	Persen	< 30	DBHCHT	Dinkes
			1.2.	Cakupan POPM cacingan pada kelompok umur balita ,anak pra sekolah dan sekolah	Persen	75
TARGET	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.															
INDIKATOR	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi															
	KEGIATAN 1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	1.1.	Proporsi penemuan kusta cacat tk 2	Persen	< 30	DBHCHT	Dinkes
TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.															
INDIKATOR	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur 18tahun.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
	KEGIATAN 1	Kesehatan Olah Raga	1.1.	Persentase club/sanggar/posbindu yang melaksanakan kesehatan olah raga	Persen	100	Dinkes
TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.															
INDIKATOR	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi															
	KEGIATAN 1	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1.1.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	100	Dinkes
TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.															
INDIKATOR	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur 18 tahun.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi															
	KEGIATAN 1	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1.1.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Obesitas	Persen	100	Dinkes
TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.															
INDIKATOR	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Penyakit Tidak Menular Dan Surveilans Epidemiologi															
	KEGIATAN 1	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1.1.	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Puskesmas	35	DBHCHT	Dinkes

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
TARGET	3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.														
INDIKATOR	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial														
	KEGIATAN 1	Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	1.1.	Persentase PMKS yang Direhabilitasi	Persen	100	Dinsos P3A
TARGET	3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.														
INDIKATOR	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya														
	KEGIATAN 1	Pemberdayaan PMKS Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	1.1.	Jumlah Fakir Miskin Yang Menerima Bantuan Melalui Program UEP	Orang	79	Dinsos P3A
TARGET	3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.														
INDIKATOR	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial														
	KEGIATAN 1	Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	1.1.	Persentase PMKS yang Direhabilitasi	Persen	100	Dinsos P3A
TARGET	3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.														
INDIKATOR	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkotika.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial														
	KEGIATAN 1	Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	1.1.	Persentase PMKS yang Direhabilitasi	Persen	100	Dinsos P3A
TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.														
INDIKATOR	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana														
	KEGIATAN 1	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1.1.	Jumlah Promosi KKBPK	Kali	12	DPPKB
TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.														
INDIKATOR	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana														
	KEGIATAN 1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB	1.1.	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	Kec	10	APBD II	DPPKB

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
TARGET	3.c.1*	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutme n, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.														
INDIKATOR	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan														
	KEGIATAN 1	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	1.1.	Tenaga kesehatan terstandar	Persen	100	DBHCHT	Dinkes
TUJUAN	4	PENDIDIKAN BERKUALITAS														
TARGET	4.2.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.														
INDIKATOR	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pendidikan Anak Usia Dini														
	KEGIATAN 1	Pembangunan Ruang Kelas Baru Jenjang PAUD	1.1.	Jumlah RKB	RKB	1	APBD II	Disdik
TARGET	4.4.	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global														
INDIKATOR	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi														
	KEGIATAN 1	Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	1.1.	Integrasi Aplikasi Antar SKPD	SKPD	5	APBD II	Diskipas
TUJUAN	5	KESETARAAN GENDER														
TARGET	5.1.	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.														
INDIKATOR	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak														
	KEGIATAN 1	Perumusan Kebijakan Gender dan Anak	1,1	Jumlah Kebijakan Gender dan Anak	Perda/Perbup	2	APBD II	Dinsos P3A
TARGET	5.2.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.														
INDIKATOR	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak														
	KEGIATAN 1	Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1,1	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	APBD II	Dinsos P3A
INDIKATOR	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak														
	KEGIATAN 1	Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1,1	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	APBD II	Dinsos P3A

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
TARGET	5.3.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.															
INDIKATOR	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana															
	KEGIATAN 1	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1.1.	Jumlah Promosi KKBPK	Kali	12	APBD II	DPPKB
INDIKATOR	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana															
	KEGIATAN 1	Pelayanan KB Keliling	1.1.	Jumlah Akseptor KB IUD	Orang	3000	APBD II	DPPKB
			1.2.	Jumlah Akseptor Implant	Orang	2500
	KEGIATAN 2	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	1.1.	Cakupan Pelayanan KB	Persen	100	APBD II	DPPKB
TARGET	5.5.	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.															
INDIKATOR	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan															
	KEGIATAN 1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial bagi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten	1,1	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial bagi Organisasi Kemasyarakatan tingkat Kabupaten	Orang	50	Dinsos P3A
INDIKATOR	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan															
	KEGIATAN 1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial bagi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten	1,1	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial bagi Organisasi Kemasyarakatan tingkat Kabupaten	Orang	50	Dinsos P3A
TARGET	5.6.	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.															
INDIKATOR	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana															
	KEGIATAN 1	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1.1.	Jumlah Promosi KKBPK	Kali	12	APBD II	DPPKB

INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
INDIKATOR	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja															
	KEGIATAN 1	Penguatan Kapasitas Calon Tenaga Kerja	1,1	Indikator Output	Orang	32	Disnakertrans
PROGRAM	2 (DUA)	Program Peningkatan Kesempatan Kerja															
	KEGIATAN 1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1,1	Jumlah Kegiatan Bursa Kerja	Kali	1	Disnakertrans
	KEGIATAN 2	Pelayanan dan Penempatan Pencari Kerja	1,1	Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan	Orang	1969	Disnakertrans
TARGET	8.6.	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.															
INDIKATOR	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kesempatan Kerja															
	KEGIATAN 1	Pelayanan dan Penempatan Pencari Kerja	1,1	Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan	Orang	1969	Disnakertrans
TARGET	8.9.	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.															
INDIKATOR	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya															
	KEGIATAN 1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	1,1	Jumlah Pentas Budaya Adat Daerah	Kali	10	APBD II	Disparbudpora
	KEGIATAN 2	Festival Kebudayaan Daerah	1,1	Jumlah Festival Yang Diselenggarakan dan diikuti	Kali	15	APBD II	Disparbudpora
PROGRAM	2 (DUA)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata															
	KEGIATAN 1	Promosi Pariwisata Nusantara	1,1	Jumlah event promosi pariwisata	Kali	2	APBD II	Disparbudpora
INDIKATOR	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya															
	KEGIATAN 1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	1,1	Jumlah Pentas Budaya Adat Daerah	Kali	10	APBD II	Disparbudpora
	KEGIATAN 2	Festival Kebudayaan Daerah	1,1	Jumlah Festival Yang Diselenggarakan dan diikuti	Kali	15	APBD II	Disparbudpora
PROGRAM	2 (DUA)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata															
	KEGIATAN 1	Promosi Pariwisata Nusantara	1,1	Jumlah event promosi pariwisata	Kali	2	APBD II	Disparbudpora

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa														
	KEGIATAN 1	Evaluasi Perkembangan Desa	1,1	Jumlah Desa Yang Di Evaluasi	Desa	26	DPMD
TARGET	10.2.	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.														
INDIKATOR	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya														
	KEGIATAN 1	Pemberdayaan PMKS Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	1,1	Jumlah Fakir Miskin Yang Menerima Bantuan Melalui Program UEP	Orang	79	Dinsos P3A
INDIKATOR	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah														
	KEGIATAN 1	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	1,1	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Dok	1	APBD II	Setda
INDIKATOR	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak														
	KEGIATAN 1	Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1,1	Persentase Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	100	Dinsos P3A
INDIKATOR	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah														
	KEGIATAN 1	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	1,1	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Dok	1	APBD II	Setda
TARGET	10.4.	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta se cara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.														
INDIKATOR	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial														
	KEGIATAN 1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1.1.	Penyelesaian perselisihan yang ditangani	Persen	100	100	APBD II	Disnakertrans
	KEGIATAN 2	Penyelesaian Prosedur Hukum dan Jamsostek	2.1.	Jumlah Fasilitas Pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	Kali	1	1	APBD II	Disnakertrans

	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)	SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
TUJUAN	11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan															
TARGET	11.2.	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.															
INDIKATOR	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan															
	KEGIATAN 1	Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang	1,1	Cakupan pelayanan angkutan orang	Persen	100	APBD II	Dishub
TARGET	11.3.	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.															
INDIKATOR	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah															
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Musrenbang	1,1	Jumlah Berita Acara Musrenbang	Dok	3	Bappeda
INDIKATOR	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah															
	KEGIATAN 1	Kerjasama Antar Pemerintahan Dan Luar Negeri	1,1	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya dan Luar Negeri	MoU/ PKS	10	APBD II	Setda
	KEGIATAN 2	Kerjasama Swasta dan Lembaga Pendidikan	1,1	Kerjasama Pemerintah dan swasta serta lembaga pendidikan	MoU/ PKS	20	APBD II	Setda
TARGET	11.4.	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.															
INDIKATOR	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya															
	KEGIATAN 1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	1,1	Jumlah Pentas Budaya Adat Daerah	Kali	10	APBD II	Disparbudpora
	KEGIATAN 2	Festival Kebudayaan Daerah	1,1	Jumlah Festival Yang Diselenggarakan dan diikuti	Kali	15	APBD II	Disparbudpora
TARGET	11.5.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.															
INDIKATOR	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam															
	KEGIATAN 1	Penanganan Darurat Bencana	1.1.	Persentase Penanganan Bencana	Persen	100	APBD II	BPBD
	KEGIATAN 2	Akselerasi Penanggulangan Bencana	2.1.	Pelayanan penanggulangan bencana	Bulan	12	APBD II	BPBD

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
INDIKATOR	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam															
	KEGIATAN 1	Penanganan Darurat Bencana	1.1.	Persentase Penanganan Bencana	Persen	100	APBD II	BPBD
	KEGIATAN 2	Akselerasi Penanggulangan Bencana	2.1.	Pelayanan penanggulangan bencana	Bulan	12	APBD II	BPBD
INDIKATOR	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.															
	KEGIATAN 1	Pengelolaan Informasi Penanggulangan Bencana	1.1.	Sistem Informasi Peringatan Dini	Sistem	1	APBD II	BPBD
INDIKATOR	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam															
	KEGIATAN 1	Penanganan Darurat Bencana	1.1.	Persentase Penanganan Bencana	Persen	100	APBD II	BPBD
TARGET	11.6.	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.															
INDIKATOR	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan															
	KEGIATAN 1	Ekstensifikasi Pelayanan Sampah	1,1	Luas Cakupan Area Pelayanan Sampah	Ha	12,2	APBD II	DLHK
	KEGIATAN 2	Pengadaan Gerobak Sampah	1,1	Jumlah Gerobak Sampah	Unit	25	APBD II	DLHK
	KEGIATAN 3	Pengadaan Motor Sampah	1,1	Jumlah Motor Sampah	Unit	4	APBD II	DLHK
	KEGIATAN 4	Pengadaan Truk Sampah	1,1	Jumlah Truk ArmRoll Sampah	Unit	1	APBD II	DLHK
INDIKATOR	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam															
	KEGIATAN 1	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1.1.	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Dok	1	APBD II	BPBD
TUJUAN	12	Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab															
TARGET	12.4.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.															
INDIKATOR	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup															
	KEGIATAN 1	Pemantauan Kualitas Limbah Cair dan Limbah B3	1,1	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Mentaati Persyaratan Administratif dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	Usaha/ Kegiatan	26	APBD II	DLHK

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
TARGET	12.5.	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.															
INDIKATOR	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan															
	KEGIATAN 1	Pembuatan Unit Pengelolaan Sampah Rumah Kompos	1,1	Jumlah Rumah Kompos	Unit	2	APBD II	DLHK
	KEGIATAN 2	Pengembangan Pengolahan Sampah Sistem 3R di TPS/Tranfer Depo	1,1	Volume Sampah yang Tertangani Melalui Sistem 3R di TPS/Transfer Depo	M3/Hari	6	APBD II	DLHK
TARGET	12.6.	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.															
INDIKATOR	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial															
	KEGIATAN 1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketenagakerjaan	1,1	Verifikasi anggota SP/SB	Perusahaan	100	Disnakertrans
TARGET	12.8.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.															
INDIKATOR	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah															
	KEGIATAN 1	Penerapan Sistem Manajemen Mutu	1,1	Jumlah SKPD yang menerapkan Manajemen Mutu	SKPD	1	APBD II	Setda
TUJUAN	13	Penanganan Perubahan Iklim															
TARGET	13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.															
INDIKATOR	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam															
	KEGIATAN 1	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1,1.	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Dok	1	APBD II	BPBD
INDIKATOR	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam															
	KEGIATAN 1	Penanganan Darurat Bencana	1.1.	Persentase Penanganan Bencana	Persen	100	APBD II	BPBD
	KEGIATAN 2	Akselarasi Penanggulangan Bencana	2.1.	Pelayanan penanggulangan bencana	Bulan	12	APBD II	BPBD

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023		
TUJUAN	15	Ekosistem Daratan																
TARGET	15.2.	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.																
INDIKATOR	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan																
	KEGIATAN 1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan (Peningkatan Kapasitas Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari)	1,1	Jumlah Pengunjung Tahura	Orang	10250	DLHK
	KEGIATAN 2	Penataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari	1,1	Jumlah Sarana Prasarana Tahura yang Terpelihara	Unit	1	DLHK
PROGRAM	2 (DUA)	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan																
	KEGIATAN 1	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari	1,1	Luas hutan dan lahan tahura yang terjaga	Ha	34,89	APBD II	DLHK
	KEGIATAN 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Daerah Penyangga Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari	1,1	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan	Kelompok	2	APBD II	DLHK
	KEGIATAN 3	Pemeliharaan dan Pengkayaan Tanaman Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari	1,1	Jenis Flora Koleksi Tahura	Jenis	5	APBD II	DLHK
TUJUAN	16	PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH																
TARGET	16.1.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.																
INDIKATOR	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																
	KEGIATAN 1	Safari Linmas Terpadu	1,1	Jumlah Wilayah yang dikunjungi	Kec	26	APBD II	Satpol PP
	KEGIATAN 2	Patroli Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,1	Jumlah Kegiatan Patroli (3 kali Patroli dalam 1 hari)	Kec	26	APBD II	Satpol PP

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
TARGET	16.6.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.															
INDIKATOR	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah															
	KEGIATAN 1	Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1,1	Jumlah Dokumen APBD Murni	Raperda	1	BPKAD
	KEGIATAN 2	Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	1,1	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Berita Acara	56	BPKAD
	KEGIATAN 3	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1,1	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Laporan	1	BPKAD
INDIKATOR	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah															
	KEGIATAN 1	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1,1	Dokumen LAKIPDA	Dok	1	Setda
INDIKATOR	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi															
	KEGIATAN 1	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1,1	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bulan	12	Diskipas
INDIKATOR	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah															
	KEGIATAN 1	Evaluasi Reformasi Birokrasi	1,1	Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi	Dok	1	APBD II	Setda
INDIKATOR	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
	KEGIATAN 1	Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1,1	Layanan Pengaduan	Bulan	12	APBD II	Setda

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)										Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.																
INDIKATOR	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan																
	KEGIATAN 1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial bagi Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten	1,1	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial bagi Organisasi Masyarakat tingkat Kabupaten	Orang	50	Dinsos P3A	
INDIKATOR	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan																
	KEGIATAN 1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial bagi Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten	1,1	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial bagi Organisasi Masyarakat tingkat Kabupaten	Orang	50	Dinsos P3A	
INDIKATOR	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pendidikan Politik Masyarakat																
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pendidikan Politik	1,1	Jumlah orang yang dibina	Orang	500	Kesbangpol	
INDIKATOR	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pendidikan Politik Masyarakat																
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pendidikan Politik	1,1	Jumlah orang yang dibina	Orang	500	Kesbangpol	
INDIKATOR	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pendidikan Politik Masyarakat																
	KEGIATAN 1	Penyelenggaraan Pendidikan Politik	1,1	Jumlah orang yang dibina	Orang	500	Kesbangpol	
TARGET	16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.																
INDIKATOR	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.																
PROGRAM	1 (SATU)	Program Penataan Administrasi Kependudukan																
	KEGIATAN 1	Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.1.	Jumlah Distribusi KK, KTP dan Akta Catatan Sipil	KK/KTP/Akta	30rb	APBD II	Disdukcapil
	KEGIATAN 2	Peningkatan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil	2.1.	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Akta Pencatatan Sipil	Persen	100	APBD II	Disdukcapil

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023										
INDIKATOR	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.															
	KEGIATAN 1	Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.1.	Jumlah Distribusi KK, KTP dan Akta Catatan Sipil	KK/KTP/Akta	30rb	APBD II	Disdukcapil
	KEGIATAN 2	Peningkatan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil	2.1.	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Akta Pencatatan Sipil	Persen	100	APBD II	Disdukcapil
INDIKATOR	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.															
	KEGIATAN 1	Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.1.	Jumlah Distribusi KK, KTP dan Akta Catatan Sipil	KK/KTP/Akta	30rb	APBD II	Disdukcapil
	KEGIATAN 2	Peningkatan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil	2.1.	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Akta Pencatatan Sipil	Persen	100	APBD II	Disdukcapil
TARGET	16.10.	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.															
INDIKATOR	16.10.2(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
	KEGIATAN 1	Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1,1	Layanan Pengaduan	Bulan	12	APBD II	Setda
INDIKATOR	16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
	KEGIATAN 1	Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1,1	Layanan Pengaduan	Bulan	12	APBD II	Setda
INDIKATOR	16.10.2(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
	KEGIATAN 1	Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1,1	Layanan Pengaduan	Bulan	12	APBD II	Setda
INDIKATOR	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah															
	KEGIATAN 1	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi	1,1	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Dok	1	APBD II	Setda

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
TUJUAN	17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan														
TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.														
INDIKATOR	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah														
	KEGIATAN 1	Evaluasi Pendapatan Daerah	1,1	Dokumen evaluasi Pendapatan Daerah	Dok	4	Bappenda
TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.														
INDIKATOR	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah														
	KEGIATAN 1	Evaluasi Pendapatan Daerah	1,1	Dokumen evaluasi Pendapatan Daerah	Dok	4	Bappenda
TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Persekitaran Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.														
INDIKATOR	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi														
	KEGIATAN 1	Pengelolaan Telekomunikasi dan Cell Plan	1,1	Jumlah Menara Telekomunikasi yang dikelola	Menara	317	Diskipas
TARGET	17.8.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.														
INDIKATOR	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi														
	KEGIATAN 1	Pengelolaan Telekomunikasi dan Cell Plan	1,1	Jumlah Menara Telekomunikasi yang dikelola	Menara	317	Diskipas
TARGET	17.17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.														
INDIKATOR	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Pemerintah Daerah														
	KEGIATAN 2	Kerjasama Swasta dan Lembaga Pendidikan	1,1	Kerjasama Pemerintah dan swasta serta lembaga pendidikan	MoU/ PKS	20	APBD II	Setda

LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR

**MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs
KABUPATEN BOGOR**

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)		SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikator Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023		
TUJUAN	1	TANPA KEMISKINAN [MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPAN]														
TARGET	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.														
INDIKATOR	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya														
	Kegiatan 1	Bimbingan sosial Orang Terlantar Dalam Perjalanan	1.1	Indikator Output	200 orang			104.747.000	81.640.000					186.387.000	APBD II	DINAS SOSIAL
	Kegiatan 2	Bantuan Hukum Masyarakat Miskin	2.1	Indikator Output	5 kasus			50.000.000	83.375.000					133.375.000	APBD II	DINAS SOSIAL
	Kegiatan 3	Fasilitasi Pelayanan SKKM	3.1	Indikator Output	1.450 PMKS			50.000.000	93.800.000					143.800.000	APBD II	DINAS SOSIAL
	Kegiatan 4	Asistensi Anak Terlantar dan lansia Terlantar Dalam Pantu dan Luar Pantu	4.1	Indikator Output	80 anak terlantar/ lansia			152.000.000	402.314.500					554.314.500	APBD II	DINAS SOSIAL
PROGRAM	2 (DUA)	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA														
	Kegiatan 1	Sosialisasi Pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Orang Tua yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus	1.1	Indikator Output	20 org tua ABK			50.000.000	14.600.000					64.600.000	APBD II	DINAS SOSIAL
PROGRAM	3 (TIGA)	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA.														
	Kegiatan 1	Bimbingan Sosial dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Eks Korban Bencana	1.1	Indikator Output	40 KK			100.000.000	500.000.600					600.000.000	APBD II	DINAS SOSIAL
	Kegiatan 2	Validasi dan Verifikasi Data Masyarakat Miskin Calon Penerima Program Jamkesda	2.1	Indikator Output	5 Buku			-	300.000.000					300.000.000	APBD II	DINAS SOSIAL
	Kegiatan 3	Pengembangan Kapasitas Ekonomi Keluarga Miskin melalui Pola Kemitraan Sosial	3.1	Indikator Output	300 org			782.607.000	618.598.200					1.401.205.200	APBD II	DINAS SOSIAL
	Kegiatan 4	Pendistribusian RASTRA	4.1	Indikator Output	40 kecamatan			110.081.000	83.590.000					193.671.000	APBD II	DINAS SOSIAL
	Kegiatan 5	Bimbingan Teknis Manajemen dan Usaha Bersama Masyarakat Miskin	5.1	Indikator Output	40 org/KUBE			182.050.000	171.700.000					353.750.000	APBD II	DINAS SOSIAL
	Kegiatan 6	Pengembangan Sosial melalui Penyuluhan Kesejahteraan Sosial (Perda No.7 Tahun 2016 ttg Kesejahteraan Sosial)	6.1	Indikator Output	50 org			143.000.000	68.219.900					211.219.900	APBD II	DINAS SOSIAL
INDIKATOR	1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas														
PROGRAM 1:	1 (SATU)	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA														
	Kegiatan 1	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat Se Kabupaten Bogor	1.1	Indikator Output	60 org				321.177.500					321.177.500	APBD II	DINAS SOSIAL
INDIKATOR	1.3.1 (d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH														
PROGRAM	1 (SATU)	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.														
	Kegiatan 1	Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupten Bogor	1.1	Indikator Output	40 kecamatan			1.548.305.000	1.512.305.000	0				3.060.610.000	APBD II	DINAS SOSIAL
PROGRAM	1 (SATU)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan														
	Kegiatan 1	Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di Lokasi PKH (Program Keluarga Harapan)	1.1	Jumlah keluarga sangat miskin yang difasilitasi untuk berusaha di sektor pertanian	KK	0	0	300	150	150				1.792.350.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
TARGET	1.4	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.														
INDIKATOR	1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah kawin umur 15 -49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan														
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap														
		Pengeluaran untuk layanan pokok kesehatan sebagai persentase dari total belanja pemerintah														
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)														
		Jumlah Penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular														
	Kegiatan 1	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan wabah	1.1	Jumlah kejadian penyakit potensial KLB	KLB	98.932.000	99.826.000	80.280.000	66.650.000	299.680.000				645.368.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
	Kegiatan 2	Dukungan Manajemen Program Imunisasi	2.1	Jumlah kecamatan yg terpantau BIAS DT/TT/Campak	kecamatan	82.680.000	393.250.000	381.535.000	294.110.000					1.151.575.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
	Kegiatan 3	Penunjang Program Imunisasi dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	3.1	Terlaksananya review Manajemen program imunisasi	Puskesmas									-		
	Kegiatan 4	Penunjang Program Imunisasi dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	4.1	Jumlah pemantauan BIAS yang dilakukan di puskesmas	puskesmas	82.680.000								82.680.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Estimasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
PROGRAM	1 (SATU)				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
	PROGRAM	1 (SATU)	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin													
	Kegiatan 1	Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah	1.1	Juml.Masyarakat Penerima Bantuan Iur(PBI) Daerah Kab Bogor	Jiwa	90.058.547.000	82.663.076.900	81.641.537.000	106.933.050.800	106.000.000.000				467.296.211.700	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
	Kegiatan 2	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Banprop)	2.1	Juml.Masyarakat Penerima Bantuan Iur(PBI) Propinsi Jawa barat	Jiwa	22.021.008.000	31.090.362.100	35.096.160.000	43.191.019.200					131.398.549.300	Banprop	Dinas Kesehatan
	INDIKATOR	1.4.1. (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan													
	PROGRAM	1 (SATU)	Penataan Lingkungan Permukiman													
		Kegiatan : Identifikasi Kawasan Kumuh	1.1	Indikator Output		tidak ada data	0,295	tidak ada data	tidak ada data							
	INDIKATOR	1.4.1.(g)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat													
	PROGRAM	1 (SATU)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun													
	Kegiatan 1	Jumlah Gedung UGB/USB yang dibangun	1.1	Jumlah Gedung UGB/USB yang dibangun	Unit	0	0	12	0	0				2.223.217.000	APBD II	Dinas Pendidikan
	Kegiatan 2	Jumlah Ruang Kelas yang Dibangun	2.1	Jumlah Ruang Kelas yang Dibangun	Ruang Kelas	364	280	281	359	385				305.056.526.113	APBD II/APBN	Dinas Pendidikan
	INDIKATOR	1.4.1.(h)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat													
	PROGRAM	1 (SATU)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun													
	Kegiatan 1	Pembangunan UGB/USB SMP	1.1	Jumlah Gedung UGB/USB yang dibangun	Unit	0	1	1	0	7				20.110.049.000	APBD II	Dinas Pendidikan
	INDIKATOR	1.4.1 (J)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan Akta Kelahiran													
	PROGRAM	1 (SATU)	Penataan Administrasi Kependudukan													
	Kegiatan 1	Peningkatan pelayanan publik dalam Administrasi Kelahiran dan Kematian	1.1	Persentase akta kelahiran anak usia 0-17	Anak	61,5	61,5	65,00	70,00	75,00				5.582.253.100	APBD	DISDUKCAPIL
			1.2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Anak	61,5	61,5	65,00	70,00	75,00				5.582.253.100	APBD	DISDUKCAPIL
			1.3	Indikator Output												
	INDIKATOR	1.4.1 (K)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN													
	PROGRAM	1 (SATU)	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan													
	Kegiatan 1	Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan	1.1	Indikator Output		97,25%	98,18%	98,63%	tidak ada data							
	TARGET	1.5	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.													
	INDIKATOR	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang													
	PROGRAM	1 (SATU)	Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam													
	Kegiatan 1	Peningkatan kinerja Satgas/TRC dalam Penanganan Bencana	1.1	Jumlah korban yang dievakuasi pada kejadian bencana	lokasi	130	130	130	130	135				5.125.125.830	APBD II	BPBD
	Kegiatan 2	Assesment/kaji cepat kerusakan/kerugian akibat bencana	2.1	Jumlah assesment akibat bencana kerusakan/kerugiannya	lokasi	130	135	100	135	140				601.150.000	APBD II	BPBD
	Kegiatan 3	Pendistribusian dan penataan logistik	3.1	Jumlah lokasi yang menerima layanan distribusi logistik	lokasi	130	130	130	130	135				1.189.676.400	APBD II	BPBD
	Kegiatan 4	Pengadaan peralatan satgas	4.1	Jumlah peralatan satgas yang dibeli	item	24	13	13	24	30				362.615.000	APBD II	BPBD
	Kegiatan 5	Assesment kaji rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana	5.1	Jumlah lokasi bencana yang dilakukan assesment rehabilitasi dan rekonstruksi	lokasi	100	100	50	50	100				755.848.500	APBD II	BPBD
	Kegiatan 6	Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	6.1	Jumlah lokasi yang akan dilaksanakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Kegiatan /lokasi	3	70	18	150	100				2.586.001.000	APBD II	BPBD
	Kegiatan 7	Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya pasca bencana	7.1	Jumlah dokumen pemulihan sosial, ekonomi dan budaya pasca bencana	dokumen	0	3	3	3	3				529.954.700	APBD II	BPBD
	INDIKATOR	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah													
		1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi													
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah													
	PROGRAM	1 (SATU)	Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam													
	Kegiatan 1	Pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana	1.1	Jumlah desa tangguh yang terbentuk dan pendmpingan desa tangguh bencana yang telah terbentuk	Desa pembentukan / penguatan	1	1	1/7	1/8	2/9				7.756.637.829	APBD II	BPBD
	Kegiatan 2	Sosialisasi siaga bencana	2.1	Jumlah lokasi rambu bencana yang dipasang	lokasi	20	13	11	7	15				250.000.000	APBD II	BPBD
	Kegiatan 3	Forum Pengurangan risiko bencana	3.1	Jumlah kegiatan/aksi komunitas Forum Pengurangan Risiko Bencana	Kegiatan	6	4	3	3	4				625.355.500	APBD II	BPBD
	Kegiatan 4	Pengembangan budaya sadar bencana	4.1	Jumlah kegiatan dalam mengembangkan budaya sadar bencana	Kegiatan	0	0	1	4	7				143.962.500	APBD II	BPBD

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)					SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 5	Penyusunan kebijakan penanggulangan bencana	5.1	Jumlah dokumen rumusan kebijakan penanggulangan bencana yang tersusun	Dokumen	1	1	2	2	2						732.745.200	APBD II	BPBD
Kegiatan 6	Penyelenggaraan Pusat pengendalian operasi bencana (Pusdalops PB)	6.1	Jumlah penyelenggaraan operasional posko pengendalian operasi penanggulangan bencana	Bulan	12	12	12	12	12						236.799.200	APBD II	BPBD
Kegiatan 7	Pengembangan Pusat data dan Informasi penanggulangan bencana	7.1	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	12						791.465.400	APBD II	BPBD
Kegiatan 8	Mitigasi dan pemantauan daerah rawan bencana	8.1	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Lokasi	0	0	12	14	16						149.481.200	APBD II	BPBD
Kegiatan 9	Kaji detail gerakan tanah di daerah rawan bencana	9.1	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Dokumen	0	0	12	12	12						272.965.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 10	Pelatihan Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat	10.1	Jumlah anggota masyarakat yang dilatih dalam penanggulangan bencana	Orang	200	200	100	150	250						2.199.615.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 11	Bimbingan teknis penyelamatan dan evakuasi pertolongan darurat	11.1	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	1	1	1						222.420.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 12	Simulasi hasil penanganan darurat bagi masyarakat/pelajar	12.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kegiatan	0	0	2	3	6						105.600.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 13	Sosialisasi kesiapsiagaan bencana di sekolah	13.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Peserta	0	0	60	60	60						234.080.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 14	Simulasi/Bimbingan teknis penanggulangan bencana tanah longsor	14.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Peserta	0	0	60	60	60						194.920.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 15	Simulasi/Bimbingan teknis penanggulangan bencana banjir	15.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Peserta	0	0	60	60	60						613.690.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 16	Simulasi/Bimbingan teknis penanggulangan bencana angin puting beliung	16.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Peserta	0	0	60	60	60						132.770.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 17	Simulasi/Bimbingan teknis penanggulangan bencana gempa dan gerakan tanah	17.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Peserta	0	0	60	60	60						154.451.000	APBD II	BPBD
INDIKATOR	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus															
PROGRAM	1 (SATU)	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam															
Kegiatan 1	Penyiapan logistik tanggap darurat bencana bahan Natura	1.1	Jumlah bahan tanggap darurat yang dibeli	Jenis	12	11	11	12	12						1.612.124.800	APBD II	BPBD
Kegiatan 2	Penyiapan logistik tanggap darurat bencana bahan bangunan	2.1	Jumlah bahan tanggap darurat yang dibeli	Jenis	2	2	2	2	2						1.280.860.900	APBD II	BPBD
Kegiatan 3	Penyiapan logistik tanggap darurat bencana berupa pakaian dan alat-alat rumah tangga	3.1	Jumlah bahan tanggap darurat yang dibeli	Jenis	23	24	24	26	30						1.561.747.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 4	roping air bersih tanggap darurat	4.1	Jumlah lokasi yang dilaksanakan evakuasi	Lokasi	0	0	50	50	50						184.575.600	APBD II	BPBD
TUJUAN	2	TANPA KELAPARAN															
TARGET	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.															
INDIKATOR	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak Balita															
	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun /balita															
	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/baduta															
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe															
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil															
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya															
Kegiatan 1	Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin	1.1	Juml. Jenis Bahan PMT-P yang tersedia	Jenis	4.872.875.000	4.200.547.000	3.633.615.000	1.263.754.000	-						13.970.791.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2	Penanggulangan Balita Gizi Buruk dan Balita Kurang Gizi (Banprop)	2.1	Juml. Balita gizi buruk dan balita kurang gizi yang ditanggulangi			104.300.000									104.300.000	Banprop	Dinas Kesehatan
Kegiatan 3	Kewaspadaan Dini Gizi Buruk	3.1	Juml. Pelaksanaan kegiatan pencegahan kurang gizi	Kegiatan				152.435.000	110.000.000						262.435.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 4	Pembentukan KP ASI dan LMKM Dalam Rangka Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif	4.1	Jumlah Kelompok Pendukung ASI Eksklusif yang terbentuk	Kelompok ASI				36.304.000	-						36.304.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikator Kinerja Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 5	Pemetaan Status Gizi Masyarakat	5.1	Indikator Output	200 orang					200.000.000					200.000.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan	
Kegiatan 6	Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat	6.1							2.000.000.000					2.000.000.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan	
Kegiatan 7	Penguatan Pembinaan Gizi Masyarakat	7.1							100.000.000					100.000.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan	
TARGET	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.															
INDIKATOR	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.															
PROGRAM	1 (SATU)	Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan															
Kegiatan 1	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	1.1	Jumlah kelompok KRPL yang dibina	Kelompok	14	26	46	46	46					2.961,10	APBD II	Dinas Ketahanan Pangan	
Kegiatan 2	Promosi Pangan Lokal pada Hari Pangan Sedunia (HPS)	2.1	Jumlah Promosi Pangan Lokal pada HPS Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Kali	3	3	3	3	3					2.892,02	APBD II	Dinas Ketahanan Pangan	
INDIKATOR	2.3.1*	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)															
	2.4.1.(d)	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan															
	2.a.1	indeks pengeluaran pemerintah untuk pertanian															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan															
Kegiatan 1	Koordinasi Penyuluhan Pertanian Di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten	1.1	Jumlah rapat koordinasi	kali	0	0	1	1	1					629.825.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		1.2	Temu teknis penyuluhan	kali			1	1	1								
		1.3	Seminar penyuluhan	kali			1	1	1								
Kegiatan 2	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian	2.1	Jumlah dok program penyuluhan	dok	0	0	150	150	150					604.865.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		2.2	Jumlah dok rencana kerja tahunan penyuluh	dok			150	150	150								
Kegiatan 3	Penyediaan Jasa Penyuluh Non PNS	3.1	Jumlah penyuluh swadaya	orang	0	0	200	200	200					5.773.140.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
Kegiatan 4	Peningkatan Kinerja Aparatur Penyuluh Pertanian	4.1	Jumlah petugas pertanian berprestasi:	orang	0	0	9	12	12					675.110.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		4.2	- UPT	orang				3	3								
		4.3	- Penyuluh	orang				3	3								
		4.4	- THL	orang				3	3								
Kegiatan 5	Pelatihan PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya)	5.1	Jumlah PPS yang mengikuti pelatihan	orang	0	0	200	160	160					741.850.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
Kegiatan 6	Bantuan Operasional Penyuluh (BANPROP)	6.1	Jumlah penyuluh PNS yang mendapat BOP	orang	0	0	88	73	73					2.190.000.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)			SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							INDIKATOR AKHIR Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
TUJUAN	3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
TARGET	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.														
INDIKATOR	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)														
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15 -49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih														
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15 -49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														
	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup														
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal(AKN) per 1.000 kelahiran hidup														
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup														
	3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi														
		Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV														
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														
		Kejadian TB per 1.000 orang														
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk														
		Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis														
		Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes atau penyakit pernafasan kronis														
		Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun														
		Prevalensi Tekanan Darah Tinggi														
		Prevalensi Obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun														
		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern														
		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin														
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern)														
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)														
		Total Fertility Rate (TFR)														
		Cakupan pelayanan kesehatan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi , ibu, bayi baru lahir dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung)														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat														
	Kegiatan 1	Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan	1.1	Juml. Media penyuluhan yang dibeli	Jenis	589.209.000	715.102.000	790.830.000	792.993.000	749.225.000				3.637.359.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
	Kegiatan 2	Penyuluhan Kesehatan	2.1	Jumlah banyaknya penyuluhan yang dilakukan	Kali	532.363.000	337.200.000	387.815.000	363.207.000	430.000.000				2.050.585.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
	Kegiatan 3	Pembinaan Kesehatan Lintas sektor dan UKBM	3.1	Jumlah fasilitasi UKBM dan pembinaan kesehatan	sekolah/desa	243.710.000	276.250.000	123.088.000	324.266.000	320.000.000				1.287.314.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
PROGRAM	2 (DUA)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat														
	Kegiatan 1	Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas & BKTk	1.1	Jumlah peserta JKN	peserta	163.185.513.000	183.600.662.000	200.510.225.000	144.898.552.000	159.388.361.000				851.583.313.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
	Kegiatan 2	Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK)	2.1	Juml.kunjungan petugas puskesmas dlm rangka pelayanan kesehatan kpd masyarakat	kunjungan		25.499.032.000	38.630.650.000	44.972.923.000	-				109.102.605.000	APBN	Dinas Kesehatan
	Kegiatan 3	Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas & BKTk	3.1	Jumlah kunjungan di puskesmas	kunjungan	11.080.729.000	15.843.129.000	16.064.179.000	14.093.603.000	15.356.833.900				72.438.473.900	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
PROGRAM	3 (TIGA)	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan														
	Kegiatan 1	Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar (DAK)	1.1	Juml.jenis pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar yang dibeli	jenis	9.298.466.000	10.500.000.000	9.012.200.000	7.313.215.000	7.500.000.000				43.623.881.000	APBN	Dinas Kesehatan
PROGRAM	4 (EMPAT)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular														
	Kegiatan 1	Penyemprotan Fogging Sarang Nyamuk	1.1	Jumlah titik yang di fogging	titik		418.563.000	345.004.000	228.840.000					992.407.000		
	Kegiatan 2	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	2.1	Juml.Penangulangan DBD dan chikungunya	kali	494.949.000								494.949.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
	Kegiatan 3	Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Program P2 TB	3.1	Juml sampel TB yang diperiksa	sampel	110.010.000	371.650.000	230.622.000	225.546.000					937.828.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
	Kegiatan 4	Penatalaksanaan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis	4.1	Juml penatalaksanaan dan pengendalian penyakit TB	kali					531.400.000				531.400.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
	Kegiatan 5	Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Diare ISPA	5.1	Juml. Supervisi kasus Diare Ispa	kali	23.430.000	23.430.000	50.000.000	86.186.000					183.046.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
	Kegiatan 6	Penatalaksanaan dan Pengendalian Penyakit Ispa	6.1	Juml penatalaksanaan dan pengendalian penyakit Ispa	kali					65.000.000				65.000.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
	Kegiatan 7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (HIV AIDS)	7.1	Juml sampel yang diperiksa	sampel	47.930.000	140.223.000	69.985.000	173.650.000					431.788.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikator Akreditasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) / (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 8	Penatalaksanaan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	8.1	Juml penatalaksanaan dan pengendalian penyakit HIV (AIDS)	kali					600.000.000					600.000.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 9	Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) Filariasis	9.1	Juml.Puskesmas yang mengadakan pengobatan masal filariasis	Puskesmas	4.920.792.000	569.451.000	345.605.000	83.951.000						5.919.799.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 10	Penatalaksanaan dan pengendalian penyakit akibat kecacingan dan filariasis	10.1	Juml pengendalian penyakit akibat kecacingan dan filariasis	kali					300.000.000					300.000.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 11	Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular	11.1	Jumlah orang yang dideteksi dini faktor resikonya	orang					430.000.000					430.000.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 12	Penatalaksanaan dan pengendalian Arbovirosis dan Zoonosis	12.1	Juml pengendalian penyakit arbovirosis dan Zoonosis	kali					18.230.000					18.230.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 13	Penatalaksanaan dan pengendalian Penyakit Hepatitis dan Infeksi Saluran cerna	13.1	Juml pengendalian penyakit hepatitis dan infeksi saluran cerna	kali					215.000.000					215.000.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 14	Penatalaksanaan dan pengendalian Penyakit Tidak menular	14.1	Juml pengendalian penyakit Tidak Menular	kali					350.000.000					350.000.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
PROGRAM	5 (LIMA)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak														
Kegiatan 1	Peningkatan Kemitraan Puskesmas PONE D dengan Rumah sakit	1.1	Juml.Puskesmas PONE D yang ditingkatkan kemampuannya	puskesmas	569.140.000	566.454.000	632.035.000	513.081.000						2.280.710.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2	Belanja Operasional Call Center / SMS Gateway Program	2.1	Juml Jaringan SMS Gateway yang terpasang	Jaringan	411.130.000	407.680.000								818.810.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 3	Dukungan Manajemen program Emas Kabupaten Bogor	3.1					451.162.000							451.162.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 4	Workshop Pembentukan Duta 1000 Hari Pertama Kehidupan	4.1						80.981.000						80.981.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 5	Jaminan Persalinan (DAK)	5.1						16.023.005.000						16.023.005.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 6	Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Manajemen Program KIA KB	6.1						156.456.000						156.456.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 7	Penyusunan Naskah Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA)	7.1	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen		189.850.000								189.850.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
PROGRAM	6 (ENAM)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja														
Kegiatan 1	Peningkatan Kemampuan KKR / Peer Konselor	1.1	Juml orang yang diikutsertakan Peer konselor	orang	12.800.000	14.080.000								26.880.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2	Orientasi Kesehatan Reproduksi Remaja pada Guru SMP/SMA	2.1	Juml orientasi yang dilaksanakan	kali		30.250.000								30.250.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
PROGRAM	7 (TUJUH)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia														
Kegiatan 1	Bimbingan Teknis Geriatri bagi Dokter dan Perawat di puskesmas	1.1	Juml peserta yang mengikuti Bimtek	peserta										-	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2	Gerakan Sehat Lanjut Usia	2.1	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan		193.500.000								193.500.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
INDIKATOR	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air															
PROGRAM	1 (SATU)	Program Pengembangan Lingkungan Sehat														
Kegiatan 1	Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum	1.1	Jumlah TTU yang dibina	TTU	71.395.000	37.625.000								37.625.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	2.1	Jumlah RW yang dipicu untuk stop buang air besar sembarangan	RW	404.100.000	342.518.000								342.518.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 3	Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan	3.1	Jumlah TPM yang dibina	TPM	146.325.000	159.386.000								159.386.000	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
Kegiatan 4	Pengawasan Kualitas Lingkungan Pemukiman	4.1	Jumlah pengawasan yang dilakukan	kali	92.463.000	-								-	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan
TUJUAN	4	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA														
TARGET	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
INDIKATOR	4.1.1(a)	Persentase SD berakreditasi minimal B.														
PROGRAM	1 (SATU)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun														
Kegiatan 1	PENYELENGGARAAN AKREDITASI TK/SD	1.1	Jumlah SD Yang di Akreditasi	Sekolah	200	240	350	0	0					1.200.194.000	APBD II	Dinas Pendidikan
Kegiatan 2	Pengelolaan Perizinan Pendidikan SD	2.1	Jumlah SD Yang di Akreditasi	Sekolah	0	0	0	350	350							

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Kegiatan 8	Pembinaan Program Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale)	8.1 terlaksananya pendampingan teknologi khususnya komoditas padi, jagung, kedelai dalam mendukung UPSUS PAJALE	orang	0	0	-	150	150							
			8.2 Jumlah kelompok yang dibina	kelp	0	0	6									
PROGRAM	2 (DUA)	Program Peningkatan Pemasaran 'Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan														
	Kegiatan 1	Pengembangan pemasaran produk pertanian/kehutanan	1.1 Fasilitasi Pemasaran Produk Pertanian:	kali	0	0		1	1					616.810.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			1.2 - Petunjuk Teknis	buku				5	5							
			1.3 - Pelaksanaan Pertemuan Pengembangan Akses	kali				1	1							
			1.4 - Pemasaran Komoditi Hortikultura	komoditi				12	12							
			1.5 - Jumlah Peserta Pertemuan Pengembangan Akses Pemasaran	orang				20	20							
			1.6 - Materi Pertemuan Pengembangan Akses Pemasaran	buku				20	20							
			1.7 - Temu Teknis Pemasaran	kali				2	2							
			1.8 - terbangunnya fasilitas pemasaran	unit			1									
			1.9 - Rapat koordinasi	kali			1									
			1.10 - Peserta Temu Usaha	orang			25									
			1.11 - Bimbingan Teknis	orang			100									
			1.12 - Festival Durian	kali			-									
	Kegiatan 2	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian daerah	2.1 Jumlah pameran yang diikuti	pameran	0	0	8	4	4					3.234.040.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			2.2 Jumlah pelaksanaan pasar tani	kali			12	6	6							
			2.3 Jumlah Juknis	buku				5	5							
			2.4 Jumlah Laporan Akhir	eks				5	5							
			2.5 Festival Kopi	kali				1	1							
	Kegiatan 3	Pengadaan alat pasca panen hortikultura	3.1 Jumlah alat pasca panen	unit	0	0	489	332	332					1.837.625.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			3.2 Petunjuk Teknis	buku				5	5							
			3.3 Sosialisasi	kali				4	4							
			3.4 Penyusunan SOP Pascapanen	kali				1	1							
			3.5 Peserta Penyusunan SOP Pascapanen	orang				20	20							
			3.6 Buku SOP Pascapanen	buku				100	100							
			3.7 Laporan Akhir	buku				5	5							
	Kegiatan 4	Pembinaan Usaha Hortikultura	4.1 Pembinaan Pelaku Usaha Hortikultura	pelaku usaha	0	0	20	20	20					482.850.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			4.2 Juknis Kegiatan	buku				5	5							
			4.3 Registrasi Lahan Usaha Budidaya Hortikultura	unit lahan				3	3							
			4.4 Pendaftaran Varietas Lokal Pepaya Bogor di PPVT PT	varietas				1	1					516.505.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			4.5 Profil Usaha Hortikultura di Kabupaten Bogor	pelaku usaha				10	10							
			4.6 Laporan Akhir	buku				5	5							
	Kegiatan 5	Pembangunan Sarana Prasarana Kebun Koleksi	5.1 Jumlah Bangunan Gudang Alsintan	unit	0	0	1	1	1							
	Kegiatan 6	Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian	6.1 Jumlah Peserta HKP	orang	0	0	-	1.000	1.000					9.801.186.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			6.2 Jumlah Demplot	Jenis	0	0		6	6							

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikator Kinerja Anggaran 5 Tahun (Rp. juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
PROGRAM	3 (TIGA)	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1	Pembuatan Media Penyuluhan Cetak dan Elektronik	Jumlah media informasi penerapan teknologi pertanian yang disusun: Banner (5 tema)		buah	0	0	66	55	55					344.730.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Poster (5 tema)		buah			300	200	200							
		Plastik kemasan sablon		lembar			1.000	30	30							
		Peta singkap		lembar				55	55							
Kegiatan 2	Penyebarluasan Informasi Penyuluhan dan Promosi Produk	Jumlah media informasi penerapan teknologi pertanian: Materi siaran radio		materi	0	0	60	36	36					521.650.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		CD		keping			240	-	-							
		HKP		Kali				1	1							
		Temu Teknis Penyuluh		Kali				2	2							
Kegiatan 3	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)	Jumlah petani yang mengikuti SLPTT		orang	0	0	-	150	150					1.726.200.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 4	Penyelenggaraan Demplot Pertanian	Jumlah pelaku utama yang berperan aktif dalam aplikasi teknologi terapan		demplot	0	0	37	21	21					878.167.500	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 5	Agro Farming System	Jumlah lokasi penerapan teknologi pertanian		lokasi	0	0	-	1	1					567.250.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 6	Dukungan Pengembangan Taman Teknologi Pertanian	Jumlah lokasi penerapan teknologi pertanian		lokasi	0	0	-	1	1					438.250.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 7	Pengembangan Kelembagaan Pos Penyuluhan Perdesaan (POSLUHDES) (BANPROP)	Tersedianya fasilitas Posluhdes		unit	0	0	-	35	35					-	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 8	Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (POSLUHDES) (BANPROP)	Tersedianya fasilitas Posluhdes		unit	0	0	-	5	5					875.000.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
PROGRAM	4 (EMPAT)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan														
Kegiatan 1	Pengembangan Tanaman Hias	Jumlah indukan tanaman lanskap		polybag	0	0	280	500	500					2.019.675.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Jumlah bibit/benih		polybag			10.000	10.000	10.000							
		Jumlah peserta sosialisasi		orang			40	80	80							
		Jumlah peserta temu teknis		orang			40	80	80							
Kegiatan 1	Pembinaan usaha perkebunan	Terbinanya pelaku usaha perkebunan		Perusahaan	0	0	36	18	18					329.150.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 1	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaraan Hasil II Wilayah Cigudeg	Jumlah laporan yang dibuat		dok	0	0	48	24	24					1.274.035.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 2	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaraan Hasil I Wilayah Parung Panjang	Jumlah laporan yang dibuat		dok	0	0	48	24	24					1.274.035.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 3	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaraan Hasil IV Wilayah Leuwiliang	Jumlah laporan yang dibuat		dok	0	0	48	24	24					1.228.900.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 4	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaraan Hasil V Wilayah Cibungbulang	Jumlah laporan yang dibuat		dok	0	0	48	24	24					1.274.280.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 5	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaraan Hasil VII Wilayah Dramaga	Jumlah laporan yang dibuat		dok	0	0	48	24	24					1.211.660.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 6	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaraan Hasil IX Wilayah Ciseeng	Jumlah laporan yang dibuat		dok	0	0	48	24	24					1.241.796.500	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 7	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaraan Hasil X Wilayah Ciawi	Jumlah laporan yang dibuat		dok	0	0	48	24	24					1.286.575.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 8	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaraan Hasil XI Wilayah Caringin	Jumlah laporan yang dibuat		dok	0	0	48	24	24					1.348.345.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 9	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaraan Hasil XII Wilayah Cibinong	Jumlah laporan yang dibuat		dok	0	0	48	24	24					1.288.425.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)			SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Maksimal Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 10	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol	Jumlah laporan yang dibuat	dok	0	0	48	24	24				1.304.350.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 11	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XVI Wilayah Cariu	Jumlah laporan yang dibuat	dok	0	0	48	24	24				1.482.030.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 12	Pengendalian Hama Terpadu Hortikultura	Fasilitasi pengendalian hama terpadu hortikultura	kelp	0	0	16	8	8				1.982.737.500	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Jumlah peserta temu teknis	orang				30	30						
Kegiatan 13	Rehabilitasi Cengkeh Rakyat	Luas lahan rehabilitasi	Ha	0	0	75	30	30				1.423.300.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Jumlah bibit cengkeh	pohon			11.250	6750	6750						
		Peserta Temu Teknis	orang			120	30	30						
		Peserta Sosialisasi	orang			40								
Kegiatan 14	Pengembangan komoditas pala	Luas Lahan	Ha	0	0	145	15	15				1.029.250.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		jumlah bibit pala	pohon			8.000	2.500	2.500						
		Temu teknis	org			60	30	30						
Kegiatan 15	Pengelolaan sinergi kegiatan hortikultura	Jumlah program pemerintah pusat dan provinsi yang sosialisasi dan pembinaan	program	0	0	5	5	5				809.995.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 16	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil III Wilayah Nanggung	Jumlah laporan yang dibuat	dok	0	0	48	24	24				1.028.960.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 17	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang	Jumlah laporan yang dibuat	dok	0	0	48	24	24				1.073.305.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 18	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil VI Wilayah Pamijahan	Jumlah laporan yang dibuat	dok	0	0	48	24	24				1.108.375.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 19	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Madang	Jumlah laporan yang dibuat	dok	0	0	48	24	24				1.124.180.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 20	pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil XIV Wilayah Gunung Putri	Jumlah laporan yang dibuat	dok	0	0	48	24	24				1.128.435.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kegiatan 21	Pengembangan kawasan buah	- Luas tanaman pepaya	ha	0	0	20	-	-				2.810.945.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Luas tanaman durian	ha			20	10	10						
		Bibit durian	phn			2.000	2.000	2.000						
		Luas lahan nenas	ha			5	5	5						
		Bibit nenas	phn			25.000	10.000	10.000						
		Luas lahan jambu kristal	ha			5	-	-						
		Bibit jambu kristal	phn			1.500	1.500	1.500						
Kegiatan 22	Pengembangan Sayuran	Luas areal tanaman wortel	Ha	0	0	51	-	-				3.714.925.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Luas tanaman cabe	ha			20	10	10						
		Bibit cabe	bks			400	240	240						
		Handsprayer	buah			24	-	-						
		Mulsa plastik	roll			150	360	360						
		Peserta temu teknis	orang			80	240	240						
		Peserta sosialisasi	orang			80	60	60						
Kegiatan 23	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah keluarga yang memanfaatkan-	KK	0	0	300	100	100				1.229.690.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		- Jumlah percontohan pemanfaatan pekarangan	unit			6	6	6						

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)		
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan 50	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Wilayah Timur	Luas Areal untuk pengembangan benih padi	Ha	0	0	30	30	30						2.056.635.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		Karung	lembar			3.000	18000	18000									
		benih padi label putih	kg			750	750	750									
		Pupuk dan obat-obatan	jenis			7	7	7									
Kegiatan 51	Pengadaan Sarana Produksi Hortikultura	Bantuan Alat Mesin Pertanian hortikultura Cultovator	unit	0	0		24	24						1.792.775.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
Kegiatan 52	Pengadaan Prasarana Produksi Perkebunan	Terbangunnya Prasarana produksi perkebunan	lokasi	0	0		1	1						3.772.050.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		Bangunan UPH	unit				1	1									
		Gerai	unit				1	1									
Kegiatan 53	Pembangunan DAM Parit (DAK)	Terbangunnya:	unit	0	0		9	9						9.000.000.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		dam parit	unit				9	9									
		embung	unit				0	0									
Kegiatan 54	Pembangunan Jalan Produksi (DAK)	Jalan produksi yang dibangun	unit	0	0		1	1						5.769.400.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
PROGRAM	5 (LIMA)	Program Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan															
Kegiatan 1	Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Padi	Jumlah jenis alat pengolah padi	jenis	0	0	17	4	4						4.192.800.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			unit			6	19	19									
Kegiatan 2	Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Ubi Kayu, Ubi Jalar, dan Talas	Jumlah alat pengolah ubi kayu	jenis	0	0	6	1	1						393.095.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			unit			30											
Kegiatan 5	Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Kopi	Jumlah kelompok yang difasilitasi	kelompok	0	0	6	-	-						4.673.535.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		- Jumlah alat	jenis			7	6	6									
		- Jumlah peserta bintek	orang			20	60	60									
		- Jumlah peserta temu teknis	orang			40	30	30									
		- Jumlah UPH	unit			2	-	-									
Kegiatan 6	Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil Pala	Jumlah kelompok yang difasilitasi	kelp	0	0	7	5	5						1.603.750.000	APBD II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		- Jumlah alat	jenis			6	6	6									
		- Jumlah peserta bintek	orang			40	20	20									
		- Jumlah peserta temu teknis	orang			40	40	40									
		- Jumlah UPH	unit			2	-	-									
TUJUAN	10	Berkurangnya Kesenjangan															
TARGET	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.															
INDIKATOR	10.1.1.(b)	Jumlah Daerah Tertinggal yang terentaskan															
PROGRAM	1 (SATU)	PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA															
Kegiatan 1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa	1.1	Jumlah desa yang menerima bantuan sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desa	417	417								392.627.000	APBD	BPMPD	
Kegiatan 2	Program Dana Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	2.1	Jumlah desa yang difasilitasi bantuan dana bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah	Desa	417	417								328.990.000	APBD	BPMPD	
Kegiatan 3	Penyusunan Profil Desa /Kelurahan	3.1	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi dalam penyusunan profil desa dan kelurahan	Desa	417	417								513.859.000	APBD	BPMPD	
Kegiatan 4	Penataan Desa	4.1	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan administrasi	Desa	417	417								402.165.000	APBD	BPMPD	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikator Lokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)	
PROGRAM	1 (SATU)					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Kegiatan 1	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	1.1	Jumlah operator profil yang mengikuti pelatihan updating Profil desa	Desa		416	416	416					730.205.000	APBD	BPMPD
	Kegiatan 2	Perlombaan Desa	2.1	Jumlah desa yang berperan serta dalam perlombaan desa	Desa	39	39	39	39					1.057.332.000	APBD	BPMPD
	Kegiatan 3	Penyusunan dan Evaluasi Perkembangan Desa	3.1	Jumlah dokumen Evaluasi Perkembangan Desa	Desa			39	39					400.000.000	APBD	BPMPD
	Kegiatan 4	Koordinasi Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)	4.1	Jumlah dokumen Indeks Desa Membangun	Desa			39	39					150.000.000	APBD	BPMPD
TUJUAN	11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan														
TARGET	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugianekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.														
INDIKATOR	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang														
PROGRAM	1 (SATU)	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam														
	Kegiatan 1	Peningkatan kinerja Satgas/TRC dalam Penanganan Bencana	1.1	Jumlah korban yang dievakuasi pada kejadian bencana	lokasi	130	130	130	130	135				5.125.125.830	APBD II	BPBD
	Kegiatan 2	Pendistribusian dan penataan logistik	2.1	Jumlah lokasi yang menerima layanan distribusi logistik	lokasi	130	130	130	130	135				1.189.676.400	APBD II	BPBD
	Kegiatan 3	Pengadaan peralatan satgas	3.1	Jumlah peralatan satgas yang dibeli	item	24	13	13	24	30				362.615.000	APBD II	BPBD
	Kegiatan 4	Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	4.1	Jumlah lokasi yang akan dilaksanakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Kegiatan /lokasi	3	70	18	150	100				2.586.001.000	APBD II	BPBD
	Kegiatan 5	Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya pasca bencana	5.1	Jumlah dokumen pemulihan sosial, ekonomi dan budaya pasca bencana	dokumen	0	3	3	3	3				529.954.700	APBD II	BPBD
	Kegiatan 6	Penyiapan logistik tanggap darurat bencana bahan Natura	6.1	Jumlah bahan tanggap darurat yang dibeli	Jenis	12	11	11	12	12				1.612.124.800	APBD II	BPBD
	Kegiatan 7	Penyiapan logistik tanggap darurat bencana bahan hanuman	7.1	Jumlah bahan tanggap darurat yang dibeli	Jenis	2	2	2	2	2				1.280.860.900	APBD II	BPBD
	Kegiatan 8	Penyiapan logistik tanggap darurat bencana berupa nakaian dan alat-alat rumah tangga	8.1	Jumlah bahan tanggap darurat yang dibeli	Jenis	23	24	24	26	30				1.561.747.000	APBD II	BPBD
	Kegiatan 9	Droving air bersih tanggap darurat	9.1	Jumlah lokasi yang dilaksanakan evakuasi	Lokasi	0	0	50	50	50				184.575.600	APBD II	BPBD
INDIKATOR	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana (IRBI)														
PROGRAM	1 (SATU)	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam														
	Kegiatan 1	Sosialisasi siaga bencana	1.1	Jumlah lokasi rambu bencana yang dipasang	lokasi	20	13	11	7	15				250.000.000	APBD II	BPBD
	Kegiatan 2	Forum Pengurangan risiko bencana	2.1	Jumlah kegiatan/aksi komunitas Forum Pengurangan Risiko Bencana	Kegiatan	6	4	3	3	4				625.355.500	APBD II	BPBD
	Kegiatan 3	Pengembangan budaya sadar bencana	3.1	Jumlah kegiatan dalam mengembangkan budaya sadar bencana	Kegiatan	0	0	1	4	7				143.962.500	APBD II	BPBD
	Kegiatan 4	Penyusunan kebijakan penanggulangan bencana	4.1	Jumlah dokumen rumusan kebijakan penanggulangan bencana yang tersusun	Dokumen	1	1	2	2	2				732.745.200	APBD II	BPBD
	Kegiatan 5	Penyelenggaraan Pusat pengendalian operasi bencana (Pusdalops PB)	5.1	Jumlah penyelenggaraan operasional posko pengendalian operasi penanggulangan bencana	Bulan	12	12	12	12	12				236.799.200	APBD II	BPBD
	Kegiatan 6	Pengembangan Pusat data dan Informasi penanggulangan bencana	6.1	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	12				791.465.400	APBD II	BPBD
	Kegiatan 7	Mitigasi dan pemantauan daerah rawan bencana	7.1	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Lokasi	0	0	12	14	16				149.481.200	APBD II	BPBD
	Kegiatan 8	Kaui detail serakan tanah di daerah rawan bencana	8.1	Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Dokumen	0	0	12	12	12				272.965.000	APBD II	BPBD
	Kegiatan 9	Pelatihan Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat	9.1	Jumlah anggota masyarakat yang dilatih dalam penanggulangan bencana	Orang	200	200	100	150	250				2.199.615.000	APBD II	BPBD

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)							Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Kegiatan 10	Bimbingan teknis penyelamatan dan evakuasi pertolongan darurat	10.1	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	1	1	1				222.420.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 11	Simulasi hasil penanganan darurat bagi masyarakat/pelajar	11.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kegiatan	0	0	2	3	6				105.600.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 12	Sosialisasi kesiapsiagaan bencana di sekolah	12.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Peserta	0	0	60	60	60				234.080.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 13	Simulasi/Bimbingan teknis penanggulangan bencana tanah longsor	13.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Peserta	0	0	60	60	60				194.920.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 14	Simulasi/Bimbingan teknis penanggulangan bencana banjir	14.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Peserta	0	0	60	60	60				613.690.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 15	Simulasi/Bimbingan teknis penanggulangan bencana angin puting beliung	15.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Peserta	0	0	60	60	60				132.770.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 16	Simulasi/Bimbingan teknis penanggulangan bencana gempa dan gerakan tanah	16.1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Peserta	0	0	60	60	60				154.451.000	APBD II	BPBD
INDIKATOR	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk													
PROGRAM	1 (SATU)	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam													
Kegiatan 1	Pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana	1.1	Jumlah desa tangguh yang terbentuk dan pendampingan desa tangguh bencana yang telah terbentuk	Desa pembentukan / penguatan	1	1	1/7	1/8	2/9				7.756.637.829	APBD II	BPBD
INDIKATOR	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana													
PROGRAM	1 (SATU)	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam													
Kegiatan 1	Assesment/kaji cepat kerusakan/kerugian akibat bencana	1.1	Jumlah assesment akibat bencana kerusakan/kerugiannya	lokasi	130	135	100	135	140				601.150.000	APBD II	BPBD
Kegiatan 2	Assesment kaji rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana	2.1	Jumlah lokasi bencana yang dilakukan assesment rehabilitasi dan rekonstruksi	lokasi	100	100	50	50	100				755.848.500	APBD II	BPBD
TUJUAN	12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab													
TARGET	12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.													
INDIKATOR	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU													
PROGRAM	1 (SATU)	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
Kegiatan 1	Pengendalian Pencemaran Air	1.1	34 Kegiatan/usaha	keg/usaha	40	40	40	34	40				707.116.000	APBD	DLH
		1.2	80 peserta sosialisasi	peserta	80	80	80	80	80						
Kegiatan 2	Pembinaan Penerapan Amdal dan UKL/UPL	2.1	35 kegiatan/usaha	keg/usaha	50	60	45	35	40				787.142.390	APBD	DLH
		3.1	60 pembinaan kegiatan/usaha	keg/usaha	60	60	60	60	95						
Kegiatan 3	Pembinaan B3 dan Limbah B3	3.2	60 verifikasi kegiatan/usaha	keg/usaha	70	60	60	60	0				1.470.381.000	APBD	DLH
		3.3	80 peserta sosialisasi	peserta	80	80	80	80	200						
PROGRAM	2 (DUA)	PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI													
Kegiatan 1	Pengendalian Pencemaran Udara	1.1	74 objek pelaku kegiatan penghasil emisi	keg/usaha	40	40	70	74	0				644.881.000	APBD	DLH
		1.1	80 peserta sosialisai	peserta	100	100	50	80	0						
INDIKATOR	12.4.2.(a)	TIMBULAN LIMBAH BERBAHAYA PERKAPITA, PROPORSI LIMBAH BERBAHAYA YANG TERKELOLA MENURUT JENIS PENANGANANNYA													
PROGRAM	1 (SATU)	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
Kegiatan 1	Pembinaan B3 dan Limbah B3	1.1	60 pembinaan kegiatan/usaha	keg/usaha	60	60	60	60	95				1.470.381.000	APBD	DLH
		1.2	60 verifikasi kegiatan/usaha	keg/usaha	70	60	60	60	0						
		1.3	80 peserta sosialisasi	peserta	80	80	80	80	200						

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT (1)				SATUAN (2)	TAHUN DASAR (2015)	TARGET TAHUNAN (3)								Indikator Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)				
INDIKATOR						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
JUMLAH LIMBAH B3 YANG TERKELOLA DAN PROPORSI LIMBAH B3 YANG DIOLAH SESUAI PERATURAN PEUNDANGAN (SEKTOR INDUSTRI)																				
PROGRAM	1 (SATU)	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																		
	Kegiatan 1	Pembinaan B3 dan Limbah B3	1.1	60 pembinaan kegiatan/usaha	keg/usaha	60	60	60	60	95					1.470.379.000	APBD	DLH			
			1.2	60 verifikasi kegiatan/usaha	keg/usaha	70	60	60	60	0										
			1.3	80 peserta sosialisasi	peserta	80	80	80	80	200										
TINGKAT DAUR ULANG NASIONAL, TON BAHAN DAUR ULANG																				
PROGRAM	1 (SATU)	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																		
	Kegiatan 1	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA	1.1	12 bulan	bulan	12	12	12	12	12					11.627.518.000	APBD	DLH			
JUMLAH TIMBULAN SAMPAH YANG DIDAUUR ULANG																				
PROGRAM	1 (SATU)	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																		
	Kegiatan 1	Peningkatan Peran Serta Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Berbasis 3R	1.1	12 Bulan	bulan	0	0	0	1	1					5.970.696.000	APBD	DLH			
JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMPUBLIKASIKAN LAPORAN BERKELANJUTAN																				
PROGRAM	1 (SATU)	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																		
	Kegiatan 1	Pembinaan Penerapan Amdal dan UKL/UPL	1.1	35 kegiatan/usaha	keg/usaha	50,0	60	45	35	40					3.568.844.000	APBD	DLH			

**LAMPIRAN MATRIKS II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIAMIS**

MATRIKS BAGIAN 2 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

KABUPATEN CIAMIS

TARGET		INDIKATOR		Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian (Rp Juta)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN																
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.															
	1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.															
	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.														
	1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.															
	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SISN Bidang Kesehatan.														
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.														
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.														
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.														
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.															
	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.														
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.														
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.														
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.														
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.														
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.														
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.		Disdik	Rp	0	0,00	0,00	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000	350.000	APBD Kab	Disdik Kab.
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.		Disdik	Rp	0	0,00	0,00	40.000	42.500	45.000	47.500	50.000	225.000	APBD Kab	Disdik Kab.
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.														
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.		Disdukcapil	Rp	160,885	838,626	452,000	497,200	546,920	601,612	661,773	727,951	3.035,456		Disdukcapil
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.														
	1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana															
	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.														
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.		BPBD	Desa	100 Juta	186,155	95,135	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	APBD	BPBD
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.		BPBD	Paket	212.800.000	128,783	157,970	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000	APBD	BPBD
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.														
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.														
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.														
	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.														
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		BPBD	Dok	-	-	-	-	100,000		100,000		200,000		BPBD

TARGET		INDIKATOR			Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian (Rp Juta)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	2017				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA																
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.															
	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	PWS KIA	Rp		11,47	6,89	12,617	13,8787	15,26657	16,793227	18,47255	77,0280	APBD&APBN	DINKES	
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.				2,01	4,44	4,884	5,3724	5,90964	6,500604	7,150664	29,8173	APBD&APBN	DINKES	
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.				3,97	9,07	9,977	10,9747	12,07217	13,279387	14,607326	60,9106	APBD&APBN	DINKES	
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.															
	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan			3,5	4,845	5,3295	5,85245	6,448695	7,093565	7,802921	32,5271	APBD&APBN	DINKES	
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan			6,5	2,43	7,15	7,865	8,6515	9,51665	10,468315	43,6515	APBD&APBN	DINKES	
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan			4	17,14	18,854	20,7394	22,81334	25,094674	27,604141	115,105555	APBD&APBN	DINKES	
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.														
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.															
	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1.000 populasi tidak terinfeksi HIV.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan			84,5918	67,87235	150	180	200	250	350	1130	APBD DAN BOK	DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS,RSU, RS SWASTA,	
	3.3.2	Kejadian TB per 1.000 orang.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan			44,76	27,9555						72,7191	APBD DAN BOK	DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS,RSU, RS SWASTA,	
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.												100	APBD DAN BOK	DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS,RSU, RS SWASTA,
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.												150	APBD DAN BOK	DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS,RSU, RS SWASTA,
	3.3.4	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.												500	APBD, DAK DAN BOK	DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS,RSU, RS SWASTA,
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).												250	APBD DAN BOK	DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS,RSU, RS SWASTA,
	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.											250	APBD DAN BOK	DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS,RSU, RS SWASTA,	
	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).											150	APBD DAN BOK	DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS,RSU, RS SWASTA,	
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.															
	3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur 18 tahun.														
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.														
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur 18 tahun.												2650	DINKES	
	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.														
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.											500	APBD +BOK	DINKES,PKM	

TARGET		INDIKATOR		Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian (Rp Juta)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.														
		3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		3.5.1(a)	Jumlah penyalahgunaan narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.												
		3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.												
		3.5.1(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.												
		3.5.1(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.												
		3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.												
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur 15 tahun dalam satu tahun terakhir.													
3,6	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.														
		3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.														
		3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.												
		3.7.1(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas PPKBPP dan PA											
		3.7.1(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas PPKBPP dan PA											
		3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).												
		3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas PPKBPP dan PA											
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.														
		3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.												
		3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.												
	3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	RSUD									475.000	BLUD/APBD/APBN/BPJS	RSUD Ciamis	
3,9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.														
		3.9.1	Angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		3.9.3	Angka kematian akibat keracunan.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		3.9.3(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.												
3,a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.														
		3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur 15 tahun.												
3,b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.														
		3.b.1	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.												
	3.b.2	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian kedokteran dan sektor kesehatan dasar.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				

TARGET			INDIKATOR				Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian (Rp Juta)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana										
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN							2017	2018	2019	2020	2021	2022				2023									
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.																											
	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.																										
3.d	Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.																											
	3.d.1	Kapasitas Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) dan Kesiapsiagaan darurat kesehatan.														NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS																												
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.																											
4.1	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.														Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BASM		
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.														Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BASM		
	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.																										
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.														Rp	0	0,00	0,00	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000	350.000	APBD Kab	Disdik Kab.	
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.														Rp	0	0	0	40.000	42.500	45.000	47.500	50.000	225.000	APBD Kab	Disdik Kab.	
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.																										
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.																											
4.2	4.2.1	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.														NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.														NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).														Disdik	Rp	0	0	0	30.000	33.000	36.000	39.000	42.000	180.000	APBD Kab	Disdik Kab.
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.																											
4.3	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.														NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.																										
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.																										
	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).																										
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.																											
	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).																										
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.																											
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.																										
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.																											
4.6	4.6.1	Persentase remaja/ dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.														NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 tahun.																										
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.														Disdik		0	0	0	15000	20000	25000	30000	35000	125.000	APBD Kab	Disdik Kab.
4.7	Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.																											
	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewarganegaraan, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.														NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.																											
	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).																										
4.b	Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.																											
	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.																										
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.																											
	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.														Disdik		0	0	0	65000	67000	69000	71000	73000	345.000	APBD Kab	Disdik Kab.

TARGET			INDIKATOR				Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian (Rp Juta)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN							2017	2018	2019	2020	2021	2022			
TUJUAN 5 KESETERAAN GENDER																		
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.																	
	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.													373	APBD	DP2KBP3A	
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.																	
	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas PPKBPP dan PA															
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.													462	APBD	DP2KBP3A	
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.																
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas PPKBPP dan PA												567	APBD	DP2KBP3A	
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan																	
	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.																
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.													385	APBD	DP2KBP3A	
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR).													1148	APBD	DP2KBP3A	
	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.													1183	APBD	DP2KBP3A	
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
5.4	Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.																	
	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.																	
	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas PPKBPP dan PA												1155	APBD	DP2KBP3A	
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.													910	APBD	DP2KBP3A	
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.																	
	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.													294	APBD	DP2KBP3A	
	5.6.1.(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).													630	APBD	DP2KBP3A	
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.													1218	APBD	DP2KBP3A	
	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.													588	APBD	DP2KBP3A	
5.a	Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.																	
	5.a.1	(1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
	5.a.2	Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/ atau hak kontrol.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.																	
	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.																
5.c	Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.																	
	5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					

TARGET			INDIKATOR	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian (Rp Juta)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK															
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.														
	6.1.1		Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	6.1.1.(a)		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.												
	6.1.1.(b)		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.												
	6.1.1.(c)		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.												
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.														
	6.2.1		Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	6.2.1.(a)		Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.												
	6.2.1.(b)		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.												
	6.2.1.(c)		Jumlah desa/keurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).												
	6.2.1.(d)		Jumlah desa/keurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).												
	6.2.1.(e)		Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.												
	6.2.1.(f)		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.												
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.														
	6.3.1		Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.												
	6.3.1.(a)		Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).												
	6.3.1.(b)		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.												
	6.3.2		Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.												
	6.3.2.(a)		Kualitas air danau.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	6.3.2.(b)		Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.												
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.														
	6.4.1		Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	6.4.1.(a)		Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.												
	6.4.1.(b)		Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.												
	6.4.2		Tingkat <i>water stress</i> : proporsi pengambilan (<i>withdrawal</i>) air tawar terhadap ketersediaannya.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.														
	6.5.1		Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	6.5.1.(a)		Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).												
	6.5.1.(b)		Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.												
	6.5.1.(c)		Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.												
	6.5.1.(d)		Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) lintas Negara.												
	6.5.1.(e)		Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.												
	6.5.1.(f)		Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.												
	6.5.1.(g)		Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.												
	6.5.1.(h)		Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.												
	6.5.1.(i)		Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.												
	6.5.2		Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			

TARGET			INDIKATOR				Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	Target Pencapaian (Rp Juta)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN							2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.																		
8,4	8.4.1		Jejak material (<i>material footprint</i>) yang dihitung selama tahun berjalan.				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
	8.4.2		Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.																		
8,5	8.5.1*		Upah rata-rata per jam pekerja.															
	8.5.2*		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.															
	8.5.2.(a)		Tingkat setengah pengangguran.															
Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.																		
8,6	8.6.1*		Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).															
Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.																		
8,7	8.7.1		Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.																		
8,8	8.8.1		Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
	8.8.1.(a)		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.															
	8.8.2		Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.																		
8,9	8.9.1*		Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.															
	8.9.1.(a)		Jumlah wisatawan mancanegara.				Dinas Pariwisata	5.634,350	6.344,250	3.706,460	11.550,000	12.750,000	13.500,000	14.750,000	15.500,000			
	8.9.1.(b)		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.															
	8.9.1.(c)		Jumlah devisa sektor pariwisata.															
	8.9.2*		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.															
Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.																		
8,1	8.10.1*		Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa															
	8.10.1.(a)		Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).															
	8.10.1.(b)		Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.															
	8.10.2		Proporsi kepemilikan rekening bank orang dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga keuangan lain atau dengan pelayanan jasa keuangan bergerak.				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the <i>Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance</i> bagi negara kurang berkembang.																		
8,a	8.a.1		Bantuan untuk komitmen perdagangan dan pencairan pendanaan.				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the <i>Global Jobs Pact of the International Labour Organization</i> .																		
8,b	8.b.1		Total pengeluaran pemerintah dalam program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap anggaran nasional dan PDB.				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					

TARGET			INDIKATOR			Target Pencapaian (Rp Juta)								Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	Sumber Data	Satuan	Baseline (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB																	
12.1	Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.																
	12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik <i>quickwins program</i> .															
12.2	Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.																
	12.2.1	Jejak material (<i>material footprint</i>).													NA	NA	NA
	12.2.2	Konsumsi material domestik (<i>domestic material consumption</i>).													NA	NA	NA
12.3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.																
	12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.													NA	NA	NA
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.																
	12.4.1	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.													NA	NA	NA
	12.4.1(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.															
	12.4.2	Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.													NA	NA	NA
	12.4.2(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).															
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.																
	12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.													NA	NA	NA
	12.5.1(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.															
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.																
	12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.													NA	NA	NA
	12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.															
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.																
	12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.													NA	NA	NA
	12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.															
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.																
	12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.													NA	NA	NA
	12.8.1(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.															
12.a	Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.																
	12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan.													NA	NA	NA
12.b	Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.																
	12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.													NA	NA	NA
12.c	Merasionalisasi struktur bahan bakar fosil untuk konsumen yang mendorong pemrosesan konsumsi dengan mengintegrasikan distribusi pasar, sesuai dengan keadilan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada sumber daya, yang tercerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan penunjang kebijakan untuk mempertimbangkan kebutuhan konsumsi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunan dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.																
	12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.													NA	NA	NA

LAMPIRAN MATRIK III NON PEMERINTAHAN / FILANTROPI

Matriks Bagian III: Program dan Kegiatan Non Pemerintah Aisyiyah Provinsi Jawa Barat

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN											
INDIKATOR : Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
PROGRAM 1 : Program Pemberdayaan Fakir Miskin											
Kegiatan 1: Fasilitasi pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin	Keluarga Miskin yang mempunyai Keterampilan	Kepala Keluarga	300	300	300	300	300	300		Filantropi dan Kemitraan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan)
Kegiatan 2: Pembinaan pengelolaan keuangan keluarga bagi keluarga miskin	Keluarga Miskin mempunyai kemampuan mengelola keuangan keluarga	Kepala Keluarga	300	300	300	300	300	300		Filantropi dan Kemitraan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan)
Kegiatan 3: Pendampingan usaha bagi keluarga miskin	Keluarga miskin meningkat kualitas hidupnya	Kepala Keluarga	100	100	100	100	100	100		Filantropi dan Kemitraan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan)
INDIKATOR : Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS)											
PROGRAM 1 : Program Advokasi Peningkatan Layanan Kesehatan											
Kegiatan 1 : Pendataan dan advokasi JKN PBI dan KIS bagi warga miskin yang memenuhi syarat penerima tapi tidak mendapatkan haknya	Warga miskin yang memenuhi persyaratan mendapatkan haknya atas layanan dasar	Orang	100	100	100	100	100	100		Filantropi dan Kemitraan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesejahteraan Sosial dan Majelis Kesehatan)
Kegiatan 2 : Pembinaan dan pendampingan kepada warga miskin penerima JKN PBI dan KIS	Peningkatan kualitas hidup warrga miskin penerima JKN PBI dan Kartu KIS	Orang	50	50	50	50	50	50		Filantropi dan Kemitraan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesejahteraan Sosial)
INDIKATOR : Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.											
PROGRAM 1 : Program Sosialisasi dan Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil											
Kegiatan 1 : Sosialisasi Kesehatan bagi Ibu Hamil	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman ibu hamil tentang pelayanan antenatal ke empat (K4)	Orang	600	600	600	600	600	600		Filantropi Dan Kemitraan	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah , 'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
Kegiatan 2 : Pendampingan Kesehatan Ibu Hamil	1. Peningkatan jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	Orang	600	600	600	600	600	600		Filantropi dan Kemitraan	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah , 'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
INDIKATOR : Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi											
PROGRAM 1 : Program Sosialisasi dan Pendampingan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita											
Kegiatan 1 : Sosialisasi pada Pasangan Usia Subur yang memiliki Bayi dan batita	Peningkatan dan pemahaman Pasangan Usia Subur yang memiliki bayi dan batita tentang imunisasi dasar lengkap	Orang	600	600	600	600	600	600		Filantropi Dan Kemitraan	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah , 'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
Kegiatan 2 : Pendampingan Pasangan Usia Subur yang memiliki bayi dan batita	Peningkatan jumlah pelayanan imunisasi pada bayi dan anak di bawah dua tahun	Orang	600	600	600	600	600	600		Filantropi dan Kemitraan	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah , 'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
INDIKATOR : Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.											
PROGRAM 1 : Program Pembinaan dan Pendampingan Pelayanan Kontrasepsi											
Kegiatan 1 : Sosialisasi KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Peningkatan pengetahuan PUS tentang berbagai macam metode KB dan dampaknya	Orang	600	600	600	600	600	600		Filantropi Dan Kemitraan	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah , 'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
Kegiatan 2 : Pendampingan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)	Peningkatan jumlah kepesertaan KB	Orang	600	600	600	600	600	600		Filantropi dan Kemitraan	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah , 'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
TUJUAN 2: TANPA KELAPARAN											
INDIKATOR : Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita											
INDIKATOR : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta											
INDIKATOR : Prevalensi malnutrisi atau wasting (berat badan atau tinggi badan) pada anak usia kurang dari 5 tahun											
INDIKATOR : Prevalensi anemia pada ibu hamil											
INDIKATOR : Persentasi bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif											
PROGRAM 1 : Pendirian dan pengelolaan Rumah Gizi Balai Sakinah 'Aisyiyah di desa											
Kegiatan 1 : Sosialisasi Gizi bagi remaja putri, ibu hamil, ibu dengan balita, ibu dengan anak stunting, gizi buruk dan gizi kurang. Juga bagi ayah dan nenek untuk dukungan nyata.	Peningkatan pengetahuan bagi remaja putri, ibu hamil dan keluarga, ibu dengan balita dan keluarga, ibu dengan anak stunting, anak gizi buruk, anak kurang gizi dan keluarga tentang gizi dan keutamaannya	Orang	200	200	200	200	200	200		Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah , 'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2 :	Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, jumlah malnutrisi, jumlah kasus anemia pada ibu hamil serta peningkatan jumlah bayi yang lulus ASI Eksklusif	orang	200	200	200	200	200	200		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah , 'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
Konseling Gizi dan Koseling Menyusui bagi masyarakat										dan	
										Kemitraan	
Kegiatan 3 :	Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, jumlah malnutrisi, jumlah kasus anemia pada ibu hamil serta peningkatan jumlah bayi yang lulus ASI Eksklusif	orang	200	200	200	200	200	200		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah , 'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
Pendampingan pengolahan makanan bergizi										dan	
										Kemitraan	
Kegiatan 4 :	Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, dan jumlah malnutrisi.	orang	200	200	200	200	200	200		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan dan Majelis Kesejahteraan Sosial)
Pemberian makanan tambahan secara berkala bagi bayi terindikasi gizi buruk dan kurang gizi										dan	
										Kemitraan	
Kegiatan 5:	Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, jumlah malnutrisi, jumlah kasus anemia pada ibu hamil serta peningkatan jumlah bayi yang lulus ASI Eksklusif	orang	200	200	200	200	200	200		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan dan Lembaga Lingkungan Hidup)
Pengelolaan kebun gizi masyarakat										dan	
										Kemitraan	
Kegiatan 6 :	Penurunan jumlah anak kurang gizi, jumlah stunting, dan jumlah malnutrisi.	orang	200	200	200	200	200	200		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan dan Lembaga Lingkungan Hidup)
Pemeliharaan Sanitasi										dan	
										Kemitraan	
TUJUAN 3 : KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN											
INDIKATOR : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih											
INDIKATOR : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan											
INDIKATOR : Angka Kematian Ibu (AKI)											
INDIKATOR : Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup											
INDIKATOR : Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup											
INDIKATOR : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup											
PROGRAM 1 : Sosialisasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Reproduksi dan Pemenuhan gizi Keluarga											
Kegiatan 1:	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman remaja putri (yang akan mengalami kehamilan) dan ibu hamil tentang kesehatan reproduksi dan kecukupan gizi bagi ibu hamil	Orang	300	300	300	300	300	300		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah , 'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan gizi bagi remaja putri dan ibu hamil										dan	
										Kemitraan	

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2:	Ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang mencukupi dan mendapatkan pelayanan pemeriksaan sebelum, saat dan sesudah melahirkan dengan baik	Orang	50	50	50	50	50	50		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah ,
Pendampingan layanan Kesehatan Reproduksi dan pemenuhan gizi keluarga bagi ibu hamil										dan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
										Kemitraan	
INDIKATOR : Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV											
INDIKATOR: Prevalensi HIV pada populasi dewasa											
INDIKATOR: Kejadian TB per 1000 orang											
INDIKATOR: Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk											
INDIKATOR: Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk											
PROGRAM 1: Penanggulangan Penyakit Menular Tuberkulosis											
Kegiatan 1:	Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit menular TB meningkat	orang	300	300	300	300	300	300		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah ,
Sosialisasi tentang Penyakit TB kepada Masyarakat										dan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
										Kemitraan	
PROGRAM 2: Penanggulangan Penyakit Menular HIV											
Kegiatan 1:	Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit menular HIV meningkat	orang	300	300	300	300	300	300		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah ,
Sosialisasi tentang Penyakit HIV kepada masyarakat										dan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
										Kemitraan	
PROGRAM 3: Penanggulangan Penyakit Menular Hepatitis B											
Kegiatan 1:	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular Hepatitis B	orang	300	300	300	300	300	300		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah ,
Sosialisasi tentang penyakit menular Hepatitis B pada masyarakat										dan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
										Kemitraan	
INDIKATOR : Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis											
PROGRAM 1 : Program penanggulangan penyakit tidak menular kanker serviks dan kanker payudara melalui Iva test dan sadarnis											
Kegiatan 1 :	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman PUS tentang penyakit tidak menular kanker serviks dan kanker payudara serta deteksi dini IVA test dan sadarnis	orang	600	600	600	600	600	600		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah ,
Sosialisasi kanker serviks dan kanker payudara serta deteksi dini Iva test dan sadarnis pada PUS										dan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
										Kemitraan	

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2 :	Jumlah PUS yang sudah melakukan pemeriksaan deteksi dini IVA test dan sadarnis bagi PUS	orang	200	200	200	200	200	200		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah ,
Pendampingan dan pelayanan pemeriksaan deteksi dini iva test dan sadarnis bagi PUS										dan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
										Kemitraan	
INDIKATOR : Prevalensi penyalahgunaan narkoba											
PROGRAM 1 : Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba											
Kegiatan 1 :	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar SMP dan SMA tentang bahaya penggunaan narkoba dan dampaknya bagi masa depan penggunaannya	Kegiatan	2	2	2	2	2	2			Perguruan Tinggi 'Aisyiyah dan Muhammadiyah ,
Sosialisasi tentang bahaya penggunaan Narkoba dan dampaknya bagi masa depan pengguna										Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan)
										dan	
										Kemitraan	
TUJUAN : PENDIDIKAN BERKUALITAS											
INDIKATOR : Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin											
INDIKATOR : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											
PROGRAM 1 : Program Pendidikan Anak Usia Dini											
Kegiatan 1 :	Tersedianya alat permainan edukatif untuk PAUD	Kegiatan	5	5	5	5	5	5		BOP,	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah)
Pembangunan sarana bermain										Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	
										dan	
										Kemitraan	
Kegiatan 2 :	Terlaksananya Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan	PAUD dan TK ABA	246	246	246	246	246	246		BOP,	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah)
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	TK ABA									Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	
										dan	
										Kemitraan	

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
TUJUAN : KESETARAAN GENDER											
INDIKATOR : Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif											
PROGRAM 1 : Program Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif											
Kegiatan 1 : Sosialisasi hak-hak perlindungan dari tindak kekerasan dalam berbagai bentuk dan dimensi	Peserta (masyarakat) perempuan memahami hak-hak perlindungan dari tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk dan dimensi	Kegiatan	2	2	2	2	2	2		Filantropi dan Kemitraan	Pusat Studi Wanita STIKes 'Aisyiyah, 'Aisyiyah Jawa Barat (majelis Hukum dan HAM)
INDIKATOR : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun											
INDIKATOR : Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun											
INDIKATOR : Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)											
INDIKATOR : Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)											
INDIKATOR : Total Fertility Rate (TFR)											
PROGRAM 1 : Program Kesehatan Reproduksi Remaja											
Kegiatan 1 : Sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang memahami KRR	Orang	500	500	500	500	500	500		Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan) dan Pusat Studi Wanita 'Aisyiyah
Kegiatan 2: Sosialisasi tentang Peningkatan Usia Perkawinan Anak	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan remaja tentang usia ideal untuk menikah	orang	500	500	500	500	500	500		Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan	'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Kesehatan) dan Pusat Studi Wanita 'Aisyiyah
PROGRAM 2 : Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan											
Kegiatan 1 : Sosialisasi terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah kegiatan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kegiatan	1	1	1	1	1	1		Filantropi (Infak dan Sodaqoh), dan Kemitraan	Pusat Studi Wanita 'Aisyiyah, 'Aisyiyah Jawa Barat (Majelis Hukum dan HAM)

Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 6 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
INDIKATOR : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD											
INDIKATOR : Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial											
PROGRAM 1 : Program pelatihan pengembangan kapasitas											
Kegiatan 1 :	1. Pemimpin dan kader organisasi perempuan yang berakhlak baik dan mampu melakukan advokasi isu-isu perempuan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3		Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	Pusat Studi Wanita 'Aisyiyah,
Pelatihan Kepemimpinan Perempuan										dan	
	2. Lahir kader-kader perempuan yang berkualitas	Kegiatan	3	3	3	3	3	3		Kemitraan	Pusat Studi Wanita 'Aisyiyah,
										Filantropi (Infak dan Sodaqoh),	
										dan	
										Kemitraan	

MATRIKS BAGIAN III: PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA (KPI)

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Tahun Dasar (2015)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN SDGs 5 Kesetaraan Gender.											
INDIKATOR SDGs: 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.											
PROGRAM 1: Pencegahan dan Penhentian Anak di Jawa Barat											
Kegiatan 1:	Pertemuan Reguler dengan Stakeholder Lokal	%	2017		40	60	90	24.400.000	Kanada	Wilayah Jawa Barat	Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat
Kegiatan 2:	Melakukan pertemuan antara kelompok perempuan dan anak perempuan dengan TOGA, TOMA, Swasta dan pemimpin politik	%	2017		30	50	70	40.750.000	Kanada	Wilayah Jawa Barat	Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat
PROGRAM 2: Pencegahan dan Penhentian Perkawinan Anak											
Kegiatan 1:	Kampanye di Level Lokal	%	2017		30	60	80	120.000.000	Kanada	Wilayah Jawa Barat	Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat
Kegiatan 2:	Membentuk Jaringan dengan Perempuan dan Anak Perempuan yang bekerja untuk KTAPAP dan PA	%	2017					51.500.000	Kanada	Wilayah Jawa Barat	Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat
INDIKATOR SDGs: 5.3.1(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.											
PROGRAM 1: Pencegahan dan Penhentian Anak di Jawa Barat											
Kegiatan 1:	Pelatihan untuk remaja mengenai advokasi hak-hak perempuan	%	2017		20	50	80	29.750.000	Kanada	Wilayah Jawa Barat	Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat
Kegiatan 2:	Pelatihan untuk perempuan dan anak perempuan mengenai kebijakan-kebijakan	%	2017		30	55	85	56.650.000	Kanada	Wilayah Jawa Barat	Koalisi perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat
Kegiatan 3:	Pelatihan Advokasi untuk Perempuan dan Anak Perempuan	%	2017		30	60	70	63.075.000	Kanada	Wilayah Jawa Barat	Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat

MATRIKS BAGIAN III: PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Tahun dasar	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta (4))	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN											
INDIKATOR TPB : 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.											
PROGRAM 1: Pemangku Kepentingan Lainnya											
Kegiatan 1: Pendampingan Pemberdayaan	1.1 Terlaksananya pembuatan document need assesment desa binaan	Dokumen	2015	7	1	0	0	8.000.000	ZIS	10 kota/kab	Baznas Prov Jabar
	1.2 Terbentuknya kelompok binaan dalam bentuk pra koperasi	Kelompok	2015	7	1	0	0	1.920.000.000	ZIS	10 kota/kab	Baznas Prov Jabar
Kegiatan 2: Bantuan Modal usaha	2.1 Mustahik yang menerima bantuan modal usaha	Orang	2016	98	880	500	0		ZIS		Baznas Prov Jabar
	2.2 Mustahik yang menerima bantuan melalui qardhul hasan	Orang	2016	600	400	200	0		ZIS		Baznas Prov Jabar
INDIKATOR TPB : 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.											
PROGRAM 1: Bantuan Pasca Bencana											
Kegiatan 1: Tanggap Respon Bencana	1.1 Jumlah lokasi yang dibantu saat terjadi bencana	Lokasi	2017	0	8	10	0	360.000.000	ZIS		Baznas Prov Jabar
	2.1 Jumlah rumah tinggal bagi keluarga terdampak bencana	Rumah	2017	0	4	10	0	1.008.000.000	ZIS		Baznas Prov Jabar
Kegiatan 2: Pembangunan Rutitebe											
TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA											
INDIKATOR TPB : 3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).											
PROGRAM 1: Klinik Sehat Baznas											
Kegiatan 1: Pelayanan Kesehatan	1.1 Jumlah pasien yang datang ke klinik	Orang	2018	-	-	12.000	12.000		ZIS		Baznas Prov Jabar
	1.2 Jumlah pasien yang didatangi untuk	Orang	2018	360	360	360	360		DSKL		Baznas Prov Jabar
Kegiatan 2: Pengantaran Ambulans	2.1 Jumlah pasien yang diantar menggunakan mobil ambulans	Orang	2018	600	600	600	600		ZIS		Baznas Prov Jabar
PROGRAM 2: Bantuan Langsung Kesehatan											
obatan	1.1 Jumlah Pasien yang dibantu	Orang	2015								Baznas Prov Jabar
Operasi	2.1 Jumlah Pasien yang dibantu	Orang	2015								Baznas Prov Jabar
Persalinan duafa	3.1 Jumlah Pasien yang dibantu	Orang	2015								Baznas Prov Jabar
Kegiatan 4: Bantuan Khitan Anak	4.1 Jumlah Pasien yang dibantu	Orang	2015								Baznas Prov Jabar

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Tahun dasar	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)	
			2016	2017	2018	2019					
TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS											
INDIKATOR TPB : 4.1.1 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.											
PROGRAM 1: Bantuan Langsung Pendidikan											
Kegiatan 1: Bantuan Operasional untuk Siswa/Siswi	1.1 Jumlah siswa yang dibantu dalam	Orang	2015							Baznas Prov Jabar	
	1.2 Siswa yang menerima paket alat	Orang	2015							Baznas Prov Jabar	
Kegiatan 2: Pembangunan/Renovasi	2.1 Jumlah sekolah/lembaga yang dibantu	Lembaga	2015							Baznas Prov Jabar	
INDIKATOR TPB :4.3.1 Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.											
PROGRAM 1: Beasiswa Perguruan Tinggi											
Kegiatan 1: Beasiswa SKDSS	1.1 Jumlah mahasiswa yang dibantu	Orang	2015							Baznas Prov Jabar	
Luar Negri	2.1 Jumlah Mahasiswa yang dibantu	Orang	2015							Baznas Prov Jabar	
Kegiatan 3: Bantuan Langsung Biaya Kuliah	3.1 Mahasiswa yang dibantu biaya D4	Orang	2015							Baznas Prov Jabar	
	3.2 Mahasiswa yang dibantu biaya S1	Orang	2015							Baznas Prov Jabar	
	3.3 Mahasiswa yang dibantu biaya S2	Orang	2015							Baznas Prov Jabar	
	3.4 Mahasiswa yang dibantu biaya S3	Orang	2015							Baznas Prov Jabar	
TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK											
INDIKATOR TPB : 6.2.1. (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.											
PROGRAM 1: Program Akses Air Bersih											
Kegiatan 1: Pembuatan Sumur & mengakses air bersih	Rumah Tangga	2017	2	7	3		408.000.000	ZIS	Se-Jawa Barat	Baznas Prov Jabar	
INDIKATOR TPB : 6.2.1.(d) Jumlah rumah tangga yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).											
PROGRAM 1: Program Sanitasi Air Bersih											
Kegiatan 1: Pembangunan MCK akses MCK	Rumah Tangga	2017	0	0	60		180.000.000	ZIS	Se-Jawa Barat	Baznas Prov Jabar	
TUJUAN 11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN											
INDIKATOR TPB : 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.											
PROGRAM 1: Rumah Tinggal Layak Huni											
Kegiatan 1: Bantuan Renovasi bantuan	Rumah Tangga	2017	0	240	20		2.600.000.000	ZIS	Se-Jawa Barat	Baznas Prov Jabar	
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB											
INDIKATOR TPB : 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.											
PROGRAM 1: Komunitas Bank Sampah											
Kegiatan 1: Edukasi & Pembinaan	1.1 Jumlah Desa yang terlibat	Desa	2017	1	1	1	1	300.000.000	ZIS	Ciasem	Baznas Prov Jabar

